



PEMERINTAH KOTA BATU

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BATU TAHUN 2012-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran serta sinergis pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Kota Batu memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor P5);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 3/D);

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012-2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Batu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yang dibagi menjadi 5 tahap pembangunan tahunan, yaitu Tahap Pembangunan ke-1 Tahun 2013, Tahap Pembangunan ke-2 Tahun 2014, Tahap Pembangunan ke-3 Tahun 2015, Tahap Pembangunan ke-4 Tahun 2016 dan Tahap Pembangunan ke-5 Tahun 2017.

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2012-2017 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 serta visi misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2012-2017.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV MASA TRANSISI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD untuk tahun pertama Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB V MUATAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 beserta lampirannya memuat:
 - a. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
 - b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. Strategi Pembangunan Daerah;
 - d. Kebijakan Umum;
 - e. Program SKPD;
 - f. Program Lintas SKPD;
 - g. Program Kewilayahan;
 - h. Rencana Kerja Dalam Regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - i. Rencana Kerja Dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Sistematika RPJMD disajikan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Analisis isu-isu strategis;
 - e. Penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi dan arah kebijakan;
 - g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

- h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. Penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

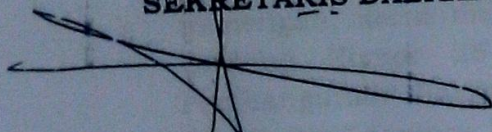
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 Juni 2013



Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,


WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 3/5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BATU TAHUN 2012-2017**

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, demi menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan, juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka menengah, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009-2014, maka Pemerintah Kota Batu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu Tahun 2012-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Batu yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Batu dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 5 tahun ke depan, mencakup kurun waktu mulai tahun 2012 hingga tahun 2017. Pelaksanaan RPJMD 2012-2017 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka pendek daerah 1 (satu) tahunan.

RPJMD Kota Batu digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD Kota Batu pada masing-masing tahapan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Batu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2012-2017 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

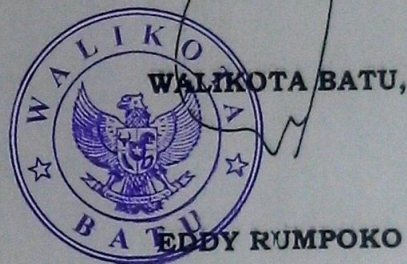
Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 7 TAHUN 2013
Tanggal : 26 Juni Tahun 2013

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BATU TAHUN 2012-2017**

Program/kegiatan dengan arah kebijakan. Oleh karena itu perlu disusun matriks arah kebijakan dan program/kebijakan, yang tercantum dalam lampiran pendukung berikut.

RPJMD ini pada akhirnya merupakan sebuah produk perencanaan yang tidak sepenuhnya sempurna dan memiliki keterbatasan, meski masih diyakini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program dan arah-arrah kegiatan pembangunan daerah. Sehingga aspirasi dan umpan-balik penyempurnaan dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan pada hasil-hasil pembangunan yang tercita-citakan sangat diharapkan. Besar harapan atas apa yang ditulis dalam dokumen ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Batu beserta Pemerintahan bagi penyelenggaraan pembangunan.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 07 TAHUN 2013
TANGGAL 26 JUNI 2013

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi sebagai kelanjutan dari RPJMD Kota Batu tahun 2007-2012 maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017 sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Batu untuk periode 5 (Lima) tahun. Dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun materi utama dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 mencakup tinjauan kaidah dan kebijakan perencanaan pembangunan, kondisi umum daerah, kondisi pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah dan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan.

Akhir Kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017.

Batu, Juni 2013

Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xviii
Daftar Grafik	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
1.5. Maksud dan Tujuan	I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2.1.2 . Letak dan Kondisi Geografis	II-3
2.1.2.1. Posisi Astronomis	II-3
2.1.2.2. Posisi Geostrategis.....	II-3
2.1.2.3. Kondisi Kawasan	II-3
2.1.3. Topografi.....	II-3
2.1.3.1. Kemiringan Lahan.....	II-3
2.1.3.2. Ketinggian Lahan.....	II-4
2.1.4. Geologi.....	II-6
2.1.4.1. Struktur dan Karakteristik.....	II-6
2.1.4.2. Potensi Kandungan	II-8
2.1. 5. Hidrologi.....	II-12
2.1.5.1. Daerah Aliran Sungai.....	II-12
2.1.5.2. Sungai, Danau, dan Rawa	II-12
2.1.6. Klimatologi`	II-19
2.1.6.1. Tipe	II-19
2.1.6.2. Curah Hujan	II-19
2.1.6.3. Suhu	II-20



2.1.6.4. Kelembaban	II-20
2.1. 7. Penggunaan Lahan	II-21
2.1.7.1. Kawasan Budidaya	II-21
2.1.7.2. Kawasan Lindung	II-28
2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-33
2.1.9. Wilayah Rawan Bencana	II-34
2.1.10. Demografi	II-34
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-35
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...	II-36
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-36
2.2.1.2. PDRB Per Kapita	II-37
2.2.2 . Fokus Kesejahteraan Sosial	II-37
2.2.2.1. Pendidikan.....	II-37
2.2.2.2. Kesehatan	II-40
2.2.2.3. Kemiskinan	II-43
2.2.2.4. Kepemilikan Tanah.....	II-44
2.2.2.5. Kesempatan Kerja	II-44
2.2.2.6. Kriminalitas	II-45
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II-46
2.2.3.1. Kebudayaan	II-46
2.2.3.2. Olahraga.....	II-47
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-47
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-47
2.3.1.1. Pendidikan.....	II-47
2.3.1.2. Kesehatan	II-50
2.3.1.3. Lingkungan Hidup.....	II-53
2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum	II-55
2.3.1.5. Penataan Ruang.....	II-62
2.3.1.6. Perhubungan	II-63
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-65
2.3.2.1. Penanaman Modal	II-65
2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	II-67
2.3.2.3. Kependudukan	II-69
2.3.2.4. Ketenagakerjaan	II-72
2.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan & Anak.....	II-75



2.3.2.6. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)	II-77
2.3.2.7. Komunikasi dan Informasi	II-78
2.3.2.8. Pertanahan	II-80
2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat & Desa.	II-80
2.3.2.10. Perpustakaan	II-82
2.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	II-83
2.3.2.12. Pemuda dan Olahraga.....	II-84
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-86
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-86
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-86
2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita.....	II-87
2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah	II-87
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah	II-88
2.4.2.1. Aksesibilitas Wilayah	II-88
2.4.2.2. Penataan Wilayah	II-89
2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank.....	II-91
2.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih	II-93
2.4.2.5. Fasilitas Listrik dan Telepon	II-93
2.4.2.6. Ketersediaan Restorant	II-94
2.4.2.7. Ketersediaan Penginapan	II-94
2.4.3. Fokus Iklim Investasi.....	II-95
2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban	II-95
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-98
2.4.4.1. Rasio Ketergantungan	II-98

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2. Neraca Daerah	III-13
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-28
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-28
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III-29
3.3. Kerangka Pendanaan	III-31

**BAB IV ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS**

- 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
- 4.2. Isu-Isu Strategis..... IV-27

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi Pembangunan V-1
- 5.2. Misi V-12
- 5.3 Tujuan dan Sasaran V-20

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI -1

- 6.1. Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat beragama...VI-2
- 6.2. Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan .. VI-4
- 6.3 Misi 3 Mengembangkan Pertanian Organik dan
Perdagangan Hasil Pertanian Organik..... VI-7
- 6.4 Misi 4 Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra
Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional VI-9
- 6.5 Misi 5 Optimalisasi Investasi Daerah VI-11
- 6.6 Misi 6 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga
Pendidikan..... VI-13
- 6.7 Misi 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan VI-16
- 6.8 Misi 8 Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik)
Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik,
Prasarana dan Sarana Lalu Lintas..... VI-18
- 6.9 Misi 9 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada
Masyarakat..... VI-20
- 6.10. Misi 10 Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik
di Kota Batu Yang Harmonis dan Demokratis VI-21
- 6.11. Misi 11 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan
UKM VI-23

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- DAERAH VII -1**
- 7.1. Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat
Beragama VII-2



7.2. Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
Pemerintahan	VII-4
7.3 Misi 3 Mengembangkan Pertanian Organik dan	
Perdagangan Hasil Pertanian Organik	VII-12
7.4 Misi 4 Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra	
Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional	VII-14
7.5 Misi 5 Optimalisasi Investasi Daerah	VI-17
7.6 Misi 6 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga	
Pendidikan.....	VI-21
7.7 Misi 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	VI-26
7.8 Misi 8 Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik)	
Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik,	
Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.....	VI-31
7.9 Misi 9 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah	
Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada	
Masyarakat.....	VI-36
7.10 Misi 10 Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik	
di Kota Batu Yang Harmonis dan Demokratis	VI-38
7.11 Misi 11 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan	
UKM	VI-41

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA
BATU.....**

8.1. Urusan Wajib.....	VIII-2
8.1.1. Pendidikan.....	VIII-2
8.1.2. Kesehatan.....	VIII-4
8.1.3. Pekerjaan Umum.....	VIII-6
8.1.4. Perumahan.....	VIII-7
8.1.5. Penataan Ruang	VIII-8
8.1.6. Perencanaan Pembangunan.....	VIII-8
8.1.7. Perhubungan	VIII-10
8.1.8. Lingkungan Hidup	VIII-11
8.1.9. Pertanahan	VIII-14
8.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil	VIII-14
8.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
Anak.....	VIII-14



8.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	VIII-15
8.1.13. Sosial	VIII-16
8.1.14. Tenaga Kerja	VIII-17
8.1.15. Koperasi dan UKM	VIII-17
8.1.16. Penanaman Modal	VIII-18
8.1.17. Kebudayaan.....	VIII-19
8.1.18. Pemuda dan Olahraga	VIII-19
8.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri..	VIII-20
8.1.20. Pemerintahan Umum	VIII-21
8.1.21. Kepegawaian	VIII-24
8.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	VIII-25
8.1.23. Statistik	VIII-25
8.1.24. Kearsipan.....	VIII-25
8.1.25. Komunikasi dan Informatika	VIII-26
8.1.26. Perpustakaan.....	VIII-27
8.2. Urusan Pilihan	VIII-27
8.2.1. Pertanian.....	VIII-27
8.2.2. Peternakan	VIII-28
8.2.3. Kehutanan.....	VIII-29
8.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral	VIII-29
8.2.5. Pariwisata	VIII-30
8.2.6. Kelautan dan Perikanan	VIII-30
8.2.7. Perdagangan	VIII-31
8.2.8. Perindustrian.....	VIII-31
8.3. Urusan Kesekretariatan	VIII-32
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	IX -1
9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IX -1
9.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	IX -1
9.1.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	IX -1
9.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	IX -2
9.2. Aspek Pelayanan Umum	IX -2
9.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	IX -2
9.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	IX -8
9.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	IX -9
9.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	IX -9
9.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	IX -9



9.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi..... IX -10

9.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia IX -10

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi..... X-1

10.2. Kaidah Pelaksanaan..... X-1



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hlm.
2.1.	Kondisi dan penggunaan lahan di Kota Batu Tahun 2011	II-3
2.2.	Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah Tahun 2011	II-6
2.3.	Jaringan Sungai Kota Batu Tahun 2011	II-13
2.4.	Sumber Mata Air di Kota Batu	II-14
2.5.	Sumber Mata Air Di Wilayah Kecamatan Bumiaji Tahun 2011	II-17
2.6.	Sumber Mata Air di Wilayah Kecamatan Junrejo	II-18
2.7.	Sumber Mata Air di Wilayah Kecamatan Batu	II-18
2.8.	Rata-Rata Curah Hujan di Kota Batu Tahun 2010-2011	II-20
2.9.	Temperatur Udara Dirinci Menurut Bulan Tahun 2011	II-20
2.10.	Lembah Nisbi Udara Dirinci Menurut Bulan Tahun 2011	II-21
2.11.	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan	II-23
2.12.	Keadaan Industri Menurut Kelompok Industri Tahun 2011	II-23
2.13.	Luas Hutan Lindung di Kota Batu Tahun 2011	II-28
2.14.	Data Taman di Kota Batu Tahun 2011	II-30
2.15.	Penggunaan Lahan Kota Batu Tahun 2011	II-33
2.16.	Kejadian Bencana Di Wilayah Kota Batu Tahun 2011	II-34
2.17.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Batu	II-35
2.18.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 Kota Batu	II-35
2.19.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2011 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 dan Harga Berlaku (Hb) Kota Batu Tahun 2012	II-35
2.20.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Harga Berlaku (Hb) Kota Batu Tahun 2011	II-36
2.21.	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008-2011 Kota Batu	II-36
2.22.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 s.d. 2011	II-37
2.23.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Tahun 2008 s.d. 2011	II-37
2.24.	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011	II-37
2.25.	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2011	II-38
2.26.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-38
2.27.	Angka partisipasi Murni (APM) menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-39
2.28.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011	II-39
2.29.	Angka partisipasi Kasar (APK) menurut Kecamatan Kota	II-39



	Batu Tahun 2011	
2.30.	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011	II-40
2.31.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Batu Tahun 2008-2012	II-41
2.32.	Angka Kematian Bayi (AKB) menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2011	II-41
2.33.	Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Batu Tahun 2008-2012	II-42
2.34.	Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-42
2.35.	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-43
2.36.	Jumlah Rumah Tangga menurut Klasifikasi Kemiskinan di Desa dan Kelurahan Kota Batu	II-43
2.37.	Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Tanah menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-44
2.38.	Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan Kota Batu Tahun 2012	II-44
2.39.	Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011	II-44
2.40.	Angka Kriminalitas Kota Batu Tahun 2012	II-45
2.41.	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Batu Tahun 2011	II-45
2.42.	Rasio Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Batu Tahun 2012	II-46
2.43.	Perkembangan Seni Budaya Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-46
2.44.	Perkembangan Seni Budaya menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-46
2.45.	Perkembangan Grup Olahraga Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-47
2.46.	Perkembangan Grup Olahraga menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-47
2.47.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-48
2.48.	Angka partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 menurut Kecamatan	II-48
2.49.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-49
2.50.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Batu Tahun 2012 menurut Kecamatan	II-49
2.51.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-49
2.52.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Batu Tahun 2012 menurut Kecamatan	II-50
2.53.	Jumlah Posyandu dan Balita Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-50
2.54.	Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-50



2.55.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-51
2.56.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu menurut Kecamatan Tahun 2012	II-51
2.57.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-51
2.58.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2012	II-52
2.59.	Jumlah Dokter Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-52
2.60.	Jumlah Dokter menurut Kecamatan Tahun 2012	II-52
2.61.	Jumlah Tenaga Medis Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-53
2.62.	Jumlah Tenaga Medis menurut Kecamatan Tahun 2012	II-53
2.63.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-53
2.64.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan Tahun 2012	II-53
2.65.	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2008 s.d. 2012	II-54
2.66.	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2012	II-54
2.67.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-55
2.68.	Rasio Jaringan Irigasi Kota Batu Tahun 2008 s/d 2012	II-58
2.69.	Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-58
2.70.	Rasio Tempat Ibadah Kota Batu Tahun 2008 dan 2011	II-59
2.71.	Rasio Tempat Ibadah menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2011	II-59
2.72.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-60
2.73.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Batu Tahun 2008 dan 2012	II-60
2.74.	Rasio Tempat Pemakaman Umum menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-61
2.75.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-61
2.76.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2012	II-61
2.77.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-62
2.78.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah menurut Kecamatan Tahun 2012	II-62
2.79.	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-62
2.80.	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan menurut Kecamatan Tahun 2012	II-63



2.81.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-63
2.82.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum menurut Kecamatan Tahun 2012	II-63
2.83.	Rasio Ijin Trayek Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-64
2.84.	Rasio Ijin Trayek menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012	II-64
2.85.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-64
2.86.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2012	II-65
2.87.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-65
2.88.	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-66
2.89.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 s.d. 2012 Kota Batu	II-66
2.90.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-67
2.91.	Persentase Koperasi Aktif Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-67
2.92.	Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-68
2.93.	Jumlah BPR/LKM Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-68
2.94.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batu	II-69
2.95.	Pengelompokan Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011	II-69
2.96.	Pengelompokan Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011	II-70
2.97.	Pengelompokan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota batu Tahun 2012	II-70
2.98.	Sebaran Penduduk menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kota Batu Tahun 2011	II-71
2.99.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kota Batu Tahun 2012	II-71
2.100.	Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Kota Batu Tahun 2012	II-71
2.101.	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, dan Akte Nikah Kota Batu Tahun 2008-2012	II-72
2.102.	Jumlah Penduduk Peserta KB Kota Batu Tahun 2011	II-72
2.103.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-73
2.104.	Produktivitas Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-73
2.105.	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Batu Tahun 2011	II-74
2.106.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-74
2.107.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batu Tahun 2008 s.d.	II-75



	2012	
2.108.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-75
2.109.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-76
2.110.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-76
2.111.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan Tahun 2012	II-77
2.112.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-77
2.113.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2012	II-77
2.114.	Rasio Akseptor KB Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-78
2.115.	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2012	II-78
2.116.	Jumlah Jaringan Komunikasi Kota Batu Tahun 2008 dan 2012	II-78
2.117.	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Kota Batu Tahun 2008 dan 2012	II-79
2.118.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kota Batu Tahun 2008 dan 2012	II-79
2.119.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kota Batu Tahun 2008 dan 2012	II-80
2.120.	Luas Lahan Bersertifikat Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-80
2.121.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Menurut Kecamatan	II-81
2.122.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan	II-81
2.123.	Jumlah LSM Aktif Tahun 2008 s.d. 2012	II-82
2.124.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2008 s.d. 2012	II-82
2.125.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-83
2.126.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2008 s.d. 2012	II-83
2.127.	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2008 s.d. 2012	II-84
2.128.	Rasio Jumlah Poskamling Per Kecamatan Tahun 2008 s.d. 2012	II-84
2.129.	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011	II-85
2.130.	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2008 s.d. 2012	II-85
2.131.	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2008 s.d. 2012	II-85
2.132.	Angka Konsumsi RT per Kapita Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-86
2.133.	Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-87
2.134.	Produktivitas Total Daerah Kota Batu	II-87
2.135.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2008	II-88



	s.d. 2012	
2.136.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-88
2.137.	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-89
2.138.	Rencana Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Perda RTRW Kota Batu	II-89
2.139.	Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-90
2.140.	Rasio Luas Wilayah Industri Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-90
2.141.	Ratio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Batu Tahun 2008 s/d 2012	II-91
2.142.	Ratio Luas Wilayah Kekeringan Kota Batu Tahun 2008 s/d 2012	II-91
2.143.	Ratio Luas Wilayah Perkotaan Kota Batu Tahun 2008 s/d 2012	II-91
2.144.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Batu	II-92
2.145.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya di Kota Batu	II-92
2.146.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Batu	II-93
2.147.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Batu	II-94
2.148.	Jenis dan Jumlah Restoran Kota Batu	II-94
2.149.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Batu	II-95
2.150.	Angka Kriminalitas Kota Batu	II-96
2.151.	Jumlah Demonstrasi Kota Batu	II-96
2.152.	Kemudahan Perijinan dan Lama Proses Perijinan Kota Batu	II-97
2.153.	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Batu	II-97
2.154.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Batu	II-98
2.155.	Rasio Ketergantungan Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012	II-99
3.1.	Perkembangan Indikator Keuangan Kota Batu Tahun 2008-2012	III-2
3.2.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008 s/d 2012	III-3
3.3.	Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2008–2012	III-5
3.4.	Realisasi Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2008–2012	III-8
3.5.	Proporsi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2008–2012	III-9
3.6.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2013-2017	III-10
3.7.	Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Kota Batu Tahun 2008 s/d 2011	III-11



3.8.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Batu Tahun 2010-2012	III-15
3.9.	Analisis Rasio Keuangan Kota Batu Tahun 2010-2012	III-17
3.10.	Rasio Kemandirian Tahun 2007-2012	III-18
3.11.	Rasio Belanja Operasi terhadap APBD Tahun 2007-2012	III-19
3.12.	Rasio Belanja Modal terhadap APBD Tahun 2007-2012	III-20
3.13.	Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2007-2012	III-22
3.14.	Rasio Efektivitas PAD Tahun 2007-2012	III-23
3.15.	Pemerintah Kota Batu LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2008 dan 2011	III-25
3.16.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batu Tahun 2010-2012	III-28
3.17.	Defisit Riil Anggaran Kota Batu Tahun 2010-2012	III-30
3.18.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Batu Tahun 2010-2012	III-30
3.19.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Batu Tahun 2010-2012	III-30
3.20.	Persentase Belanja Urusan Wajib Terhadap Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2009-2011	III-31
3.21.	Proyeksi Pendapatan Kota Batu Tahun 2013-2017	III-35
3.22.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2013-2017	III-36
4.1.	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Batu	IV-7
4.2.	Identifikasi Isu-Isu Strategis	IV-27
4.3.	Identifikasi Kebijakan Dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Kota Batu	IV-29
4.4.	Hasil Telaahan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025	IV-35
5.1.	Perumusan Penjelasan Visi	V-1
5.2.	Perumusan Penjelasan Misi	V-13
5.3.	Rumusan Sasaran dan Indikator	V-20
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama	VI-2
6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	VI-4
6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik	VI-7
6.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 4 : Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisata Internasional	VI-9
6.5.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah	VI-11
6.6.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan	VI-13
6.7.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	VI-16

6.8.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas	VI-18
6.9.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	VI-20
6.10.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis	VI-21
6.11.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM	VI-23
7.1.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama	VII-2
7.2.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	VII-4
7.3.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik	VII-12
7.4.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 4 : Meningkatkan Posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisata Internasional	VII-14
7.5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah	VII-17
7.6.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan	VII-21
7.7.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	VII-26
7.8.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas	VII-31
7.9.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	VII-36
7.10.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis	VII-38
7.11.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM	VII-41
8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batu	VIII-2
9.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Batu	IX-1



DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	HAL
1	Peta Wilayah Administrasi Kota Batu	II - 2
2	Peta Kemiringan Lahan Kota Batu	II - 5
3	Peta Topografi Kota Batu	II - 7
4	Daerah Aliran Sungai	II - 12
5	Aliran DAS Brantas	II - 13
6	Peta Pola Persebaran Kawasan Pertanian Kota Batu	II - 22
7	Persebaran Kawasan Permukiman Kota Batu	II - 27
8	Lokasi Persebaran Kawasan Hutan di Kota Batu	II - 29
9	Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu	II - 31
10	Taman Hutan Raya	II - 32

**DAFTAR GRAFIK**

NO	NAMA GRAFIK	HAL
1	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008 – 2012	III - 4
2	Proyeksi Pendapatan Kota Batu Tahun 2008 – 2012	III - 6
3	Perbandingan Realisasi APBD (Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota) Tahun 2011 dan Tahun 2012	III – 11
4	Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2007 – 2012	III - 18
5	Perkembangan Belanja Operasi Terhadap APBD Tahun 2007 – 2012	III - 19
6	Perkembangan Belanja Modal Terhadap APBD Tahun 2007 – 2012	III - 21
7	Pertumbuhan PAD Kota Batu Tahun 2007 – 2012	III - 22
8	Rasio Pertumbuhan PAD Kota Batu Tahun 2007 – 2012	III - 22
9	Target dan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2007 – 2012	III - 24
10	Rasio Pertumbuhan PAD Kota Batu Tahun 2007 – 2012	III – 24
11	Proyeksi Pendapatan Kota Batu Tahun 2013-2017	III – 36
12	Proyeksi Belanja Kota Batu Tahun 2013-2017	III – 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Dokumen ini memuat hasil proses penyusunan tahapan program pembangunan dengan memanfaatkan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu, yang dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan Kota Batu.

Proses penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 diupayakan semaksimal mungkin berpedoman pada panduan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Tahapan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pembahasan dengan DPRD, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan RPJMD sebagai peraturan daerah diupayakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down*, dan *bottom-up* diupayakan untuk dilaksanakan sesuai porsinya masing-masing. Pendekatan teknokratis yang merupakan upaya dalam mendekati perencanaan pembangunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah diterapkan dalam menganalisis hasil kinerja periode lalu, merumuskan peluang dan tantangan, merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, merumuskan program prioritas dan target capaiannya, menetapkan tolok ukur capaian, menetapkan SKPD penanggung-jawab, serta memproyeksikan pagu indikatif program pembangunan daerah. Pendekatan

partisipatif untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam pelaksanaan forum konsultasi publik dan musrenbang RPJMD dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berpegang pada prinsip kesetaraan. Pendekatan politis diwujudkan dalam penerjemahan visi dan misi walikota dan wakil walikota kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan secara tepat dan sistematis untuk menentukan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun masa jabatannya. Selain itu juga diwujudkan dalam pembahasan dan konsultasi dengan DPRD Kota Batu terkait dengan penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan Kota Batu. Pendekatan *top-down*, dan *bottom-up* untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah diwujudkan dalam kajian terhadap dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi.

Kedudukan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 dalam kaitannya dengan keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 adalah terletak pada periodisasi lima tahunan kedua dan lima tahunan ketiga. Periodisasi lima tahunan kedua RPJPD adalah tahun 2010-2015, dan periodisasi lima tahunan ketiga adalah tahun 2015-2020.

Keberadaan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan perencanaan lain ditingkat kota, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD yang merupakan rencana pembangunan daerah lima tahunan menjadi pedoman dalam menyusun RKPD tahun yang merupakan rencana pembangunan daerah satu tahunan. RPJMD berisi substansi-substansi yang harus dijabarkan dalam RKPD. Adapun penjabaran dalam RKPD tidak boleh menyimpang dari substansi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Keberadaan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Rencana Strategis (Renstra). RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 menjadi pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Renstranya untuk periode tahun 2012-2017. Berbagai substansi yang ada dalam RPJMD harus dijabarkan dalam Renstra sesuai dengan perspektif tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD diperinci dalam bentuk

kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun penjabaran dalam Renstra oleh SKPD tidak boleh menyimpang dari substansi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118).
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).



19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48).
22. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2032.
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030.
29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025.
30. Perda Nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 juga memiliki hubungan dengan RPJMN Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025, dan RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030.

1.3.1. Hubungan dengan RPJMN Tahun 2010-2014

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Mengingat bahwa kebijakan dalam RPJMN yang berjumlah sekitar 78 (tujuh puluh delapan) kebijakan menunjukkan prioritas arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan dalam RPJMN menjadi acuan penyelaras dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu.

1.3.2. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. Mengingat bahwa kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 yang berjumlah sekitar 125 (seratus dua puluh lima) kebijakan menunjukkan prioritas arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut menjadi acuan penyelaras dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu.

1.3.3. Hubungan dengan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 berpedoman pada RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025. Sekitar 87 (delapan puluh tujuh) sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 menjadi dasar analisis dalam identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sasaran pokok dalam RPJPD menjadi

rujukan penjelasan visi dalam RPJMD. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD juga menjadi indikator kinerja dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 berpedoman pada RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030. Program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RTRW dalam periode waktu tahun 2012-2017 ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017. Penetapan dalam RPJMD ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Batu dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 diorganisir dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Garis besar substansi pada bab ini adalah latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah gambaran umum kondisi daerah yang relevan dan penting, dalam arti selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Gambaran umum kondisi daerah dikelompokkan dalam aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah gambaran kinerja keuangan masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan yang meliputi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Garis besar substansi pada bab ini adalah analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang harus dapat menjelaskan butir-butir penting dari isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Garis besar substansi pada bab ini adalah pernyataan visi dan penjelasannya menurut kata-kata kunci dalam pernyataan visi, pernyataan misi dan penjelasannya, serta pernyataan tujuan dan sasaran beserta hubungannya dengan isu-isu strategis daerah.

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Garis besar substansi pada bab ini adalah strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah, serta hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah rumusan program pembangunan daerah, indikator kinerja, uraian penjelasan hubungan antara kebijakan umum dengan target capaian indikator kinerja, serta uraian penjelasan hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Garis besar substansi pada bab ini adalah hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD terkait, beserta program yang menjadi tanggung-jawab SKPD, pencapaian indikator targetnya, yang disertai kebutuhan pendanaannya.

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah indikator kinerja daerah yang ditetapkan untuk memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Garis besar substansi pada bab ini adalah pedoman terkait perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017 adalah :

1. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu tahun 2005-2025.
2. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam rencana kerja yang konkret atau bisa dilaksanakan.
3. Mewujudkan pedoman bagi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu.
4. Mewujudkan pedoman bagi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017 adalah :

1. Mengidentifikasi gambaran umum kondisi daerah Kota Batu.
2. Mengidentifikasi gambaran pengelolaan keuangan daerah Kota Batu.
3. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
4. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Batu periode tahun 2012-2017.
5. Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah Kota Batu periode tahun 2012-2017.
6. Merumuskan program pembangunan daerah Kota Batu periode tahun 2012-2017.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luasan wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 hektar dan secara administrasi terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Batu

- Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 hektar
- Jumlah Desa/Kelurahan : 4 kelurahan dan 4 desa
- Jumlah RW/RT : 96 RW dan 453 RT.

2. Kecamatan Junrejo

- Luas wilayah Kecamatan Batu : 2.565,02 hektar
- Jumlah Desa/Kelurahan : 1 kelurahan dan 6 desa
- Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT.

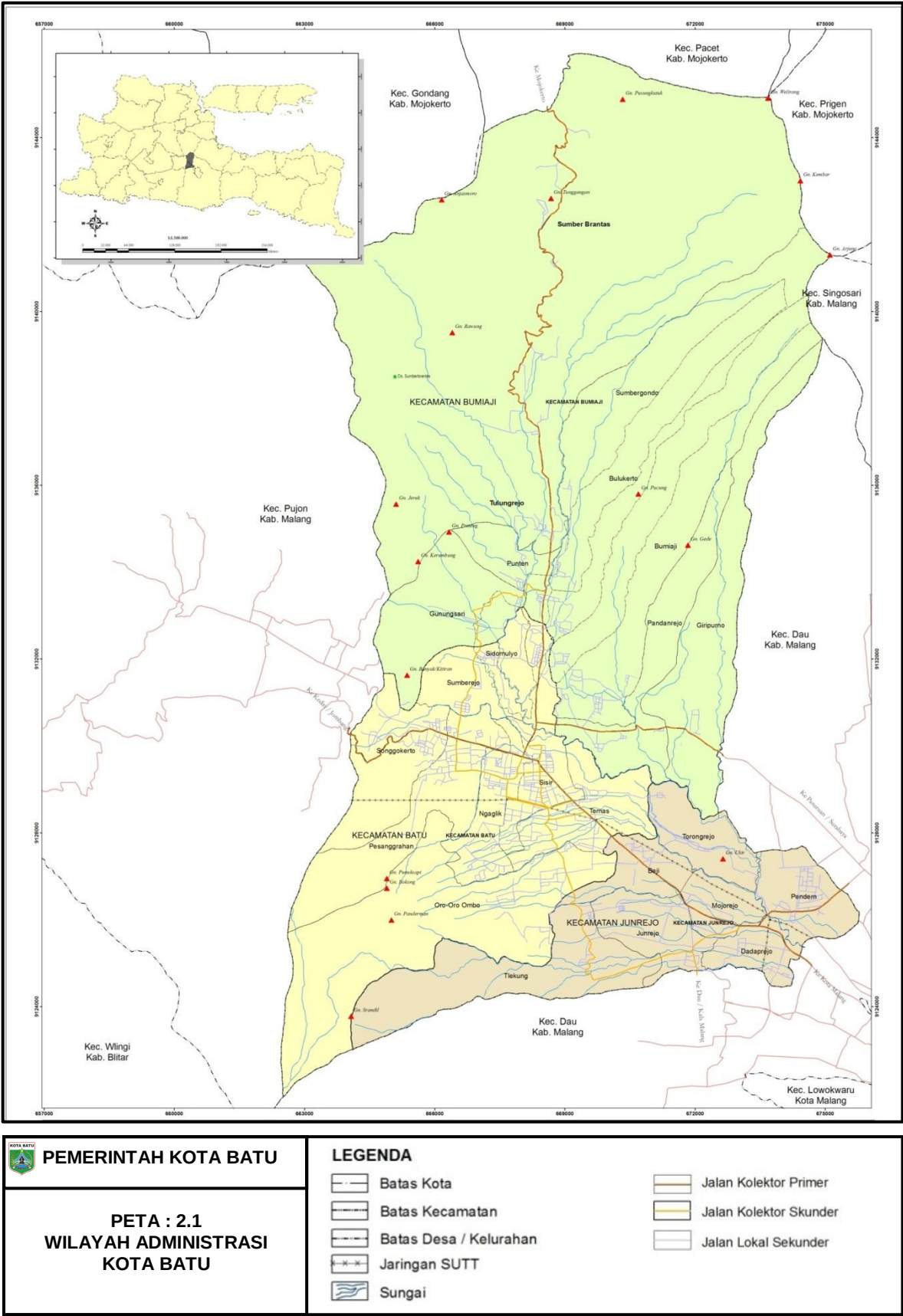
3. Kecamatan Bumiaji

- Luas wilayah Kecamatan Batu : 12.797,89 hektar
- Jumlah Desa/Kelurahan : 9 desa
- Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT

Adapun batas administrasi wilayah Kota Batu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Untuk lebih jelasnya lihat peta 2.1.





2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.2.1. Posisi Astronomis

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara 122° 17' - 122° . 57' Bujur Timur dan 7° 44' - 8° 26' Lintang Selatan.

2.1.2.2. Posisi Geostrategis

Kota Batu merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu mempunyai peran yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam skala wilayah Malang Raya dan umumnya dalam skala wilayah Jawa Timur, yaitu sebagai sentra pariwisata Jawa Timur.

2.1.2.3. Kondisi Kawasan

Wilayah Kota Batu merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan dengan iklim yang sejuk. Potensi utama Kota Batu adalah pada sektor pariwisata dan sektor pertanian khususnya pertanian hortikultura. Fungsi kawasan kota Batu meliputi areal permukiman, perdagangan dan jasa, pergudangan, perindustrian, fasilitas umum, kawasan militer, kawasan wisata, areal pertanian, ruang terbuka hijau serta hutan. Adapun untuk penggunaan lahan di Kota Batu didominasi oleh lahan pertanian seluas 11.265,64 hektar dari luas keseluruhan lahan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kondisi dan penggunaan lahan di Kota Batu
Tahun 2011

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luasan (Ha)
1	Permukiman	1.436,87
2	Perdagangan dan Jasa	121,83
3	Pergudangan	43,27
4	Perindustrian	54,09
5	Fasilitas Umum	132,06
6	Kawasan Militer	79,05
7	Kawasan Wisata	81,17
8	Pertanian	11.265,64
9	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	144,12
10	Hutan	6.550,61
Jumlah		19.908,72

Sumber : RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030

2.1.3. Topografi

2.1.3.1. Kemiringan Lahan

Kemiringan lahan (*slope*) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal diketahui bahwa, sebagian besar wilayah Kota Batu

mempunyai kemiringan lahan sebesar 25 – 40% dan kemiringan > 40. Rincian mengenai kemiringan ini adalah :

- 0 – 8 % seluas 2.207,21 Ha.
- 8 – 15 % seluas 2.223,73 Ha.
- 15-25 % seluas 1.799,37 Ha.
- 25 – 40 % seluas 4.529,85 Ha.
- > 40 % seluas 4.493, 33 Ha.

Untuk lebih jelasnya lihat peta 2.2 (peta kemiringan lahan Kota Batu)

2.1.3.2. Ketinggian Lahan

Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada tiga gunung yang telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu diklasifikasikan kedalam 6 (enam) kelas, yaitu:

A. 600 – 1.000 DPL dengan luas 6.019,21 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah:

1. Kecamatan Batu (terutama Desa Sidomulyo secara keseluruhan, sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo serta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto;
2. Kecamatan Junrejo (terutama Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo dan sebagian Desa Tlekung); dan
3. Kecamatan Bumiaji (terutama pada sebagian kecil desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji).

B. 1.000 – 1.500 DPL dengan luas 6.493,64 Ha

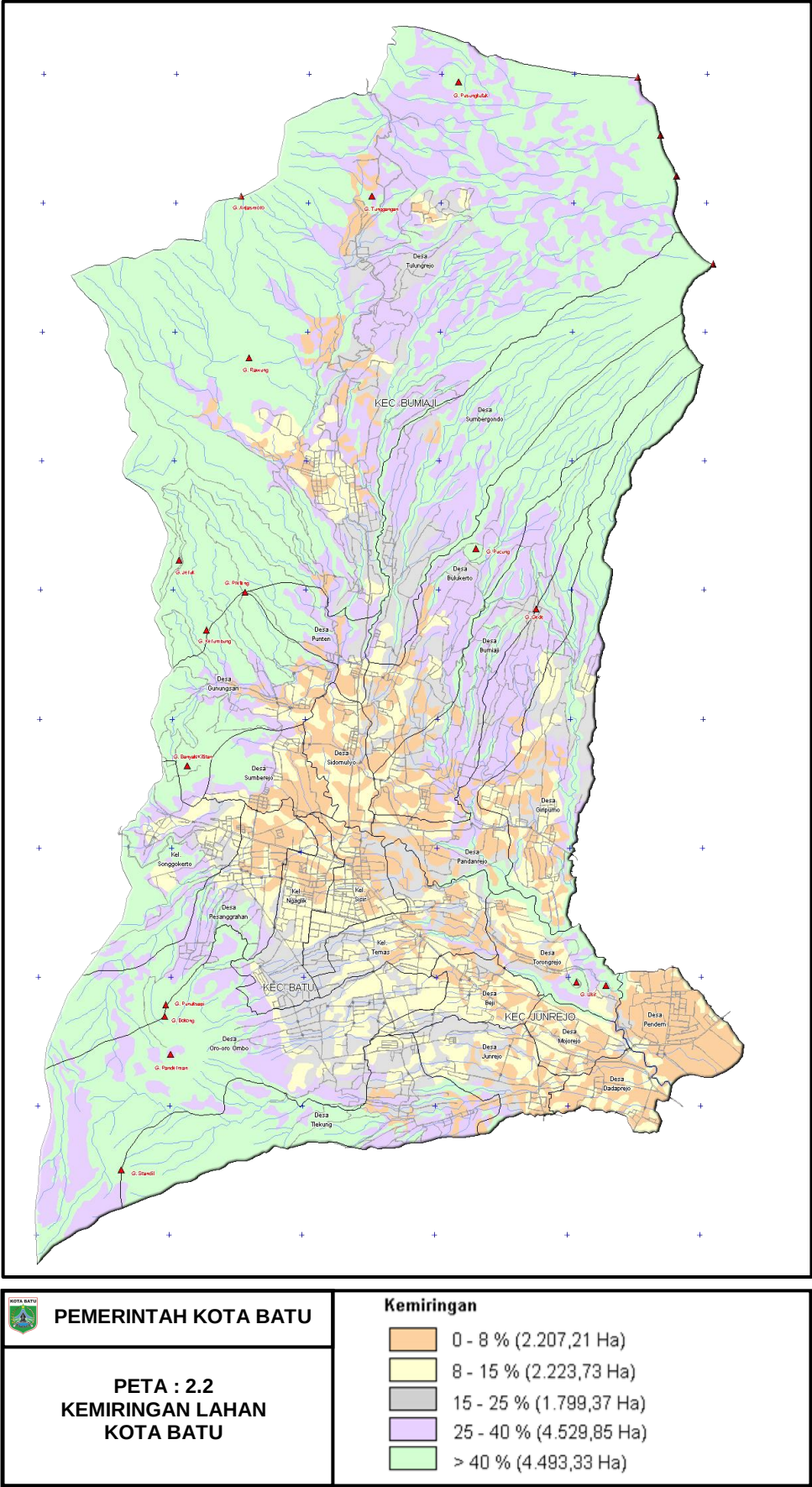
Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah: sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji dan sebagian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (terutama wilayah Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan) serta di sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.

C. 1.500 – 2.000 DPL dengan luas 4.820,40 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah: sebagian kecil Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil



Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, terutama di sekitar kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong serta Gunung Punuksari.





Sedangkan di wilayah Kecamatan Bumiaji, seluruh bagian desa mempunyai ketinggian ini, terutama kawasan-kawasan di sekitar Gunung Rawung, Gunung Tunggangan, Gunung Pusungkutuk.

D. 2.000 – 2.500 DPL dengan luas 1.789,81 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini relatif sedikit, yaitu di sekitar Gunung Srandil serta diujung Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir. Untuk Kecamatan Bumiaji, ketinggian ini berada di sekitar Gunung Anjasmoro dan pada sebagian kecil di wilayah Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa sumbergondo dan Desa Torongrejo.

E. 2.500 – 3.000 DPL dengan luas 707,32 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji, terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen.

F. > 3.000 DPL dengan luas 78,29 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah pada beberapa desa di Kecamatan Bumiaji, khususnya di sekitar Gunung Arjuno (Desa sumbergondo), Gunung Kembar dan Gunung Wlirang (Desa Tulungrejo). Lebih jelasnya lihat peta 2.3.

2.1.4. Geologi

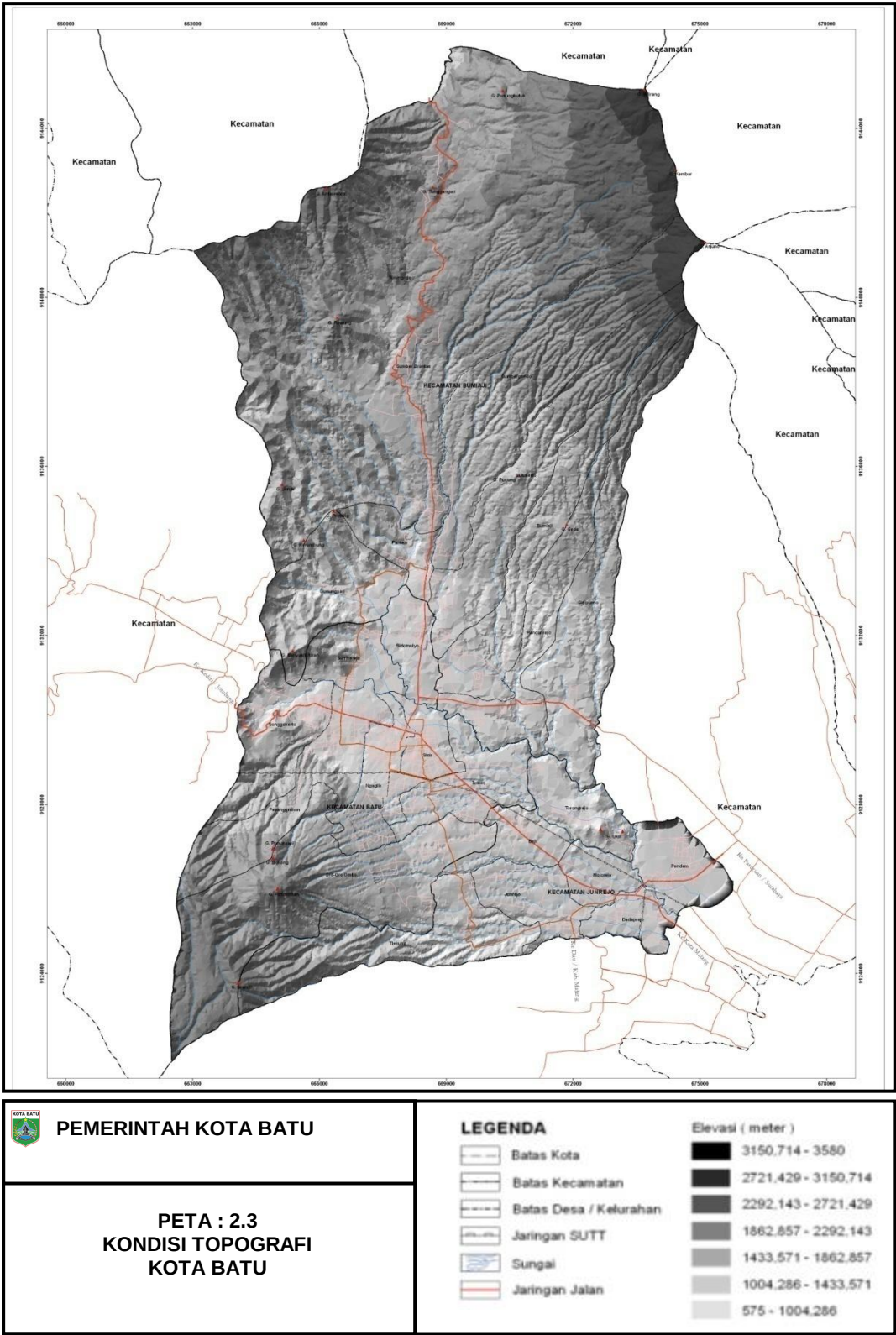
2.1.4.1. Struktur dan Karakteristik

Batuan pembentuk tanah yang terdapat di wilayah Kota Batu sebagian besar dari jenis andosol, dimana jenis tanah ini memiliki karakteritik lahan tanah yang paling subur. Jenis tanah lain yang terdapat di Kota Batu antara lain tanah kambisol berupa jenis tanah yang cukup subur, tanah alluvial berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur serta tanah latosol. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di masing-masing Kecamatan di Kota Batu secara umum dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah Tahun 2011

Kecamatan	Andosol	Kambisol	Aluvial	Latosol
1. Batu	1.831,04	889,31	239,86	260,34
2. Junrejo	1.526,19	741,25	199,93	217,00
3. Bumiaji	2.873,89	1.395,81	376,48	408,61
Kota Batu	6.231,12	3.026,37	816,27	885,95

Sumber : Peta Jenis Tanah Oleh Institut Pertanian Bogor



Dilihat dari formasi geologi diatas menunjukan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu, sehingga di Kota Batu mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian.

2.1.4.2. Potensi Kandungan

Kota Batu secara geologis tersusun atas endapan gunung api yang aktif pada masa lampau. Endapan hasil aktifitas gunung api ini sering disebut endapan Epiklastik dan Tiroklastika. Secara berurutan (dimulai yang tertua), tata urutan statigrafi tersusun atas :

- 1 Batuan Gunung Api Anjosmoro Tua
- 2 Batuan Gunung Api Kwarter Bawah
- 3 Batuan Gunung Api Kwarter Tengah
- 4 Batuan Gunung Api Arjuno/ Wlirang
- 5 Batuan Gunung Api Kwarter Atas

Selanjutnya masing-masing akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

A. Batuan Gunung Api Anjosmoro Tua (QVAT)

Batuan ini tersusun atas breksi gunung api, tufreksi, tuf dan lava. Breksi gunung api, aneka bahan, warna kelabu coklat, ukuran butir 4 mm - 64 mm, bentuk agak runcing-agak bulat. Dan terbilang buruk. Batuan penyusun adalah andesit, basal, Batu apung, absidian, mineral mafik dengan masa dasar tuf kasar, setempat bersisipan aglomerat, tuf dan lava. Tuf breksi dan tuf berwarna kelabu, kuning jeruk sampai coklat, berukuran butir sampai bongkahan, berbentuk membulat tanggung dan padat. Frakmen dan matrik tersusun atas Batuan andesit, Batu apung oksidan dan gelas vulkanik, frakmen berukuran besar tersebar tidak merata. Tebal lapisan mencapai puluhan meter dan setempat bersisipan tuf dan lava.

Lava terdiri atas andesit dan basal, segi fisik berwarna kelabu hitam, berstruktur aliran dan terkekarkan. Komposisi mineral tersusun atas piroksen, feldspar, gelas vulkanik dan sedikit olivin. Sebagian berupa sisipan dan melidah dalam breksi. Batuan Gunung Api Anjosmoro Batuan ini diduga sebagai alas dan berumur pliosen awal-tengah. Beberapa tempat tertindih tak selaras oleh Batuan gunung api arjuno-wlirang. Desa

yang termasuk Batuan api gunung anjosmoro tua ini adalah sebagian kecil di daerah utara desa Tulungrejo.

B. Batuan Gunung Api Kwartir Bawah (QPVA)

Batuan ini terbentuk hasil aktifitas gunung api anjosmoro muda dan terdiri atas breksi gunung api, tuf breksi, lava dan aglomerat. Breksi gunung api, aneka bahan, warna kelabu, hitam, dan coklat, ukuran lapili hingga bom, bentuk butir sangat runcing-agak bulat, kemas tertutup dan terpilah buruk. Batuan penyusun adalah andesit, basal, Batu apung, absidian, kwarsa, mineral mafik dengan masa dasar tuf sangat kasar. Struktur aliran, pelapisan bersusun dan tebal sampai lapisan meter, setempat diterobos lava dan andesit basal. Tuf breksi dan tuf berwarna kelabu, kuning keruk sampai coklat berukuran pasir sampai bongkah, berbentuk membulat tanggung dan padat. Frakmen dan matrik tersusun oleh Batuan andesit, basal, Batu apung, absidian dan gelas vulkanik. Fragmen berukuran besar tersebar tidak merata. Tebal lapisan mencapai puluhan meter dan setempat bersisipan tuf dan lava.

Lava terdiri andesit dan basal berciri fisik berwarna kelabu hitam, porfir, berstruktur aliran, vesikuler dan terkekarkan. Komposisi mineral terdiri dari tiroksin feldspar, mineral biji, mikrolit dan gelas. Aglomerat berwarna coklat hingga kelabu tua, bersifat menengah hingga basal, berbutir lavili hingga bom. Kemas terbuka, terpilah buruk dan komposisi penyusun terdiri atas andesit, basal, absidian dan gelas vulkanik. Ketebalan mencapai puluhan meter.

Batuan gunung api diduga berumur plistosen tengah dan tertindih oleh Batuan gunung api kwarter tengah. Daerah yang termasuk ke dalam daerah Batuan gunung api kwarter bawah ini meliputi Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Sumberrejo.

C. Batuan Gunung Api Kwartir Tengah (QPVKB) dan (QPVR)

Batuan ini terbentuk dari aktifitas Gunung Api Kawi – Butak dan aktifitas Gunung Api Ringgit yang terjadi dimasa kwarter tengah. Batuan ini tersusun atas breksi gunung ap, tuf, lava, aglomerat dan lahar.

Bresi gunung api, aneka bahan, warna coklat kemerahan-kelabu-kuning-keruh berukuran pasir hingga bom, bentuk butir agak runcing agak bulat, kemas terbuka, mampat dan terpilah buruk. Batuan penyusun adalah andesit, basal, Batu apung, obsidian, mineral mafik dengan masa dasar tuf kasar. Setempat bersisipan aglomerat, tuf dan lava. Tuf berwarna

kelabu, kuning keruh sampai coklat, berukuran butir pasir kasar-halus kemas terbuka, kesarangan cukup dan padat. Frakmen dan matrik tersusun oleh feldspar, gelas vulkanik, pecahan Batuan andesit, basal, Batu apung, dan obsidian. Struktur aliran dan pelapisan bersusun tebal lapisan mencapai puluhan meter dan setempat bersisipan tuf atau lava.

Lava terdiri dari andesit, andewit piroksen dan basal. Ciri-ciri fisik berwarna kelabu hitam berstruktur aliran dan terkekarkan. Komposisi mineral terdiri dari piroksen, feldspar, gelas vulkanik dan sedikit olivin. Sebagian berupa sisipan dan melidah dalam breksi. Aglomerat berwarna coklat hingga kelabu tua, putih, kemerahan bersifat menengah hingga basal, berbutir lavili hingga bom. Kemas terbuka, membundar tanggung terpilah buruk dan komposisi penyusun terdiri atas andesit, basal, absidian dan gelas vulkanik.

Lahar berwarna kelabu-coklat kemerahan, berukuran pasir halus-kerakal, berbentuk menyudut tanggung-membundar, dan komposisi tersusun oleh pecahan andesit, Batu apung, gelas vulkanik dan sedikit sisa tumbuhan. Tebal mencapai beberapa meter dan tersingkap pada lembah dan tidak merata. Batuan gunung api diduga berumur plistosen akhir dan tertindih oleh Batuan gunung yang lebih muda. Daerah yang termasuk ke dalam daerah Batuan gunung api kwarter bawah ini adalah baguan selatan Desa Tlekung.

D. Batuan Gunung Api Arjuno-Wlirang (QVAW)

Batuan ini terbentuk karena aktifitas Gunung Arjuno dan Gunung Wlirang yang terjadi di masa kwarter dan tersusun oleh breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf. Breksi gunung api, aneka bahan, warna coklat kemerahan-kelabu-kuning-keruh berukuran pasir hingga bom, bentuk butir agak runcing agak bulat, kemas terbuka, mampat dan terpilah buruk. Batuan penyusun adalah andesit, basal, Batu apung, obsidian, mineral mafik dengan masa dasar tuf kasar. Setempat bersisipan aglomerat, tuf dan lava.

Lava terdiri dari andesit, andewit piroksen dan basal. Ciri-ciri fisik berwarna kelabu hitam berstruktur aliran dan terkekarkan. Komposisi mineral terdiri dari piroksen, feldspar, gelas vulkanik dan sedikit olivin. Sebagian berupa sisipan dan melidah dalam breksi. Breksi tufan berwarna kelabu, kuning keruh sampai coklat berukuran pasir sampai bongkah, berbentuk membulat tanggung dan padat. Frakmen dan matrik

tersusun oleh Batuan andesit, basal, Batu apung, absidian dan gelas vulkanik. Fragmen berukuran besar tersebar tidak merata. Tebal lapisan mencapai puluhan meter dan setempat bersisipan tuf dan lava.

Tuf berwarna kelabu, kuning keruh sampai coklat, berukuran butir pasir kasar-halus kemas terbuka, kesarangan cukup dan padat. Frakmen dan matrik tersusun oleh feldspar, gelas vulkanik, pecahan Batuan andesit, basal, Batu apung, dan obsidian. Struktur aliran dan pelapisan bersusun tebal lapisan mencapai puluhan meter dan setempat bersisipan tuf atau lava. Daerah yang termasuk kedalam daerah Batuan Gunung Api Arjuna-Wlirang ini adalah meliputi sebagian besar Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Pandanrejo, Desa Sidomulyo, Desa Bulukerto.

E. Batuan Gunung Api Kwarter Atas Atau Panderman (QVP)

Batuan gunung api ini terutama dibentuk oleh aktifitas Gunung Panderman pada masa kwarter atas dan tersusun oleh breksi gunung api, lava, tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar. Breksi gunung api, aneka bahan, warna kelabu-coklat, ukuran butir 4 mm sampai > 64 mm, bentuk butir sangat runcing-agak bulat, dan terpilah buruk. Batuan penyusun adalah andesit, basal, batu apung, obsidian, mineral mafik dengan masa dasar tuf kasar. Setempat bersisipan aglomerat, tuf dan lava.

Lava terdiri dari andesit, andewit piroksen dan basal. Ciri-ciri fisik berwarna kelabu hitam berstruktur aliran dan terkekarkan. Komposisi mineral terdiri dari piroksen, feldspar, gelas vulkanik dan sedikit olivin. Sebagian berupa sisipan dan melidah dalam breksi. Tuf berwarna kelabu, kuning keruh sampai coklat, berukuran butir pasir kasar-halus kemas terbuka, kesarangan cukup dan padat. Frakmen dan matrik tersusun oleh feldspar, gelas vulkanik, pecahan Batuan andesit, basal, Batu apung, dan obsidian. Breksi tufan berwarna kelabu, kuning keruh sampai coklat berukuran pasir sampai bongkah, berbentuk membulat tanggung dan padat. Frakmen dan matrik tersusun oleh Batuan andesit, basal, Batu apung, absidian dan gelas vulkanik. Fragmen berukuran besar tersebar tidak merata. Tebal lapisan mencapai puluhan meter dan setempat bersisipan tuf dan lava.

Aglomerat berwarna coklat hingga kelabu tua, putih, kemerahan bersifat menengah hingga basal, berbutir lavili hingga bom. Kemas terbuka, membundar tanggung terpilah buruk dan komposisi penyusun terdiri atas

andesit, basal, absidian dan gelas vulkanik. Tebal beberapa meter dan tersingkap setempat saja. Lahar berwarna kelabu-coklat kemerahan, berukuran pasir halus-kerakal, berbentuk menyudut tanggung-membundar, dan komposisi tersusun oleh pecahan andesit, Batu apung, gelas vulkanik dan sedikit sisa tumbuhan. Tebal mencapai beberapa meter dan tersingkap pada lembah dan tidak merata. Daerah yang termasuk kedalam daerah Batuan gunung api kwarter atas atau Panderman ini adalah, meliputi Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Beji, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Dadaprejo, Desa Pendem, Desa Oro-oro Ombo, sebagian utara Desa Tlekung, Kelurahan Songgokerto, Desa Pesangrahan, Desa Junrejo.

Dilihat dari formasi geologi diatas menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu, sehingga di Kota Batu mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian. Kota Batu secara geologis tersusun atas endapan gunung api yang aktif pada masa lampau. Endapan hasil aktifitas gunung api ini sering disebut endapan Epiklastik dan Tiroklastika.

2.1.5. Hidrologi

2.1.5.1. Daerah Aliran Sungai



Daerah aliran sungai (Das) yang ada di Kota Batu yaitu Das Brantas. Hulu Das Brantas di wilayah Kota Batu berada di Desa Sumberbrantas. Panjang Das Brantas mulai dari hulu

hingga ke hilir yaitu sekitar 12.000 Km² dengan jumlah sungai sebanyak 485 buah serta melalui 9 kabupaten dan 6 kota di Jawa Timur. Keberadaan Das Brantas potensial mendukung pangan sebesar 29% dari 34% share nasional.

2.1.5.2. Sungai, Sumber Mata Air, Danau dan Rawa

A. Sungai

Jaringan sungai yang ada di wilayah Kota Batu kurang lebih terdapat tujuh belas jaringan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan nama sungai, panjang, lebar permukaan, lebar dasar serta kedalaman sungai lihat pada tabel berikutnya.



PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Mata air yang ada di Kota Batu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Sumber Mata Air di Kota Batu

No	Sumber Air	Lokasi		Debit	
		Desa	Kecamatan	Max (L/detik)	Min (L/detik)
1.	Sumber Biru	Tulung Rejo	Bumiaji	25	17
2.	Sumber Ngel	Tulung Rejo	Bumiaji	15	10
3.	Sumber Brantas 1	Tulung Rejo	Bumiaji	2	1
4.	Sumber Brantas 2	Tulung Rejo	Bumiaji	20	13
5.	Sumber Brantas 3	Tulung Rejo	Bumiaji	25	17
6.	Sumber Rejeki	Tulung Rejo	Bumiaji	15	10
7.	Sumber Petungngamplok 1	Tulung Rejo	Bumiaji	30	20
8.	Sumber Petungngamplok 2	Tulung Rejo	Bumiaji	12	8
9.	Sumber Jeblokan	Tulung Rejo	Bumiaji	27	18
10.	Sumber Kolong	Tulung Rejo	Bumiaji	65	39
11.	Sumber Dompjong	Tulung Rejo	Bumiaji	30	18
12.	Sumber Jombranti 1	Tulung Rejo	Bumiaji	8	6
13.	Sumber Jombranti 2	Tulung Rejo	Bumiaji	10	7
14.	Sumber Sari	Tulung Rejo	Bumiaji	6	4
15.	Sumber Ngesong 1	Punten	Bumiaji	60	40
16.	Sumber Ngesong 2	Punten	Bumiaji	30	21
17.	Sumber Ngesong 3	Punten	Bumiaji	71	51
18.	Sumber Lodengkol	Punten	Bumiaji	65	59
19.	Sumber Bletok	Punten	Bumiaji	39	25
20.	Sumber Banyuning	Punten	Bumiaji	179	160
21.	Sumber Belik Bei	Gunungsari	Bumiaji	5	3
22.	Sumber Petungkobong	Gunungsari	Bumiaji	20	12
23.	Sumber Sumberan	Gunungsari	Bumiaji	15	10
24.	Sumber Preteng	Gunungsari	Bumiaji	35	23
25.	Sumber Krecek	Sumber Gondo	Bumiaji	8	6
26.	Sumber Gabes	Sumber Gondo	Bumiaji	2	1
27.	Sumber Pesunglading	Bulukerto	Bumiaji	1	0,4
28.	Sumber Brukan	Bulukerto	Bumiaji	1,5	0,5
29.	Sumber Watugupik	Bulukerto	Bumiaji	2	1
30.	Sumber Gemulo	Bulukerto	Bumiaji	179	160
31.	Sumber Pakisan	Sidomulyo	Batu	20	15
32.	Sumber Dolo	Sidomulyo	Batu	17	12
33.	Sumber Kalo	Sidomulyo	Batu	4	1
34.	Sumber Abdul Muntalib	Sidomulyo	Batu	10	7
35.	Sumber Grinsing	Gunungsari	Batu	40	28
36.	Sumber Torongdadap	Songgokerto	Batu	14	11
37.	Sumber Watugudik	Songgokerto	Batu	47	35
38.	Sumber Coban Petak	Songgokerto	Batu	2	1
39.	Sumber Bulu	Songgokerto	Batu	3	1
40.	Sumber Torongbelok	Songgokerto	Batu	41	33
41.	Sumber Torong Jeruk	Songgokerto	Batu	14	11
42.	Sumber Kasinan	Songgokerto	Batu	30	18
43.	Sumber Srebet 1 dan 2	Pesanggrahan	Batu	4	3
44.	Sumber Seruk	Pesanggrahan	Batu	2	1
45.	Sumber Panderman	Pesanggrahan	Batu	12	8
46.	Sumber Beliktanjung 1	Ngaglik	Batu	19	13
47.	Sumber Beliktanjung 2	Ngaglik	Batu	2	1
48.	Sumber Belik	Sisir	Batu	2	1



No	Sumber Air	Lokasi		Debit	
		Desa	Kecamatan	Max (L/detik)	Min (L/detik)
49.	Sumber Torong Sisir 1	Sisir	Batu	52	23
50.	Sumber Torong Sisir 2	Sisir	Batu	2	2
51.	Sumber Tenggulun	Temas	Batu	27	24
52.	Sumber Genengan	Temas	Batu	40	35
53.	Sumber Reco	Temas	Batu	5	4
54.	Sumber Jurangrejo	Beji	Junrejo	50	40
55.	Sumber Jambe	Beji	Junrejo	6	5
56.	Sumber Ngantak	Beji	Junrejo	7	5
57.	Sumber Sukanton	Mojorejo	Junrejo	6	5
58.	Sumber Dok	Mojorejo	Junrejo	8	6
59.	Sumber Jeding 1 dan 2	Junrejo	Junrejo	8	6
60.	Sumber Kasinan	Junrejo	Junrejo	50	40
61.	Sumber Tempur 1 dan 2	Junrejo	Junrejo	10	7
62.	Sumber Pereng Gedek	Tlekung	Junrejo	10	8
63.	Sumber Urip	Tlekung	Junrejo	8	6
64.	Sumber Pandan	Tlekung	Junrejo	7	5
65.	Sumber Kembang	Tlekung	Junrejo	8	6
66.	Sumber Cinde	Bumiaji	Bumiaji	69	56
67.	Sumber Bakgede	Bumiaji	Bumiaji	30	26
68.	Sumber Areng - areng	Bumiaji	Bumiaji	89	70
69.	Sumber Ketohan	Bumiaji	Bumiaji	38	29
70.	Sumber Torongmiri	Bumiaji	Bumiaji	35	30
71.	Sumber Binangun	Bumiaji	Bumiaji	190	180
72.	Sumber Miringngampel	Bumiaji	Bumiaji	33	29
73.	Sumber Bungkaji	Bumiaji	Bumiaji	5	3
74.	Sumber Wuluh/Curah Kerikil	Bumiaji	Bumiaji	5	2
75.	Sumber Royan	Pandanrejo	Bumiaji	3	28
76.	Sumber Dandang 2	Gripurno	Bumiaji	30	24
77.	Sumber Bendo	Gripurno	Bumiaji	33	7
78.	Sumber Slayur/Kian	Gripurno	Bumiaji	10	25
79.	Sumber Kerto	Gripurno	Bumiaji	30	1
80.	Sumber Kuriah	Gripurno	Bumiaji	3	3
81.	Sumber Gambiran	Gripurno	Bumiaji	6	4
82.	Sumber Andong	Oro-oro ombo	Batu	50	40
83.	Sumber Darmi	Oro-oro ombo	Batu	120	90

Sumber : Dinas Pengairan dan Binamarga

Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Mata air yang ada di Kota Batu dan beberapa potensi sumber mata air tersebut dimanfaatkan untuk PDAM, dimana masing-masing mata air tersebut melayani desa/ kelurahan tertentu dengan sistem gravitasi, antara lain :

1. Mata air Darmi melayani Desa Oro-oro Ombo, Ngaglik dan Temas dengan debit terpasang 19 liter/detik.
2. Mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Ngaglik, Sisir dan Temas dengan debit terpasang 52 liter/detik.

3. Mata air Gemulo melayani 3 desa Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo dan Desa Torongrejo serta melayani sebagian Desa Beji dan Desa Mojorejo.
 - Gemulo I
Penangkapan air dari Mata Air Gemulo I didistribusikan ke sebagian Desa Sisir.
 - Gemulo II
Penangkapan air dari Mata Air Gemulo II untuk melayani Desa Pandanrejo.
 - Gemulo III
Penangkapan air dari Mata Air Gemulo III untuk melayani Desa Beji, Desa Temas, Desa Mojorejo dan Desa Sisir.Sehingga debit total yang diambil dari Mata Air Gemulo adalah 50 lt/dt.
4. Mata air Torong Belok melayani Desa Songgokerto dan Pesanggrahan dengan debit 6 liter/detik.
5. Mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan dengan debit terpasang 8 liter/detik.
6. Mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo, Sabtean dan Jl.Panglima Sudirman dengan total debit terpasang 25 liter/detik.
 - Sumber Ngesong 1 melayani Desa Sumberejo dan Desa Sabtean.
 - Sumber Ngesong 2 melayani daerah Jl. Panglima Sudirman.
7. Sumber Cemoro Kandang melayani Panderman Hill dengan debit terpasang 2,5 liter/detik.

Secara keseluruhan, Kota Batu memiliki jumlah mata air sebanyak 111 sumber mata air. Sumber-sumber ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Selanjutnya sumber mata air pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lokasi sumber air tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.5
Sumber Mata Air Di Wilayah Kecamatan Bumiaji
Tahun 2011

Desa/ Kelurahan	Sumber Mata Air
Desa Tulung Rejo	Sumber Cangar
	Sumber Nget
	Sumber Janin
	Sumber Brantas I
	Sumber Brantas II
	Sumber Brantas III
	Sumber Sri Rejeki
	Sumber Biru
	Sumber Kromo
	Sumber Ladongkol
Desa Sumber Gondo	Sumber Krecek
	Sumber Sari
Desa Punten	Sumber Umbulan
	Sumber Banyuning
	Sumber Lahdengkol
	Sumber Ngesong I
	Sumber Ngesong II
	Sumber Ngesong III
	Sumber Dompjong
Desa Bumi Aji	Sumber Brugang
	Sumber Cinde
	Sumber Tlogo
	Sumber Krembug
	Sumber Bakgede
	Sumber Binangun
Desa Giri Purno	Sumber Kajar
	Sumber Soyi
	Sumber Umbul
	Sumber Areng-Areng
	Sumber Marijan
	Sumber Dalem
	Sumber Koriyah
	Sumber Di'i
	Sumber Telembung
Desa Pandan Rejo	Sumber Kijang
	Sumber Ketohan
	Sumber Dawuan
	Sumber Sabranggondo
	Sumber Dandang
	Sumber Kajar
	Sumber Telogotowo
	Sumber Sari
	Sumber Dadapan
	Sumber Ngujung



Desa/ Kelurahan	Sumber Mata Air
Desa Gunung Sari	Sumber Grinsing
	Sumber Petungkobong
	Sumber Bletok
	Sumber Pleteng

Sumber : Dinas Pengairan dan Binamarga

Tabel 2.6
Sumber Mata Air di Wilayah Kecamatan Junrejo
Tahun 2011

Desa/ Kelurahan	Sumber Mata Air
Desa Torong Rejo	Sumber Watusaron
	Sumber Kanapi
Desa Dadap Rejo	Sumber Simpan Areng-Areng
Desa Tlekung	Sumber Urip
	Sumber Parang Ghedek
	Sumber Pandan
	Sumber Bendo
	Sumber Ampu
Desa Junrejo	Sumber Dandang
	Sumber Kembang
	Sumber Kali Jeding
	Sumber Dok
	Sumber Gondok
	Sumber Bendo
	Sumber Kilah
Desa Beji	Sumber Terong Gede
	Sumber Kali Jiwa
	Sumber Blik Bseduk
	Sumber Beji
	Sumber Belik Keramat

Sumber : Dinas Pengairan dan Binamarga

Tabel 2.7.
Sumber Mata Air di Wilayah Kecamatan Batu
Tahun 2011

Desa/ Kelurahan	Sumber Mata Air
Kelurahan Ngaglik	Sumber Yasan
	Sumber Beliktanjung
	Sumber Beliciduk
	Sumber Belikitri
Kelurahan Temas	Sumber Genting
	Sumber Wunut
	Sumber Tulus
	Sumber Cobantrenggolan
	Sumber Torongtubo
	Sumber Ceprik
	Sumber Ledok
	Sumber Kedungkandang



Desa/ Kelurahan	Sumber Mata Air
	Sumber Kalireco
	Sumber Kampungteh
Kelurahan Songgokerto	Sumber Torongdadak
	Sumber Torongbelok
	Sumber Pedem
	Sumber Belik
	Sumber Pinkan
	Sumber Kauman
	Sumber Torong I
	Sumber Torong II
	Sumber Torong III
Desa Pesanggarahan	Sumber Belik Tanjung
	Sumber Belik Belut
	Sumber Kasinan
	Sumber Seruk
	Sumber Karang Wlico
Desa Oro-oro Ombo	Sumber Andong
	Sumber Gondorejo
Desa Sumberejo	Sumber Ledong
	Sumber Njobok
	Sumber Kasin
Desa Sidomulyo	Sumber Dholo

Sumber : Dinas Pengairan dan Binamarga

2.1.6. Klimatologi

2.1.6.1. Tipe

Adapun Kota Batu memiliki 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011, musim hujan dimulai pada bulan September dan diakhiri bulan Juni.

2.1.6.2. Curah Hujan

Rata-rata curah hujan pada tahun 2011 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso rata-rata hujan sebanyak 103 hari dan berkisar 122,04 mm/tahun. Untuk lebih jelasnya curah hujan di wilayah Kota Batu lihat pada tabel berikut:



Tabel 2.8
Rata-Rata Curah Hujan di Kota Batu
Tahun 2010-2011

Bulan	Hari Hujan		Curah Hujan	
	2010	2011	2010	2011
Januari	25	15	395	121
Februari	23	6	371,5	66
Maret	14	14	236	181
April	21	13	448	255
Mei	16	9	172	183
Juni	4	3	15	15,5
Juli	2	2	17,5	10
Agustus	9	-	114	-
September	9	-	199	-
Oktober	16	4	263	43
November	11	17	194	411
Desember	21	20	308	181

Sumber : Badan Meterologi Klimatologi & Geofisika Stasiun Klimatologi, Karangploso

2.1.6.3. Suhu

Kota Batu merupakan daerah pegunungan dengan hawa dingin dengan temperatur udara pada tahun 2011 rata-rata antara 20,0°C hingga 27,8 °C. Kecenderungan perkembangan suhu di wilayah Kota Batu dari tahun ke tahun terus meningkat akibat pengaruh global warming. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.9
Temperatur Udara Dirinci Menurut Bulan
Tahun 2011

Bulan	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Januari	19,6	26,1	22,3
Februari	19,6	26,6	22,7
Maret	19,6	26,3	22,0
April	20,0	26,2	22,1
Mei	19,4	26,1	21,8
Juni	17,9	25,2	20,7
Juli	18,4	25,4	20,8
Agustus	18,8	25,5	20,1
September	17,9	26,5	21,3
Oktober	18,5	27,8	22,2
November	20,0	26,7	22,2
Desember	20,0	26,7	22,2

Sumber : Badan Meterologi Klimatologi & Geofisika Stasiun Klimatologi, Karangploso

2.1.6.4. Kelembaban

Tingkat kelembaban udara di wilayah Kota Batu berkisar antara 35% (minimum) pada bulan Juli dan yang tertinggi pada bulan Maret sebesar 99% (maksimum).



Tabel 2.10
Lembah Nisbi Udara Dirinci Menurut Bulan
Tahun 2011

Bulan	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Januari	48	96	76
Februari	54	98	77
Maret	51	99	81
April	42	98	81
Mei	51	97	81
Juni	46	94	75
Juli	49	92	73
Agustus	37	98	70
September	38	98	72
Oktober	35	98	74
November	47	99	80
Desember	47	99	80

Sumber : Badan Meterologi Klimatologi & Geofisika Stasiun Klimatologi, Karangploso

2.1.7. Penggunaan Lahan

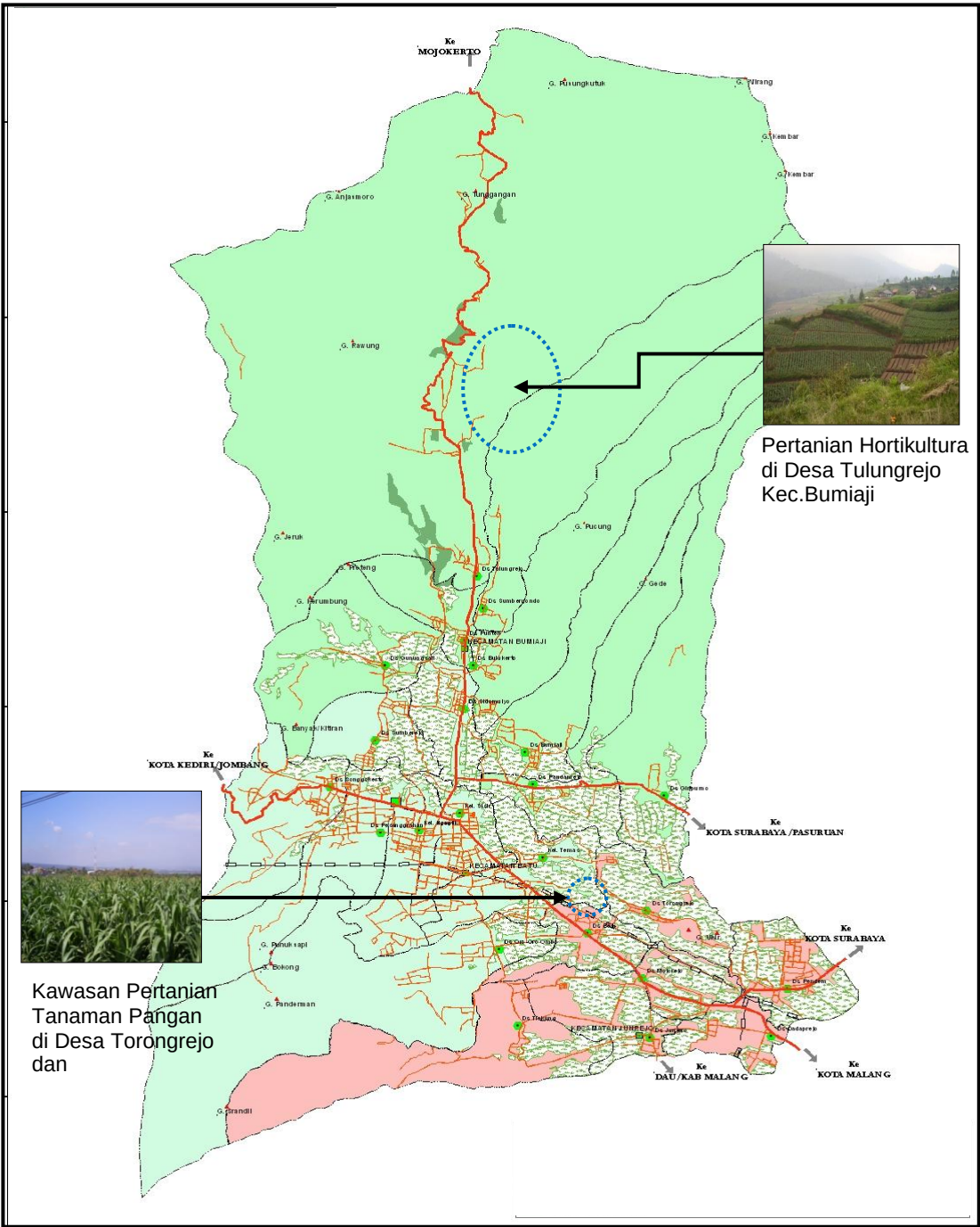
2.1.7.1. Kawasan Budidaya

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan peruntukkan hutan produksi berfungsi sebagai hutan yang dibudidayakan untuk diambil hasil hutan yang berupa kayu. Luas kawasan peruntukkan hutan produksi di Kota Batu adalah sebesar 3288,00 Ha menyebar di seluruh kecamatan, kecamatan yang memiliki peruntukkan hutan produksi terluas adalah Kecamatan Bumiaji sebesar 2245,20 Ha, selanjutnya Kecamatan Batu sebesar 776, 20 Ha dan yang terakhir adalah Kecamatan Junrejo sebesar 266, 60 Ha.

B. Kawasan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai nilai strategis dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota sebab sektor ini masih dominan dan mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar. Pada tahun 2011, jumlah lahan tanah sawah di Kota Batu seluas 2.516 Ha dengan rincian 1.923 Ha perairan teknis, 556 Ha perairan setengah teknis dan 37 Ha perairan sederhana. Hasil pertanian di Kota Batu memiliki potensi yang beraneka ragam baik komoditi maupun produksinya. Komoditi yang banyak dihasilkan adalah tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan dan sayuran serta tanaman hias. Untuk lebih jelasnya lihat peta 2.3 dan tabel 2.11.



PEMERINTAH KOTA BATU

PETA : 2.4
POLA PERSEBARAN KAWASAN
PERTANIAN KOTA BATU

LEGENDA

KANTOR WALIKOTA	KOLEKTOR SEKUNDER	BATAS DESA/KELURAHAN
KANTOR KECAMATAN	LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN BATU
KANTOR DESA	JARINGAN SUTT	KECAMATAN BUMIAJI
SAWAH IRIGASI	SUNGAI	KECAMATAN JUNREJO
SAWAH TADAH HUJAN		



Tabel 2.11
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan

Kecamatan	Teknis (Ha)	1/2 Teknis (Ha)	Sederhana (Ha)	Jumlah
Batu	441	146	7	594
Junrejo	833	265	10	1.108
Bumiaji	649	145	20	814
Kota Batu	1.923	556	37	2.516

Sumber: Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012

C. Industri

Sektor industri adalah sektor yang mampu menggambarkan laju perekonomian suatu daerah, dimana pertumbuhan industri menjadi indikasi tumbuhnya suatu wilayah sebagai sentra produksi yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan tingkat pendapatan penduduk. Jenis industri di Kota Batu meliputi industri formal dan industri non formal. Jumlah unit usaha industri formal sebanyak 93 unit dengan tenaga kerja sebanyak 409 tenaga kerja, sedangkan jumlah unit usaha industry non formal sebanyak 15 unit dengan tenaga kerja sebanyak 45 jiwa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.12
Keadaan Industri Menurut Kelompok Industri
Tahun 2011

Kelompok Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Juta Rp.)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
Industri Formal	93	409	4.733,27	16.829,15
Industri Non Formal	15	45	37,00	58,00
Kota Batu	108	454	4.770,27	16.887,15

Sumber: Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012

D. Pariwisata

Wilayah Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama yang indah dan sejuk serta mempunyai spesifikasi khusus yaitu dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, Gunung Bokong sehingga wilayah ini berpotensi sebagai daerah wisata.

a. Jenis Wisata

Jenis wisata di Kota Batu meliputi wisata agro dan wisata bunga, wisata alam, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus, wisata sejarah, wisata religi, wisata ziarah, wisata husada dan wisata kuliner.

1. Wisata Agro dan Wisata Bunga

Kota Batu memiliki ciri khas dengan agro wisatanya berupa tanaman bunga, apel, stroberi dan sayur mayur. Berikut obyek wisata agro dan bunga di Kota Batu :

- Kusuma Agrowisata
- Wisata Agro Punten
- Wisata Bunga Sidomulyo

2. Wisata Alam

Kondisi geografis Kota Batu yang dikelilingi dengan pegunungan dengan udara yang sejuk sangat cocok untuk berwisata alam. Bagi wisatawan yang ingin melepaskan kepenatan ataupun berefreshing dapat melakukan aktivitas wisata sambil menikmati keindahan alam Kota Batu. Berikut obyek wisata alam di Kota Batu :

- Pemandian Air Panas Cangar
- Pemandian Air Panas Songgoriti
- Camping Ground.
- TAHURA (Taman Hutan Raya) Junggo
- Camping Ground
- Air Terjun Coban Talun
- Air Terjun Coban Rais

3. Wisata Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota Batu, kebudayaan tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya yang dipegang teguh masyarakatnya. Adapun keindahan tradisi budaya Batu dapat dilihat pada atraksi wisata berikut :

- Sedekah Bumi
- Grebeg Desa
- Tari Sembrama
- Maulud Nabi Muhammad SAW
- Dokar Wisata

4. Wisata Rekreasi

Di wilayah Kota Batu telah dibangun tempat-tempat rekreasi wisata pendidikan dan keluarga untuk menambah daya tarik wisata di Kota Batu. Berikut obyek wisata rekreasi di Kota Batu.

- Jatim Park I
- Jatim Park II
- BNS
- Kawasan Wisata Songgoriti
- Wisata Selecta
- Tirta Nirwana
- Eco Green
- Alun-Alun Kota Batu
- Dan lain sebagainya

5. Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata yang diselenggarakan dengan tema khusus seperti olahraga paralayang, arung jeram dan *mountain bike*. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dan ingin menguji adrenalin dapat berkunjung ke obyek wisata berikut :

- Wisata Paralayang (Aero Tourism)
- Wisata Arung Jeram
- Wisata Sepeda Gunung, Downhill.
- Wisata Bumi Perkemahan

6. Wisata Sejarah

Wisata sejarah yang ada di Kota Batu berupa situs peninggalan bangunan candi, rumah peristirahatan dan goa jaman Jepang. Berikut obyek wisata sejarah yang ada di Kota Batu.

- Candi Supo Songgoriti
- Patung Ganesha
- Makam Tuan Denger
- Wisma Bima Sakti Selekt
- Kartika Wijaya (Heritage Hotel)
- Goa Jepang Cangar
- Goa Jepang Tlekung

7. Wisata Religi

Wisata religi merupakan salah satu obyek daya tarik wisata mengenai seni arsitektur bangunan tempat peribadatan agama di Kota Batu. Keberadaan bangunan dan tempat beribadah di Kota Batu begitu terawat dan terjaga sehingga menarik sebagai tempat wisata. Berikut tempat yang dapat dijadikan sebagai wisata religi di Kota Batu.

- Masjid An-Nur
- Gereja Tua Jago
- Vihara Budha Kertarajasa
- Klenteng Dewi Kwam Im Thong

8. Wisata Ziarah

Wisata ziarah merupakan obyek wisata bagi wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisata ziarah. Berikut tempat yang ada di Kota Batu dan dijadikan sebagai tempat wisata ziarah

- Makam Pesarehan Mbah Wastu terletak di Bumiaji merupakan cikal bakal nama Kota Batu.
- Makam Pesarehan Mbah Pathok terdapat di wilayah Songgoriti yang konon Mbah Pathok membuka wilayah/ babat alas daerah Songgoriti.

9. Wisata Husada

Wisata husada merupakan wisata yang sangat diminati bagi para wisatawan khususnya bagi mereka yang sangat mengagumi tanaman obat herbal seperti kunir, jahe, temu lawak dll (tanaman toga). Wisata tersebut dapat dijumpai di Balai Materia Medika.

10. Wisata Kuliner

Wisata kuliner merupakan wisata dengan daya tarik beraneka ragam makanan yang dijual bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Di Kota Batu terdapat restoran dan rumah makan yang menjual aneka makanan.

b. Sarana Akomodasi Wisata

Potensi obyek wisata yang ada di Kota Batu juga didukung oleh adanya kelengkapan sarana wisata yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kota Batu. Sarana akomodasi merupakan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata lebih dari 24 jam. Berikut sarana akomodasi yang ada di Kota Batu berdasarkan klasifikasi hotel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

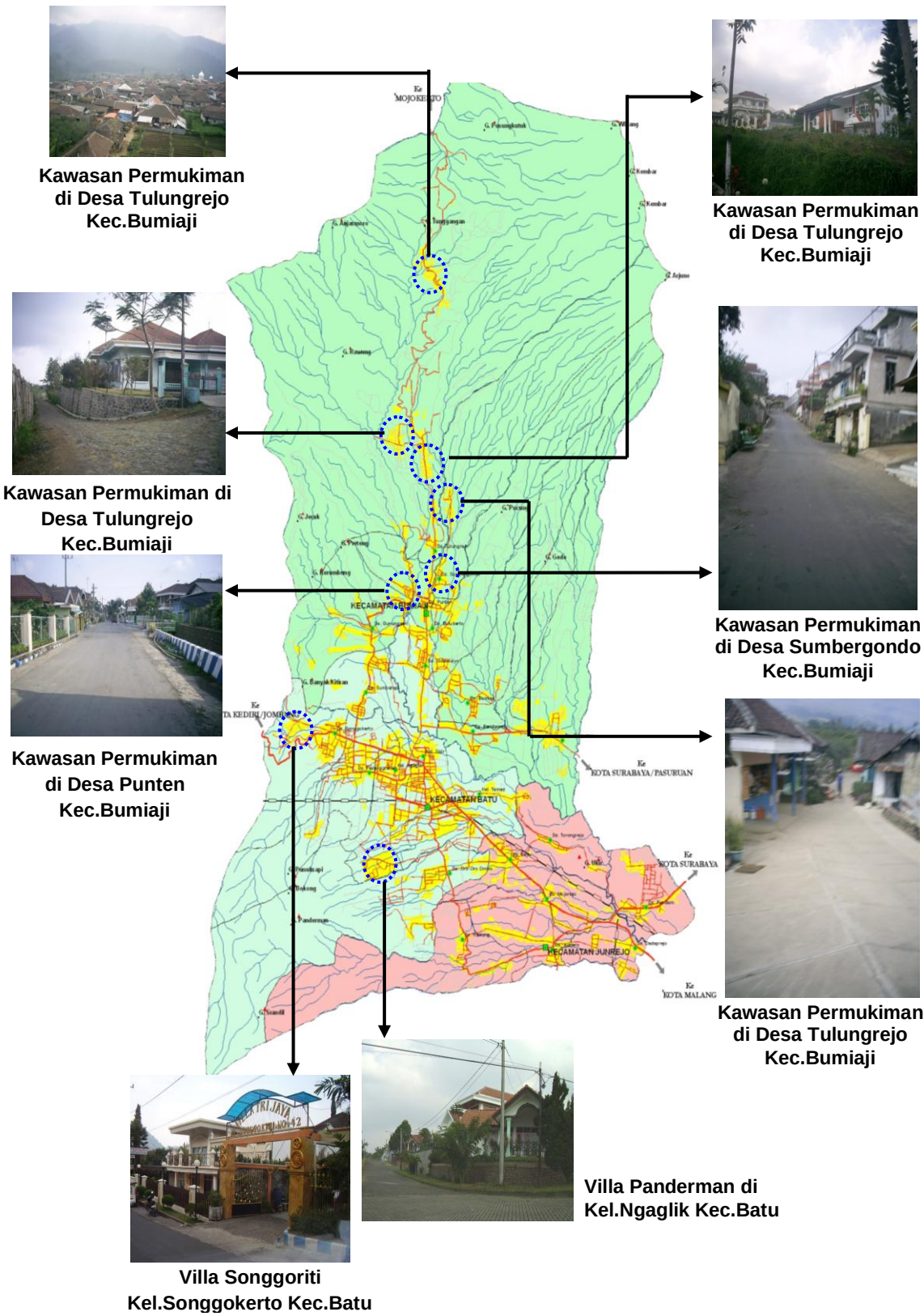
E. Permukiman

Pola persebaran kawasan permukiman di wilayah Kota Batu merata diseluruh wilayah Kota Batu. Keberadaan bangunan permukiman terus mengalami pertumbuhan, baik rumah alami yang dikembangkan oleh



penduduk sendiri maupun rumah yang dikembangkan oleh pengembangan.

Gambar 2.2
Persebaran Kawasan Permukiman Kota Batu





F. Fasilitas dan Sarana Prasarana Pendukung

Selain kawasan budidaya sebagaimana tersebut diatas juga terdapat fasilitas dan sarana prasarana pendukung perkotaan lainnya dengan pola persebaran merata di seluru wilayah Kota Batu.

a. Fasilitas

Fasilitas yang ada di Kota Batu antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, tempat peribadatan, perdagangan-jasa dan lain sebagainya.

b. Sarana dan prasarana pendukung

Sarana prasarana pendukung antara lain berupa terminal, jalan dan lain sebagainya.

2.1.7.2. Kawasan Lindung

A. Kawasan Perlindungan Bawahannya

Kawasan hutan lindung berfungsi memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan tidak dapat dialihkan peruntukannya. Adapun luas kawasan hutan lindung di Kota Batu adalah sebesar 5197,40 hektar menyebar di seluruh kecamatan, kecamatan yang memiliki hutan lindung terluas adalah kecamatan Bumiaji yaitu 3674,40 hektar, selanjutnya Kecamatan Junrejo sebesar 810,20 hektar dan yang terakhir Kecamatan Batu sebesar 622,80 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Luas Hutan Lindung di Kota Batu
Tahun 2011

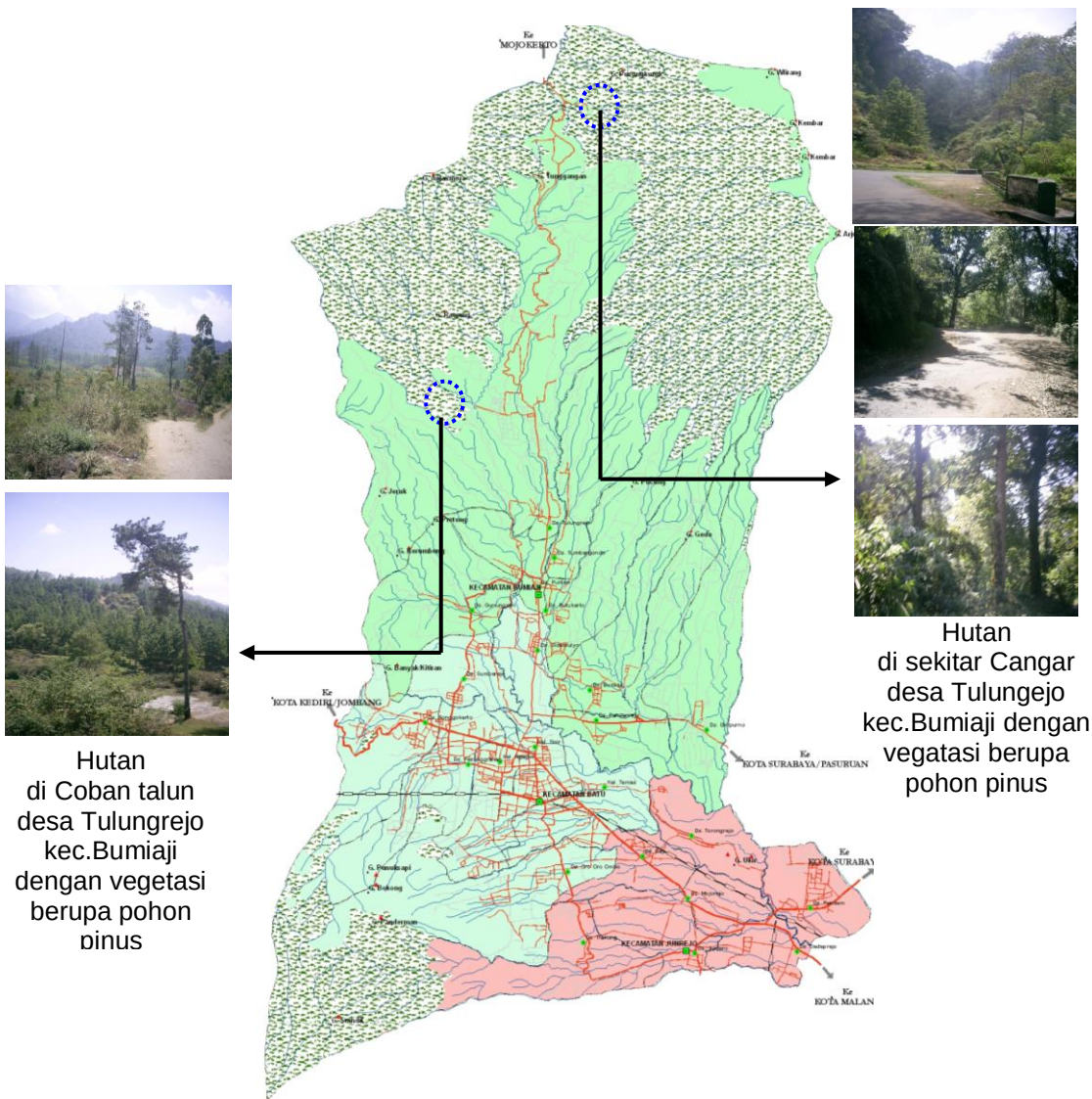
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Luas Lahan Hutan Lindung (Ha)
Kecamatan Bumiaji		
1	Tulungrejo	2649.20
2	Sumbergondo	46.50
3	Bumiaji	-
4	Pandanrejo	-
5	Punten	200.80
6	Bulukerto	219.10
7	Gunungsari	304.10
8	Giripurno	344.70
Jumlah		3764.40
Kecamatan Batu		
1	Sisir	-
2	Ngaglik	-
3	Temas	-
4	Oro-oro Ombo	203.80
5	Pesanggrahan	297.20
6	Songgokerto	80.50



No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Luas Lahan Hutan Lindung (Ha)
7	Sumberejo	41.30
8	Sidomulyo	-
Jumlah		622.80
Kecamatan Junrejo		
1	Tlekung	810.20
2	Junrejo	-
3	Mojerejo	-
4	Beji	-
5	Torongrejo	-
6	Pendem	-
7	Dadaprejo	-
Jumlah		810.20

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

Gambar 2.3
Lokasi Persebaran Kawasan Hutan di Kota Batu





B. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/ jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan dan dalam pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman. Perwujudan ruang terbuka hijau di Kota Batu berupa taman, lapangan olahraga, alun-alun, makam, boulevard dan jalur hijau sepanjang tepi sungai atau saluran serta taman-taman tempat rekreasi. Persebaran ruang terbuka hijau di Kota Batu secara umum berada diseluruh wilayah Kecamatan dengan wujud yang sebagian besar berupa taman, lapangan olah raga dan makam. Untuk ruang terbuka hijau jenis taman, sebagian besar terdapat di lingkungan permukiman dan sebagian lagi berada di ujung dan pertemuan dari jalan-jalan raya. Dari segi pemanfaatannya ruang terbuka hijau di Kota Batu selain sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan juga sebagian dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga baik pada skala lingkungan maupun kota, disamping itu ada juga yang bersifat khusus seperti jalur hijau dan fasilitas taman yang ada di perumahan atau yang ada di sekitar kawasan hotel dan tempat rekreasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.14
Data Taman di Kota Batu
Tahun 2011

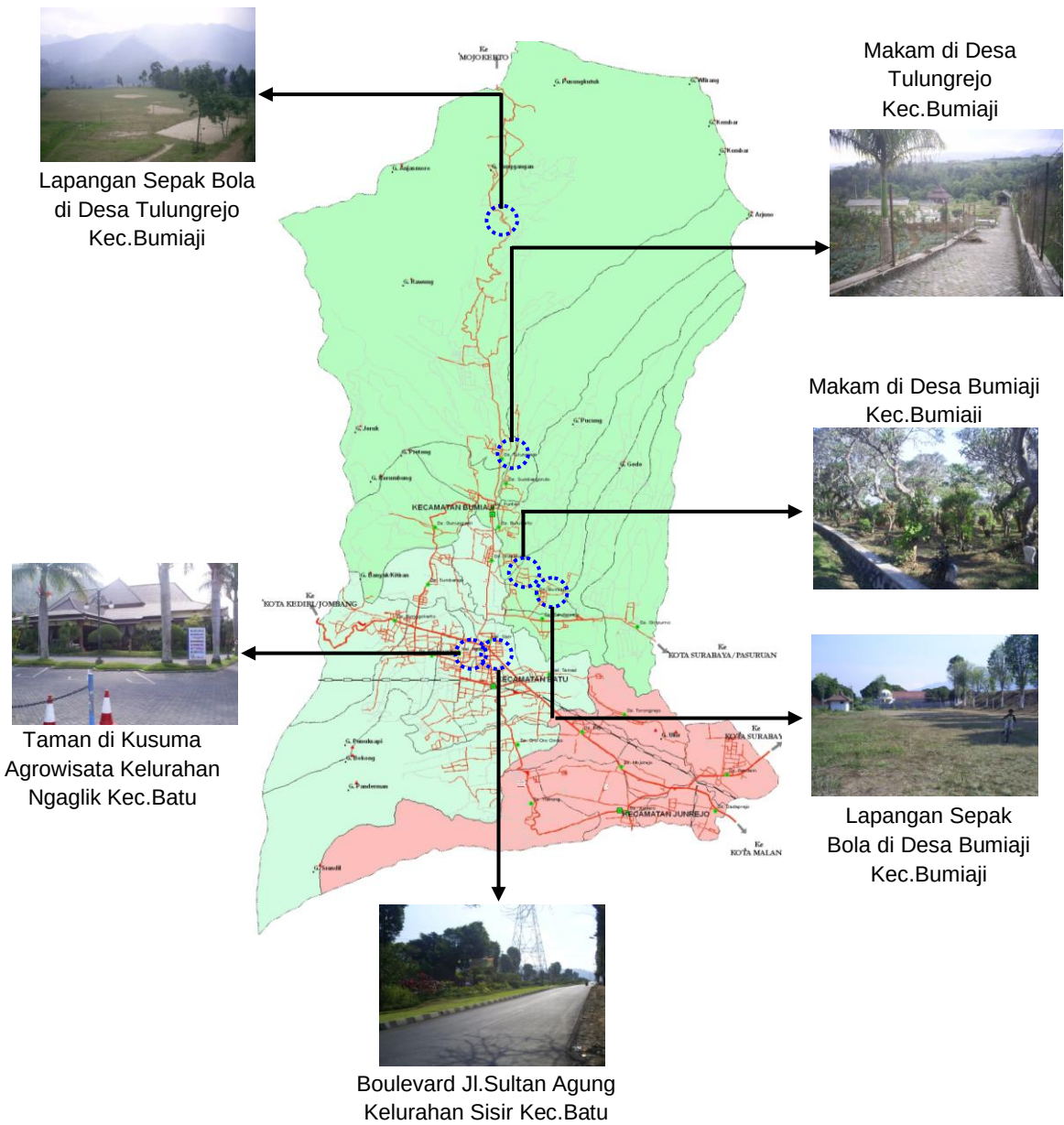
No	Prasarana	Luas (M ²)	Jenis Taman	Lokasi
1	Taman Plaza Batu (Alun-alun)	3.963,4 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
2	Taman JL. Sultan Agung	12.405,93 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir/ Ngaglik
3	Taman JL. Kasiman	630 m ²	Taman Lingkungan	Kel. Sisir
4	Taman JL. Imam Bonjol	317,64 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
5	Taman JL. Diran	193 m ²		Kel. Sisir
6	Taman JL. Gajah Mada (Samping Masjid An-Nur)	264 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
7	Taman Jalur Hijau JL. Gajah Mada	336 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
8	Taman Adipura	25,8 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
9	Taman Tugu Apel	214 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
10	Taman Gerbang Pendem	680 m ²	Taman Kota	Desa Pendem, Kec. Junrejo
11	Taman Ganesha	90,3 m ²	Taman Kota	Kel. Sisir
12	Taman Kantor Walikota	600 m ²	Taman Perkantoran	Desa Pesanggrahan
13	Taman JL. Indragiri	917 m ²		
14	Taman Jalur Hijau JL. Dewi	534,75 m ²	Taman Kota	Kel. Temas



No	Prasarana	Luas (M ²)	Jenis Taman	Lokasi
	Sartika			
15	Taman Batas Kota (Gerbang Dadaprejo)	Ds. Areng-Areng	Taman Kota	Kec. Junrejo
16	Taman Gabes	239,15 m ²	Taman Kota	
17	Taman JL. Mawar	168 m ²	Taman Lingkungan	Desa Pesanggrahan

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.

Gambar 2.4
Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu



2. Taman Hutan Raya



Kawasan Hutan Arjuno Lalijiwo ditetapkan sebagai TAHURA R. Soeryo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 1128/Kpts-II/1992 tanggal 19 September 1992 dengan luas 25.000 Ha. Sedangkan pembangunannya ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992. Peresmian TAHURA R. Soeryo dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pekan Penghijauan Nasional di Propinsi Sulawesi Utara pada tanggal 19 Desember 1992. Tahura R. Soeryo secara administrasi pemerintahan terletak di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Pengelolaan kawasan berada pada Resort KSDA Lalijiwo Barat, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jatim I, Balai KSDA IV, Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Adapun keadaan flora dan kawasan TAHURA R. Soeryo didominasi tumbuhan jenis : Cemara (*Casuarina junghuniana*), Saren (*Toenasureni*), Pasang (*Quercus lincata*), Kemelindingan gunung (*Mycura javabica*) dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti Padi-padian (*Sarghum vitidumvaki*). Fauna yang terdapat di dalam kawasan TAHURA R. Soeryo antara lain adalah Rusa (*Cerous timorensis*), Kijang (*Muntiacus muncak*), Babi hutan (*Sus Srofa*), Kera abu-abu (*Macaca fascicuis*), Budeng (*Presbytis cristata*) dan berbagai jenis burung seperti Tekukur dan Kerenda.

Tahura R. Soeryo memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi selain flora dan fauna serta pemandangan alam yang indah pada kawasan tersebut terdapat juga tempat pemandian sumber air panas, Arboretum Cangar yaitu tempat koleksi tanaman langka, Arboretum Sumber Brantas, Gua Jepang, Petapaan Abiyoso, Padang Rumput Lalijiwo, Pondok Welirang, Puncak Welirang dan Petapaan Indrokilo. Beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan diantaranya : lintas alam, menikmati pemandangan alam pegunungan, berkemah, mandi air panas dan lain-lain. Beberapa fasilitas yang dapat mendukung kegiatan wisata alam di Tahura R. Soeryo adalah : jalan masuk, pos jaga, pondok wisata, pendopo, pusat informasi, kantor pengelola, pondok kerja, MCK dan jalan setapak. Kawasan TAHURA



R. Soeryo dapat dikunjungi dengan mudah dari kota Surabaya, Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang

3. Taman Wisata Alam

Batu memiliki banyak objek wisata alam yang menarik. Diantaranya Taman Wisata Seleкта. Objek wisata andalan Batu yang menyediakan arena bermain, berenang, sepeda air dan ekowisata berupa hutan pinus. Sebagai daerah penghasil utama apel, Batu juga memiliki tempat agrowisata di Kusuma Agrowisata. Di tempat ini, pengunjung bisa memanen sendiri apel dan strawbery dari kebun lalu menikmati kesegarannya.

Selain itu bisa dinikmati hawa dingin pegunungan di berbagai objek wisata yang tersebar di daerah pinggiran Kota Batu. Sebut saja Pemandian Air Panas Songgoriti, Pemandian Air Panas Cangar, Air Terjun Coban Rondo, Coban Rais, Coban Talun, serta Coban Banteng. Ada pula objek wisata sejarah seperti Candi Renggo, Patung Ganesha, dan Junggo. Untuk kegiatan ekstrim, Gunung Panderman, Banyak, dan Arjuno, serta gua di Cangar dan Tlekung menawarkan keekstremanya masing-masing melalui kegiatan mountain hiking, caving serta olahraga Paralayang dan ATV riding.

Tabel 2.15
Penggunaan Lahan Kota Batu
Tahun 2011

Kecamatan	Sawah	Pekarangan	Tegal/ Kebun	Hutan	Lain-lain	Jumlah
1. Batu	594,00	530,04	772,56	1.105,00	1.544,21	4.545,81
2. Junrejo	1.108,00	259,74	527,37	412,01	257,90	2.565,02
3. Bumiaji	814,00	799,68	1.253,81	6.682,30	3.248,10	12.797,89
Kota Batu	2.516,00	1.589,46	2.553,74	8.199,31	5.050,21	19.908,72

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kota Batu secara geografis berada di daerah pegunungan dengan kondisi alam yang sejuk. Berdasarkan kondisi tersebut, maka potensi utama wilayah Kota Batu yaitu pada sektor kehutanan, pertanian dan pariwisata. Luas wilayah hutan di Kota Batu yaitu sekitar 52% dari luas wilayah dengan fungsi utama sebagai wilayah yang melindungi wilayah bawahannya. Sedangkan untuk sektor pertanian yaitu berupa perkebunan apel, tanaman hortikultura, maupun tanaman pangan. Sektor pariwisata saat



ini merupakan sektor unggulan yang terus berkembang dan merusakkan salah satu tujuan wisata Jawa Timur.

2.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Mengingat wilayah Kota Batu merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan, maka sebagian besar wilayahnya rawan bencana, khususnya bahaya tanah longsong dan banjir bandang pada DAS Brantas Hulu. Untuk kejadian bencana di wilayah Kota Batu pada tahun 2011 lihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Kejadian Bencana Di Wilayah Kota Batu
Tahun 2011

Jenis Bencana	Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Korban Jiwa	Kerugian Harta (Rp.)
Longsor	Desa Toyomerto	30 Maret 2011	-	-
Angin Kencang	Kecamatan Batu	12 Januari 2011	-	-
	Kecamatan Junrejo			
	Kecamatan Bumiaji			
Kebakaran Hutan	Gunung Panderman	14 Oktober 2011	-	-

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.



Tabel.2.17
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2011
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kota Batu

No	Uraian	Tahun							
		2008		2009		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	260.734,94	20,94	276.609,23	20,77	291.877,84	20,38	306.163,18	19,79
2	Pertambangan & Penggalian	2.862,80	0,23	3.024,26	0,23	3.223,58	0,23	3.417,00	0,22
3	Industri Pengolahan	92.800,24	7,45	97.984,13	7,36	104.082,34	7,27	110.355	7,13
4	Listrik, Gas & Air bersih	18.688,04	1,50	20.357,01	1,53	22.178,68	1,55	24.148,01	1,56
5	Konstruksi	18.369,29	1,48	20.655,02	1,55	23.261,36	1,62	26.514,25	1,71
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	576.043,60	46,27	616.184,16	46,26	668.027,72	46,64	729.736,87	47,16
7	Pengangkutan & Komunikasi	44.790,82	3,60	48.009,81	3,60	51.695,08	3,61	56.363,52	3,64
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	56.294,06	4,52	60.108,19	4,51	65.405,56	4,57	71.027,65	4,59
9	Jasa-jasa	174.362,75	14,01	189.060,80	14,19	202.441,74	14,14	219.661,37	14,20
PDRB		1.244.946,54	100,00	1.331.992,60	100,00	1.432.193,90	100,00	1.547.387,28	100,00

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

Tabel. 2.18
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2011
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012
Kota Batu

No	Uraian	Tahun							
		2008		2009		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	490.871,98	19,44	531.163,35	18,63	590.056,43	18,12	660.771,82	17,87
2	Pertambangan & Penggalian	5.590,48	0,22	6.093.59	0,21	6.798,54	0,21	7.546,38	0,20
3	Industri Pengolahan	183.113,25	7,25	200.089,42	7,02	219.595,87	6,74	239.919,79	6,49
4	Listrik, Gas & Air bersih	38.522,87	1,53	42.447,96	1,49	47.014,29	1,44	51.660,36	1,40
5	Konstruksi	42.181,41	1,67	49.774,12	1,75	61.965,45	1,90	74.296,58	2,01
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.179.491,92	46,72	1.360.959,46	47,72	1.578.555,55	48,48	1.812.300,72	49,01
7	Pengangkutan & Komunikasi	92.205,27	3,65	102.468,73	3,59	113.495,57	3,49	124.971,05	3,38
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	102.800,17	4,07	114.603,63	4,02	127.881,73	3,93	144.356,85	3,90
9	Jasa-jasa	389.773,28	15,44	444.089,72	15,57	510.401,61	15,68	581.955,12	15,74
PDRB		2.524.551,63	100,00	2.551.689,98	100,00	3.255.765,04	100,00	3.697.778,68	100,00

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

Tabel 2.19
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2011
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 dan Harga Berlaku (Hb)
Kota Batu Tahun 2012

No	Uraian	Tahun							
		2008		2009		2010		2011	
		Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)
1	Pertanian	20,94	19,44	20,77	18,63	20,38	18,12	19,79	17,87
2	Pertambangan & Penggalian	0,23	0,22	0,23	0,21	0,23	0,21	0,22	0,20
3	Industri Pengolahan	7,45	7,25	7,36	7,02	7,27	6,74	7,13	6,49
4	Listrik, Gas & Air bersih	1,50	1,53	1,53	1,49	1,55	1,44	1,56	1,40
5	Konstruksi	1,48	1,67	1,55	1,75	1,62	1,90	1,71	2,01
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	46,27	46,72	46,26	47,72	46,64	48,48	47,16	49,01



7	Pengangkutan & Komunikasi	3,60	3,65	3,60	3,59	3,61	3,49	3,64	3,38
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	4,52	4,07	4,51	4,02	4,57	3,93	4,59	3,90
9	Jasa-jasa	14,01	15,44	14,19	15,57	14,14	15,68	14,20	15,74
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 2.20
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Harga Berlaku (Hb)
Kota Batu Tahun 2011

No.	Uraian	Pertumbuhan	
		Hk (%)	Hb (%)
1	Pertanian	19,79	17,87
2	Pertambangan & Penggalian	0,22	0,20
3	Industri Pengolahan	7,13	6,49
4	Listrik, Gas & Air bersih	1,56	1,40
5	Konstruksi	1,71	2,01
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	47,16	49,01
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,64	3,38
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	4,59	3,90
9	Jasa-jasa	14,20	15,74
	PDRB	100,00	100,00

Sumber: Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kota Batu merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan.

Tingkat inflasi Kota Batu selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang diukur dengan indeks implisit PDRB mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2008 inflasi sebesar 9,53 persen, tahun 2009 inflasi sebesar 5,82 persen, inflasi tahun 2010 sebesar 6,18 persen dan inflasi tahun 2011 sebesar 5,12 persen. Selanjutnya rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Batu tahun 2008-2011 sebesar 6,66 persen.

Tabel 2.21.
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008 -2011
Kota Batu

Uraian	Dalam Persen				Rata-Rata Pertumbuhan (Persen)
	2008	2009	2010	2011	
Inflasi	9,53 %	5,82 %	6,18 %	5,12 %	6.66 %

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011



2.2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Sedangkan PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk.

Tabel 2.22
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Nilai PDRB (Rp)	1.244.946,54	1.331.922,60	1.432.193,90	1.547.387,28
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	185.925	188.145	190.184	191.254
3	PDRB perkapita (Rp/jiwa)	5.524.157,80	5.840.675,53	6.212.720,14	6.674.864,34

Sumber: Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Nilai PDRB (Rp)	2.524.551,63	2.851.689,98	3.255.765,04	3.697.778,68
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	185.925	188.145	190.184	191.254
3	PDRB perkapita (Rp/jiwa)	11.202.125,00	12.504.420,70	14.123.197,30	15.950.868,53

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk *satu*, mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, *dua*, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan *tiga*, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	145.352	143.144	141.220	141.220
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	148.804	146.215	143.022	143.022
3	Angka melek huruf (1) / (2) x 100	97,7	97,9	98,7	98,7

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.



Tabel 2.25
Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf (AMH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 100)
1	Batu	65.568	66.405	98,7
2	Bumiaji	40.770	41.290	98,7
3	Junrejo	34.882	35.327	98,7
Jumlah Total		141.220	143.022	98,7

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

2.2.2.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.616	16.680	17.024	17.489	17.324
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.936	17.934	18.942	18.942	18.123
1.3.	APM SD/MI (1.1) / (1.2) x 100	128,4	93	89,9	92,3	95,6
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	6.240	6.663	6.964	6.485	6.582
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.808	8.901	9.116	9.116	8.122
2.3.	APM SMP/MTs (2.1) / (2.2) x 100	70,8	74,9	76,4	71,1	81,04
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	3.992	2.760	2.698	4.735	4.811
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.147	8.806	8.904	8.904	8.884
3.3.	APM SMA/MA/SMK (3.1) / (3.2) x 100	49	31,3	30,3	53,2	54,2

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.



Tabel 2.27
Angka partisipasi Murni (APM) menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah Siswa 7-12 Tahun di SD/MI	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	APM (%)	Jumlah Siswa 13-15 Tahun di SMP/MTs	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	APM (%)	Jumlah Siswa 16-18 Tahun di SMA/SMK/MA	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	APM (%)
1	Batu	8.743	8.906	98,17	3.853	4.522	85,20	3.648	4.255	85,73
2	Bumiaji	3.986	5.570	71,56	1.108	2.580	42,94	434	2.557	16,97
3	Junrejo	4.558	4.558	100	1.621	2.213	73,15	729	2.072	35,18
Jumlah Total		17.287	19.034	90,82	6.582	9.315	70,66	4.811	8.884	54,15

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kotor (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum tanpa memperhatikan umur di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Jenjang Pendidikan	Kota			
		2008	2009	2010	2011
1	SD/MI				
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	19.769	19.570	19.767	18.973
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.936	17.934	18.942	18.942
1.3	APM SD/MI (1.1) / (1.2) x 100	152,8	109,1	104,4	100,2
2	SMP/MTs				
2.1	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	8.655	8.963	8.911	9.068
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.808	8.901	9.116	9.116
2.3	APM SMP/MTs (2.1) / (2.2) x 100	98,3	100,7	97,8	99,5
3	SMA/MA/SMK				
3.1	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	5.474	5.547	5.991	5.733
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.147	8.806	8.904	8.904
3.3	APM SMA/MA/SMK (3.1) / (3.2) x 100	67,2	62,99	67,3	64,4

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.

Tabel 2.29
Angka partisipasi Kasar (APK) menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2011

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah Siswa di SD/MI	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	APK	Jumlah Siswa di SMP/MTs	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	APK	Jumlah Siswa di SMA/SMK/MA	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	APK
1	Batu	9.282	8.794	105,5	6.006	4.232	141,9	4.528	4.134	109,5
2	Bumiaji	5.249	4.679	112,2	1.465	2.252	65,1	351	2.199	15,96
3	Junrejo	4.442	5.469	81,2	1.597	2.632	60,7	854	2.571	0,003
Jumlah Total		18.973	18.942	100,2	9.068	9.116	99,5	5.733	8.904	64,4

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.



2.2.2.1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT berguna untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk SD	19.769	19.570	19.767	18.973
2	Jumlah penduduk SMP	8.655	8.963	8.911	9.068
3	Jumlah penduduk SMA	5.474	5.547	5.991	5.733
4	Jumlah penduduk Perguruan Tinggi	1.499	1.572	1.621	1.591
5	Jumlah penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527
6	APT SD (1) / (5) x 100	10,8	9,65	9,71	9,14
7	APT SMP (2) / (5) x 100	4,73	4,42	4,37	4,36
8	APT SMA (3) / (5) x 100	2,99	2,73	2,94	2,76
9	APT Perguruan Tinggi (4) / (5) x 100	0,81	0,77	0,79	0,76

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.

2.2.2.2. Kesehatan

2.2.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Angka kematian bayi merupakan indikator yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Kematian bayi didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai sebelum bayi berusia satu tahun. Dari penyebabnya, kematian bayi dapat dibedakan menjadi endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang lebih dikenal dengan kematian neonatal adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah bayi dilahirkan dan umumnya disebabkan karena faktor bawaan. Sedangkan kematian eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi antara usia satu bulan sampai dengan satu tahun yang umumnya disebabkan oleh faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Kontribusi kematian neonatal terhadap AKB lebih besar dibandingkan dengan kematian post natal. Penyebab kematian neonatal sendiri masih dominan akibat kelainan perinatal, sedangkan kematian post natal sebagian besar disebabkan karena prematuritas dan BBLR.



Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Tabel 2.31
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Batu Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (5=3/4x1000)	AKHB (6=1000-AKB)
1	2008	12	3.204	3.75	996.25
2	2009	25	3.249	7.69	992.31
3	2010	32	3.086	10.37	989.63
4	2011	31	2.973	10.40	989.60
5	2012	28	2.795	10.02	989.98

Sumber : Data dari Dinas Kesehatan Kota Batu.

Tabel 2.32
Angka Kematian Bayi (AKB) menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (5=3/4x1000)	AKHB (6=1000-AKB)
1	Batu	15	1.280	7,81	992,19
2	Bumiaji	5	840	5,95	994,19
3	Junrejo	8	675	11,85	988,15

Sumber : Data dari Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian maternal atau Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari pembangunan kesehatan. Menurut ICD-10 WHO, kematian maternal atau kematian ibu adalah kematian ibu hamil, melahirkan atau selama masa nifas yang disebabkan hal apapun yang berkaitan dengan kehamilan atau penanganannya tapi bukan karena kecelakaan atau insidental. Adapun tingkat kematian maternal atau Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian maternal adalah faktor obstetrik dan kondisi selama kehamilan yang dibedakan menjadi penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab tidak diduga sebelumnya dan penyebab yang tidak diketahui. Penyebab langsung kematian ibu menurut data Survei Demografi & Kesehatan Indonesia tahun 2003 adalah ; Perdarahan 28%, Eklampsia 13%, Sepsis 10%, Aborsi 11%, Partus



macet 9%, Kehamilan tak di inginkan 7%, dan Lain - lain 22%. Data dari beberapa sumber bahkan menyebutkan kasus kematian ibu karena perdarahan mencapai 45% dari seluruh kasus kematian ibu. Hal ini erat hubungannya dengan status gizi ibu yang buruk. Selain itu, sebagian besar kasus perdarahan yang terjadi selama masa post partum/ masa nifas terjadi karena retensio plasenta dan atonia uteri. Hal ini mengindikasikan kurang baiknya manajemen tahap ketiga proses kelahiran dan pelayanan emergensi obstetrik dan perawatan neonatal yang tepat waktu.

Adapun selain penyebab langsung, ada juga penyebab tidak langsung kematian ibu yaitu :

- 1. Kemiskinan.
- 2. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu mengenai proses kehamilan dan persalinan yang aman.
- 3. Lemahnya kedudukan dan peran wanita dalam keluarga.
- 4. Faktor budaya di masyarakat.
- 5. Buruknya sarana dan infrastruktur transportasi menuju sarana pelayanan kesehatan.
- 6. Kurang tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Tabel 2.33
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kota Batu Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI (5=3/4x100.000)
1	2008	3	3.204	93.63
2	2009	3	3.249	92.34
3	2010	3	3.086	97.21
4	2011	4	2.973	134.54
5	2012	3	2.795	107.33

Sumber : Data dari Dinas Kesehatan Kota Batu.

Tabel 2.34
Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI (5=3/4x100.000)
1	Batu	1	1.280	78.125
2	Bumiaji	1	840	119.05
3	Junrejo	1	675	148.15

Sumber : Data dari Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar



dikatakan gizi buruk. Prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu rendah (<10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%), dan sangat tinggi (>=30%).

Tabel 2.35
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	0	0	24	14	83
2	Jumlah Balita	13.446	13.299	11.477	11.201	10.658
3	Persentase jumlah balita gizi buruk (1) / (2) x 100%	0	0	0.21	0.12	0.78

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.2.2.3. Kemiskinan

2.2.2.3.1. Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu antar daerah, dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Tabel 2.36
Jumlah Rumah Tangga menurut Klasifikasi Kemiskinan di Desa dan Kelurahan
Kota Batu

Daerah / Tahun	Jumlah				Total
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	
KECAMATAN BATU					
Oro-Oro Ombo	28	23	268	421	740
Temas	53	33	410	889	1.385
Sisir	27	17	178	403	625
Ngaglik	26	34	202	399	661
Pesanggrahan	52	36	303	617	1.008
Songgokerto	12	11	100	225	348
Sumberejo	15	19	330	313	677
Sidomulyo	5	13	100	165	283
JUMLAH TOTAL	218	186	1.891	3.432	5.727
KECAMATAN JUNREJO					
Tlekung	1	10	68	190	269
Junrejo	19	20	198	295	532
Mojorejo	5	6	59	135	205
Torongrejo	13	17	125	137	292
Beji	22	20	121	152	315
Pendem	13	21	150	357	541
Dadaprejo	7	10	66	81	164
JUMLAH TOTAL	80	104	787	1.347	2.318
KECAMATAN BUMIAJI					
Pandanrejo	6	11	116	317	450
Bumiaji	13	16	183	529	741
Bulukerto	15	17	265	268	565
Gunungsari	16	19	291	432	758
Punten	14	22	161	184	381
Tulungrejo	23	21	147	216	407
Sumbergondo	10	13	144	231	398
Giripurno	23	27	338	710	1.098
Sumber Brantas	33	33	196	114	376
JUMLAH TOTAL	153	179	1.841	3.001	5.174

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Batu.



2.2.2.4. Kepemilikan Tanah

2.2.2.4.1. Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Tanah

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100.

Tabel 2.37
Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Tanah menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

Kecamatan	Luas Tanah	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Memiliki Tanah	Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 x 100%)
Batu	4.910,472	97.790	35.144	35,94%
Bumiaji	12.828,043	60.593	34.505	56,94%
Junrejo	2.470,611	51.743	24.381	47,12%
Jumlah Total	20.209,126	210.126	94.030	44,75%

Sumber : Data Badan Pertanahan Kota Batu.

2.2.2.5. Kesempatan Kerja

2.2.2.5.1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Tabel 2.38
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan
Kota Batu Tahun 2012

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
15-19	3.082	1.161	4243
20-24	9.340	409	9.749
25-29	8.646	762	9.408
30-34	15.438	496	15.934
35-39	12.263	0	12.263
40-44	12.970	0	12.970
45-49	9.650	178	9.828
50-54	10.164	320	10.984
55-59	7.565	146	7.711
60-64	4.092	0	4.092
65+	5.051	0	5.051
Jumlah	98.261	3.472	101.733

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Tabel 2.39
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	88.555	95.679	92.751	94.555
2	Jumlah Angkatan Kerja	147.716	162.499	158.312	138.376
3	Rasio penduduk yang bekerja (1) / (2)	0,60	0,59	0,59	0,68

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.



2.2.2.6. Kriminalitas

2.2.2.6.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tabel 2.40
Angka Kriminalitas
Kota Batu Tahun 2012

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pengeroyokan	13	6
Kebakaran	8	8
Aniaya berat	18	16
Curi biasa	10	4
Curi berat	55	14
Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)	125	29
Perampasan	2	1
Pencurian dengan kekerasan (curas)	5	3
Penggelapan	9	2
Penipuan	46	11
Perjudian	13	13
Perzinahan	1	1
Senjata Tajam	0	0
Aborsi	1	1
Penguasaan rumah tanpa ijin	1	1
Pencabulan	5	2
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2
Membawa lari anak	3	2
Fidusia	1	0
Pencemaran nama baik	2	0
Narkoba	39	39
Curi kayu	0	0
Jumlah	361	155

Sumber : Data Polres & Kantor Kesbangpol Kota Batu.

Tabel 2.41
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kota Batu Tahun 2011

Uraian	Perkara			
	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Diselesaikan	Sisa Tahun
Tindak Pidana Umum	0	170	170	0
Tindak Pidana Khusus	1	4	5	0
Perkara Perdata	0	0	0	0
Perkara Tata Usaha Negara	0	1	1	0
Jumlah	1	175	176	0

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Kota Batu.



Tabel 2.42
Rasio Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Kejadian Kriminalitas yang tertangani	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Kejadian Kriminalitas yang tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 10.000)
1	Batu	75	97.790	7,67
2	Bumiaji	39	60.593	6,44
3	Junrejo	41	51.743	7,92
Jumlah Total		155	210.126	7,38

Sumber : Data Polres & Kantor Kesbangpol Kota Batu.

2.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

2.2.3.1. Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat melalui indikator jumlah grup dan gedung kesenian per 10.000 penduduk. Adapun jumlah grup kesenian pada tahun 2008 sebanyak 104, tahun 2009 sebanyak 55, tahun 2010 sebanyak 45, tahun 2011 sebanyak 80 dan tahun 2012 sebanyak 74 grup. Sedangkan jumlah gedung kesenian di Kota Batu sebanyak 1 unit yang berada di Desa Oro-Oro Ombo yang dibangun pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.43
Perkembangan Seni Budaya
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	104	55	45	80	74
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	1	1	1

Sumber : Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Tabel 2.44
Perkembangan Seni Budaya menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Batu	28	1
2	Bumiaji	23	0
3	Junrejo	23	0
Jumlah Total		74	1

Sumber : Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.



2.2.3.2. Olahraga

Pencapaian pembangunan olahraga dapat dilihat melalui indikator jumlah grup dan gedung olahraga per 10.000 penduduk. Jumlah grup olahraga di Kota Batu pada tahun 2008 sebanyak 69, tahun 2009 sebanyak 92, tahun 2010 sebanyak 122, tahun 2011 sebanyak 135 dan tahun 2012 sebanyak 158 grup. Keberadaan grup olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan, hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk berolahraga semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Grup Olahraga
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup olah raga per 10.000 penduduk	69	92	122	135	158
2	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	1	1	1	1	1

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga & KONI Kota Batu.

Tabel 2.46
Perkembangan Grup Olahraga menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Grup Olahraga per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Batu	60	1
2	Bumiaji	56	0
3	Junrejo	42	0
Jumlah Total		158	1

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga & KONI Kota Batu.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi murni (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, yaitu perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Sedangkan angka partisipasi murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya



persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun dan 16-18) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	16.616	16.680	17.024	17.489	17.324
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.769	17.934	18.942	18.942	18.123
1.3.	APS SD/MI (1.1.) / (1.2.) x 1000	841	930	899	923	956
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	6.240	6.053	6.054	6.485	6.582
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.808	8.901	9.116	9.116	8.122
2.3.	APS SMP/MTs (2.1.) / (2.2.) x 1000	708	680	664	711	810
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	jumlah murid usia 16-18 thn	3.992	2.760	2.698	4.735	4.811
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.147	8.806	8.904	8.904	8.884
3.3.	APS SMA/SMK/MA (3.1.) / (3.2.) x 1000	490	313	303	532	542

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel 2.48
Angka partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2012 menurut Kecamatan

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
	Jumlah Murid 7-12 Tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	APS	Jumlah Murid 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	APS	Jumlah Murid 16-18 Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	APS
Batu	8.779	8.906	985,74	3.853	4.522	852,05	3.648	4.255	857,34
Bumiaji	3.986	5.570	715,62	1.108	2.580	429,46	434	2.557	169,73
Junrejo	4.559	4.558	1.000,2	1.621	2.213	723,49	729	2.072	351,83
Jumlah	17.324	19.034	910,16	6.582	9.315	706,60	4.811	8.884	541,53

Sumber: Dinas Pendidikan

2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah meningkatnya sarana pendidikan seperti sekolah dan meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.49
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	83	83	84	85	88
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.769	17.934	18.942	18.942	18.123
1.3.	Rasio (1.1.) / (1.2.) x 10.000	40	50	40	40	50
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	27	27	29	30	30
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.808	8.901	9.116	9.116	8.122
2.3.	Rasio (2.1.) / (2.2.) x 10.000	30	30	30	30	40
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	20	21	22	23	24
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.147	8.806	8.904	8.904	8.884
3.3.	Rasio (3.1.) / (3.2.) x 10.000	20	20	20	30	30

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.

Tabel 2.50
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Batu Tahun 2012 menurut Kecamatan

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Rasio
Batu	41	8.906	46,03	16	4.522	35,38	18	4.255	42,30
Bumiaji	21	5.570	37,70	7	2.580	27,13	3	2.557	11,73
Junrejo	26	4.558	57,04	7	2.213	31,63	3	2.072	14,48
Jumlah	88	19.034	46,23	30	9.315	32,21	24	8.884	27,01

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Batu.

2.3.1.1.1.3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.51
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah guru	1.008	1.175	1.140	1.138	1.242
1.2.	Jumlah murid	19.411	19.438	19.757	19.771	11.964
1.3.	Rasio (1.1.) / (1.2.) x 1000					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah guru	612	652	642	734	731
2.2.	Jumlah murid	8.655	9.315	8.060	9.209	9.521
2.3.	Rasio (2.1.) / (2.2.) x 1000					
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah guru	581	653	605	736	777
3.2.	Jumlah murid	5.474	4.235	4.138	6.401	6.943
3.3.	Rasio (3.1.) / (3.2.) x 1000	106	154	146	115	112

Sumber: Dinas Pendidikan.



Tabel 2.52
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Batu Tahun 2012
menurut Kecamatan

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
Batu	631	9.948	63	425	5.745	74	629	5.381	117
Bumiaji	278	4.463	62	138	1.533	90	99	569	174
Junrejo	333	5.120	65	168	2.243	75	49	993	49
Jumlah Total	1.242	19.531	190	731	9.521	239	777	6.943	340

Sumber: Dinas Pendidikan.

2.3.1.2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya indikator pelayanan kunjungan dan status gizi, dan dukungan sarana kesehatan yang ada dalam suatu wilayah.

2.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empiric di beberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Tabel 2.53
Jumlah Posyandu dan Balita
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah posyandu	186	187	189	189	189
2	Jumlah balita	13.446	13.299	11.477	11.201	10.658
3	Rasio (1) / (2) x 100	1,38	1,40	1,65	1,69	1,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

Tabel 2.54
Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 100)
1	Batu	89	4.728	1.88
2	Bumiaji	52	3.480	1.49
3	Junrejo	48	2.450	1.96
Jumlah Total		189	10.658	1.77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.



2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu digunakan untuk mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.55
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Puskesmas	4	4	5	5	5
2	Jumlah Poliklinik	10	7	6	7	7
3	Jumlah Pustu	4	4	4	6	6
4	Jumlah Penduduk	192.059	195.150	206.981	208.366	194.793
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk (1) / (4) x 1000	0.02	0.02	0.024	0.023	0.025
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk ((2) / (4) x 1000	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03
7	Rasio Pustu persatuan penduduk (3) / (4) x 1000	0.02	0.02	0.019	0.028	0.030

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

Tabel 2.56
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu menurut Kecamatan
Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Batu	90.316	2	0.02	4	0.04	2	0.02
2	Bumiaji	56.971	1	0.01	1	0.01	4	0.07
3	Junrejo	47.506	2	0.04	2	0.04	0	0
	Jumlah	194.793	5	0.02	7	0.03	6	0.03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.57
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0	0
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	5	5	5	5	5
6	Jumlah Penduduk	192.059	195.150	206.981	208.366	194.793
7	Rasio (5) / (6) x 10.000	0.260	0.256	0.241	0.239	0.256

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.



Tabel 2.58
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk menurut Kecamatan
Tahun 2012

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit										Total	
		Umum Pemerintah		Jiwa/Paru/ Penyakit Khusus		AD/AU/AL/ POLRI		Daerah		Swasta			
		Jmh	Rsio	Jmh	Rsio	Jmh	Rsio	Jmh	Rsio	Jmh	Rsio	Jmh	Rsio
Batu	90.316	0	0	1	0.01	1	0.01	0	0	2	0.02	4	0.04
Bumiaji	56.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junrejo	47.506	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	1	0.02
Jumlah Total	194.793	0	0	1	0.01	1	0.01	0	0	3	0.015	5	0.025

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.3.1.2.4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.59
Jumlah Dokter Kota Batu
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah dokter	127	115	148	102	153
2	Jumlah penduduk	192.059	195.150	206.981	208.366	194.793
3	Rasio (1) / (2) x 2500	1.65	1.47	1.78	1.22	1.96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

Tabel 2.60
Jumlah Dokter menurut Kecamatan
Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 2500)
1	Batu	103	90.316	2.85
2	Bumiaji	13	56.971	0.57
3	Junrejo	37	47.506	1.94
Jumlah Total		153	194.793	1.96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis pada tahun 2008 sebanyak 272, tahun 2009 sebanyak 307, tahun 2010 sebanyak 415 dan tahun 2012 sebanyak 368 tenaga medis. Keberadaan tenaga medis menyebar merata di tiga kecamatan di wilayah Kota Batu. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.61
Jumlah Tenaga Medis
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah tenaga medis	272	307	357	415	368
2	Jumlah penduduk	192.059	195.150	206.981	208.366	194.793
3	Rasio (1) / (2) x 1000	141.62	157.31	172.47	199.16	188.91

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

Tabel 2.62
Jumlah Tenaga Medis menurut Kecamatan
Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 1000)
1	Batu	205	90.316	226.98
2	Bumiaji	37	56.971	64.94
3	Junrejo	126	47.506	265.22
Jumlah Total		368	194.793	188.91

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu.

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Sistem persampahan di wilayah perencanaan dikumpulkan secara komunal oleh petugas persampahan yang selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) setempat. Berdasarkan data tahun 2011, jumlah sarana kebersihan di Kota Batu terdiri dari 8 unit *amroll truck*, 6 unit *dump truck*, 1 unit *open truck*, 1 unit *shovel*, 2 unit *bulldozer*, 1 unit *excavator*, 12 unit gerobak motor, 345 buah tong sampah, dan 197 buah gerobak sampah. Sedangkan jumlah prasarana kebersihan berupa 12 lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Batu dengan kondisi baik, dan 1 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo dengan luas $\pm$ 2 Ha.

Tabel 2.63
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah volume sampah ditangani	245	245	245	225	200
2	Jumlah volume produksi sampah	471	475	521	536	551
3	Persentase (1) / (2) x 100%	52%	52%	47%	43%	37%

Sumber : Data Kantor Lingkungan Hidup.

Tabel 2.64
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan
Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Sampah yang Ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 100%)
1	Batu	93,1	244,5 m ³	38,1%
2	Bumiaji	57,7	151,5 m ³	38,1%
3	Junrejo	49,2	129,4 m ³	38%
Jumlah Total		200	525,4 m ³	38,1%

Sumber : Data Kantor Lingkungan Hidup.



2.3.1.3.2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Hampir diseluruh wilayah Kota Batu untuk kebutuhan air bersih sudah cukup terpenuhi, yaitu dengan memanfaatkan PDAM, HIPPAM, sumur gali dan langsung mengambil di sumber mata air. Kedepan diupayakan seluruh masyarakat Kota Batu mendapatkkan akses air bersih yang cukup serta didukung dengan kualitas air yang layak minum. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.65
Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk mendapat akses air minum	98.675	100.275	110.965	115.230.	124.035
2	Jumlah penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527	210.126
3	Persentase penduduk berakses air bersih	53,95%	49,48%	54,54%	55,52%	59,03%

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang & PDAM Kota Batu.

Tabel 2.66
Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 x 100%)
1	Batu	97.790	60.777	62,15%
2	Bumiaji	60.593	38.128	62,92%
3	Junrejo	51.743	25.139	48,58%
Jumlah Total		210.126	124.035	59,03%

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang & PDAM Kota Batu.

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

2.3.1.4.1. Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Batu sebagai salah satu tujuan wisatawan, maka keberadaan infrastruktur mempunyai peran vital dan



perlu terus dikembangkan agar perputaran roda perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jaringan jalan di Kota Batu lihat tabel berikut:

Tabel 2.67.a
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	Panjang Jalan (km)			
		2008	2009	2010	2011
1	Kondisi Baik	95,83	95,83	110,83	101,83
2	Kondisi Sedang Rusak	221,18	221,18	216,18	227,18
3	Kondisi Rusak	84,83	109,83	104,83	100,83
4	Kondisi Rusak Berat	38,99	63,99	58,99	60,99
5	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	440,83	490,83	490,83	490,83
6	Proporsi jalan kondisi baik (1) / (5)	0,22	0,19	0,22	0,20

Sumber: Pengairan dan Binamarga Kota Batu

Adapun jaringan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur dengan panjang sekitar 19 Km, yaitu jalan Malang-Batu-Pujon dan Jalan Batu-Cangar-Pacet/Mojokerto. Adapun kondisi jalan, khususnya Malang-Batu-Pujon berkondisi bagus, sedangkan jalan Batu-Cangar-Pacet/Mojokerto kondisi sedang. Sedangkan jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kota Batu yaitu jalan perkotaan, jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan, antar desa dan jalan lainnya dengan panjang jalan sekitar 471,83 Km.

Guna mendukung peningkatan perekonomian daerah, serta mendukung pengembangan potensi Kota Batu, yaitu sebagai sentra pariwisata Jawa timur dan juga sebagai pengembangan pertanian, maka salah satu kendala yang dihadapi oleh Kota Batu yaitu masalah kemacetan, khususnya disaat musim kunjungan wisatawan. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah Kota Batu berusaha untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, baik jalan perkotaan maupun jalan-jalan tembus untuk mengatasi kemacetan. Adapun program yang telah berjalan terkait dengan pembangunan jalan alternative untuk mengatasi kemacetan antara lain:

1. Jalan lingkaran selatan dengan rute Junrejo-Tlekung-Oro-Oro Ombo-Batu telah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan sejak tahun 2007.
2. Jalan Lingkar Timur dengan rute Batu-Giripurno-tembus Karangploso juga telah selesai dilaksanakan sejak tahun 2007.
3. Pembangunan Jembatan Kali Lanang pada tahun 2007 untuk mendukung jalan lingkaran utara Kota Batu.
4. Pembangunan jalan alternative untuk mengurangi kemacetan, seperti:

- a. Jalan alternative Pendem-Torongrejo tembus Temas, melalui pelebaran dan perbaikan jalan.
- b. Jalan gunungsari tembus punten-selecta melalui peningkatan kualitas jalan.

Setelah jalan tersebut diatas dibangun dan ditingkatkan, tetapi kenyataan dilapangan masih belum mampu memecahkan masalah kemacetan, sehingga pemerintah Kota Batu berusaha untuk pembangunan-pembangunan jalan baru dan rekayasa lalu lintas, seperti:

1. Pembangunan jalan lingkaran barat mulai dari Tlekung-Panderman Hill-tembus ke Jalan Agrowisata-Jalan Imam Bonjol hingga tembus ke Jalan Untung Suripati. Target akhir tahun 2013 telah bisa dimanfaatkan.
2. Rencana pembangunan rest area yang ditargetkan mulai dibangun sekitar tahun 2014 yang lokasinya diarahkan di Desa Pendem.
3. Rekayasa lalu lintas, dengan cara mengatur arus/sirkulasi kendaraan pada ruas-ruas jalan utama, pengaturan parkir kendaraan dan lainnya.

Terkait dengan program pembangunan sector pariwisata, salah satunya dengan mempromosikan pariwisata Kota Batu serta mengupayakan aksesibilitas menuju Kota Batu dapat lancar, sehingga kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi terjamin yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu serta mampu meningkatkan investasi di Kota Batu. Adapun program yang telah dilakukan maupun program yang masih dalam tahap proses pelaksanaan yaitu:

- a. Adanya pembukaan Lapangan Terbang Abdul Rahman Saleh menjadi Bandar udara komersil dengan melibatkan ketiga wilayah Malang Raya serta Provinsi Jawa Timur. Manfaat dengan dibukanya Bandar Udara tersebut, khususnya untuk Kota Batu, antara lain memudahkan wisatawan nasional ataupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Kota Batu, hingga tahun ini kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu meningkat pesat hingga tembus di atas 3 juta pengunjung dalam satu tahun. Diharapkan dengan adanya Bandar Udara ke depan wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Batu dalam kurun lima tahun kedepan ditargetkan diatas 5 juta kunjungan.
- b. Adanya rencana pembangunan jalan tembus Lawang-Batu. Pembangunan jalan tembus Lawang-Batu kedepan tidak hanya menguntungkan wilayah Kota Batu saja, melainkan akan menguntungkan wilayah Malang Raya, mengingat pusat perputaran perekonomian Jawa Timur berada di Surabaya, maka sudah seharusnya permasalahan-

permasalahan aksesibilitas yang menghubungkan Surabaya perlu ditingkatkan. Mengingat saat ini arah menuju Malang Raya, khususnya di sekitar Lawang dan Singosari rawan terjadi kemacetan, sehingga sangat mengganggu aktifitas pemakai jalan, baik yang akan berwisata maupun menjalankan usaha nya ke Kota Batu, Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Didalam rencana pembangunan jalan tembus Lawang-Batu saat ini masih menghadapi kendala-kendala dan masih dalam tahap negosiasi dan koordinasi, antara lain:

- Proses negosiasi dengan pihak perhutani, mengingat sebagian lahan yang akan digunakan untuk jalan berada dalam kawasan perhutani.
- Koordinasi intens dengan wilayah Kabupaten Malang, mengingat sebagian besar jalan tembus melalui wilayah Kabupaten Malang.
- Koordinasi intens dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota, baik terkait koordinasi maupun pendanaan.

Selanjutnya dengan terialisasinya jalan tembus Lawang-Batu akan bermanfaat besar bagi pembangunan Kota Batu, baik terhadap investasi, target peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu, maupun untuk mendukung sektor perdagangan terhadap produk-produk pertanian Kota Batu.

- c. Peningkatan status Terminal Kota Batu. Kedepan keberadaan terminal Kota Batu dapat lebih dikembangkan lagi, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana terminal maupun penambahan rute angkutan antar Kota, seperti rute bis Batu-Surabaya, Batu-Bali dan rute lainnya yang strategis. Mengingat Kota Batu sebagai salah satu tujuan wisatawan, maka keberadaan rute angkutan bis umum dirasa sangat diperlukan, agar ke depan Kota Batu lebih berkembang lagi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu.

2.3.1.4.2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.



Tabel 2.68
Rasio Jaringan Irigasi
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jaringan primer	0	0	0	0	0
2	Jaringan Sekunder (meter)	16.362	18.362	22.412	28.302	31.782
3	Jaringan Tersier (meter)	0	18.045,21	20.045,21	22.295,21	26.045,21
4	Luas lahan budidaya (Ha) (sawah)	2.516	2.516	2.479	2.436	2.373
5	Rasio ((1) + (2) + (3)) / (4)	6,50	14,47	17,13	20,77	24,39

Sumber : Data Dinas Pengairan dan Binamarga, & Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

Tabel 2.69
Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Batu	0	5.675	2.250	7.925	573	13,83
2	Bumiaji	0	12.877	9.477,16	22.354,16	794	28,15
3	Junrejo	0	13.230	14.318,05	27.548,05	1.006	27,38
Jumlah		0	31.782	26.045,21	57.827,21	2.373	24,37

Sumber : Data Dinas Pengairan dan Binamarga, & Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

2.3.1.4.3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Sebagian besar penduduk Kota Batu merupakan penduduk yang heterogen dari segi pemeluk agama. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap penyebaran tempat peribadatan dan jumlah fasilitasnya. Adapun fasilitas peribadatan yang ada di kota Batu berupa masjid, langgar/musholla, Gereja, Wihara dan Pura yang cenderung menyebar di setiap kecamatan. Sebagian besar penduduk Kota Batu beragama Islam, hal ini bisa dilihat dari penyebaran jumlah fasilitas peribadatan yang mendominasi adalah masjid dan langgar/ musholla.

- Masjid
Berdasarkan data tahun 2011 jumlah fasilitas peribadatan di Kota Batu berupa masjid sejumlah 138 unit dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo yang masing-masing berjumlah 50 unit.
- Langgar/ Musholla
Fasilitas peribadatan berupa langgar/ musholla tahun 2011 di Kota Batu secara keseluruhan berjumlah 397 unit dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Batu sejumlah 175 unit
- Gereja
Di Kota Batu pada tahun 2011 jumlah fasilitas peribadatan berupa gereja berjumlah 14 unit dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Batu sejumlah 10 unit



- Vihara
Berdasarkan data tahun 2011 jumlah peribadatan di Kota Batu berupa vihara sejumlah 5 unit dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Batu sejumlah 4 unit
- Pura
Fasilitas peribadatan berupa pura di Kota Batu pada tahun 2011 hanya berjumlah 1 unit dan terdapat di Kecamatan Bumiaji.

Tabel 2.70
Rasio Tempat Ibadah
Kota Batu Tahun 2008 dan 2011

No.	Bangunan Tempat Ibadah	2008			2011		
		Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4x1000)	(6)	(7)	(8=6/7x1000)
1	Mesjid	139	172.982	0,80	139	191.524	0,72
2	Gereja	37	9.639	3,83	37	11.089	3,33
3	Pura	2	342	5,84	2	429	4,66
4	Vihara	7	1.147	6,10	7	667	10,49
5	Kelenteng	0	0	0	0	0	0
6	Lain-Lain	0	0	0	0	333	0
Jumlah		185	184.110	1	185	203.709	0,90

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

Tabel 2.71
Rasio Tempat Ibadah menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2011

No.	Kecamatan	Masjid			Gereja			Pura		
		Jmh (unit)	Jmh Pmluk	Rasio	Jmh (unit)	Jmh Pmluk	Rasio	Jmh (unit)	Jmh Pmluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Batu	51	88.650	0,57	29	7.815	3,71	0	66	0
2	Bumiaji	38	54.380	0,69	2	873	2,29	2	289	6,92
3	Junrejo	50	48.494	1,03	6	2.401	2,50	0	74	0
Jumlah		185	191.524	0,96	37	11.089	3,34	2	429	4,66

Tabel lanjutan

Vihara			Kelenteng			Lain-Lain		
Jmh (unit)	Jmh Pmluk	Rasio	Jmh (unit)	Jmh Pmluk	Rasio	Jmh (unit)	Jmh Pmluk	Rasio
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	404	12,37	0	0	0	0	165	0
0	13	0	0	0	0	0	50	0
2	250	8	0	0	0	0	118	0
7	667	10,49	0	0	0	0	333	0

Sumber : Kota Batu Dalam Angka Tahun 2012.

2.3.1.4.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yang berupa fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah. Berdasarkan data presentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Batu masih sangat minim sekali, sehingga ke depan perlu adanya penuntasan



program pembangunan sanitasi sebagaimana telah diamanatkan dalam program MDGs. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.72
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	-	-	80	104	154
2	Jumlah rumah tinggal	-	-	-	-	-
3	Persentase (1) / (2) x 100%	-	-	-	-	-

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.

2.3.1.4.5. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Batu masih sangat terbatas, yaitu hanya terdapat 1 lokasi dengan luas sekitar 3.000 M². Kedepan perlu adanya upaya pengembangan makam umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.73
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Batu Tahun 2008 dan 2012

No.	Bangunan Tempat Ibadah	2008			2012		
		Jmlh	Luas	Daya Tampung	Jmlh	Luas	Daya Tampung
1	Tempat pemakaman umum (TPU)	-	-	-	1 *	3.000 m ²	850 **
2	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	-	-	-	-	-	-
3	Tempat pemakaman khusus (TPK)	2	45.000 m ²	-	3	50.000 m ²	-
4	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Tempat Pemakaman	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah penduduk (jiwa)	182.885			210.126		
7	Rasio TPU persatuan penduduk (1) / (6)	0,001%			0,002%		

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.

* TPU Ngaglik.

** Dengan ukuran makam 2 x 1,5 m.



Tabel 2.74
Rasio Tempat Pemakaman Umum menurut Kecamatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat Pemakaman Umum (TPU)		Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	
			Jumlah	Daya Tampung	Jumlah	Daya Tampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Batu	97.790	1	850	-	-
2	Bumiaji	60.593	-	-	-	-
3	Junrejo	51.743	-	-	-	-
Jumlah		210,176	-	-	-	-

Tempat Pemakaman Khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total		Rasio TPU Persatuan Penduduk
Jumlah	Daya Tampung	Jumlah	Daya Tampung	Tempat Pemakaman	Daya Tampung	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12=4+6+8+10)	(13=5+7+9+11)	(14=4/3)
3 *	-	-	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.
* Makam Cina Gelonggong, Makam Kristen Gg Karate dan TMP Suropati.

2.3.1.4.6. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.75
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah TPS	16	23	27	27	27
2	Jumlah daya tampung TPS	12 m³	12 m³	48 m³	48 m³	48 m³
3	Jumlah Penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527	210.126*
4	Rasio daya tampung TPS thd jumlah penduduk	1,04	1,33	6,2	6,2	6,2 **

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.
* Sumber Dispendukcapil per Agustus-2012.
** Rumus = Jumlah daya tampung/jumlah penduduk x 1000.

Tabel 2.76
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tempat Pembuangan Sampah		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3 x 1000)
1	Batu	97.790	11	528 m³	5,4 m³
2	Bumiaji	60.593	6	288 m³	4,8 m³
3	Junrejo	51.743	10	480 m³	9,3 m³
Jumlah		210,126	27	1.296 m³	6,2 m³

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.



2.3.1.5. Penataan Ruang

2.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Tabel 2.77
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	62.290 ^(*)	62.290 ^(*)	62.290 ^(*)	62.290 ^(*)	62.290 ^(*)
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	779,34	779,34	779,34	779,34	779,34
3	Luas wilayah	19.908,72	19.908,72	19.908,72	19.908,72	19.908,72
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1) / (2)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.
* RTH Yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Tabel 2.78
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Wilayah ber-HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Batu	4.548,81	-	62.036 ^(*)	-
2	Bumiaji	2.565,02	-	254 ^(*)	-
3	Junrejo	2.565,89	-	-	-
Jumlah		19.908,70	-	62.290	-

Sumber : Data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.
* RTH Yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

2.3.1.5.2. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.79
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	-	922	1.271	1.714	2.559
2	Jumlah Bangunan					
3	Rasio bangunan ber-IMB (1) / (2)					

Sumber : Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.



Tabel 2.80
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan
menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4 / 3)
1	Batu		1191	
2	Bumiaji		617	
3	Junrejo		751	
Jumlah			2559	

Sumber : Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

2.3.1.6. Perhubungan

2.3.1.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jenis angkutan umum yang menghubungkan antar kota yang ada di Kota Batu yaitu berupa angkutan bis dengan rute malang-batu Kediri/jombang dan bus antar wilayah luar provinsi Batu-Bali. Adapun jumlah penumpang bis dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata jumlah penumpang di kisaran lima koma lima juta penumpang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut;

Tabel 2.81
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penumpang Bis	5.821.384	5.727.131	5.635.405	5.363.000	5.169.999
2	Jumlah penumpang Kereta api	0	0	0	0	0
3	Jumlah penumpang Kapal laut	0	0	0	0	0
4	Jumlah penumpang Pesawat udara	0	0	0	0	0
Total Jumlah Penumpang		5.821.384	5.727.131	5.635.405	5.363.000	5.1699.999

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

Tabel 2.82
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penumpang				Jumlah Penumpang
		Bis	Kereta Api	Kapal Laut	Pesawat Udara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1	Batu	2.442.736	0	0	0	2.442.736
2	Bumiaji	1.260.869	0	0	0	1.260.869
3	Junrejo	1.466.394	0	0	0	1.466.394
Jumlah		5.169.999	0	0	0	5.169.999

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

2.3.1.6.2. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek yang terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antarkota antarprovinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan jaringan trayek perdesaan. Untuk ijin trayek perkotaan mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlahnya tetap yaitu 354 ijin trayek. Tetapi tidak semua



kendaraan angkutan yang telah memiliki ijin trayek beroperasi rutin, hal ini dikarenakan semakin berkurangnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan perkotaan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.83
Rasio Ijin Trayek
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Izin Trayek perkotaan	354	354	354	354	354
2	Izin Trayek perdesaan	0	0	0	0	0
3	Jumlah Izin Trayek	354	354	354	354	354
4	Jumlah penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527	210.126
5	Rasio Izin Trayek	0,0019	0,0017	0,0017	0,0017	0,0016

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

Tabel 2.84
Rasio Ijin Trayek
menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Ijin Trayek		Total Jumlah Ijin Trayek	Rasio Ijin Trayek
			Perkotaan	Perdesaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7=6/3)
1	Batu	97.790	84	0	84	0,00086
2	Bumiaji	60.593	140	0	140	0,0023
3	Junrejo	51.743	130	0	130	0,0025
Jumlah		210.126	354	0	354	0,0017

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

2.3.1.6.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Berdasarkan data jumlah kendaraan yang wajib uji kir di Kota Batu pada tahun 2008 sebanyak 6.180 unit, tahun 2009 sebanyak 6.186 unit, tahun 2010 sebanyak 6.259 unit, tahun 2011 sebanyak 6.307 unit dan tahun 2012 sebanyak 7.443 unit kendaraan. Jenis kendaraan yang dominan untuk wajib uji kir yaitu kendaraan barang. Untuk jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.85
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008			2009		
		Jmh	Jmlh KIR	%	Jmh	Jmlh KIR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mobil penumpang umum	52	52	100%	60	58	98,33%
2	Mobil bus	515	512	99,4%	700	661	94,43%
3	Mobil barang	5613	5546	98,81%	6204	5466	88,1%
4	Kereta gandengan	0	0	0	0	0	0
5	Kereta tempelan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6180	6110	98,86%	6964	6186	88,83%



Tabel lanjutan.

2010			2011			2012		
Jmh	Jmlh KIR	%	Jmh	Jmlh KIR	%	Jmh	Jmlh KIR	%
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
68	64	94,12%	55	52	94,54%	55	41	75%
506	505	99,80%	555	533	96,04%	550	545	99,1%
5685	5492	96,61%	5778	5722	99,03%	6838	5873	85,88%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6259	6061	96,84%	6388	6307	98,73%	7443	6459	86,78%

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

Tabel 2.86
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 Tahun
menurut Kecamatan Tahun 2012

Kecamatan	Mobil Penumpang Umum			Mobil Bus			Mobil Barang		
	Jmh	Mlh KIR	%	Jmh	Mlh KIR	%	Jmh	Mlh KIR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Batu	25	19	76	256	256	100	3.214	2.760	85,87
Bumiaji	14	10	71	140	136	97	1.710	1.710	85,91
Junrejo	16	12	75	154	153	99	1.914	1.914	85,89
Jumlah	55	41	75	550	545	99,1	6.838	5.873	85,88

Kereta Gandengan			Kereta Tempelan			Jumlah Angkutan	Jumlah KIR	%
Jmh	Mlh KIR	%	Jmh	Mlh KIR	%			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	0	0	0	0	0	3.495	3.035	86,84
0	0	0	0	0	0	1.864	1.615	86,64
0	0	0	0	0	0	2.084	1.809	86,80
0	0	0	0	0	0	7.443	6.459	86,78

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

2.3.1.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Diwilayah Kota Batu hanya terdapat terminal angkutan umum (terminal bis tipe B) yang lokasinya berada di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.87
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0
2	Jumlah pelabuhan udara	0	0	0	0	0
3	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
Jumlah		1	1	1	1	1

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Penanaman Modal

2.3.2.1.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan



semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Salah satu potensi investasi di Kota Batu yang strategis yaitu investasi pada sektor jasa usaha pariwisata, sektor pertanian, sektor perdagangan-jasa, sektor property perumahan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya jumlah investor yang masuk ke Kota Batu lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah investor PMDN	-	-	743	678	380
2	Jumlah investor PMA	0	0	0	2	0
Total jumlah investor		-	-	743	680	380

Sumber : Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

2.3.2.1.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Investasi mulai meningkat di Kota Batu yaitu pada kisaran tahun 2010 yang ditandai dengan semakin bertambahnya obyek wisata beserta jasa usaha kepariwisataan, fasilitas perdagangan dan jasa, perumahan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.89
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Tahun 2008 s.d. 2012 Kota Batu

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2008	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2010	743	-	743	761.470.618.831
2011	680	-	680	804.619.580.699
2012	380	-	380	292.841.475.711

Sumber : Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

2.3.2.1.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Jumlah tenaga



kerja yang bekerja pada perusahaan pada tahun 2010 sebanyak 2.709 jiwa dengan jumlah perusahaan sebanyak 743 perusahaan serta rasio daya serap tenaga kerja sebesar 3,65%. Tahun 2011 sebanyak 2.373 jiwa dengan jumlah perusahaan sebanyak 680 perusahaan serta rasio daya serap tenaga kerja sebesar 3,49%. Tahun 2012 sebanyak 1.978 jiwa dengan jumlah perusahaan sebanyak 380 perusahaan serta rasio daya serap tenaga kerja sebesar 5,20%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.90
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	-	-	2.709	2.373	1.978
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	-	-	743	680	380
3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	3,65	3,49	5,20

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.3.2.2.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Persentase koperasi aktif di Kota Batu pada tahun 2008 sekitar 66,66%, tahun 2009 sekitar 70,72%, tahun 2011 sekitar 72,98% dan tahun 2012 sekitar 69,71%. Berdasarkan jumlah koperasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.91
Persentase Koperasi Aktif
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah koperasi aktif	90	106	120	127	122
2	Jumlah koperasi	135	151	165	174	175
3	Persentase koperasi aktif (1) / (2) x 100%	66,66%	70,19%	72,72%	72,98%	69,71%

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.



2.3.2.2.2. Jumlah UKM Non BPR/LKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Tabel 2.92
Jumlah UKM Non BPR/LKM
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah seluruh UKM	9.142	12.104	13.361	14.217	14.579
2	Jumlah BPR/LKM	8	8	9	10	10
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	9.134	12.096	13.352	14.207	14.569

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

2.3.2.2.3. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM.

Tabel 2.93
Jumlah BPR/LKM
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah BPR	5	5	5	6	6
2	Jumlah LKM	3	3	4	4	4
Jumlah BPR dan LKM		8	8	9	10	10

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.



2.3.2.3. Kependudukan

2.3.2.3.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tabel 2.94
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batu Tahun 2011

No.	Fertilitas/ Mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	2.975
2	Angka kematian kasar (CDR)	339
3	Angka kematian bayi (IMR)	28

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

2.3.2.3.2. Pengelompokan Penduduk

2.3.2.3.2.1. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Rasio jenis kelamin (sex rasio) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan ([penduduk laki-laki] : [penduduk perempuan] x 100). Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kota Batu jumlahnya cukup berimbang, yaitu pada tahun 2011 jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 94.110 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 96.066 jiwa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.95
Pengelompokan Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	0-4	8.387	6.483	7.570	7.570
2	5-9	8.291	7.684	7.081	7.081
3	10-14	7.626	7.777	7.034	7.034
4	15-19	6.759	8.073	8.219	8.219
5	20-24	6.579	7.730	7.135	7.135
6	25-29	8.125	9.000	7.600	7.600
7	30-34	9.149	6.635	8.626	8.626
8	35-39	8.567	7.598	7.517	7.517
9	40-44	7.239	7.474	7.884	7.884
10	45-49	6.434	6.658	5.961	5.961
11	50-54	6.599	6.906	5.874	5.874
12	55-59	3.807	4.336	4.454	4.454
13	60-64	3.013	3.677	3.058	3.058
14	65+	7.592	4.994	6.097	6.097
Jumlah		98.167	95.025	94.110	94.110

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.



Tabel 2.96
Pengelompokan Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	0-4	6.399	7.016	8.817	8.817
2	5-9	8.039	7.291	7.688	7.688
3	10-14	7.604	7.138	7.530	7.530
4	15-19	6.819	6.604	6.879	6.879
5	20-24	7.382	7.838	5.921	5.921
6	25-29	8.980	7.937	8.732	8.732
7	30-34	7.806	7.417	7.238	7.238
8	35-39	8.219	8.819	8.017	8.017
9	40-44	6.985	7.318	7.292	7.292
10	45-49	6.942	7.587	5.744	5.744
11	50-54	5.759	5.867	5.089	5.089
12	55-59	3.896	3.907	4.755	4.755
13	60-64	2.871	2.733	3.477	3.477
14	65+	9.282	7.107	8.887	8.887
Jumlah		96.983	94.579	96.066	96.066

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Tabel 2.97
Pengelompokan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Kota batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Batu	43.970	42.902	97.790	102,49
2	Bumiaji	26.125	25.529	60.593	102,33
3	Junrejo	22.249	21.617	51.743	102,92
Jumlah Total		92.344	90.048	210.126	102,55

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

2.3.2.3.2.2. **Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran
Penduduk/Geografis**

Jumlah penduduk Kota Batu tahun 2012 sebanyak 210.126 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Batu
Jumlah penduduk Kecamatan Batu pada tahun 2012 sebanyak 97.790 jiwa atau sekitar 46,53% dari jumlah penduduk keseluruhan. Adapun tingkat kepadatannya yaitu 2.151,12 jiwa/kilometer².
- b. Kecamatan Junrejo
Jumlah penduduk Kecamatan Junrejo pada tahun 2012 sebanyak 51.743 jiwa atau sekitar 24,62% dari jumlah penduduk keseluruhan. Adapun tingkat kepadatannya yaitu 2.017,27 jiwa/kilometer².
- c. Kecamatan Bumiaji
Jumlah penduduk Kecamatan Bumiaji pada tahun 2012 sebanyak 60.593 jiwa atau sekitar 28,84% dari jumlah penduduk keseluruhan. Adapun tingkat kepadatannya yaitu 473,46 jiwa/kilometer². Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:



Tabel 2.98
Sebaran Penduduk menurut Luas Wilayah dan Kepadatan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Batu	97.790	45,46	2151,12
2	Bumiaji	60.593	127,98	473,46
3	Junrejo	51.743	25,65	2017,27
Jumlah se-Kota		210.126	199,087	1055,45

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

2.3.2.3.2.3. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masih didominasi tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 95.190 jiwa, sedangkan yang terendah yaitu tingkat kelulusan perguruan tinggi sebanyak 15.159 jiwa. Ke depan tingkat kelulusan penduduk perlu ditingkatkan minimal rata-rata lulus pendidikan menengah atas atau kejuruan. Untuk jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.99
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kota Batu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD/MI	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Tidak Sekolah	
1	Batu	10.870	39.820	21.863	9.042	16.195	97.790
2	Bumiaji	8.361	32.554	7.292	2.114	10.272	60.593
3	Junrejo	6.192	22.816	10.181	3.862	8.692	51.743
Jumlah		25.423	95.190	39.336	15.018	35.159	210.126

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Tabel 2.100
Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi
Kota Batu Tahun 2012

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak punya ijazah SD	12.998	12.425	25.423	12%
2	SD/MI sederajat	31.258	30.372	61.630	29%
3	SMP	18.285	15.275	33.560	16%
4	SMA	20.250	19.086	39.336	19%
5	Perguruan tinggi	7.601	7.417	15.018	7%
Jumlah		90.392	84.575	174.967	83%

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

2.3.2.3.2.4. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, dan Akte Nikah

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah. Adapun jumlah penduduk menurut kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte nikah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.101
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, dan Akte Nikah
Kota Batu Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio jumlah penduduk yang memiliki KTP	-	(144.137 / 156.447) 0,92	(153.440 / 162.902) 0,94	126.831 / 158.539) 0,80	(143.925 / 159.917) 0,90
2	Jumlah keluarga yang memiliki KK	-	55.820	57.760	57.527	58.096
3	Jumlah penduduk yang melakukan pengurusan akte kelahiran	-	90.559	4.096	10.522	5.277
4	Jumlah balita berakte kelahiran	-	1.007	1.261	837	752
5	Jumlah pasangan nikah yang mempunyai akte nikah	175	95	78	73	62

Sumber : Data LKPJ AMJ Kota Batu 2007-2012.

2.3.2.3.2.5. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepesertaan KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa jumlah penduduk peserta KB telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh dinas terkait, hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat untuk be KB sangat besar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.102
Jumlah Penduduk Peserta KB
Kota Batu Tahun 2011

No.	Kecamatan	Peserta KB Aktif		
		Target	Pencapaian	Persentase
1	Batu	13.328	14.486	108,69
2	Bumiaji	7.074	7.036	99,46
3	Junrejo	9.558	10.481	109,66
Jumlah		29.960	32.003	106,82

Sumber : Data Kota Batu dalam Angka.

2.3.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.



2.3.2.4.1. Angkatan Kerja (Labor Force)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Batu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebesar 97.258 jiwa, tahun 2009 sebanyak 102.689 jiwa, tahun 2010 sebanyak 97.692 jiwa tahun 2011 sebanyak 99.081 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 101.733 jiwa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.103
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk angkatan kerja	97.259	102.689	97.692	99.081	101.733
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	131.491	138.075	138.350	139.706	140.985
3	Rasio (1) / (2) x 100%	73,97	74,37	70,61	70,92	72,16

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

2.3.2.4.2. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja dengan rumus PDRB dibagi jumlah pekerja.

Rasio produktivitas tenaga kerja di Kota Batu dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2008 rasio produktivitas tenaga kerja sebesar 28,50%, tahun 2009 sebesar 29,82%, tahun 2010 sebesar 35,28%, tahun 2011 sebesar 39,4% dan tahun 2012 sebesar 42,60%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.104
Produktivitas Tenaga Kerja
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	PDRB	2.524.000	2.851.689,98	3.255.765	3.697.778,68	4.185.987,62
2	Jumlah pekerja	88.555	95.629	92.274	94.555	98.261
3	Rasio (1) / (2)	28,50	29,82	35,28	39,4	42,60

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

2.3.2.4.3. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan



bakatnya masing-masing. Penghitungan kesempatan kerja menggunakan rumus jumlah ketersediaan lapangan kerja dibagi jumlah pekerja. Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Sektor mata pencaharian penduduk Kota Batu masih didominasi pada sector pertanian yaitu sebanyak 28.662 jiwa dan yang terkecil yaitu bekerja pada sector angkutan, pergudangan dan komunikasi yaitu sebanyak 1.888 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut lapangan usaha lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kota Batu Tahun 2011

No.	Uraian	Lapangan Usaha			
		Pertanian	Industri Pengolahan	Bangunan	Perdagangan, Restoran, dan Hotel
1	Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha	28.662	7.457	6.708	29.451

Lapangan Usaha				Jumlah
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	Jasa Kemasyarakatan	Lainnya (Pertambangan, Listrik & Air Minum)	
1.888	2.060	0	18.329	94.555

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

2.3.2.4.4. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun

Seringkali dijumpai adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja. Tingkat sengketa antara pengusaha dan pekerja per tahun dihitung dengan rumusan jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah perusahaan dikali seribu. Berdasarkan data, angka sengketa pengusaha Pekerja dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.106
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	6	1	4	4	3
2	Jumlah perusahaan	182	191	205	242	244
3	Angka sengketa pengusaha pekerja (1) / (2) x 1000	32,96	5,23	19,51	16,52	12,29

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.



2.3.2.4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali seribu. Jumlah pengangguran di Kota Batu cenderung terus mengalami penurunan, yang semula sebanyak 8.704 jiwa pada tahun 2008 menurun menjadi 3.472 jiwa pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.107
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	8.704	7.069	5.418	4.526	3.472
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	131.491	138.075	138.350	139.706	140.985
3	Rasio (1) / (2) x 1000	66,19	51,19	39,16	32,40	24,63

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

2.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2.3.2.5.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Dari sisi jumlah pegawai perempuan di lembaga pemerintah sudah cukup banyak dengan rata-rata di atas 55% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Tetapi dari sisi jabatan, untuk pegawai perempuan masih cukup terbatas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.108
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	5	5	5	5
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	18	18	17	17	17
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	66	66	80	87	87



4	Pekerja perempuan di pemerintah	1.359	1.359	2.135	2.236	2.332
5	Jumlah pekerja perempuan	3.244	3.244	3.256	3.256	3.256
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (4) / (5) x 100	41,89	41,89	65,57	68,67	71,62

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.5.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun untuk presentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 58,11 persen Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.109
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	1.885	1.885	-	-	-
2	Jumlah pekerja perempuan	3.244	3.244	-	-	-
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta (1) / (2) x 100%	58,11%	58,11%	-	-	-

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.5.3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data, jumlah kekekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2009 terjadi KDRT sebanyak 16 kali, tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 20 kali, tahun 2011 meningkat menjadi 21 kali dan tahun 2012 meningkat secara drastis menjadi 134 kali. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.110
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah KDRT	-	16	20	21	134
2	Jumlah Rumah Tangga	45.256	45.752	46.949	47.320	47.410
3	Rasio KDRT (1) / (2) x 100	-	0,034	0,042	0,044	0,28

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

Tabel 2.111
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah KDRT	Jumlah Rumah Tangga	Rasio KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 100)
1	Batu	63	21.195	0,30
2	Bumiaji	36	14.793	0,24
3	Junrejo	35	11.422	0,30
Jumlah se-Kota		134	47.410	0,28

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.6. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.2.6.1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Berdasarkan data, rata-rata jumlah anak perkeluarga antara 1,21 sampai dengan 1,23. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batu saat ini terkendali dengan ditandai pada penekanan jumlah kelahiran serta jumlah orang dalam satu keluarga. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.112
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah anak	58.834	61.420	62.117	62.574	62.784
2	Jumlah keluarga	48.581	49.831	50.595	51.252	51.785
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga (1) / (2)	1,21	1,23	1,23	1,22	1,21

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

Tabel 2.113
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Batu	29.713	22.622	1,31
2	Bumiaji	17.834	16.631	1,07
3	Junrejo	15.237	12.532	1,21
Jumlah		62.784	51.785	1,21

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.6.2. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kota Batu semakin meningkat, pada tahun 2008 sebesar 72,66%, tahun 2009 sebesar 73,84%, tahun 2010 sebesar 75,64%, tahun 2011 sebesar 79,30% dan tahun 2012 sebesar 79,58%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:



Tabel 2.114
Rasio Akseptor KB
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah akseptor KB	26.835	27.113	27.835	30.264	31.126
2	Jumlah pasangan usia subur	36.931	36.717	36.797	38.164	39.113
3	Rasio akseptor KB (1) / (2) x 100	72,66	73,84	75,64	79,30	79,58

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

Tabel 2.115
Rasio Akseptor KB
Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4 x 100)
1	Batu	13.879	17.410	79,72
2	Bumiaji	10.025	12.609	79,51
3	Junrejo	7.222	9.094	79,41
Jumlah		31.126	39.113	79,58

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.7. Komunikasi dan Informasi

2.3.2.7.1. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.116
Jumlah Jaringan Komunikasi
Kota Batu Tahun 2008 dan 2012

No.	Uraian	2008	2012
1	Jumlah jaringan telepon genggam	13	13
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1) + (2)	14	14

Sumber : Data Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

2.3.2.7.2. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Semakin besar rasio wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.



Tabel 2.117
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk
Kota Batu Tahun 2008 dan 2012

No.	Kecamatan	2008				
		Jumlah Penduduk	Jumlah Wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/3 x1000)	(7=5/3 x1000)
1	Batu	-	424	3	-	-
2	Bumiaji	-	268	0	-	-
3	Junrejo	-	214	0	-	-
Jumlah		-	906	3	-	-

2012				
Jumlah Penduduk	Jumlah Wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
(8)	(9)	(10)	(6=9/8 x1000)	(7=10/8x1000)
97.790	375	5	3,83	0,05
60.593	232	2	3,83	0,03
51.743	198	2	3,82	0,04
210.126	805	9	3,83	0,04

Sumber : Data Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

2.3.2.7.3. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.118
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Kota Batu Tahun 2008 dan 2012

No.	Uraian	2008	2012
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	18	20
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	10	10
Total jenis surat kabar (1) + (2)		28	30

Sumber : Data Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

2.3.2.7.4. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.



Tabel 2.119
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Kota Batu Tahun 2008 dan 2012

No.	Uraian	2008	2012
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	10
2	Jumlah penyiaran radio nasional	0	0
3	Jumlah penyiaran TV lokal	3	3
4	Jumlah penyiaran TV nasional	11	15
Total penyiaran radio/TV lokal (1) + (2) + (3) + (4)		19	28

Sumber : Data Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

2.3.2.8. Pertanahan

2.3.2.8.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

Tabel 2.120
Luas Lahan Bersertifikat
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas wilayah daratan	189.867.000	189.867.000	189.867.000	189.867.000	189.867.000
2	Luas tanah bersertifikat HGB	2.088.537	2.195.380	2.396.238	2.440.421	2.490.896
3	Luas tanah bersertifikat HGU	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4	Luas tanah bersertifikat HM	28.673.178	29.321.541	32.681.588	32.897.488	34.236.237
5	Luas tanah bersertifikat HPL	0	0	0	0	0
6	Total luas tanah bersertifikat	30.780.615	32.580.590	36.337.373	36.681.447	38.976.129
7	Persentase HGB dibanding luas daratan	1,10%	1,16%	1,26%	1,29%	1,31%
8	Persentase HGU dibanding luas daratan	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
9	Persentase HM dibanding luas daratan	15,10%	15,44%	17,21%	17,33%	18,03%
10	Persentase HGPL dibanding luas daratan	0	0	0	0	0
11	Persentase total luas lahan bersertifikat	16,21%	17,16%	19,14%	19,32%	20,53%

Sumber : Data Badan Pertanahan Kota Batu.

2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.9.1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam



pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Tabel 2.121
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	2008			2009		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Batu	8	3	0,37	8	8	1
2	Bumiaji	9	13	1,44	9	13	1,44
3	Junrejo	7	13	1,86	7	7	1
Jumlah		24	29	1,21	24	28	1,17

2010			2011			2012		
Jumlah LPM	Jumlah Klp. Binaan	Rata-Rata Jumlah Klp. Binaan	Jumlah LPM	Jumlah Klp. Binaan	Rata-Rata Jumlah Klp. Binaan	Jumlah LPM	Jumlah Klp. Binaan	Rata-Rata Jumlah Klp. Binaan
(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
8	15	1,87	8	22	2,75	8	29	3,63
9	17	1,89	9	19	2,11	9	24	2,67
7	11	1,57	7	21	3	7	16	2,28
24	43	1,79	24	62	2,58	24	69	2,87

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.9.2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Tabel 2.122
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	2008			2009		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Batu	8	8	1	8	8	1
2	Bumiaji	9	9	1	9	9	1
3	Junrejo	7	7	1	7	7	1
Jumlah		24	24	1	24	24	1



Tabel Lanjutan

2010			2011			2012		
Jumlah PKK	Jumlah Klp. Binaan	Rata-Rata Jumlah Klp. Binaan	Jumlah PKK	Jumlah Klp. Binaan	Rata-Rata Jumlah Klp. Binaan	Jumlah PKK	Jumlah Klp. Binaan	Rata-Rata Jumlah Klp. Binaan
(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
8	8	1	8	8	1	8	8	1
9	9	1	9	9	1	9	9	1
7	7	1	7	7	1	7	7	1
24	24	1	24	24	1	24	24	1

Sumber : Data BPMPKB Kota Batu.

2.3.2.9.3. Jumlah LSM yang Aktif

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tabel 2.123
Jumlah LSM Aktif
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah LSM terdaftar	12	14	16	17	19
2	Jumlah LSM tidak aktif	0	0	0	0	0
Jumlah LSM aktif (1) – (2)		12	14	16	17	19

Sumber : Data Kantor Kesbangpolinmas Kota Batu.

2.3.2.10. Perpustakaan

2.3.2.10.1. Jumlah Perpustakaan

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Tabel 2.124
Jumlah Perpustakaan
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	27	36	36	36	36
Total Perpustakaan (1) + (2)		28	37	37	37	37

Sumber : Data Kantor Perpustakaan Daerah Kota Batu.



2.3.2.10.2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Tabel 2.125
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	15.107	4.374	5.466	5.662	8.323
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
Total Perpustakaan (1) + (2)		15.107	4.374	5.466	5.662	8.323

Sumber : Data Kantor Perpustakaan Daerah Kota Batu.

2.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.3.2.11.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.126
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah polisi pamong praja	102	99	74	69	69
2	Jumlah penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527	210.126
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk (1) / (2) x 10.000	5,57	4,88	3,64	3,32	3,28

Sumber : Data Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.

2.3.2.11.2. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.



Tabel 2.127
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah linmas	1.580	1.650	1.645	1.600	1.670
2	Jumlah penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527	210.126
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk (1) / (2) x 10.000	86,39	81,42	80,85	77,09	79,47

Sumber : Data Kantor Kesbangpol Kota Batu.

2.3.2.11.3. Rasio Jumlah Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Tabel 2.128
Rasio Jumlah Poskamling Per Kecamatan
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Kecamatan	2008			2009		
		Jumlah Pos Kamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Pos Kamling	Jumlah Desa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Batu	50	8	6,25	50	4	12,5
2	Bumiaji	58	9	6,44	58	9	6,44
3	Junrejo	48	7	6,86	48	7	6,86
Jumlah		156	24	6,5	156	20	7,8

2010			2011			2012		
Jumlah Pos Kamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Pos Kamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Pos Kamling	Jumlah Desa	Rasio
(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
50	4	12,5	50	4	12,5	50	4	12,5
58	9	6,44	58	9	6,44	58	9	6,44
48	6	8	48	6	8	48	6	8
156	19	8,21	156	19	8,21	156	19	8,21

Sumber : Data dari Bagian Pemerintahan Kota Batu.

2.3.2.12. Pemuda dan Olahraga

2.3.2.12.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.



Tabel 2.129
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun 2011

No.	Kecamatan	KNPI	KT	FKPPI	REMAS
1	Batu	1	8	1	15
2	Bumiaji	1	9	1	10
3	Junrejo	1	7	1	8
Jumlah		3	24	3	33

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga & KONI Kota Batu.

2.3.2.12.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Tabel 2.130
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Batu	35	35	41	41	41
2	Bumiaji	20	20	24	24	24
3	Junrejo	24	25	27	27	27
Jumlah		79	80	92	92	92

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga & KONI Kota Batu.

2.3.2.12.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 1.131
Jumlah Kegiatan Olahraga
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Batu	2	2	4	4	6
2	Bumiaji	2	2	3	4	4
3	Junrejo	2	2	3	4	5
Jumlah		6	6	10	12	15

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga & KONI Kota Batu:



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut :

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.132
Angka Konsumsi RT per Kapita
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Total Pengeluaran RT	480.139	465.008	574.594	-	-
2	Jumlah RT	54.645	55.227	49.915	-	-
3	Rasio (1) / (2)	8,79	8,42	11,51	-	-

Sumber : Data Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu.
Catatan : Data tahun 2011 dan 2012 belum keluar.

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.133
Persentase Konsumsi RT Non Pangan
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	233.434	237.945	304.346	-	-
2	Total Pengeluaran	480.139	465.008	574.594	-	-
3	Rasio (1) / (2) x 100	48,62%	51,17%	52,97%	-	-

Sumber : Data Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu.

2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Tabel 2.134
Produktivitas Total Daerah Kota Batu

No.	Uraian	2008		2009		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PDRB	1.244.946,54	100,00	1.331.992,60	100,00	1.432.193,90	100,00	1.547.387,28	100,00
1.1	Pertanian	260.734,94	20,94	276.609,23	20,77	291.877,84	20,38	306.163,18	19,79
1.2.	Pertambangan & Penggalian	2.862,80	0,23	3.024,26	0,23	3.223,58	0,23	3.417,00	0,22
1.3.	Industri Pengolahan	92.800,24	7,45	97.984,13	7,36	104.082,34	7,27	110.355	7,13
1.4.	Listrik, Gas & Air bersih	18.688,04	1,50	20.357,01	1,53	22.178,68	1,55	24.148,01	1,56
1.5.	Konstruksi	18.369,29	1,48	20.655,02	1,55	23.261,36	1,62	26.514,25	1,71
1.6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	576.043,60	46,27	616.184,16	46,26	668.027,72	46,64	729.736,87	47,16
1.7.	Pengangkutan & Komunikasi	44.790,82	3,60	48.009,81	3,60	51.695,08	3,61	56.363,52	3,64
1.8.	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	56.294,06	4,52	60.108,19	4,51	65.405,56	4,57	71.027,65	4,59
1.9.	Jasa-jasa	174.362,75	14,01	189.060,80	14,19	202.441,74	14,14	219.661,37	14,20
2	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	147.716		162.499		158.312		138.376	

Sumber : Data Kota Batu dalam Angka.



2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dikategorikan dalam fasilitas yang mendukung aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, bank dan non bank, ketersediaan air bersih, listrik dan telepon, ketersediaan restoran, dan ketersediaan penginapan.

2.4.2.1. Aksesibilitas Wilayah

2.4.2.1.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Adapun rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2008 yaitu 0,073, tahun 2009 yaitu 0,064, tahun 2010 yaitu 0,054, tahun 2011 yaitu 0,048 dan tahun 2012 dengan rasio 0,044. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.135
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Panjang Jalan	399,08	399,08	399,08	399,08	399,08
2	Jumlah Kendaraan	5.475.000	6.205.000	7.320.000	8.195.000	9.125.000
3	Rasio (1) / (2)	0,073	0,064	0,054	0,048	0,044

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

2.4.2.1.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Adapun jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan semakin berkurangnya minat masyarakat untuk naik angkutan umum di, karenakan beberapa faktor penyebab, antara lain semakin membaiknya perekonomian masyarakat sehingga mampu membeli kendaraan sendiri serta akibat dari pelayanan angkutan yang kurang memadai. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah orang yang terangkut angkutan umum lihat tabel berikut:

Tabel 2.136
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah orang	Orang	6.214.137	5.918.226	5.635.405	5.363.000	5.170.000

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.



2.4.2.1.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun. Adapun jumlah orang yang melalui terminal untuk tahun 2008 sebanyak 6.214.137 jiwa, tahun 2009 sebanyak 5.918.226, tahun 2010 sebanyak 5.636.405 jiwa tahun 2011 sebanyak 5.363.000 dan tahun 2012 sebanyak 5.170.000. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.137
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Dermaga	0	0	0	0	0
2	Bandara	0	0	0	0	0
3	Terminal	6.214.137	5.918.226	5.635.405	5.363.000	5.170.000
Jumlah		6.214.137	5.918.226	5.635.405	5.363.000	5.170.000

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Batu.

2.4.2.2. Penataan Wilayah

2.4.2.2.1. Rencana Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Batu, pemanfaatn ruang lebih dominan untuk kawasan hutan, yaitu sekitar 53% dari luar wilayah Kota Batu, sedangkan untuk kawasan budidaya sekitar 47% dari luas wilayah Kota Batu. Adapun luas wilayah Kota Batu yaitu 19.908,70 hektar. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pemanfaatn ruang wilayah Kota Batu lihat tabel berikut:

Tabel 2.138
Rencana Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kota Batu

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Hutan lindung	3.563,30
2.	Taman hutan rakyat R. Suryo	5.342,50
3.	Hutan produksi	2.521,70
4.	Ruang Terbuka Hijau	1.777,70
5.	Kawasan pertanian	4.018,50
6.	Kawasan perumahan	2.104,50
7.	Kawasan perdagangan dan jasa	172,70
8.	Kawasan perkantoran	12,70
9.	Kawasan industri dan pergudangan	26,70
10.	Kawasan pariwisata	206,00
11.	Kawasan pertahanan dan keamanan	45,90
12.	Pelayanan umum	117,00
Jumlah		19.908,70

Sumber : Peraturan Daerah RTRW Kota Batu 2010-2030.



2.4.2.2.2. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah produktif Kota Batu tahun 2010 yaitu 75,07, tahun 2011 yaitu 74,35 dan tahun 2012 yaitu 73,41. Rasio luas wilayah produktif di Kota Batu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan luas lahan produktif semakin berkurang akibat dari dampak pembangunan. Untuk lebih jelasnya hita tabel berikut:

Tabel 2.139
Rasio Luas Wilayah Produktif
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Produktif	5.032,74	4.984,57	4.921,59
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	6.704	6.704	6.704
3	Rasio (1) / (2) x 100	75,07	74,35	73,41

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

2.4.2.2.3. Luas wilayah industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah industry di Kota Batu mengalami peningkatan, hal ini dikarena untuk industry, khususnya industry kecil dan menengah di Kota Batu mengalami peningkatan. Adapun rasio luas wilayah industry terhadap luas seluruh wilayah budiaya pada tahun 2010 yaitu 1,13, tahun 2011 yaitu 1,46 dan tahun 2012 yaitu 1,54. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.140
Rasio Luas Wilayah Industri
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Industri (Ha)	76	98	103
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	6.704	6.704	6.704
3	Rasio (1) / (2) x 100	1,13	1,46	1,54

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

2.4.2.2.4. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Diwilayah Kota batu terkait dengan wilayah banjir tidak ada, hal ini dikarenakan wilayah Kota Batu berada di daerah pegunungan dan kondisi lahannya cenderung bergelombang, lereng dan terjal, sehingga pada saat musim hujan air dengan cepat mengalir ke sungai. Adapun yang ada yaitu berupa kawasan tertentu yang terkadi genangan sesaat pada saat hujan dan dengan cepat menghilang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:



Tabel 2.141
Rasio Luas Wilayah Kebanjiran
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Kebanjiran	-	-	-
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	6.704	6.704	6.704
3	Rasio (1) / (2) x 100			

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

2.4.2.2.5. Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Di wilayah Kota Batu tidak ada wilayah yang kekeringan, hal ini dikarenakan selain wilayahnya yang dingin juga dikarenakan banyak sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian maupun kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.142
Rasio Luas Wilayah Kekeringan
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Kekeringan			
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	6.704	6.704	6.704
3	Rasio (1) / (2) x 100			

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

2.4.2.2.6. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.143
Rasio Luas Wilayah Perkotaan
Kota Batu Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Perkotaan			
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	6.704	6.704	6.704
3	Rasio (1) / (2) x 100			

Sumber : Data Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.

2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

2.4.2.3.1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan



taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Total jumlah bank umum dan BPR di Kota Batu pada tahun 2012 sebanyak 24 buah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.144
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Batu

No.	Sektor	Jumlah				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Bank Umum	3	3	1	-	15
1.1.	Konvensional	3	3	-	-	12
1.2.	Syariah	-	-	1	-	3
2	BPR	3	2	1	-	9
2.1.	Konvensional	3	-	-	-	8
2.2.	Syariah	-	2	1	-	1
Jumlah		6	5	2	-	24

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.
Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

2.4.2.3.2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-Cabangnya

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi).Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Jenis perusahaan asuransi di Kota Batu yaitu berupa perusahaan asuransi jiwa konvensional, dengan jumlah sebanyak 2 unit. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.145
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya di Kota Batu
Tahun 2008-2012

No.	Sektor	Jumlah				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional	0	0	0	0	0
1.2.	Syariah	0	0	0	0	0
2	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional	2	2	2	2	2
2.2.	Syariah	0	0	0	0	0
Jumlah		2	2	2	2	2

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.



2.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih

2.4.2.4.1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih (*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas hujan, sungai dan danau, mata air, sumur dangkal, dan sumur dalam. Rata-rata bahan baku air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu berupa air PDAM, sumur lindung, sungai dan Hippiam. Sedangkan prosesntase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2008 sebanyak 96%, tahun 2008 sebesar 90%, tahun 2009 sebesar 98%, tahun 2010 sebesar 90%, tahun 2011 sebesar 98% dan tahun 2012 sebesar 98%. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.146
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Batu
Tahun 2008-2012

No.	Sumber Air Bersih	2008	2009	2010	2011	2012
1	Leding (Perpipaan)	9.208	9.244	9.498	9.875	10.298
2	Sumur Lindung	8.208	7.946	8.105	8.272	8.132
3	Sumur Tidak Terlindung	0	0	0	0	0
4	Mata Air Terlindung	0	0	0	0	0
5	Mata Air Tidak Terlindung	0	0	0	0	0
6	Sungai	4.560	3.459	3.194	2.065	1.402
7	Danau/Waduk	0	0	0	0	0
8	Air Hujan	0	0	0	0	0
9	Air Kemasan	0	0	0	0	0
10	Lainnya (Swadaya/Hippam)	21.889	21.875	22.360	25.897	28.880
11	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	43.865	42.524	43.157	46.109	46.712
12	Jumlah Rumah Tangga	45.602	46.743	47.677	46.746	47.626
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11) / (12) x 100	96%	90%	90%	98%	98%

Sumber : Data PDAM Kota Batu.

2.4.2.5. Fasilitas Listrik dan Telepon

2.4.2.5.1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.



Tabel 2.147
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Batu
Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2012	2011	2010	2009	2008
1	RT dengan daya 450 watt	30.536	29.340	28.874	29.262	29.674
2	RT dengan daya 900 watt	21.808	19.740	18.053	16.414	15.468
3	RT dengan daya 1.300 watt	6.153	5.607	4.652	4.245	4.066
4	RT dengan daya 2.200 watt	1.877	1.706	1.519	1.404	1.331
5	RT dengan daya > 2.200 watt	593	539	486	444	428
6	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	60.967	56.932	53.584	51.769	50.967
7	Jumlah Rumah Tangga	-	-	-	-	-
8	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6) / (7) x 100	-	-	-	-	-

Sumber : Data PLN Kota Batu.

2.4.2.6. Ketersediaan Restoran

2.4.2.6.1. Jenis, dan Jumlah Restoran (Persentase Jumlah Restoran menurut Jenis dan Kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jenis dan jumlah restoran di Kota Batu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini akibat dari semakin berkembangnya sector pariwisata Kota Batu. Pada tahun 2008 jumlah restoran sebanyak 4 buah dan rumah makan sebanyak 20 buah, sedangkan tahun 2012 jumlah restoran menjadi 19 buah dan rumah makan menjadi 55 buah. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.148
Jenis dan Jumlah Restoran Kota Batu

No.	Uraian	2008		2012	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	4	400	19	1.900
2	Jenis Usaha Rumah Makan	20	1000	55	2.750

Sumber : Data Kantor Pelayanan Terpadu Kota Batu.

2.4.2.7. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.



2.4.2.7.1. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Sebagai Kota tujuan wisata, maka salah satu dampak yang ditimbulkan adalah berkembangnya sarana akomodasi perhotelan. Adapun jumlah penginapan, hotel di Kota Batu tahun 2012 yaitu hotel bintang 5 sebanyak 1 buah, hotel bintang 4 sebanyak 3 buah, hotel bintang 3 sebanyak 5 buah, hotel bintang 1 sebanyak 1 buah dan hotel non bintang sebanyak 60 buah. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.149
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Batu

No.	Jenis Penginapan/Hotel	2008			2012		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	Hotel Bintang 5	0	0	-	1	193	-
2	Hotel Bintang 4	3	393	-	3	393	-
3	Hotel Bintang 3	5	437	-	5	437	-
4	Hotel Bintang 2	0	0	-	0	0	-
5	Hotel Bintang 1	2	125	-	2	125	-
6	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	49	1616	-	49	1616	-
7	Total Jumlah penginapan/Hotel	59	2571	-	60	2764	-

Sumber : Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

2.4.3.1.1. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Kejadian kriminal di Kota Batu dalam satu tahun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2008 kejadian criminal sebanyak 210 kali, tahun 2009 sebanyak 373 kali, tahun 2010 sebanyak 245 kali, tahun 2011 sebanyak 292 kali dan tahun 2012 sebanyak 325 kali. Adapun jenis kriminal yang terjadi didominasi oleh kasus pencurian. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:



Tabel 2.150
Angka Kriminalitas Kota Batu

No.	Jenis Kriminalitas	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah kasus narkoba	10	14	18	35	43
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	0	2	3	2
3	Jumlah kejahatan seksual	2	2	2	3	8
4	Jumlah kasus penganiayaan	16	10	16	14	21
5	Jumlah kasus pencurian	152	297	181	205	202
6	Jumlah kasus penipuan	28	48	23	30	46
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	2	3	2	3
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	210	373	245	292	325
9	Jumlah penduduk	182.885	202.636	203.459	207.527	210.126
10	Angka kriminalitas (8) / (9) x 10.000	11,48	18,41	12,04	14,07	15,47

Sumber : Data dari Polres Kota Batu dan Kantor Kesbangpol Kota Batu.

2.4.3.1.2. Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi di Kota Batu selama lima tahun terakhir fluktuatif, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 11 kali, tahun 2009 sebanyak 30 kali, tahun 2010 sebanyak 21 kali, tahun 2011 sebanyak 19 kali dan tahun 2012 sebanyak 21 kali. Adapun kejadian demonstrasi lebih didominasi oleh demonstrasi bidang politik. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.151
Jumlah Demonstrasi Kota Batu

No.	Bidang Demonstrasi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Politik	8	25	17	15	15
2	Ekonomi	1	2	0	0	1
3	Ketenagakerjaan	2	3	4	4	5
Jumlah demonstrasi		11	30	21	19	21

Sumber : Data Kantor Kesbangpol Kota Batu.

2.4.3.1.3. Kemudahan Perijinan dan Lama Proses Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan dan lama proses perijinan. Pada prinsipnya dalam bidang perijinan di Kota Batu telah didukung dengan perda dan kantor pelayanan perijinan untuk mempermudah



pelayanan bagi masyarakat. Jenis perijinan yang dominan di Kota Batu yaitu berupa IMB dan Ho. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.152
Kemudahan Perijinan dan Lama Proses Perijinan Kota Batu

No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp.)
1	SIUP	6	11	0.-
2	TDP	6	11	0.-
3	IUI	6	11	0.-
4	TDI	6	11	0.-
5	IMB	12	11	Sesuai Perda No 9 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu
6	HO	12	8	Sesuai Perda No 9 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu

Sumber : Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

2.4.3.1.4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah.

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Adapun jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di Kota Batu lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.153
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Batu

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	0	1	7	6	1
2	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	0		7	6	1
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	0	2	6	2	1
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	0	2	6	2	1

Sumber : Data Bagian Hukum Setda Kota Batu.

2.4.3.1.5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Adapun jenis perda yang mendukung iklim usaha di Kota Batu yaitu perda terkait perijinan dan perda terkait lalu lintas barang dan jasa. Sedangkan untuk jumlah perda dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.154
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Batu
Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Perda terkait perijinan	0	0	-	6	0
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	0	0	13	9	2
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber : Data Bagian Hukum Setda Kota Batu.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan (Tingkat Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Adapun rasio ketergantungan di Kota Batu pada tahun 2008 yaitu 39,08%, tahun 2009 yaitu 46,76%, tahun 2010 yaitu 47,06%, tahun 2011 yaitu 48,54% dan tahun 2012 yaitu 49,04%. Untuk lebih jelasnya lihat pada taeb1 berikut:

Tabel 2.155
Rasio Ketergantungan Kota Batu
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	42.040	48.624	48.899	50.255	51.579
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	9.354	15.937	16.210	17.566	17.562
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) + (2)	51.394	64.561	65.109	67.821	69.141
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	131.491	138.075	138.350	139.706	140.985
5	Rasio ketergantungan (3) / (4) x 100%	39,08%	46,76%	47,06%	48,54%	49,04%

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum mengenai perkembangan pengelolaan keuangan di Kota Batu. Adapun yang menjadi fokus dari bahasan adalah kinerja pelaksanaan APBD lima tahun terakhir dan neraca daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan/Unit Kerja Pemerintah Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui desentralisasi dan otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian pengelolaan keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaannya. Selama tahun 2008–2012, pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber penerimaan guna mendukung beban belanja pembangunan daerah. Secara garis besar kinerja APBD Kota Batu tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Keuangan Kota Batu
Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
PDRB ADHB (Jutaan)	2,524,551.63	2,851,689.98	3,251,565.04	3,554,756.51	2,851,689.98
PDRB ADHK (Jutaan)	1,244,946.54	1,328,892.60	1,422,065.90	1,492,248.52	1,328,892.60
PDRB/KAPITA (Ribuan)	13,578.33	15,156.87	17,096.94	18,476.64	15,156.87
APBD (Jutaan)	311,061.13	368,477.57	418,326.20	446,028.33	495.994,38
Rasio APBD/PDRB	12.32	12.92	12.87	12.55	12.92
PAD (Jutaan)	14,202.63	17,386.74	17,735.60	30,257.31	38.794,38
Rasio PAD/APBD	4.57	4.72	4.24	6.78	4.72

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu, 2012 – Data diolah

Tabel di atas mengungkapkan bahwa PDRB Kota Batu baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan yang berkelanjutan selama kurun waktu 2008-2012. Peningkatan tersebut disertai dengan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dalam periode yang sama yakni pada tahun 2008 sebesar Rp. 13.578,33 ribu, pada tahun 2009 menjadi Rp. 11.156,87 ribu pada tahun 2010 sebesar Rp. 17.096,94 ribu, tahun 2011 sebesar Rp. 18.476,64 ribu dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.156,87 ribu. Demikian pula besarnya APBD Kota Batu selama periode tersebut juga mengalami peningkatan yang berkelanjutan yakni pada tahun 2008 sebesar Rp.311.061,13 juta, pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi Rp. 368.477,57 juta, pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 418.326,20 juta, tahun 2011 APBD sebesar Rp. 446.028,33 juta dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 495.994,38 juta. Kualitas daya ungkit (*leverage*) APBD yang mengindikasikan peran APBD terhadap pembentukan PDRB masih berada pada kisaran 12% dan mengalami perbaikan (penurunan) dalam waktu lima tahun terakhir dari pada tahun 2008 sebesar 12,32, tahun 2009 menjadi 12,92, tahun 2010 sebesar 12,87, tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 12,55 dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 12,92. Di sisi lain PAD secara kuantitas juga mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 4,57, tahun 2009 sebesar 4,72, tahun 2010 sebesar 4,24 pada tahun 2011 sebesar 6,78 dan tahun 2012 sebesar 4,72. Proporsi PAD yang meningkat mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan (*financial dependency*) pembangunan dari dana luar (pusat dan provinsi) semakin kecil. Pada tahun 2013 target PAD Kota Batu ditargetkan sebesar Rp. 48 milyar, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk terus menarik investasi



dan melakukan reformasi birokrasi, review terhadap Perda terkait, perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dunia usaha dan adanya pajak bumi bangunan dialihkan ke daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja.

Dimana aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lian-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

A. Pendapatan

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah.

Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pendapatan selama lima tahun terakhir (tahun 2008 sampai dengan tahun 2012) mengalami pertumbuhan/kenaikan yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 10,90%. Lebih jelasnya lihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu
Tahun 2008 s/d 2012

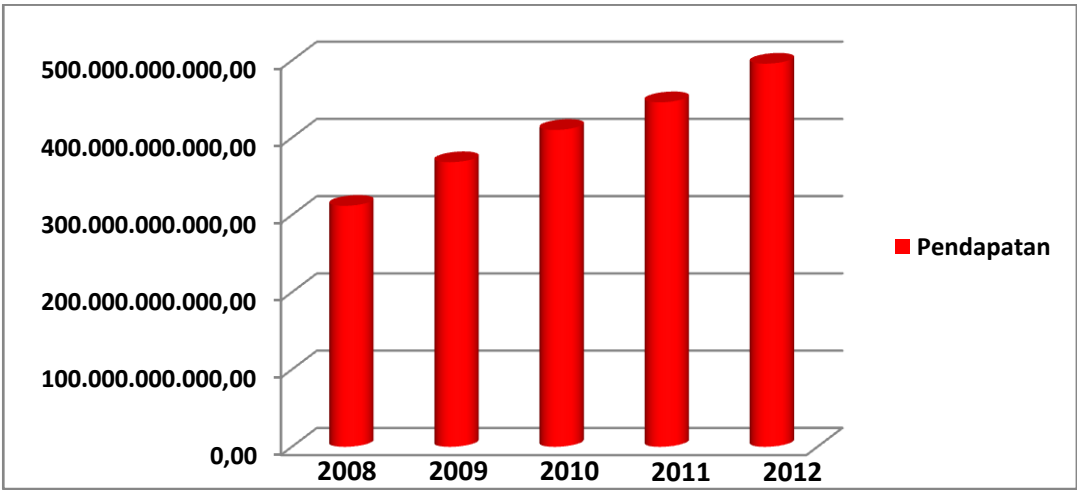
No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	
1.	PENDAPATAN	311.999.327.571,76	368.477.569.487,44	410.224.971.247,95	446.028.334.466,14	495.994.989.183,38	10,90
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14.202.630.312,49	17.386.741.568,44	17.735.602.953,95	30.241.864.301,14	38.794.059.670,38	20,92
1.1.1.	Pajak Daerah	6.841.187.889,00	7.861.348.123,00	9.529.225.958,00	19.404.220.619,00	28.187.860.661,00	28,13
1.1.2.	Retribusi Daerah	2.757.399.233,00	3.087.977.630,00	3.478.065.774,00	4.048.972.418,00	4.925.276.704,00	13,45
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	749.099.174,91	876.068.906,11	924.903.592,24	1.543.221.141,59	1.690.951.280,48	17,14
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	3.854.944.015,58	5.561.346.909,33	3.803.407.629,71	5.245.450.122,55	3.989.971.024,90	-4,88
1.2.	Dana Perimbangan	274.133.654.159,00	285.344.171.420,00	308.784.465.486,00	332.441.321.487,00	391.468.206.744,00	8,43
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	23.437.981.971,00	24.047.370.443,00	30.597.701.590,00	32.648.541.969,00	24.520.343.885,00	-0,73
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak	4.197.864.188,00	10.124.444.977,00	12.188.403.696,00	8.716.889.518,00	25.593.197.859,00	25,40
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	215.977.808.000,00	218.135.356.000,00	247.723.360.200,00	273.492.290.000,00	324.768.945.000,00	9,54



1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	30.520.000.000,00	33.037.000.000,00	18.275.000.000,00	17.583.600.000,00	16.585.720.000,00	-20,78
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.	767.130.000,00	3.779.175.000,00	38.899.457.000,00	47.495.658.450,00	30.008.080.000,00	32,45
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	767.130.000,00	3.779.175.000,00	38.899.457.000,00	47.495.658.450,00	30.008.080.000,00	32,45
1.2.3.	Transfer Pemerintah Propinsi	20.951.015.026,27	21.532.376.499,00	31.375.335.808,00	27.636.390.228,00	30.083.932.057,00	7,17
1.2.3.1	Dana bagi hasil pajak propinsi	20.951.015.026,27	21.532.376.499,00	31.375.335.808,00	27.636.390.228,00	30.083.932.057,00	7,17
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.944.898.074,00	40.435.105.000,00	13.430.110.000,00	8.213.100.000,00	5.640.710.712,00	-53,75
1.3.1	Pendapatan Lainnya	1.944.898.074,00	40.435.105.000,00	13.430.110.000,00	8.213.100.000,00	5.640.710.712,00	-53,75

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batu
Tahun 2008-2012



Penerimaan pendapatan selanjutnya dialokasikan sebagai belanja untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Tentunya setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan.



Tabel 3.3
Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batu
Tahun Anggaran 2008–2012

URAIAN	PROPORSI					PERTUMBUHAN				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	13.13%	18.46%	11.33%	8.73%	4.06%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.57%	4.72%	4.32%	6.78%	6.79%	6.92%	22.42%	2.01%	70.60%	4.09%
Pendapatan Pajak Daerah	2.20%	2.13%	2.32%	4.35%	4.17%	26.93%	14.91%	21.22%	103.63%	-0.18%
Hasil Retribusi Daerah	0.89%	0.84%	0.85%	0.91%	1.00%	21.25%	11.99%	12.63%	16.41%	14.23%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.24%	0.24%	0.23%	0.35%	0.32%	3.16%	16.95%	5.57%	66.85%	-2.80%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.24%	1.51%	0.93%	1.18%	1.29%	-21.22%	44.27%	-31.61%	38.32%	14.05%
DANA PERIMBANGAN	88.13%	77.44%	75.27%	78.75%	82.37%	15.28%	4.09%	8.21%	13.75%	8.85%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	8.88%	9.27%	10.43%	9.27%	8.47%	19.86%	23.65%	25.21%	-3.36%	-4.97%
Dana Alokasi Umum	69.43%	59.20%	60.39%	65.53%	69.97%	14.87%	1.00%	13.56%	17.99%	11.11%
Dana Alokasi Khusus	9.81%	8.97%	4.45%	3.94%	3.93%	14.25%	8.25%	-44.68%	-3.78%	3.76%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.31%	17.84%	20.40%	14.47%	10.84%	-4.86%	189.32%	27.31%	-22.90%	-22.03%
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.06%	5.84%	7.65%	1.84%	5.67%	58.12%	-1.94%	45.71%	-73.82%	220.24%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.25%	1.03%	9.48%	6.43%	4.71%	-92.33%	392.64%	929.31%	-26.24%	-23.76%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00%	10.97%	3.27%	6.20%	0.46%	2,31%	3,09%	-66.79%	105.78%	-92.23%

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu dan Hasil Analisis

Dari tahun ke tahun, masing-masing komponen pendapatan daerah umumnya selalu terealisasi melebihi target yang ditetapkan, yang berarti menunjukkan bahwa kinerja pendapatan relatif baik. Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada masalah dalam upaya pencapaian target pendapatan. Komposisi pendapatan yang berturut-turut didominasi oleh dana perimbangan (rata-rata 82,15%), lain-lain pendapatan daerah yang sah (rata-rata 9,42%) diikuti PAD (rata-rata 8,43%); menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan. Padahal tujuan otonomi antara lain adalah untuk memberi ruang bagi kreativitas pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, maka Pemerintah Kota Batu senantiasa dan terus berusaha untuk meningkatkan proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala yang menghambat peningkatan PAD secara signifikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah, dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Permasalahan sistem dan kualitas pelayanan
- Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu misi

pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dalam hal apapun, khususnya peningkatan kualitas pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya peningkatan kualitas pelayanan umum tersebut diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan, yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat. Terkait dengan PAD, khususnya berkenaan dengan penghimpunan pajak dan retribusi daerah, pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan belum dapat secara optimal meng-cover dinamika perkembangan dan kebutuhan yang ada.

- b) Permasalahan perencanaan penerimaan pendapatan daerah
- Perencanaan target beberapa jenis pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Batu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jenis pajak langsung yang meliputi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hotel, memiliki karakter yang mudah diprediksi karena adanya potensi yang dapat diketahui secara pasti. Sedangkan retribusi daerah terdapat beberapa jenis retribusi yang memiliki karakter yang sulit diprediksi. Untuk itu, perencanaan target pendapatan selama ini dilakukan secara konservatif, dengan peluang melakukan koreksi atas hasil evaluasi atas kondisi dan perkembangan riil. Optimasi penggalan potensi pajak dan retribusi serta perbaikan sistem atau mekanisme pemungutan dan variabel-variabel perhitungan pajak dan retribusi tersebut tidak hanya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan. Sedangkan mengenai kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari usaha-usaha daerah masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan daerah lebih merupakan instansi teknis yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dalam kerangka pemerintahan dan pembangunan di bidang masing-masing, sehingga fungsi regulatifnya memang lebih diutamakan dibanding fungsi *budgetair* untuk menggali potensi PAD.
- c) Permasalahan dana perimbangan
- Sistem perhitungan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan mengandung diskresi yang besar terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Oleh karenanya, kendati formula dasarnya telah ada namun Pemerintah Daerah tetap sulit untuk melakukan simulasi perhitungan yang riil sebagai dasar dalam menyusun proyeksi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang retribusi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, namun dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- b) Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c) Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas kerja dan kinerja aparatur.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/dividen atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang/saham maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah);
- e) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna optimasi pemanfaatan aset daerah;
- f) Meningkatkan penerimaan lain yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah; dan
- g) Mengupayakan peningkatan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi serta dana-dana khusus yang lain dari pemerintah pusat.



B. Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 59 Tahun 2007 menegaskan pembedaan Belanja Daerah menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

Berdasarkan data diketahui bahwa belanja tidak langsung dan belanja langsung Kota Batu dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yaitu belanja tidak langsung pada tahun 2008 sebesar Rp. 139,462,229,932.59, pada tahun 2009 sebesar Rp. 167,589,420,631.00, pada tahun 2010 sebesar Rp. 221,238,520,657.00, pada tahun 2011 sebesar Rp. 251,066,445,194.00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 267,968,911,530.00. Sedangkan untuk belanja langsung pada tahun 2008 sebesar Rp. 147.227.764.720,85, tahun 2009 sebesar 227.831.643.440,50, Rp. tahun 2010 sebesar Rp. 179.522.328.097,53, tahun 2011 sebesar Rp. 246.133.545.015,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 214.816.547.247,00. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan grafik berikut:

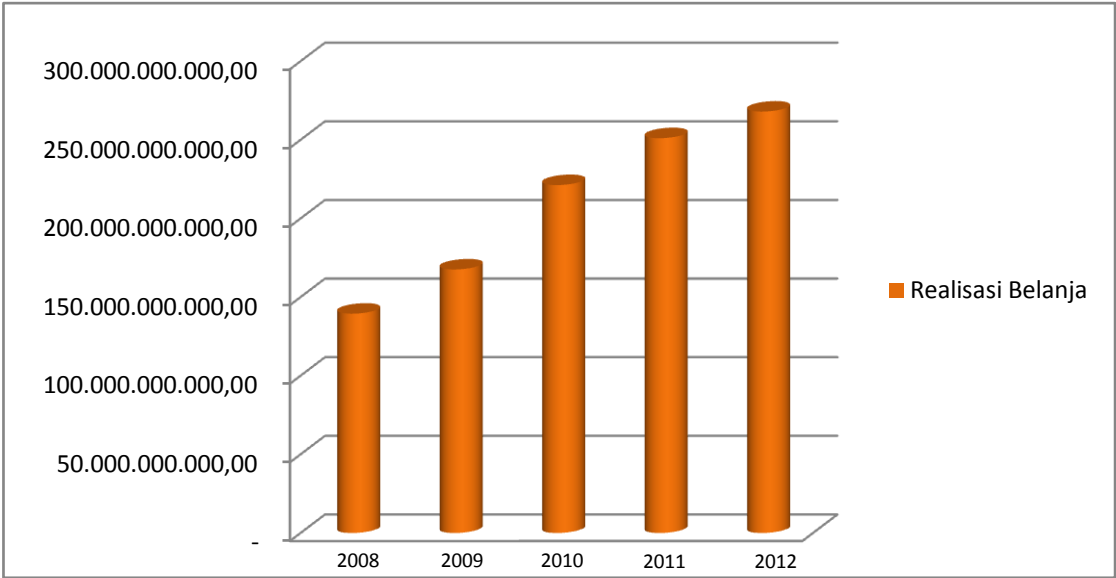
Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Daerah Kota Batu
Tahun Anggaran 2008–2012

URAIAN	TAHUN				
	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	139,462,229,932.59	167,589,420,631.00	221,238,520,657.00	251,066,445,194.00	267,968,911,530.00
Belanja Pegawai	104,390,389,832.59	126,261,616,131.00	170,547,732,535.00	207,546,500,594.00	217,133,640,830.00
Belanja Hibah	5,687,949,000.00	7,086,000,000.00	16,639,360,000.00	15,577,147,600.00	24,774,220,000.00
Belanja Bantuan Sosial	13,970,944,100.00	17,638,179,500.00	15,415,486,050.00	8,922,580,000.00	6,826,100,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15,412,947,000.00	15,502,575,000.00	17,411,876,000.00	18,520,217,000.00	18,234,950,700.00
Belanja Tidak Terduga	-	1,101,050,000.00	1,224,066,072.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	147,227,764,720.85	227,831,643,440.50	179,522,328,097.53	246,133,545,015.00	214,816,547,247.00
Belanja Pegawai	27,171,471,148.41	30,871,826,731.00	22,846,223,800.00	20,774,252,515.87	33,046,630,200.00
Belanja Barang dan Jasa	40,321,293,231.44	53,857,159,361.50	59,133,041,387.50	90,497,114,104.53	77,574,219,344.00
Belanja Modal	79,735,000,341.00	143,102,657,348.00	97,543,062,910.03	134,862,178,394.60	104,195,697,703.00

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu



Grafik 3.2
Proyeksi Pendapatan
Kota Batu Tahun 2008-2012



Tabel 3.5
Proporsi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Batu
Tahun Anggaran 2008-2012

URAIAN	PROPORSI					PERTUMBUHAN				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
BELANJA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	16.23%	37.93%	1.35%	8.76%	10.77%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	48.65%	50.19%	55.20%	53.98%	55.50%	27.96%	42.30%	11.48%	6.35%	13.89%
Belanja Pegawai	36.41%	39.74%	42.56%	43.74%	44.98%	20.03%	50.52%	8.54%	11.79%	13.89%
Belanja Hibah	1.98%	1.79%	4.15%	3.24%	5.13%	1991.16%	24.58%	134.82%	-15.26%	75.70%
Belanja Bantuan Sosial	4.87%	4.46%	3.85%	2.71%	1.41%	10.63%	26.25%	-12.60%	23.26%	42.30%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.38%	3.92%	4.34%	4.26%	3.78%	73.28%	0.58%	12.32%	6.56%	-1.72%
Belanja Tidak Terduga	0.00%	0.28%	0.31%	0.03%	0.21%	-100.00%	#DIV/0!	11.17%	-88.40%	604.23%
BELANJA LANGSUNG	51.35%	49.81%	44.80%	46.02%	44.50%	6.94%	33.78%	-8.85%	11.73%	7.10%
Belanja Pegawai	9.48%	0.00%	5.70%	4.94%	6.84%	20.03%	-100.00%	#DIV/0!	-5.74%	53.46%
Belanja Barang dan Jasa	14.06%	13.62%	14.76%	16.68%	16.07%	23.61%	33.57%	9.80%	22.94%	6.71%
Belanja Modal	27.81%	36.19%	24.34%	24.40%	21.58%	-3.25%	79.47%	-31.84%	9.02%	-2.02%

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu dan Hasil Analisis



Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah Kota Batu
Tahun 2013-2017

Uraian	Rata2 Pertumbuh- an (%)	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Tidak Langsung	33.57	333,423,018,019.01	363,929,865,095.53	392,192,200,476.08	425,026,803,820.20	448,127,166,986.95
Belanja Pegawai	9.70	264,015,677,645.93	291,914,890,073.94	317,469,036,439.10	347,490,844,139.74	367,669,577,567.49
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	3.63	40,294,782,790.56	41,757,483,405.86	43,273,280,053.49	44,844,100,119.43	46,471,940,953.77
Belanja Bantuan Sosial	3.63	24,004,726,435.64	24,876,098,005.25	25,779,100,362.84	26,714,881,706.01	27,684,631,911.94
Belanja Bagi Hasil	9.47	151,328,940.96	165,663,063.82	181,354,938.06	198,533,172.09	217,338,556.33
Belanja Bantuan Keuangan	6.38	2,883,902,205.92	3,067,895,166.66	3,263,626,878.29	3,471,846,273.13	3,693,350,065.36
Belanja Tidak Terduga	3.63	2,072,600,000.00	2,147,835,380.00	2,225,801,804.29	2,306,598,409.79	2,390,327,932.07
Belanja Langsung	0.92	190,875,284,404.42	204,571,193,652.15	218,903,964,880.17	235,252,464,462.00	251,124,757,143.66
Belanja Pegawai	9.70	48,807,981,714.79	53,965,646,070.88	58,689,783,363.21	64,239,847,110.80	67,970,243,960.53
Belanja Barang dan Jasa	6.38	64,782,183,160.71	68,675,592,368.67	73,057,095,161.79	77,981,143,375.69	83,517,804,555.37
Belanja Modal	6.38	77,285,119,528.92	81,929,955,212.61	87,157,086,355.17	93,031,473,975.51	99,636,708,627.77
Jumlah	34.49	524,298,302,423.43	568,501,058,747.69	611,096,165,356.25	660,279,268,282.20	699,251,924,130.61

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu dan Hasil Analisis

Selanjutnya berdasarkan realisasi penyerapan belanja secara nasional berdasarkan persentase menunjukkan perbandingan antara besaran realisasi penyerapan dengan anggaran belanja (konsolidasi) tahun 2012 berdasarkan hasil monitoring realisasi APBD yang dilakukan oleh kementerian keuangan, penyerapan belanja secara nasional cenderung relatif sama dengan periode tahun sebelumnya yaitu tahun 2011. Penyerapan belanja yang cenderung menumpuk di akhir tahun dan penyerapan belanja yang tidak mencapai 100% menyebabkan munculnya dana idle (tidak tergunakan). Dana idle pemda dalam laporan ini dilihat dari simpanan pemda dibank umum, kepemilikan BPD dalam bentuk SBI dan kepemilikan BPD dalam bentuk SUN. Untuk lebih jelasnya lihat grafik berikut:



Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi APBD (Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota)
Tahun 2011 dan Tahun 2012



Adapun realisasi penyerapan APBD Kota Batu pada prinsipnya sama jika dibandingkan terhadap realisasi penyerapan APBD secara nasional, yaitu penyerapan belanja yang cenderung menumpuk di akhir tahun serta penyerapan tidak mencapai 100% dan menjadi dana idle (tidak tergunakan). Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan APBD Kota Batu dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2008 s/d 2011 lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Kota Batu
Tahun Anggaran 2008–2011

URAIAN	Realisasi Penyerapan Anggaran dalam persen (%)			
	2008	2009	2010	2011
BELANJA TIDAK LANGSUNG	88,37	90.43	93.65	97.02
Belanja Pegawai	92,27	89.90	95.06	97.23
Belanja Hibah	54,67	90.76	81.33	93.80
Belanja Bantuan Sosial	96,34	91.39	90.44	98.23
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	99,83	98.29	98.99	98.41
Belanja Tidak Terduga	-	55.05	69.95	28.40
BELANJA LANGSUNG	66,24	88.12	86.40	87.77
Belanja Pegawai	-	84.45	91.48	92.01
Belanja Barang dan Jasa	74,02	81.90	90.30	91.66
Belanja Modal	66,14	91.59	83.14	84.53

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu

Faktor penyebab pelaksanaan APBD tidak optimal yang ditandai dengan rendahnya penyerapan/realisasi APBD pada awal tahun dan

menumpuk di akhir tahun serta penyerapan tidak sampai 100% di Kota Batu sebagai berikut:

- a. Secara umum, permasalahan belanja meliputi 2 (dua) hal pokok, yakni: efisiensi dan efektivitas. Dari aspek efisiensi, nilai realisasi belanja selalu berada di bawah pagu anggaran belanjanya; yang dari situ dapat dipandang sebagai terjadi penghematan. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut fenomena terjadinya efisiensi belanja tersebut bukan sepenuhnya diperoleh dari penghematan belanja; dalam arti, terdapat kendala teknis dan nonteknis yang menghambat realisasi anggaran belanja program/kegiatan tertentu.
- b. Ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana merupakan salah satu kendala teknis yang menghambat penyerapan anggaran. Terlambatnya penetapan dana oleh pemerintah pusat, juga menjadi salah satu penyebab pelaksanaan program dan kegiatan ada yang tertunda sampai mendekati batas akhir tahun pelaksanaan anggaran. Konsekuensinya, alokasi belanja yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap maksimal pada tahun anggaran berjalan, bahkan kadang tertunda. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, yang disebabkan oleh karena persoalan teknis anggaran maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Menjadi catatan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik beranggaran besar cenderung memerlukan kejelian perencanaan dan persiapan ekstra. Hal inilah yang tampil sebagai kendala dalam beberapa kasus.
- c. Selanjutnya, efektivitas belanja berkaitan dengan ketepatan penggunaan uang dalam mencapai sasaran pelaksanaan program/kegiatan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas belanja, penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan bahwa setiap penggunaan uang dalam belanja harus disertai dengan capaian kinerja. Dalam beberapa hal terdapat kesulitan bagi SKPD dalam menyusun dan menetapkan target kinerja yang tepat, sehingga beberapa program/kegiatan terkesan reaktif (bukan responsif), yang pada akhirnya bermuara pada inefektivitas belanja.

Solusi atas permasalahan belanja di atas, ditempuh melalui beberapa skenario berikut:

- a. Mensinkronkan waktu pelaksanaan kegiatan dengan penetapan anggaran, sebab terlambatnya penetapan APBD akan menghambat pelaksanaan APBD. Tertundanya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana perimbangan, dapat dicegah (atau dikurangi intensitasnya) dengan



- membangun koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan dana perimbangan dan proses penetapan APBD;
- b. Melakukan persiapan-persiapan secara lebih teliti dan cermat serta koordinasi secara konsisten terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran, agar dengan demikian realisasi anggaran dapat lebih efektif sekaligus efisien;
 - c. Menyusun *Term of Reference* (TOR) untuk setiap usulan program/kegiatan pembangunan yang diajukan secara lebih cermat, yang sekaligus merupakan proses pembelajaran bagi SKPD mengenai arti penting indikator kinerja bagi keterukuran dan ketertanggungjawaban hasil pelaksanaan setiap program/kegiatan yang akan diusulkan dan dikelolanya.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

A. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2012, Kota Batu memiliki aset senilai Rp. 1.021.285.407.528,86. Pertumbuhan aset selama 2008-2012 tercatat 7,96% per tahun. Yang

terbesar nilainya adalah aset tetap, yaitu sebesar Rp. 854.744.850.061,79 pada tahun 2012.

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kota Batu pada tahun 2010 sebesar Rp. 41.050.308.035,54, tahun 2011 sebesar Rp. 73.850.883.860,67 dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 131.381.955.826,28. Rata-rata pertumbuhan aset lancar ini sebesar 28,29% per-tahun. Peningkatan aset lancar ini disebabkan oleh kas daerah akibat dari sisa lebih dari tahun anggaran (Silpa) akibat dari tidak terserapnya kegiatan.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang Kota Batu mengalami pertumbuhan yang cukup kecil dengan rata-rata 0,27 % per-tahun. Pada tahun 2010, investasi jangka panjang sebesar Rp. 15.407.316.403,74. namun tahun 2011 mengalami penurunan dengan investasi sebesar Rp 9.656.282.749,74 dan pada tahun 2012 investasi jangka panjang mengalami peningkatan menjadi Rp. 15.496.282.749,74. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah serta investasi non permanen.

B. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Batu pada tahun 2012 mencapai Rp 1.021.193.551.205,86. Nilai ekuitas dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi yaitu sebesar Rp. 889.917.296.702,58 pada tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,95% per-tahun.



Tabel. 3.8
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Batu
Tahun 2010-2012

No.	Uraian	2010	2011	2012	Rata-Rata Pertumbuh- an (%)
1.	ASET				
1.1.	ASET LANCAR	41.050.308.035,54	73.850.883.860,67	131.381.955.826,28	28,29
1.1.1.	Kas	31.632.370.048,05	40.906.063.283,33	99.193.497.666,21	
1.1.2.	Investasi Jangka Panjang	-	-	-	
1.1.3.	Piutang	3.086.209.634,00	26.467.079.201,00	26.355.172.219,00	
1.1.4.	Piutang Lain-Lain	4.222.122.452,99	3.868.674.752,33	3.813.632.245,33	
1.1.5.	Persediaan	2.109.605.900,50	2.609.066.624,01	2.019.653.695,74	
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	15.407.316.403,74	9.656.282.749,74	15.496.282.749,74	0,27
1.2.1.	Investasi Non Permanen	4.236.750.000,00	647.115.000,00	6.487.115.000,00	
1.2.2.	Investasi Permanen	11.170.566.403,74	9.009.167.749,74	9.009.167.749,74	
1.3.	ASET TETAP	670.956.528.565,85	795.277.862.365,20	854.744.850.061,79	6,04
1.3.1.	Tanah	182.937.322.664,00	199.654.705.784,00	199.654.705.784,00	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	139.924.820.914,70	149.683.612.005,30	159.394.911.897,89	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	182.302.332.941,00	199.538.692.744,75	213.770.321.129,75	
1.3.4.	Jalan, Irigasi, & Jaringan	137.397.403.514,90	178.153.237.062,90	212.409.337.051,90	
1.3.5.	Aset Tetap lainnya	21.569.288.531,25	25.511.043.093,25	28.408.406.868,25	
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	6.825.360.000,00	42.736.571.675,00	41.107.167.330,00	
1.4.	DANA CADANGAN	-	-	-	
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	
1.5.	ASET LAINNYA	16.054.437.274,90	18.443.790.008,05	19.676.163.891,05	5,08
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	
1.5.4.	Aset tak berwujud	-	372.302.929,00	1.578.847.212,00	
1.5.5.	Aset lain-lain	16.054.437.274,90	18.071.487.079,05	18.097.316.679,05	
	JUMLAH ASET DAERAH	743.468.590.280,03	897.228.818.983,66	1.021.299.252.528,86	7,92
2.	KEWAJIBAN	496.433.864,00	763.218.323,00	91.856.323,00	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	
2.1.5.	Pendapatan diterima dimuka	496.433.864,00	91.856.323,00	91.856.323,00	



2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	671.362.000,00	-	
3.	EKUITAS DANA	741.624.073.416,03	902.228.100.660,66	1.021.193.551.205,86	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	40.553.874.171,54	73.087.665.537,67	131.276.254.503,28	28,55
3.1.1.	SILPA	31.632.370.048,05	40.880.387.115,19	99.155.725.898,07	
3.1.2.	Cadangan piutang	7.308.332.086,99	30.335.753.953,33	30.168.804.464,33	
3.1.3.	Cadangan persediaan	2.109.605.900,50	2.609.066.624,01	2.019.653.695,74	
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka	(496.433.864,00)	(763.218.323,00)	(91.856.323,00)	
2.1.5.	Pendapatan yang ditanggguhkan	-	25.676.168,14	23.926.768,14	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	701.070.199.244,49	829.140.435.122,99	889.917.296.702,58	5,95
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	15.407.316.403,74	15.496.282.749,74	15.496.282.749,74	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	670.956.528.565,85	795.277.862.365,20	854.884.063.028,79	
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	14.706.354.274,90	18.366.290.008,05	19.536.950.924,05	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		742.120.507.280,03	902.991.318.983,66	1.021.285.407.528,86	7,96

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

Selanjutnya rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Batu dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Batu tahun 2010 sebesar 82,69 persen, tahun 2011 sebesar 96,76 persen, dan tahun 2012 sebesar 1,43 persen. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelusuri penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah aset lancar akibat semakin berkurangnya kas, namun di sisi lain utang jangka pendek juga semakin meningkat.



Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Batu tahun 2010 sebesar 78,44 persen, tahun 2011 sebesar 93,34 persen dan tahun 2012 sebesar 1,40 persen. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Batu setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Kota Batu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 didapatkan untuk rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2010 sebesar 0,07 persen, tahun 2011 sebesar 0,09 persen dan tahun 2012 sebesar 0,01 persen. Rasio hutang terhadap modal pada tahun 2010 sebesar 0,51 persen, tahun 2011 sebesar 0,72 persen dan tahun 2012 sebesar 0,14 persen. Sedangkan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan nihil. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 3.9
Analisis Rasio Keuangan
Kota Batu Tahun 2010-2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
		(%)	(%)	(%)
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	82,69	96,76	1,43
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	78,44	93,34	1,40
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,07	0,09	0,01
4	Rasio hutang terhadap modal	0,51	0,72	0,14
5	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6	Rata-rata umur persediaan	-	-	-

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

Secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan sebagai berikut:

C. Rasio Keuangan Pemerintah Kota Batu Terhadap APBD Tahun 2007 Sampai dengan Tahun 2012

C.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah, Provinsi \& Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat



yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

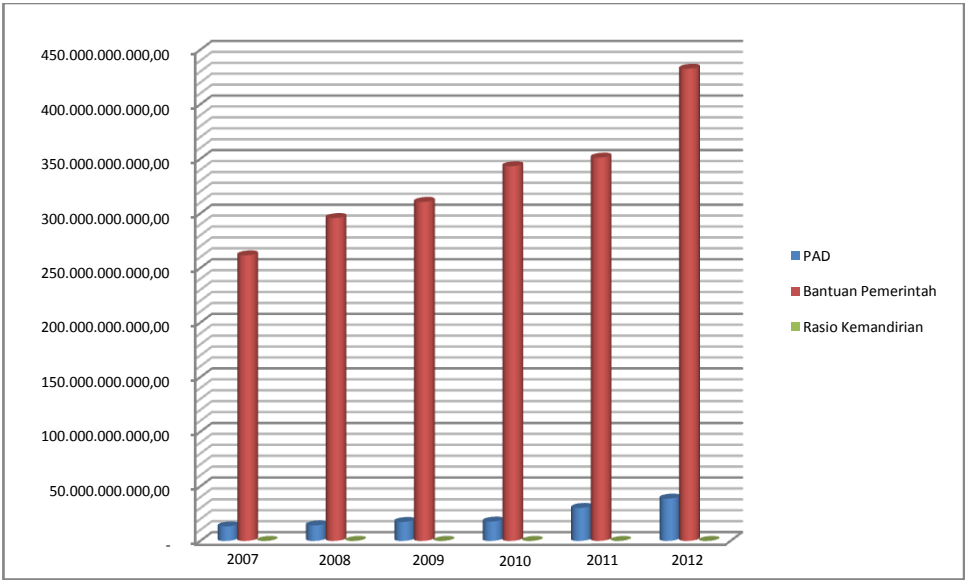
Tabel 3.10.
Rasio Kemandirian
Tahun 2007-2012

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi & Pinjaman	Rasio Kemandirian Rumus: $\frac{2}{3} \times 100$
1	2	3	4
2007	13.283.274.381,07	261.681.362.676,25	5,08
2008	14.202.630.312,49	295.851.799.185,27	4,80
2009	17.386.741.568,44	310.655.722.919,00	5,60
2010	17.735.602.953,95	343.297.801.294,00	5,17
2011	30.257.308.053,14	351.230.610.935,00	8,61
2012	38.794.059.670,38	432.630.825.518,00	8,97

Sumber: Bagian Keuangan Setda, dan Hasil Analisis

Dari data diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu masih rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat/propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Data di atas, meskipun terjadi perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2012, menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Batu, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Batu terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi. Data pada tabel rasio kemandirian jika dibuat grafik akan tampak seperti di bawah ini.

Grafik 3.4
Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun 2007-2012





C.2. Rasio Aktivitas/Keserasian

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD

Rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

Berdasarkan tabel rasio belanja operasi terhadap APBD Kota Batu mulai tahun 2007 hingga tahun 2011 cenderung konstan, yaitu rasio belanja operasi terhadap APBD pada tahun 2007 sebesar 66,50 persen, tahun 2008 sebesar 72,19 persen, tahun 2009 sebesar 63,53 persen, tahun 2010 sebesar 75,36 persen dan tahun 2011 sebesar 75,60 persen dan tahun 2012 sebesar 75,83 persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

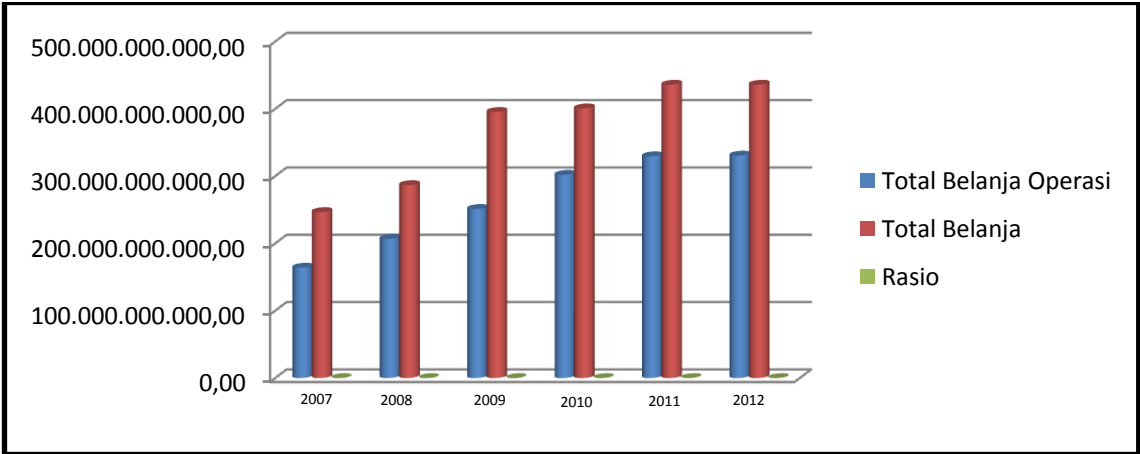
Tabel 3.11.
Rasio Belanja Operasi terhadap APBD
Tahun 2007-2012

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap APBD 4 = 2/3*100
1	2	3	4
2007	164,019,631,340.00	246,661,476,210.00	66.50
2008	206,954,994,312.44	286,689,994,653.44	72.19
2009	251,217,356,723.50	395,421,064,071.50	63.53
2010	301,993,746,772.50	400,760,875,754.53	75.36
2011	329,515,269,131.00	435,856,317,399.00	75.60
2012	330.515.234.211,00	435.856.559.660,72	75.83

Sumber : Bagian Keuangan Setda, dan Hasil Analisis

Data pada tabel rasio belanja operasi jika dibuat grafik akan tampak seperti di bawah ini.

Grafik 3.5
Perkembangan Belanja Operasi terhadap APBD
Tahun 2007-2012





b. Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

Rumus:

Rasio Belanja Modal Terhadap APBD = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$

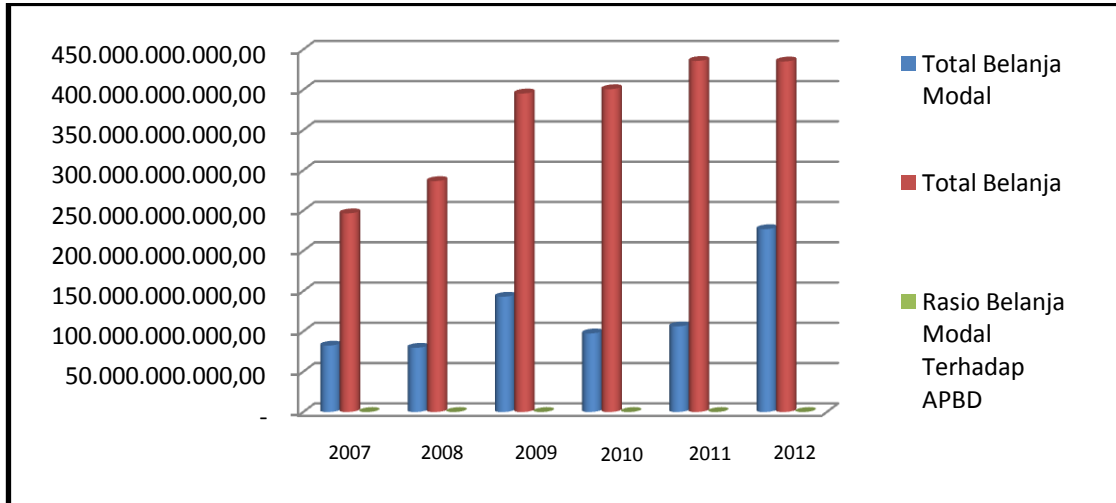
Rasio belanja modal terhadap APBD didasarkan pada perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja. Dari perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal diketahui bahwa porsi belanja operasi lebih besar jika dibandingkan dengan belanja modalnya. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rasio belanja modal terhadap APBD tahun 2007 sebesar 33,41 persen, tahun 2008 sebesar 27,81 persen, tahun 2009 sebesar 36,19 persen, tahun 2010 sebesar 24,34 persen dan tahun 2011 sebesar 24,40 persen dan pada tahun 2012 sebesar 52,16 persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan diagram berikut:

Tabel 3.12.
Rasio Belanja Modal terhadap APBD
Tahun 2007-2012

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal terhadap APBD
1	2	3	4 = 2/3*100
2007	82,415,344,870.00	246,661,476,210.00	33.41
2008	79,735,000,341.00	286,689,994,653.44	27.81
2009	143,102,657,348.00	395,421,064,071.50	36.19
2010	97,543,062,910.03	400,760,875,754.53	24.34
2011	106,341,048,268.00	435,856,317,399.00	24.40
2012	227.007.476.247,00	435.856.559.660,72	52,16

Sumber: Bagian Keuangan Setda, dan Hasil Analisis

Grafik 3.6
Perkembangan Belanja Modal terhadap APBD
Tahun 2007-2012



c. Rasio Pertumbuhan PAD

Rumus:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp } X_n - X_{n-1}}{\text{Rp } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan PAD nya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Dari Perhitungan di atas diketahui bahwa rasio pertumbuhan tahun 2009 mengalami kenaikan dari 6,92% pada tahun 2008 menjadi 22,42% pada tahun 2009 22,42% dan pada tahun 2010 sebesar 2,01% . Pertumbuhantahun 2010 tidak sebesar pertumbuhan tahun 2009. Hal ini dikarenakan oleh peningkatan Realisasi PAD dari tahun 2009 ke tahun 2010 tidak signifikan, hanya sebesar Rp 348.861.385,51. Pada Tahun 2011 pertumbuhan PAD dapat dikatakan signifikan yakni sebesar 70,60% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2012 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 38.794.059.670,38 atau dengan rasio pertumbuhan sebesar 28,21 persen. Data pada tabel rasio pertumbuhan PAD jika dibuat grafik akan tampak seperti di bawah ini

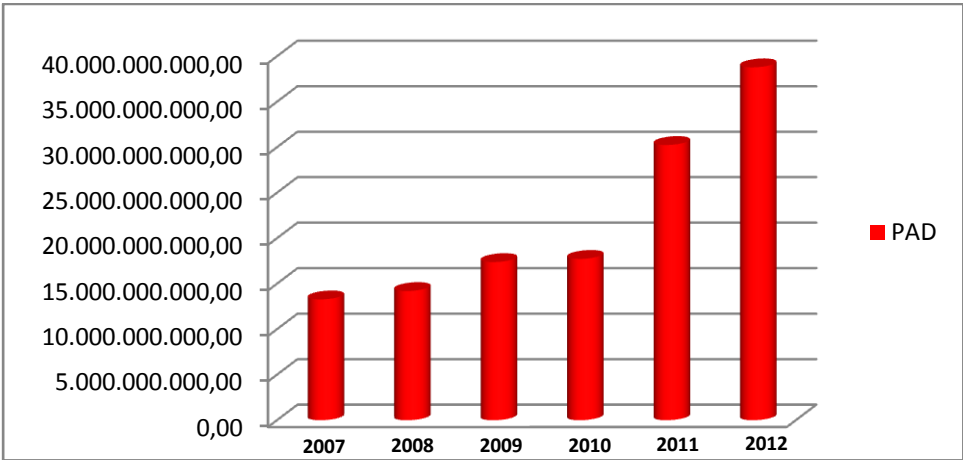


Tabel 3.13.
Rasio Pertumbuhan PAD
Tahun 2007-2012

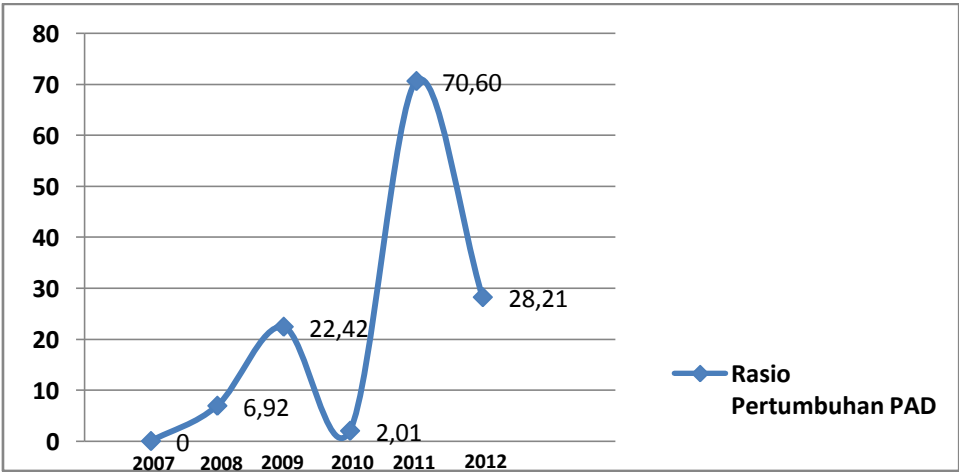
Tahun	PAD	Rasio Pertumbuhan
1	2	3
2007	13.283.274.381,07	0
2008	14.202.630.312,49	6,92
2009	17.386.741.568,44	22,42
2010	17.735.602.953,95	2,01
2011	30.257.308.053,14	70,60
2012	38.794.059.670,38	28,21

Sumber: Bagian Keuangan Setda, dan Hasil Analisis

Grafik 3.7
Pertumbuhan PAD Kota Batu
Tahun 2007-2012



Grafik 3.8
Rasio Pertumbuhan PAD Kota Batu
Tahun 2007-2012





d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rumus:

Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu dihitung rasio efisiensi PAD. Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio efektivitas PAD yaitu rasio pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 103,76 persen, tahun 2008 sebesar 73,50 persen, tahun 2009 sebesar 77,00 persen, tahun 2010 sebesar 59,12 persen, tahun 2011 sebesar 100,66 persen dan tahun 2012 sebesar 123,18 persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan grafik berikut:

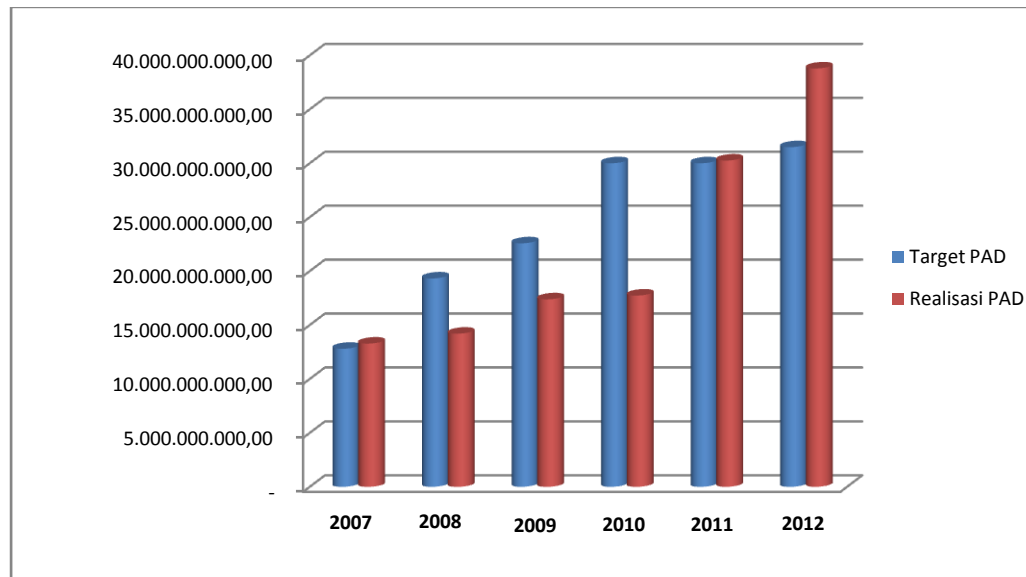
Tabel 3.14.
Rasio Efektivitas PAD
Tahun 2007-2012

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Pertumbuhan
1	2	3	4
2007	12,802,148,511.75	13,283,274,381.07	103.76
2008	19,323,649,999.69	14,202,630,312.49	73.50
2009	22,581,000,000.00	17,386,741,568.44	77.00
2010	30,000,000,000.00	17,735,602,953.95	59.12
2011	30,000,000,000.00	30,257,308,053.14	100.86
2012	31.494.481.182,00	38.794.059.670,38	123,18

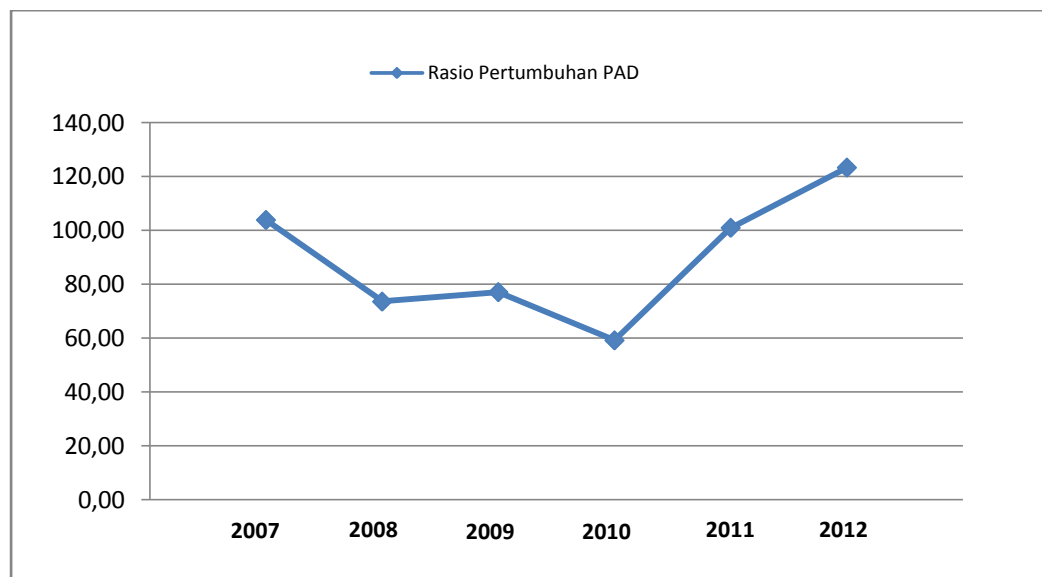
Sumber: Bagian Keuangan Setda, dan Hasil Analisis



Grafik 3.9
Target dan Realisasi PAD Kota Batu
Tahun 2007-2012



Grafik 3.10
Rasio Pertumbuhan PAD Kota Batu
Tahun 2007-2012



C.3. Laporan Arus Kas

Tabel berikut menyajikan laporan arus kas (cash flow) Pemerintah Kota Batu secara komparatif tahun 2008 dan 2011 yang mencakup arus kas masuk, arus kas keluar, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.15.
Pemerintah Kota Batu
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2008 dan 2011

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2008	2009	2010	2011
<i>Arus Kas Masuk</i>				
Pendapatan Pajak Daerah	6,841,187,889.00	7,861,348,123.00	9,529,225,958.00	19,404,220,619.00
Hasil Retribusi Daerah	2,757,399,233.00	3,087,977,630.00	3,478,065,774.00	4,048,972,418.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	749,099,174.91	876,068,906.11	924,903,592.24	1,543,221,141.59
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,854,944,015.58	5,561,346,909.33	3,803,407,629.71	5,260,893,874.55
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27,635,846,159.00	34,171,815,420.00	42,786,105,286.00	41,349,987,735.00
Dana Alokasi Umum	215,977,808,000.00	218,135,356,000.00	247,723,360,200.00	292,297,023,200.00
Dana Alokasi Khusus	30,520,000,000.00	33,037,000,000.00	18,275,000,000.00	17,583,600,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	21,532,376,499.00	31,375,335,808.00	27,636,390,228.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	3,779,175,000.00	38,899,457,000.00	28,690,925,250.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22724794063	40,435,105,000.00	13,430,110,000.00	8,213,100,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	311,061,078,534.76	368,477,569,487.44	410,224,971,247.95	446,028,334,466.14
<i>Arus Kas Keluar</i>				
Belanja Pegawai	131,561,860,981.00	157,133,442,862.00	193,393,983,335.00	212,191,015,115.00
Belanja Hibah	5,687,949,000.00	7,086,000,000.00	16,639,360,000.00	14,100,033,100.00
Belanja Bantuan Sosial	13,970,944,100.00	17,638,179,500.00	15,415,486,050.00	11,829,953,630.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15,412,947,000.00	15,502,575,000.00	17,411,876,000.00	18,554,857,500.00
Belanja Tidak Terduga	0	1,101,050,000.00	1,224,066,072.00	142,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	40,321,293,231.44	53,857,159,361.50	59,133,041,387.50	72,697,409,786.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	191,542,047,312.44	252,318,406,723.50	303,217,812,844.50	329,515,269,131.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	119,519,031,222.32	116,159,162,763.94	107,007,158,403.45	116,513,065,335.14
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan				
<i>Arus Kas Keluar</i>				
Belanja Modal Pengadaan Tanah	79,000,000.00	42,449,258,000.00	0	1,652,510,700.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	22,345,071,167.00	53,946,000.00	1,227,171,000.00	1,204,551,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor		7,458,224,020.00	2,689,246,000.00	744,262,000.00



Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		204,066,000.00	234,540,000.00	0
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Udara		0	315,700,000.00	0
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel		77,197,350.00	97,096,250.00	0
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan		1,050,902,000.00	825,309,600.00	173,125,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		341,920,000.00	157,766,500.00	271,719,650.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		315,026,000.00	912,614,200.00	328,279,250.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer		3,383,955,968.00	1,370,195,630.00	3,209,086,298.00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair		970,755,050.00	373,846,885.00	1,484,576,970.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		113,676,160.00	252,262,315.00	25,829,800.00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga		175,093,093.00	214,167,084.00	211,497,200.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio		474,091,820.00	255,111,119.00	693,199,550.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi		57,008,000.00	287,885,000.00	72,758,428.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur		193,773,100.00	217,540,000.00	65,121,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran		2,917,360,960.00	1,213,876,351.00	395,901,600.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium		1,216,377,350.00	1,765,448,288.00	2,079,002,867.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	30,574,116,800.00	22,334,494,128.00	27,334,111,150.00	18,578,499,750.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan		2,746,838,000.00	648,919,000.00	2,954,260,900.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		21,825,508,500.00	12,613,422,000.00	19,251,641,200.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota		2,974,493,400.00	3,802,727,350.00	1,501,141,888.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon		889,466,900.00	966,254,820.00	144,365,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	25,612,337,649.00	30,161,582,309.00	35,188,910,168.03	50,626,603,799.00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,124,474,725.00	77,008,800.00	4,333,154,400.00	565,114,418.00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan		82,500,000.00	74,172,000.00	0
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman		117,527,000.00	45,676,800.00	0



Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan		440,607,440.00	125,939,000.00	95,200,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat dan Kelengkapan Olahraga		0.00	0.00	12,800,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	79,735,000,341.00	143,102,657,348.00	97,543,062,910.03	106,341,048,268.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(79,735,000,341.00)	(143,102,657,348.00)	(97,543,062,910.03)	(106,341,048,268.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,336,936,597.99	0	24,000,000.00	0
Jumlah Arus Kas Masuk	1,336,936,597.99	0	24,000,000.00	0
Arus Kas Keluar				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,339,717,823.80	1,981,750,000.00	4,279,000,000.00	924,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	9,339,717,823.80	1,981,750,000.00	4,279,000,000.00	924,000,000.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(8,002,781,225.81)	-1,981,750,000.00	-4,255,000,000.00	-924,000,000.00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8,771,580,906.00	36,142,237,435.48	34,336,548,928.51	37,366,606,413.13
Jumlah Arus Kas Masuk	8,771,580,906.00	36,142,237,435.48	34,336,548,928.51	37,366,606,413.13
Arus Kas Keluar				
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8,771,580,906.00	36,142,237,435.48	34,336,548,928.51	37,366,606,413.13
Reklasifikasi Selisih Kas	0	13,532,005,278.90	0	0
Jumlah Arus Kas Keluar	8,771,580,906.00	49,674,242,714.38	34,336,548,928.51	37,366,606,413.13
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-13,532,005,278.90	0	0
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		-42,457,249,862.96	5,209,095,493.42	9,248,017,067.14
Saldo Awal Kas	51.573.972.725,08	55,348,519,138.69	26,423,274,554.63	31,632,370,048.05
Saldo Akhir Kas	54.616.876.194,69	26,423,274,554.63	31,632,370,048.05	40,880,387,115.19
Terdiri Dari :				
Kas Di Kas Daerah		26,290,458,137.63	31,632,370,048.05	40,880,387,115.19
Kas Di Bendahara Pengeluaran		132,816,417.00	0	0

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu, 2012



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berangkat dari konsepsi dasar bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk belanja (kerangka anggaran), namun dapat dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif (kerangka regulasi); maka belanja daerah mengejawantah sebagai salah satu alat untuk merepresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada.

Konsepsi tersebut mengisyaratkan kejelian dalam menganalisis berbagai implementasi kebijakan, apakah harus dialokasikan belanja atau cukup difasilitasi dengan regulasi yang kondusif. Upaya ini merupakan salah satu bentuk riil dari ketepatan dalam menetapkan alternatif pemecahan masalah (efektivitas), yang akan berujung pada pendayagunaan anggaran (efisiensi). Sekaligus menghapus stigma bahwa implementasi kebijakan harus selalu menggunakan anggaran belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batu selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2010, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 48 persen, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 49 persen dan pada tahun tahun 2008 meningkat lagi menjadi 54 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kota Batu sudah mengarah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Batu digunakan digunakan untuk belanja tidak langsung. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 3.16
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Batu Tahun 2010-2012

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2010	193.393.983.335,00	405.039.875.754,53	48%
2	Tahun anggaran 2011	212.191.015.115,00	436.780.317.399,00	49%
3	Tahun anggaran 2012	238.716.063.988,00	438.859.921.660,72	54%

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Batu diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pembiayaan daerah dan mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas serta profitabilitas. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dilakukan untuk pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan / pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas terjadinya defisit anggaran sehingga menghindari timbulnya hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.pendanaan kepada usaha ekonomi skala mikro dan menengah.
- b) Dalam APBD diperkirakan mengalami defisit, maka perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya.
- c) Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut sebagai pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup.

Berdasarkan data terkait, selama kurun waktu 2010-2012, APBD Kota Batu mengalami defisit anggaran. Pada dua tahun awal dengan defisit riil anggaran Kota Batu dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 mengalami defisit sebesar Rp. 9.464.095.493,42, tahun 2011 sebesar Rp. 10.172.017.067,14 dan tahun 2012 sebesar Rp. 60.806.429.522,66.

Selanjutnya untuk menutupi defisit anggaran, yaitu dengan menggunakan sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya. Adapun Silpa tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 31.632.370.048,05 , tahun 2011 sebesar Rp. 40.880.387.115,19, dan tahun 2012 sebesar Rp. 99.169.570.898,07. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.



Tabel 3.17
Defisit Riil Anggaran
Kota Batu Tahun 2010-2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Realisasi pendapatan daerah	410.224.971.247,95	446.028.334.466,14	495.994.989.183,38
2	Belanja daerah	400.760.875.754,53	435.856.317.399,00	435.188.559.660,72
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	4.279.000.000,00	924.000.000,00	3.671.362.000,00
	Defisit Riil	9.464.095.493,42	10.172.017.067,14	60.806.429.522,66

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

Tabel 3.18
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Batu Tahun 2010-2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	31.632.370.048,05	40.880.387.115,19	99.169.570.898,07
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

Tabel 3.19
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Batu Tahun 2010-2012

No	Uraian	2010		2011		2012	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	31.632.370.048,05	100%	40.880.387.115,19	100%	99.169.570.898,07	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	0%	241.864.301,14	0,59%	5.594.059.670,38	5,64%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	0%	-		6.139.069.466,00	6,19%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	0%	-		4.057.159.207,00	4,09%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	9.464.095.493,42	29,92%	10.172.017.067,14	24,88%	60.806.429.522,66	61,32%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga		0%	-	0%	--	0%

	sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan lanjutan		0%	-	0%	-	0%

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

3.3. Kerangka Pendanaan

1.3.1. Analisis pengeluaran periodik prioritas utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar.

Pertumbuhan belanja periodik urusan wajib pada masing-masing SKPD Kota Batu jika dibandingkan terhadap belanja daerah maka rata-rata perbandingannya di atas 50,65 persen. Dengan memperhatikan kondisi yang demikian maka proporsi belanja daerah tersebut lebih banyak dialokasi untuk belanja pembangunan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 3.20
Presentase Belanja Urusan Wajib Terhadap Belanja Daerah Kota Batu
Tahun 2009-2011

Kode SKPD	Nama SKPD	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan (%)
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	24.145.980.000,00	22.942.680.000,00	32.019.356.000,00	11,55
1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	9.710.570.000,00	9.711.721.117,00	9.711.721.117,00	0,01
1.03.01.01	DINAS PENGAIRAN DAN BINA MARGA	37.889.800.000,00	37.921.830.000,00	50.220.870.000,00	12,29
1.03.02.01	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	30.799.188.800,00	57.124.874.550,00	55.803.214.801,00	21,86
1.06.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.484.436.100,00	3.978.500.000,00	3.703.500.000,00	(60,34)
1.07.01.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.480.379.000,00	2.612.410.000,00	2.762.410.000,00	5,24
1.08.01.01	Kantor Lingkungan Hidup	2.446.507.000,00	2.078.700.000,00	2.066.700.000,00	(9,14)
1.10.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.529.700.000,00	1.375.781.889,00	2.169.781.889,00	12,70
1.11.01.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB	2.451.800.000,00	2.288.199.513,00	2.200.199.173,00	(5,57)
1.13.01.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	-	1.800.000.000,00	2.531.324.000,00	64,45
1.15.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.199.258.300,00	2.272.800.000,00	2.432.800.000,00	(17,09)
1.17.01.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.182.800.000,00	7.056.285.000,00	4.991.153.500,00	(21,58)
1.18.01.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.719.504.500,00	1.438.000.000,00	1.326.429.000,00	(48,76)
1.19.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.105.900.000,00	1.025.211.600,00	1.000.000.000,00	(5,20)
1.19.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.241.700.000,00	1.159.851.500,00	1.059.807.500,00	(8,25)
1.20.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
1.20.02.01	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	-	-	-	-
1.20.03.01	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.075.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	0,80
1.20.03.02	BAGIAN HUKUM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.20.03.03	BAGIAN PEMBANGUNAN	925.000.000,00	1.000.000.000,00	1.350.000.000,00	16,71
1.20.03.04	BAGIAN PEREKONOMIAN	1.621.672.000,00	1.484.090.381,00	1.000.000.000,00	(28,84)
1.20.03.05	BAGIAN UMUM	9.766.560.021,00	7.840.518.000,00	7.840.518.000,00	(12,28)
1.20.03.06	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.921.150.000,00	1.433.000.000,00	1.633.000.000,00	(10,91)
1.20.03.07	BAGIAN ORGANISASI	1.000.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	(7,14)
1.20.03.08	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-
1.20.03.09	BAGIAN KEUANGAN (SKPD)	63.543.500.649,00	1.740.000.000,00	2.538.414.000,00	(1.760,24)
1.20.03.10	BAGIAN KEUANGAN (PPKD)	-	-	-	-
1.20.03.11	BAGIAN PERLENGKAPAN	-	3.372.933.000,00	4.430.930.000,00	61,94
1.20.04.01	SEKRETARIAT DPRD	6.578.096.000,00	7.583.691.000,00	8.196.076.000,00	10,37
1.20.06.01	INSPEKTORAT	1.112.200.000,00	1.861.555.000,00	1.800.555.000,00	18,43
1.20.07.01	KANTOR PELAYANAN PERUJINAN TERPADU	1.312.555.000,00	965.000.000,00	965.000.000,00	(18,01)
1.20.08.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.732.200.000,00	4.578.000.000,00	4.122.934.300,00	3,72
1.20.09.01	KECAMATAN BATU	1.043.400.000,00	1.075.800.000,00	750.000.000,00	(20,21)
1.20.10.01	KECAMATAN BUMAJI	825.600.000,00	802.619.377,00	750.000.000,00	(4,94)
1.20.11.01	KECAMATAN JUNREJO	816.400.000,00	884.609.450,00	750.000.000,00	(5,12)
1.20.12.01	DINAS PENDAPATAN	-	2.584.000.000,00	2.249.846.440,00	42,57
1.21.01.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	-	850.000.000,00	750.000.000,00	43,33
1.26.01.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN DOKUMENTASI	760.800.000,00	843.200.000,00	750.000.000,00	(1,33)
2.01.01.01	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	25.379.400.000,00	10.466.559.000,00	10.913.559.000,00	(69,19)
	Jumlah	258.551.057.370,00	207.777.420.377,00	228.515.099.720,00	(7,68)
	Belanja Daerah	368.477.569.487,44	410.224.971.247,95	446.028.334.466,14	
	Persentase Belanja Urusan Wajib SKPD Terhadap Belanja Daerah	57,48	50,65	51,23	

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu

1.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Penyusunan kebijakan anggaran baik sebagai kerangka anggaran maupun kerangka regulasi, harus mengacu pada landasan yuridis RKPD dan KUA APBD Kota Batu. Dengan *frame* yuridis ini, maka penyusunan kebijakan perencanaan belanja diarahkan:

- a) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b) Untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- c) Didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran;
- e) Menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar;
- f) Mengendalikan tingkat konsumsi dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- g) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan investasi di daerah melalui kerjasama antar daerah dan antar sektor;
- h) Diprioritaskan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya serta peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- i) Pola penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
- Dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - Dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan Pemerintah Kota Batu antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, infrastruktur, air bersih, lingkungan hidup, kependudukan dan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kota Batu pada Tahun 2012-2017, yaitu:

- a) Pengalokasian Belanja Daerah diarahkan pada program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mengacu pada prioritas pembangunan Kota Batu sebagaimana tercantum dalam penjabaran visi serta misi RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017.
- b) Kegiatan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Batu dan masyarakat serta mengacu pada prioritas pembangunan Kota Batu yang tercantum penjabaran visi serta misi RPJMD tahun 2012-2017.
- c) Pendanaan kegiatan darurat yang penganggarnya belum tersedia atau belum mencukupi.
- d) Mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program dan/atau kegiatan serta lokasi tertentu.
- e) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang berjalan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada:

- a) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja daerah.
- b) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembanguana infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi.
- c) Penanganan isu-isu strategis melalu stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembaga-lambaga atau instansi yang berkompeten.
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Batu dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Memenuhi kekurangan dana sharing untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor usaha produktif serta program dan kegiatan lain yang telah menjadi kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- f) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.
- g) Penggeseran/penyesuaian anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis serta obyek belanja.
- h) Penambahan/pengurangan alokasi anggaran belanja daerah sebagai akibat adanya prakiraan yang tidak dan/atau dapat tercapai/terlaksana.
- i) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berkenaan.
- j) Mengakomodasi perubahan anggaran mendahului perubahan APBD tahun anggaran yang berkenaan.

Pada kurun waktu 5 tahun mendatang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batu diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas



penggunaan belanja daerah. Perkiraan pendapatan dan belanja daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017 tersaji secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

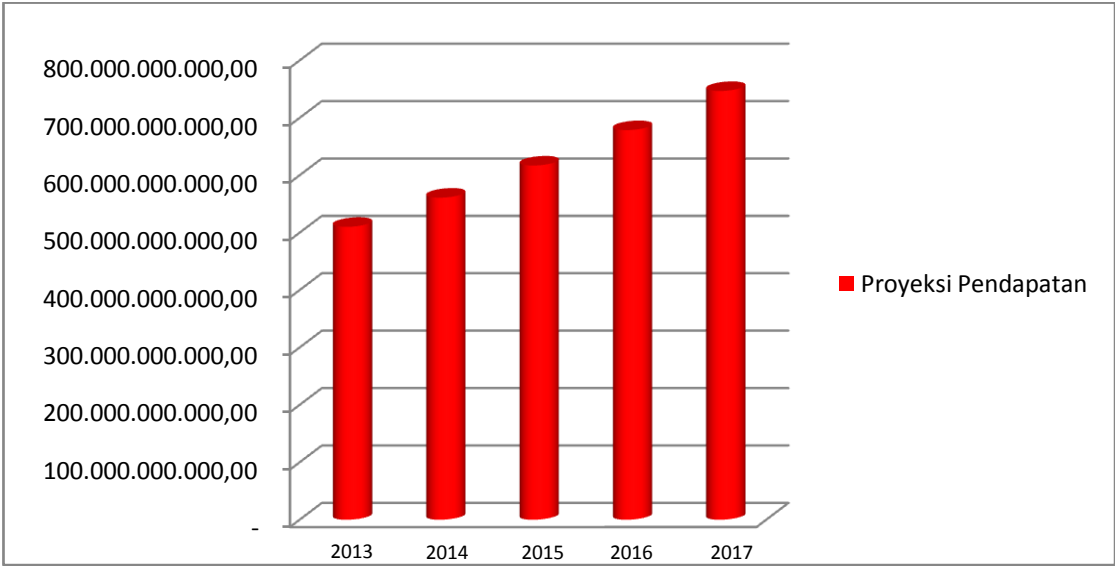
Tabel 3.21.
Proyeksi Pendapatan
Tahun 2013-2017

Uraian	Rata2 Pertumbuh an (%)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
PENDAPATAN	10.52	568.000.000.000,00	618.000.000.000,00	668.000.000.000,00	720.000.000.000,00	768.000.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah	22.03	48.000.000.000,00	49.000.000.000,00	50.000.000.000,00	51.000.000.000,00	52.000.000.000,00
Pajak daerah	29.72	20,748,188,327.15	22,239,431,536.03	23,825,614,008.67	25,514,321,637.35	27,358,985,831.01
Retribusi daerah	13.80	5,263,380,398.05	5,989,875,289.63	6,816,646,959.17	7,757,536,429.26	8,828,295,173.81
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	18.96	1,784,346,708.76	2,122,595,451.38	2,524,964,138.47	3,003,607,633.49	3,572,984,930.16
Lain-lain PAD yang sah	11.69	6,427,076,120.07	6,889,012,047.48	7,380,356,897.99	7,903,460,520.48	8,474,874,130.27
Dana Perimbangan	8.67	422,088,680,350.55	466,052,648,795.31	514,614,734,888.83	568,260,578,692.54	627,569,863,665.02
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	9.20	42,907,235,230.72	46,853,504,916.99	51,162,721,419.86	55,868,265,730.05	61,006,588,958.96
Dana alokasi umum	10.74	359,638,217,001.60	398,251,277,159.79	441,010,082,526.07	488,359,746,832.94	540,793,174,071.33
Dana alokasi khusus	(16.79)	19,543,228,118.23	20,947,866,718.54	22,441,930,942.91	24,032,566,129.55	25,770,100,634.72
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.99	53,905,973,658.61	57,780,380,226.97	61,901,448,979.57	66,288,888,861.71	71,081,520,288.83
Hibah		-	-	-	-	-
Dana darurat		-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	4.62	28,173,682,044.85	30,198,620,866.30	32,352,476,419.60	34,645,549,484.44	37,150,393,842.52
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	131.08	23,430,691,384.40	25,114,735,256.34	26,905,992,951.23	28,813,031,130.28	30,896,189,271.51
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	(62.40)	2,301,600,229.36	2,467,024,104.32	2,642,979,608.74	2,830,308,246.99	3,034,937,174.79

Sumber: Bagian Keuangan, Setda Kota Batu dan Hasil Analisis



Grafik 3.11
Proyeksi Pendapatan
Kota Batu Tahun 2013-2017



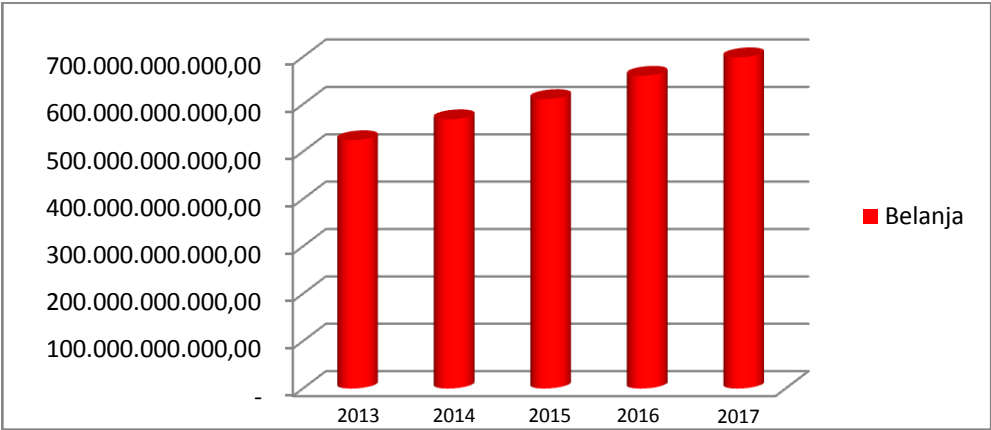
Tabel 3.22
Proyeksi Belanja Daerah Kota Batu
Tahun 2013-2017

Uraian	Rata2 Pertumbuh- an (%)	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Tidak Langsung	33.57	333,423,018,019.01	363,929,865,095.53	392,192,200,476.08	425,026,803,820.20	448,127,166,986.95
Belanja Pegawai	9.70	264,015,677,645.93	291,914,890,073.94	317,469,036,439.10	347,490,844,139.74	367,669,577,567.49
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	3.63	40,294,782,790.56	41,757,483,405.86	43,273,280,053.49	44,844,100,119.43	46,471,940,953.77
Belanja Bantuan Sosial	3.63	24,004,726,435.64	24,876,098,005.25	25,779,100,362.84	26,714,881,706.01	27,684,631,911.94
Belanja Bagi Hasil	9.47	151,328,940.96	165,663,063.82	181,354,938.06	198,533,172.09	217,338,556.33
Belanja Bantuan Keuangan	6.38	2,883,902,205.92	3,067,895,166.66	3,263,626,878.29	3,471,846,273.13	3,693,350,065.36
Belanja Tidak Terduga	3.63	2,072,600,000.00	2,147,835,380.00	2,225,801,804.29	2,306,598,409.79	2,390,327,932.07
Belanja Langsung	0.92	190,875,284,404.42	204,571,193,652.15	218,903,964,880.17	235,252,464,462.00	251,124,757,143.66
Belanja Pegawai	9.70	48,807,981,714.79	53,965,646,070.88	58,689,783,363.21	64,239,847,110.80	67,970,243,960.53
Belanja Barang dan Jasa	6.38	64,782,183,160.71	68,675,592,368.67	73,057,095,161.79	77,981,143,375.69	83,517,804,555.37
Belanja Modal	6.38	77,285,119,528.92	81,929,955,212.61	87,157,086,355.17	93,031,473,975.51	99,636,708,627.77
Jumlah	34.49	524,298,302,423.43	568,501,058,747.69	611,096,165,356.25	660,279,268,282.20	699,251,924,130.61

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Batu dan Hasil Analisis



Grafik 3.12
Proyeksi Belanja
Kota Batu Tahun 2013-2017



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah salah satu input yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Dengan diketahuinya berbagai permasalahan yang terjadi, maka berbagai kebijakan yang akan ditetapkan akan semakin mengarah kepada upaya pemecahan masalah yang terjadi. Agar identifikasi terhadap berbagai permasalahan ini lebih dalam dan mendetail, maka permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan pada sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025, dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Sasaran pokok dalam RPJPD dua puluh tahunan sangat perlu untuk diperhatikan dalam rencana pembangunan daerah lima tahunan untuk menjaga arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, sasaran pokok RPJPD menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan pembangunan daerah dalam setiap urusan pemerintahan. Terdapat 87 (delapan puluh tujuh) sasaran pokok RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif.
3. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Menguatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat.
5. Terbentuknya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
6. Berkembangnya seni dan budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar pada warisan leluhur.
7. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas.
8. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan nonformal.
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan.
10. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu serta dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau.
12. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.
13. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.
14. Menurunnya jumlah penyakit menular yang diderita masyarakat.
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
16. Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat.
17. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.
18. Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja.
19. Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
20. Terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku kepemudaan yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif.
21. Meningkatnya kualitas dan partisipasi kepemudaan dalam pembangunan.
22. Meningkatnya pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
23. Meningkatnya minat keolahragaan masyarakat, baik yang mengarah pada olahraga sebagai budaya maupun olahraga sebagai prestasi.
24. Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

25. Menguatnya kelembagaan dan pengarusamaan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan.
26. Meningkatnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
27. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.
28. Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada korban *trafficking* pada anak dan perempuan.
29. Menurunnya jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
30. Meningkatnya peran keluarga sejahtera sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.
31. Meningkatnya kinerja keluarga berencana melalui perbaikan layanan kesehatan.
32. Terbentuknya keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas.
33. Terkendalinya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah (pengendalian tingkat kelahiran) maupun migrasi.
34. Meningkatnya pemerataan sebaran penduduk, yang ditunjang dengan pemerataan pembangunan antar wilayah.
35. Meningkatnya kinerja administrasi kependudukan, khususnya dalam menyediakan data demografi yang handal dan mampu menunjang kebijakan kependudukan.
36. Terwujudnya ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
37. Meningkatnya aktifitas berbasis komunitas untuk mengatasi masalah kesejahteraan.
38. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial.
39. Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kota Batu.
40. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.
41. Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran.
42. Meningkatnya kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial.

43. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan merata ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
44. Terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal.
45. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
46. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan.
47. Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan.
48. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan.
49. Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
50. Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah.
51. Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.
52. Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan, sampai pemberhentian pegawai.
53. Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang penyimpangan pelaksanaan pembangunan.
54. Terciptanya aparatur pengawas yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi.
55. Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah.
56. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal.
57. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.
58. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

59. Terwujudnya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.
60. Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.
61. Menguatnya kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan.
62. Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban yang bersifat antisipatif, persuasive, dan preventif.
63. Meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram, dan damai.
64. Meningkatnya kemampuan mengelola resiko ancaman bencana alam.
65. Pengembangan dan revitalisasi objek wisata, dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan agrowisata.
66. Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.
67. Meningkatnya penggunaan sumber daya ekonomi lokal, untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain.
68. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Batu, terutama koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausahawan baru.
69. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing, serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah.
70. Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.
71. Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi.
72. Terpenuhinya sarana prasarana (infrastruktur) pendukung investasi.
73. Terjaganya distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau.
74. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam

skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.

75. Pengembangan perlbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah, dan murah.
76. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi yang ditunjang dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur.
77. Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan daerah.
78. Tersedianya berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi dan non ekonomi.
79. Terbukanya kelancaran akses informasi ke seluruh pelosok wilayah.
80. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan beserta sarana dan prasarana dasar pendungnya yang layak, sehat, dan murah.
81. Tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah.
82. Terciptanya sistem pengelolaan pertanahan daerah yang efisien dan efektif serta dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang pertanahan secara efektif.
83. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
84. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
85. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.
86. Terkendalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan bernilai tambah.
87. Terwujudnya kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan seluruh urusan dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan terhadap seluruh urusan pemerintahan. Uraian permasalahan krusial yang terjadi dikaitkan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD melalui hasil capaian kinerja SKPD. Berdasarkan uraian permasalahan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan pencapaian. Penetapan permasalahan memperhatikan pada hasil capaian terhadap indikator kinerja pembangunan tiap urusan.



Tabel 4.1.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Batu

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	<	Ketidaksesuaian kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu.	Kebijakan rekrutmen dan penempatan guru bersertifikat sesuai kebutuhan.
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	<		
1.3.	Angka partisipasi kasar	<		
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	<	Ketidakmerataan persebaran guru.	Mengupayakan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
1.5.	Angka Partisipasi Murni	<		
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	<	Tidak optimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	<		
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	<	Rendahnya keterlibatan orang tua.	Keterlibatan semua pihak (pemerintah daerah, lembaga pendidikan, guru, orang-tua, dan masyarakat) dalam urusan penyelenggaraan pendidikan.
1.6.	Pendidikan Dasar	<	Kurangnya Ruang Kelas Baru.	
1.6.1.	Angka partisipasi sekolah	<		
1.6.2.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	<	Masih tingginya angka putus sekolah terutama di daerah pinggiran dan terpencil.	Ketersediaan ruang kelas yang memadai.
1.6.3.	Rasio guru/murid	<		
1.6.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	<	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah.	Kualifikasi tenaga pendidik yang sesuai SPM.
1.7.	Pendidikan Menengah	<		
1.7.1.	Angka partisipasi sekolah	<	Kurangnya tenaga administrasi terutama di lingkungan sekolah dasar.	Sarana dan Prasarana yang memadai.
1.7.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	<		
1.7.3.	Rasio guru terhadap murid	<	Dalam memberikan pembelajaran guru masih kurang inovatif sehingga guru yang berprestasi masih minim.	Pemerataan akses pendidikan.
1.7.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	<		
1.7.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	<	Kurangnya peralatan olah raga yang dimiliki sekolah sehingga prestasi di bidang olah raga masih kurang.	Pemberian beasiswa untuk siswa yang tidak mampu.
1.8.	Fasilitas Pendidikan	<		
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<	Kurangnya peralatan olah raga yang dimiliki sekolah sehingga prestasi di bidang olah raga masih kurang.	Pelatihan tentang TI untuk guru.
1.8.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	<		
1.8.3.	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<	Terhambatnya penyaluran tunjangan sertifikasi guru.	
1.9.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.9.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.10.	Angka Putus Sekolah	<		



1.10.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<	Terhambatnya pencairan Biaya Operasional Sekolah sehingga menghambat kegiatan yang ada di sekolah. Kurangnya alat peraga edukasi.	Tercukupinya SDM terutama sebagai tenaga administrasi tingkat SD.
1.10.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.10.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.11.	Angka Kelulusan	<		
1.11.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.11.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.11.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.11.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		
1.11.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.11.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi		Belum semua ibu hamil periksa 4 K. Pernikahan dini.	Sosialisasi norma dan standart. (SPM)
2.2.	Angka usia harapan hidup		Kurang berkualitasnya pola hidup dan pola makan. Beban hidup yang berat.	Sosialisasi pola hidup sehat.
2.3.	Persentase balita gizi buruk		Kemiskinan. Kurangnya pemeliharaan kesehatan.	Bantuan stimulant. Peningkatan upaya pengobatan.
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita	=	Jumlah posyandu yang aktif saat ini 189 posyandu di 24 desa/ kelurahan dengan jumlah kader aktif per posyandu rata-rata 3-5 orang.	(Dinkes tidak memiliki basis data untuk indikator ini sehingga tidak ada target yang ditetapkan untuk indikator ini.)
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	=	Jumlah Puskesmas 5 unit, Pustu 6 unit sudah dapat mengcover kebutuhan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.	(Dinkes tidak memiliki basis data untuk indikator ini sehingga tidak ada target yang ditetapkan untuk indikator ini.)
2.6.	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	>	Rasio Tempat Tidur RS per penduduk idealnya adalah 1 : 1500. Kondisi di Kota Batu saat ini sudah mencapai 1 : 639. Hal ini berarti sudah melampaui kebutuhan masyarakat di Kota Batu.	-
2.7.	Rasio dokter per satuan penduduk	>	Rasio tenaga dokter ideal adalah 40 per 100.000 penduduk. Saat ini kondisi di Kota Batu telah mencapai 68,56 per 100.000 penduduk. Hal tersebut berarti rasio tenaga medis sudah mencukupi dari segi jumlah. Namun masalah yang timbul adalah karena distribusi tenaga dan pendayagunaannya yang belum optimal.	Kebijakan diklat nakes, kebijakan rekrutmen dan mutasi pegawai.
2.8.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	>		
2.9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	<	Kegiatan deteksi dini ibu hamil dengan resiko tinggi masih belum mencapai sasaran yang ditargetkan sehingga pencapaian indikator cakupan komplikasi	Adanya partisipasi aktif masyarakat, Adanya peran lintas sektor, berfungsinya desa siaga P4K, Kompetensi tenaga bidan di desa maupun



			kebidanan yang ditangani masih dibawah target.	Puskesmas dan jaringannya dalam menolong persalinan.
2.10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<	Masih banyak persalinan tidak tercatat dan dilaporkan dengan baik, masih adanya persalinan ditolong dukun.	Adanya partisipasi aktif masyarakat, adanya peran lintas sektor, berfungsinya desa siaga P4K, kompetensi tenaga bidan di desa maupun puskesmas dan jaringannya dalam menolong persalinan. Berjalannya program kemitraan bidan - dukun untuk mengeliminasi persalinan oleh dukun
2.11.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<	Pendataan sasaran imunisasi masih belum tepat sehingga menyebabkan cakupan UCI desa tidak mencapai target.	Kerjasama lintas sektor, program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian keluarga sadar gizi.
2.12.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	=	Saat ini 100% balita gizi buruk yang ditemukan telah memperoleh penanganan sesuai standar.	Kerjasama lintas sektor, program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian keluarga sadar gizi.
2.13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	<	Penemuan penderita baru masih dibawah target karena tidak mudah menegakkan diagnosa TBC dengan BTA+.	Adanya strategi penemuan kasus baru, Kebijakan Pengawas Minum Obat, Pendekatan pengobatan dengan teknik DOTS, Pelatihan teknis tenaga medis dan paramedis serta kader untuk penemuan kasus.
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	=	Seluruh pasien dengan DBD yang ditemukan telah ditangani sesuai standar.	Kerjasama lintas program dan lintas sektor, sanitasi lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2.15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<	Pelayanan rujukan yang masih kurang dari target, disebabkan masih belum berjalannya sistem rujukan, dimana masyarakat sering kali langsung berobat ke RS.	Promosi kesehatan mengenai sistem rujukan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan sistem rujukan.
2.16.	Cakupan kunjungan bayi	<	Cakupan kunjungan bayi masih belum mencapai target karena masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor, selain karena masalah perilaku masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan serta imunisasi dasar bagi bayi.	Penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor, upaya promosi kesehatan secara kontinyu.
2.17.	Cakupan puskesmas	=	Jumlah Puskesmas saat ini 5 unit. Apabila ditinjau dari konsep kewilayahan dan jumlah penduduk, maka jumlah Puskesmas sudah mencukupi.	(Dinas Kesehatan tidak memiliki basis data indikator ini. Yang tersedia adalah cakupan kunjungan rawat jalan/ rawat inap serta kunjungan jiwa.)
2.18.	Cakupan pembantu puskesmas	=	Jumlah Puskesmas Pembantu saat ini 6 unit. Apabila ditinjau dari konsep	



			kewilayahan dan jumlah penduduk, maka jumlah tersebut sudah mencukupi.	
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	=	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	<		
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	<	Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tempat ibadah.	Penambahan dukungan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan tempat ibadah.
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	< 56,16%	Belum tercapai target berdasarkan MDGs sebesar 62,41% dikarenakan : Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar masih kurang. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman baik sistem setempat atau terpusat di pedesaan dan perkotaan masih kurang.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Penyediaan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk. Pengoptimalan fungsi IPLT Kota.
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	<	Kesulitan dalam menentukan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, dikarenakan areal pemakaman di masyarakat merupakan tanah wakaf sehingga dikelola langsung oleh masyarakat. Sedangkan dinas hanya mengelola satu TPU. Kesulitan pengadaan lahan untuk TPU baru.	Penambahan Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh dinas.
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	< 12,8%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 20% dikarenakan : Adanya beberapa TPS yang belum berfungsi secara optimal. Masih kurangnya jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.	Mengoptimalkan fungsi TPS. Menambah jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.
3.7.	Rasio rumah layak huni	<	Tidak tersedia data rumah layak huni.	Dilakukannya pendataan terhadap rumah layak huni.
3.8.	Rasio permukiman layak huni	<		
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	>	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	=	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	=	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	=	Belum terbangunnya saluran drainase.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.13.	Sempadan jalan yang	<	Dinas Cipta Karya dan Tata	Koordinasi dengan dinas



	dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		Ruang hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi teknis tentang penentuan sempadan jalan untuk pembangunan, bukan penertiban terkait pedagang kaki lima dan bangunan rumah liar.	terkait dalam penertiban pelanggaran terhadap penggunaan sempadan jalan.
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	<	Dinas Pengairan dan Bina Marga hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi teknis, bukan penertiban pelanggaran.	Kesinambungan kinerja antar dinas terkait dalam upaya pengawasan, pelestarian, dan penertiban pemakaian tanah sempadan. Pelaksanaan peraturan tentang sempadan sungai. Sosialisasi peraturan perundangan tentang sempadan sungai.
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	=	Belum terbangunnya saluran drainase.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		Pemasangan turap di tanah pegunungan tidak efektif karena kondisi tanah di Kota Batu koros/gembur, sehingga turap mudah lepas. Pemasangan turap di sungai tidak bisa dipasang, karena kondisi tanah di sungai terdiri dari pasir dan batu.	Penggunaan besi pancang dengan kedalaman menyesuaikan dengan kondisi geologi. Menggunakan pondasi dalam.
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	<	Tahapan pembangunan disesuaikan dengan anggaran.	Berkurangnya kehilangan air di saluran irigasi. Meningkatnya produksi pertanian. Bangunan irigasi berfungsi dengan baik.
3.18.	Lingkungan Pemukiman	< 35%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 50% dikarenakan : Belum tersedianya infrastruktur secara merata.	Tersedianya infrastruktur secara merata yang dapat mendukung produktifitas masyarakat.
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	< 66%	Belum tercapainya target berdasarkan MDGs sebesar 68,87% dikarenakan : Proporsi penduduk terhadap air minum terlindungi (akses aman) masih kurang. Ketersediaan data yang akurat dan tidak sinkron antar instansi. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan SPAM masih rendah.	Mempunyai data base yang akurat tentang air minum/air bersih dan jumlah pengelola HIPAM guna mengetahui wilayah permukiman yang belum terlayani air minum/air bersih. Pemeliharaan sumber mata air agar debit dan kualitas air tidak menurun.
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hanya memiliki kewenangan untuk menyediakan jaringan	-



			Penerangan Jalan Umum.	
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	< 56,16%	Belum tercapainya target berdasarkan MDGs sebesar 62,41% dikarenakan : Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar masih kurang. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman baik sistem setempat maupun terpusat di pedesaan dan perkotaan masih kurang.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Penyediaan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk. Pengoptimalan fungsi IPLT Kota.
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	-	Belum ada data base yang akurat tentang luas, lokasi, dan kriteria permukiman kumuh/miskin di Kota Batu.	Perlu pendataan yang akurat terhadap berbagai hal terkait lingkungan pemukiman kumuh/ miskin.
4.5.	Rumah layak huni	-	Belum ada data base tentang rumah layak huni di Kota Batu.	Perlu ada program perbaikan permukiman.
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	< 0,08%	Belum tercapainya target SPM sebesar 25% dikarenakan : Berkurangnya RTH yang beralih fungsi menjadi area permukiman dan lahan produktif lainnya.	Penanaman pohon di tepi kaki jalan dan wilayah permukiman. Pembangunan taman kota, taman lingkungan serta hutan kota.
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	<	Belum dipatuhi sepenuhnya SOP terkait pengurusan ijin.	Upaya penegakan pelaksanaan SOP secara tegas dalam pelaksanaannya.
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=	RPJPD Kota Batu belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010.	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk menyusun dokumen perencanaan tersebut.
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	=	Lemahnya koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait dengan penyajian data. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap arti penting dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.	
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	=	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman SKPD dalam teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=		
7.	Perhubungan			
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	<	Banyaknya jumlah kendaraan pribadi.	Sosialisasi penggunaan angkutan umum.
7.2.	Rasio ijin trayek	<	Masih ada daerah yang belum terpenuhi trayeknya.	Faktor penumpang. Angkutan umum yang mau memenuhi trayek.
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	<	Terkendala Perda No. 39 Tahun 2003 terkait dengan tariff uji kir angkutan umum yang terlalu rendah.	Dilakukan penyesuaian tarif uji kir yang dapat diseimbangkan dengan tarif uji kir di Malang Raya melalui penetapan



				peraturan daerah.
7.4.	Jumlah Terminal Bis	>	Luas kurang memadai.	Upaya perluasan terminal bis.
7.5.	Angkutan darat	<	Surat keputusan tentang jaringan trayek masih merupakan keputusan Kabupaten Malang, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum masalah trayek angkutan umum di Kota Batu, dinas terkait belum bisa melakukan upaya penegakan.	Ditetapkan peraturan perundangan daerah yang mengatur jaringan trayek untuk angkutan umum di Kota Batu.
			Hampir 60% jalan di Kota Batu yang melewati jaringan trayek merupakan jalan propinsi, sehingga singgungan/himpitan jalan menimbulkan banyak permasalahan.	Peningkatan kualitas/ kelas jalan, bisa melalui alternatif pelebaran, penebalan, dan peningkatan kualitas aspal.
			Tidak dimilikinya terminal kargo sebagai tempat bongkar muat barang, sehingga bongkar muat dilakukan di sembarang tempat. Akibatnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang merugikan sektor kehidupan masyarakat.	Pembangunan terminal kargo sebagai tempat bongkar muat barang dan sekaligus dapat digunakan untuk terminal transit kendaraan-kendaraan besar.
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	<	Selama ini Pemerintah Kota Batu/Dishubkominfo belum memiliki sarana prasarana gedung pengujian sendiri.	Mohon segera dibangun sarana prasarana pengujian KIR sendiri di Kota Batu.
			Selama ini pelayanan ijin KIR masih menggunakan peralatan lama milik Provinsi Jawa Timur.	Memudahkan pelayanan kepada masyarakat/ pemilik kendaraan angkutan umum untuk menguji kendaraan miliknya.
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	=	Masa uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan sesuai pasal 148 ayat 2 PP 1993.	Penyediaan sarana prasarana gedung pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor di Kota Batu. Sosialisasi tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada masyarakat pemilik kendaraan bermotor.
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	=	Perda Retribusi Kendaraan Bermotor No. 39 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi.	Mohon segera direvisi kembali Perda Retribusi Kendaraan Bermotor No. 39 Tahun 2003 dengan perda yang baru agar pemasukan PAD dapat memenuhi target.
7.9.	Persentase pemasangan rambu-rambu	<	Belum terpenuhi rambu-rambu lalu lintas.	Anggaran pengadaan.
8.	Lingkungan Hidup			
8.1.	Persentase penanganan sampah	< 35%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 70% dikarenakan : Kurangnya armada angkut sampah sehingga tidak bisa menjangkau kesemua wilayah yang belum terlayani.	Penambahan armada angkut sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan bahayanya membuang sampah sembarangan.



			Kesadaran masyarakat masih rendah.	Peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang mendekati sumber sampah.
8.2.	Persentase penduduk berakses air minum	< 66%	Belum tercapainya target berdasarkan MDGs sebesar 68,87% dikarenakan : Proporsi penduduk terhadap air minum terlindungi (akses aman) masih kurang. Ketersediaan data yang akurat dan tidak sinkron antar instansi. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan SPAM masih rendah.	Mempunyai data base yang akurat tentang air minum/air bersih dan jumlah pengelola HIPAM guna mengetahui wilayah permukiman yang belum terlayani air minum/air bersih. Pemeliharaan sumber mata air agar debit dan kualitas air tidak menurun.
8.3.	Persentase Luas permukiman yang tertata	<	Belum semua kawasan permukiman memenuhi kriteria permen PU.	Penataan kawasan permukiman sesuai kriteria dalam permen PU.
8.4.	Pencemaran status mutu air	<	Kurangnya kesadaran dan ketersediaan biaya dari pelaku usaha industri skala kecil dan juga masyarakat dari kegiatan pertanian dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan baik air, tanah, maupun udara.	Merubah perilaku masyarakat dari petani dan pelaku industri untuk meminimalkan bahan pencemar pada bahan baku yang digunakan, mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	<	Kurangnya sarana dan prasarana yang ada dan pendanaan yang memadai. Daerah konservasi tangkapan air di lereng gunung Arjuno dan gunung Panderman adalah milik perhutani, dan untuk mengadakan konservasi dibutuhkan MoU dengan dinas terkait (Perhutani). Permasalahan penghijauan di sekitar kawasan sumber mata air untuk menjaga kualitas air. Daerah di gunung Arjuno dan Panderman sebagian besar sudah beralih fungsi, sehingga lahan pertanian yang ditanami dengan sistem tanaman sayur musiman menjadi tanaman musiman. Adanya penebangan liar.	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektoral atau antar instansi guna mewujudkan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Jenis bibit pohon dan kualitas bibit tanaman penghijauan yang baik. Peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan sekitar sumber mata air. Mengadakan MoU antara pemerintah dan Instansi terkait. Merubah pola tanaman dari tanaman musiman menjadi tanaman tegakan. Meningkatkan pengawasan terhadap kelestarian hutan.
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	<	Kurangnya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) untuk mengawasi pelaksanaan AMDAL.	Terpenuhinya tenaga PPLHD.



			Karena kurangnya pengawasan AMDAL dan cenderung hanya sebagai formalitas saja, sehingga tidak ada kepatuhan terhadap AMDAL dari pelaku usaha.	
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	< 12,8%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 20% dikarenakan : Adanya beberapa TPS yang belum berfungsi secara optimal. Masih kurangnya jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.	Mengoptimalkan fungsi TPS. Menambah jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	<	Tidak mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang lingkungan, Belum terkoordinir dengan baik masalah penegakan hukum.	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum/pengusaha. Perlunya koordinasi antara pihak Kantor Lingkungan Hidup maupun instansi terkait lain dengan kepolisian/penegak hukum.
9.	Pertanahan			
9.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	<	Belum ada data base tentang penduduk yang memiliki lahan.	Perlu dilakukan data base tentang penduduk yang memiliki lahan.
9.2.	Persentase luas lahan bersertifikat	<	Kurangnya sosialisasi tentang arti penting surat akte tanah.	Dilakukan sosialisasi tentang arti penting surat akte tanah. Adanya program sertifikat murah bagi penduduk.
9.3.	Penyelesaian kasus tanah Negara	<	Ketidakpastian dokumen resmi sebagai dasar hukum. Kurang tegasnya dan keterlambatan tindakan penyelesaian kasus tanah negara. Adanya permohonan dari masyarakat atas kawasan hutan untuk pemukiman dan pertanian. Belum ada titik temu antara masyarakat pemohon dengan Departemen Kehutanan dan Perhutani selaku pemangku penentu proses tukar menukar kawasan hutan.	Peraturan perundang-undangan dan inventarisasi/sensus. Terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam proses penyelesaian tukar menukar hutan.
9.4.	Penyelesaian izin lokasi	<	Kurangnya sosialisasi kriteria lahan yang harus memiliki ijin lokasi. Terbatasnya SDM aparatur untuk melakukan sosialisasi ijin lokasi.	Dipenuhinya jumlah aparatur pelaksana tentang ijin lokasi.
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil			
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	<	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas kependudukan, akte lahir, dan surat identitas diri lainnya.	Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan dan kepastian hukum tentang prosedur dan tatacara pengurusan surat-surat identitas
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran			
10.3.	Rasio pasangan			



	berakte nikah			
10.4.	Kepemilikan KTP		Masih adanya masyarakat tidak mampu.	kependudukan.
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		Keterbatasan perlengkapan sarana proses perekaman data kependudukan.	Keterjaminan ketersediaan blangko surat kependudukan.
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Kurangnya SDM dalam bidang IT untuk melaksanakan database kependudukan.	Perlu adanya perawatan dan update data secara berkesinambungan.
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			Perlu pengembangan SDM pelaksana.
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	=	Kurang berminatnya pegawai perempuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.	Meningkatkan motivasi perempuan dalam meningkatkan kompetensi kerja.
11.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	<	Belum adanya kegiatan terkait upaya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta. Tidak adanya data perempuan di lembaga swasta. Belum pernah dilakukan upaya koordinasi dengan sektor swasta.	Diselenggarakannya kegiatan terkait upaya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta. Pendataan yang akurat dan terbaru tentang partisipasi perempuan di lembaga swasta. Koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga swasta.
11.3.	Persentase KDRT	<	Adanya kasus-kasus KDRT yang disinyalir telah dicabut untuk kepentingan pelaku, bukan korban.	Penegakan hukum harus dapat dipatuhi dan memberikan efek jera.
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	<	Adanya anak usia sekolah yang bekerja.	Perlu adanya kebijakan tentang perlindungan anak.
11.5.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	<	Peluang kerja banyak didominasi oleh laki-laki.	Perlu adanya kebijakan tentang perlindungan perempuan.
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<	Korban cenderung menutup diri dan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami.	Perlu kerjasama antara aparat hukum, psikolog, dan sekolah.
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	<	Berkurangnya motivasi dari SDM PLKB yang dikarenakan :	Penjaringan aspirasi dari para petugas PLKB.
12.2.	Rasio akseptor KB	>	Adanya keinginan dari petugas PLKB untuk dapat berkarir sesuai dengan kepangkatannya diluar PLKB. Belum ada perhatian khusus terhadap jabatan fungsional PLKB. Misal terkait tunjangan fungsional bagi PLKB tidak sama dengan tunjangan fungsional di dinas lain. Padahal peran PLKB cukup penting.	Upaya pemberian perhatian terkait dengan peningkatan kinerja aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas PLKB.
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	>	Kesulitan dalam menarik peran serta masyarakat untuk mengikuti MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Kurangnya SDM Penyuluh	Harus meningkatkan upaya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap MKJP. Penambahan SDM



			Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), karena saat ini jumlah PLKB ada 11 orang, sedang jumlah desa ada 24 desa.	PLKB.
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	<	Tidak adanya petugas khusus yang menangani Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, sehingga PLKB-lah yang harus menangani program ini.	Rekrutmen SDM aparatur yang khusus menangani Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
13.	Sosial			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	=	Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di panti sosial karena jumlah penghuni panti yang bertambah.	Adanya suplai bantuan dari pemerintah sehingga sarana dan prasarana terpenuhi.
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	=	Masih banyak penduduk di Kota Batu yang kurang mampu. Banyak pengangguran karena lapangan pekerjaan yang terbatas.	Adanya monitoring setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memantau hasil/ perkembangan warga yang menerima bantuan sosial.
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	<	Anggaran APBD tidak bisa memenuhi atau mencukupi.	Adanya monitoring yang berkelanjutan.
14.	Ketenagakerjaan			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	<	Kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	Skill, pengetahuan, dan pengalaman.
14.2.	Angka partisipasi angkatan kerja			
14.3.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	=	Tidak adanya keharmonisan di lingkungan bekerja antara pengusaha dan pekerja. Belum terlaksananya UU ketenagakerjaan secara normatif dalam lingkungan kerja, sehingga terjadi ketidaksepahaman antara pengusaha dan pekerja. Minimnya peluang kerja (lowongan) yang ada.	Dilaksanakannya UU ketenagakerjaan secara normatif sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi. Tersedianya pencari kerja yang mempunyai skill.
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<	Pencari kerja tidak bisa memenuhi kualifikasi yang diminta perusahaan.	Peningkatan informasi peluang kerja/lowongan, misalnya penyampaian secara online.
14.5.	Pencari kerja yang ditempatkan	<	Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar Kota Batu.	Merubah pola pikir bahwa peluang kerja di luar Kota Batu lebih besar.
14.6.	Tingkat pengangguran terbuka	<	Lowongan kerja lebih sedikit dibanding dengan pencari kerja yang ada.	Peningkatan investor.
14.7.	Keselamatan dan perlindungan			
14.8.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	=		
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Kurangnya jumlah SDM pembina koperasi yang berkompeten.	Perlu upaya peningkatan jumlah SDM pembina koperasi dalam hal jumlah dan kompetensinya.
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	<	Ketidakjelasan wewenang dalam melakukan	Penetapan kewenangan untuk melakukan



15.3.	Jumlah BPR/LKM	<	pembinaan terhadap UKM non BPR/LKM dan BPR/ LKM.	pembinaan terhadap UKM non BPR/LKM dan BPR/ LKM.
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	=	Kurang berkompetennya SDM. Minimnya akses permodalan diluar APBD.	Bimbingan teknis.
16.	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	=	Belum tersusunnya sistem informasi sumber daya dan potensi unggulan daerah.	Perlunya Peningkatan masuknya Investasi melalui kemudahan, ketepatan waktu dan transparansi pelayanan perijinan. Perlunya Peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi. Perlunya Peningkatan promosi produk unggulan daerah dan kerjasama investasi.
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	=	Belum tersusunnya peta penanaman modal daerah.	
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Kebutuhan jumlah pekerja di perusahaan tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia tenaga kerja yang ada.	
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
17.	Kebudayaan			
17.1.	Jumlah grup kesenian	>	Kekurangmampuan dinas dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok seni budaya di masyarakat, karena jumlah grup seni budaya yang terlalu banyak.	Mengupayakan kemandirian dari masing-masing grup seni dan budaya, sehingga dinas lebih berperan sebagai pengawas.
17.2.	Jumlah gedung kesenian	=	Kondisi gedung yang perlu direnovasi.	Perlu dilakukannya renovasi yang disesuaikan dengan peruntukannya agar lebih representative.
17.3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Terjadinya kemacetan sebagai dampak dari diselenggarakannya festival seni dan budaya. Adanya komplain dari pengelola obyek wisata dan hotel.	Ada jalur khusus untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya yang tidak mengganggu lalu lintas wisatawan.
17.4.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<	Kurangnya sarana penunjang kegiatan seni dan budaya, sehingga menghambat volume pembinaan seni dan budaya.	Perlu penambahan sarana penunjang kegiatan seni dan budaya.
17.5.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<	Sulitnya merunut status kepemilikan bangunan cagar budaya. Kesulitan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan detail data	Perlunya ditetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan cagar budaya. Penyediaan SDM aparatur yang memiliki kompetensi bidang cagar budaya.



			tentang bangunan cagar budaya (misal bangunan kolonial) Belum ada perda tentang pengelolaan cagar budaya. Terbatasnya SDM aparatur yang spesifik memiliki kompetensi di bidang cagar budaya.	Peningkatan kerjasama dengan dirjen kepurbakalaan (Balai Pelestarian Cagar Budaya). Perlu koordinasi dengan pemilik cagar budaya yang berstatus pribadi. Pemberian kompensasi kepada pemilik cagar budaya (bangunan kolonial) berupa pengurangan nilai pajak bangunan.
18.	Pemuda dan Olahraga			
18.1.	Jumlah klub olahraga	=	Kurangnya kemampuan untuk melakukan pembinaan dan bantuan untuk klub-klub olahraga yang ada di masyarakat.	Peningkatan kemampuan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membina klub olahraga.
18.2.	Jumlah gedung olahraga	<	Belum adanya lahan dan alokasi anggaran untuk gedung olahraga.	Tersedianya lahan dan alokasi anggaran untuk gedung olahraga.
18.3.	Jumlah organisasi pemuda	<	Kurang terdatanya organisasi kepemudaan yg ada di Kota Batu.	Perlu pendataan ttg organisasi kepemudaan yg ada di Kota Batu.
18.4.	Jumlah organisasi olahraga	=	Kurangnya koordinasi kinerja antara Dinas Pemuda Olahraga dengan KONI.	Dispora dan KONI perlu koordinasi ttg data dan perkembangan organisasi olahraga.
18.5.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<	Kurangnya pembinaan thd organisasi pemuda.	Perlu diadakan pembinaan thd organisasi pemuda
18.6.	Jumlah kegiatan olahraga	=	Keterbatasan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat. Benturan jadwal penyelenggaraan kegiatan olahraga (POR SD/MI dan POP DA) bagi murid dengan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan. Kendala dalam memperoleh rekomendasi atau ijin bagi atlit untuk mengikuti kegiatan olahraga yang dikirim oleh Dispora.	Penyediaan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan penjadwalan pelaksanaan kegiatan olahraga. Perlunya pendekatan terhadap sekolah maupun orangtua murid untuk mendapat ijin pengiriman atlet.
18.7.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<	Belum ada gelanggang olahraga yang bisa mencakup olahraga.	Pembangunan gelanggang olahraga.
18.8.	Lapangan olahraga	<	Kurangnya kelayakan lapangan olahraga yang sudah ada di semua desa.	Peningkatan kelayakan dari lapangan olahraga yang telah ada di semua desa.
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	Usulan anggaran sehingga pembinaan LSM, ormas, dan OKP tidak terealisasi.	Pembinaan melekat di Dinas Pemuda dan Olahraga.
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	=	Tingkat partisipasi masyarakat kurang.	Tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi tinggi.
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010 yang mengatur standart ideal jumlah satpol PP, maka dapat diidentifikasi	Penambahan jumlah anggota satpol PP yang benar-benar berdasarkan kriteria-kriteria aparatur



			bahwa jumlah Satpol PP di Kota Batu masih kurang. Adanya anggapan umum bahwa petugas Satpol PP merupakan pegawai yang dipandang sebelah mata.	Satpol PP yang diatur dalam peraturan perundangan.
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<	Belum adanya peraturan perundangan secara nasional. Belum adanya ketersediaan anggaran untuk perekrutan anggota Satuan Linmas. Kekurangan personil (PNS). Ketidaksanggupan masyarakat.	Ketersediaan peraturan perundangan. Penambahan personil linmas. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Satuan Linmas.
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan.	=	Kurangnya upaya perawatan pos siskamling. Ketersediaan lahan. Dukungan anggaran (ADD).	Kepedulian warga. Sosialisasi.
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	=	Naiknya pertumbuhan ekonomi tidak ditunjang oleh pertumbuhan/penambahan infrastruktur. Naiknya pertumbuhan ekonomi masih dirasakan oleh beberapa orang/ kelompok tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh naiknya lapangan kerja/kesempatan kerja yang signifikan.	Penyediaan infrastruktur daerah yang memadai. Upaya peningkatan lapangan kerja yang bersifat padat karya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran.
20.5.	Kemiskinan		Rendahnya pendidikan dan ketrampilan masyarakat. Sulitnya akses lapangan kerja. Tidak memiliki lahan produktif. Tingkat penghasilan yang rendah dengan beban keluarga tinggi.	Komitmen dan tindakan nyata pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Identifikasi permasalahan melalui pendataan yang terbaru dan valid. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<	Belum terimplementasinya SPIPISE untuk Usaha Penanaman Modal sesuai Perka BKPM No. 12 Tahun 2012, karena terpisahnya urusan PM dan Perizinan (tidak ditangani oleh satu lembaga).	Diajukan perubahan Perda OPD, yang menyatukan urusan PM dan Perizinan dalam satu OPD yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, saat ini sedang dalam proses konsultasi ke Depdagri.
20.7.	Penegakan PERDA	<	Tidak adanya pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Proses mutasi PNS yang mengakibatkan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan ijin menjadi pejabat PPNS justru dipindah, sehingga terjadi kekosongan lagi.	Pemenuhan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pengaturan mutasi PNS yang lebih memperhatikan upaya peningkatan kompetensi yang sudah dilakukan terhadap aparatur, sehingga upaya tersebut tidak sia-sia dan

			Kurangnya koordinasi secara intens dalam hal penegakan peraturan daerah, sehingga seringkali terjadi benturan ketika melakukan penegakan.	mendukung kinerja pemerintahan. Koordinasi dan komitmen pemerintah kota untuk benar-benar menegakkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	<	Belum adanya tempat pembinaan terhadap PMKS yang tertibkan. Terjadinya penurunan semangat dari pihak satpol PP sendiri dalam melakukan tindakan pendisiplinan, yang disebabkan karena banyak faktor antara lain faktor kejenuhan, usia, dll.	Perlu diadakan media pembinaan terhadap PMKS yang telah tertibkan oleh Satpol PP. Dilakukan upaya pengatasan faktor-faktor penyebab penurunan semangat dari para aparatur Satpol PP.
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	<	Kurangnya kemampuan untuk mendidik aparatur satpol PP untuk dapat bertindak tegas dan cepat di lapangan. Kurang adanya pemberian solusi pemecahan masalah dari pemerintah kota kepada masyarakat terkait dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh SKPD terkait.	Pembinaan yang tepat dan berkelanjutan terhadap aparatur Satpol PP bekerjasama dengan lembaga penegak hukum. Penetapan alternatif solusi terhadap kelompok masyarakat yang mendapat tindak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota.	<	Kurangnya personil. Keengganan untuk menjadi anggota linmas.	Penambahan personil. Upaya peningkatan kesadaran bela negara.
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	<	Dalam perhitungan capaian SPM yang digunakan adalah luas wilayah kota. Sedangkan Kota Batu masih didominasi dengan wilayah yang tidak terbangun, sehingga cakupan wilayah bencana kebakaran bila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Batu akan menghasilkan persentase yang kecil.	Pembentukan pos kesiagaan kebakaran beserta sarana dan prasarana di beberapa lokasi yang dianggap sulit dijangkau. Peningkatan partisipasi masyarakat tentang kesiagaan bahaya kebakaran.
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	= 100%	-	Wilayah permukiman masyarakat yang tidak terlalu luas dan relatif terjangkau.
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		Kurang dukungan anggaran untuk sarana prasarana pemerintahan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dari pemkot. Belum semua desa mempunyai SDM yang memadai.	Dokumen kebijakan. Komitmen masyarakat desa. Pemenuhan SDM yang memadai.
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	<	Belum selesainya sosialisasi pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) di setiap SKPD Pemerintah Kota Batu. Lemahnya kualitas dan	Mendorong sosialisasi pelaksanaan PPID di setiap SKPD Pemerintah Kota Batu melalui kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.



			komitmen SDM aparatur di setiap SKPD untuk mengelola PPID SKPD secara berkelanjutan.	Peningkatan kemampuan dan komitmen SDM aparatur untuk mengelola PPID SKPD secara berkelanjutan.
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	<	Belum terlaksananya survey kepuasan layanan masyarakat di setiap bidang pelayanan dasar.	Penetapan dan penerapan prosedur, persyaratan, kecepatan dan ketepatan waktu, keadilan, serta keamanan pelayanan. Penetapan dan penerapan kejelasan, kepastian, kedisiplinan, tanggung-jawab, kemampuan, kesopanan, dan keramahan petugas. Penetapan kepastian dan kewajaran biaya. Kenyamanan lingkungan pemberian pelayanan.
21.	Ketahanan Pangan			
21.1.	Regulasi ketahanan pangan			
21.2.	Ketersediaan pangan utama	<	Kesulitan memperoleh data riil tentang ketersediaan pangan utama dari pihak alur distribusi. Sulitnya akses data pendukung dalam penghitungan capaian SPM untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kurangnya SDM yang kompeten dan bersertifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keamanan pangan.	Pendekatan yang baik untuk dapat memperoleh data dari pihak-pihak pelaku alur distribusi. Kerjasama dengan pihak-pihak atau instansi terkait untuk perolehan data primer maupun sekunder. Pemenuhan SDM yang kompeten dan bersertifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keamanan pangan.
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		Belum semua LPM mempunyai kelompok binaan sesuai potensi desa.	Identifikasi potensi. Pembentukan dan pembinaan kelompok.
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	=	Kurangnya kualitas SDM aparatur pembina.	Peran aktif pengurus PKK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan adanya kreatifitas dari kader PKK.
22.3.	Jumlah LSM	<	Belum dilaksanakannya pendataan. Belum dilaksanakannya pembinaan. Rendahnya kinerja (kurang efektif dan inovatif). Belum semua LSM bekerjasama dengan aparat/ pemerintah secara baik.	Dilaksanakannya pendataan. Dilaksanakannya pembinaan terhadap LSM yang ada. Dukungan kebijakan untuk peningkatan kualitas/kompetensi. Pembinaan secara periodik.
22.4.	LPM Berprestasi	<	Belum terdukung SDM yang memadai.	Pengurus yang kompeten.



			Penggantian pengurus.	Dilaksanakannya pelatihan.
22.5.	PKK aktif	=	Kurangnya informasi yang didapat masyarakat.	Dukungan dari semua SKPD terkait dan seluruh lapisan masyarakat.
22.6.	Posyandu aktif	=	Kurang memadainya sarana dan prasarana. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya posyandu. Animo masyarakat menurun.	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan. Dukungan dari semua SKPD terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi fungsi poyandu.
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	<	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.	Sosialisasi dan koordinasi. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	<	Kurangnya pengawasan oleh aparat maupun masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pelibatan (kepedulian) masyarakat. Anggaran untuk monitoring dan pelaporan.
23.	Statistik			
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	=	Kinerja BPS dalam penyediaan data selalu 1 tahun lebih lambat. Angka yang disajikan belum merupakan angka final, tetapi masih merupakan angka sementara, dan masih dimungkinkan terjadi revisi di tahun-tahun berikutnya.	BPS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui kebenarannya secara legal. Melakukan koordinasi secara intens dengan instansi penyaji data.
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	=		
24.	Kearsipan			
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	<	Keterbatasan pemahaman tentang arti penting arsip. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengolahan arsip secara baku. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan pengelolaan arsip.	Adanya kebijakan kota yang memiliki kekuatan memaksa/mewajibkan pengelolaan arsip di setiap SKPD. Diadakannya diklat/bimtek untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian SDM pengelola arsip. Adanya depo arsip beserta sarana dan prasarananya.
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	<	Kurangnya kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.	
25.	Komunikasi dan Informatika			
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	<	Kurang sosialisasi.	Harus ada SDM yang memadai.
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=	Tidak berbanding seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Serta kurangnya keberadaan wartel/warnet di daerah pelosok.	Peningkatan jumlah wartel dan warnet.
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	<	Belum semua terdata.	Harus ada SDM yang memadai.
25.4.	Jumlah penyiaran	=	Belum semua terdata dan	Harus ada anggaran



	radio/TV lokal		kurangnya sosialisasi tentang penataan tower dan ijin frekuensi.	Sosialisasi dan SDM yang memadai.
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	=	Belum selesaikan sosialisasi sub domain website Pemerintah Kota Batu kepada seluruh SKPD. Lemahnya kualitas dan komitmen SDM aparatur di semua SKPD untuk mengelola website SKPD secara berkelanjutan. Lemahnya wewenang pengelolaan website pemerintah kota yang terkait dengan SKPD lain, karena status satuan pengelola yang hanya bidang.	Mendorong sosialisasi sub domain website Pemerintah Kota Batu kepada seluruh SKPD melalui kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Peningkatan kemampuan dan komitmen SDM aparatur untuk mengelola website SKPD secara berkelanjutan. Peningkatan status pengelola dari Bidang Komunikasi dan Informasi.
25.6.	Pameran/expo	<	Standart mutu produk yg dipamerkan dr kelompok tani masih kurang memenuhi. Kapasitas produksi terbatas shg untuk memenuhi permintaan yang tinggi kadang tidak mencukupi.	Peningkatan SDM kelompok tani, standart mutu produk, kapasitas dan kontinyuitas produksi, serta dana yang mencukupi.
26.	Perpustakaan			
26.1.	Jumlah perpustakaan	<	Bangunan gedung perpustakaan masih berstatus sewa, dan belum memenuhi standart perpustakaan.	Adanya gedung perpustakaan milik pemerintah kota yang memenuhi standart spesifikasi gedung perpustakaan.
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<	Lokasi perpustakaan yang tidak strategis.	Lokasi gedung perpustakaan yang strategis.
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<	Koleksi buku tidak lengkap dan kurangnya jumlah koleksi buku.	Alokasi anggaran untuk penambahan koleksi buku.
27.	Pertanian			
27.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	=	Keterlambatan pengadaan sarana produksi dan bibit terkait musim tanam.	Maksimal 2 bulan sebelum musim tanam sudah dilaksanakan lelang pengadaan sarana produksi dan bibit.
27.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi pertanian (peternakan, perikanan), perkebunan, dan kehutanan.
27.3.	Kontribusi sektor pertanian (horticultura/buah bunga sayur) terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
27.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi perkebunan.
27.5.	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi yang dihasilkan kelompok tani.
27.6.	Cakupan bina kelompok petani	=	-	Bantuan pemerintah yang dimanfaatkan kelompok tani.
28.	Kehutanan			
28.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	<	Kurangnya anggaran terkait rehabilitasi hutan dan lahan	Perlu penyadaran masyarakat tentang



			kritis. Kurangnya jumlah SDM aparaturnya pelaksana bidang kehutanan. Masih luasnya lahan kritis khususnya di luar kawasan hutan. Kesadaran masyarakat yang belum memahami cara berusaha tani yang memperhatikan upaya konservasi tanah.	tehnik berusaha tani yang benar di lokasi masing-masing. Alokasi anggaran yang memadai untuk membangun bangunan-bangunan konservasi tanah seperti terasering, gully plug dan dam penahan.
28.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	=	Tidak dimilikinya kewenangan yang penuh dalam pengelolaan hutan. Belum adanya kesepahaman antara SKPD terkait dengan LMDH dalam pengelolaan wilayah sekitar hutan.	Koordinasi dengan pihak Perhutani selaku pemegang kewenangan pengelolaan hutan. Dilakukannya pendekatan persuasif dengan LMDH untuk mewujudkan kesepahaman dan kesepakatan dalam mengelola wilayah sekitar hutan.
28.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	=	Selama ini pengelolaan sudah berjalan dengan lancar.	Koordinasi yang baik dengan Perhutani selaku pengelola kawasan hutan.
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
29.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Kondisi tanpa ijin. Jumlah penambang 107 orang. Lokasi/area DAS Sumber Brantas bukan area yang diijinkan untuk pertambangan. Belum ada aturan (Perda) pertambangan daerah.	Dengan adanya ijin, para penambang bisa diberi pengarahan dan sosialisasi, sehingga dapat dikoordinir dengan baik.
29.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<	Kota Batu bukan merupakan daerah pertambangan.	Kota Batu bukan merupakan daerah pertambangan.
30.	Pariwisata			
30.1.	Kunjungan wisata	>	Sulitnya mendapat data kunjungan wisata yang akurat dari obyek wisata, hotel, restoran, dan panti pijat. Selalu terjadinya kemacetan lalu lintas ketika hari libur dan musim liburan yang disebabkan karena jumlah jalan utama kurang dan jalan alternatif yang kelas jalannya belum memenuhi.	Koordinasi dan upaya lain yang diperlukan untuk bisa memperoleh data kunjungan wisata yang akurat dari pihak swasta terkait dengan pariwisata. Peningkatan kapasitas jalan terkait dengan upaya memperlancar arus lalu lintas.
30.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>	Kurangnya penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat untuk siap menjadi manusia pariwisata. Kurangnya kemampuan SDM aparaturnya dalam mempersuasi masyarakat terkait sikap masyarakat	Peningkatan upaya pembinaan dan pengendalian dalam mempersiapkan masyarakat pariwisata. Peningkatan kemampuan SDM aparaturnya pelaksana pembinaan terhadap masyarakat dalam



			terhadap perkembangan pariwisata.	menyongsong perkembangan pariwisata.
31.	Kelautan dan Perikanan			
31.1.	Produksi perikanan	<	SDM perikanan kurang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Harga pakan cukup tinggi. Tidak ada petugas penyuluh lapang perikanan. Kondisi iklim/lingkungan tidak mendukung. Perikanan masih menjadi usaha sampingan.	SDM yang berwawasan perikanan. Ada pakan alternatif untuk menekan biaya. Perlu ada petugas penyuluh lapang khusus perikanan.
31.2.	Konsumsi ikan	<	Kurang sosialisasi pentingnya makan ikan. Kurang kesadaran akan pentingnya makan ikan.	Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan. Peningkatan intensitas sosialisasi gemar ikan.
32.	Perdagangan			
32.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	=	Kurangnya interaksi yang saling mendukung yang mengutamakan antar pelaku perdagangan.	Peningkatan forum komunikasi di bidang perdagangan. Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa.
32.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	<	Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi produk unggulan dalam bentuk permodalan, akses ekspor, pameran-pameran, dll. Produk unggulan kurang memiliki daya saing.	Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi produk unggulan. Tersedianya media/akses bagi pengusaha untuk melakukan ekspor. Upaya peningkatan kualitas produk unggulan.
32.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	=	Kurangnya SDM aparatur yang berkompeten. Keterbatasan anggaran.	Peningkatan kompetensi SDM aparatur.
33.	Perindustrian			
33.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	=	Daerah Kota Batu kurang kondusif untuk dijadikan kawasan industri.	Peningkatan industri rumah tangga.
33.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	=	Banyak produk industri yang belum terstandarisasi.	Standarisasi produk industri rumah tangga.
33.3.	Pertumbuhan Industri	=	Kurangnya akses dalam mempromosikan produk industri.	Pembaharuan informasi secara kontinyu.
33.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	=	Kurangnya SDM aparatur yang berkompeten. Keterbatasan anggaran.	Aparatur yang berkompeten.

Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan dari SKPD terkait.



4.2. Isu Strategis

Sub bab ini menyajikan isu-isu strategis yang merupakan pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Dinamika eksternal, khususnya yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5 (tahun) kedepan, sangat perlu diperhatikan agar kinerja pelayanan dan pembangunan daerah dapat terwujud dan bahkan meningkat. Kegagalan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dimungkinkan karena kurang selarasnya program prioritas pembangunan dengan isu strategis yang berkembang.

Tabel 4.2.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan.	Dukungan terhadap iklim investasi nasional melalui dukungan kelembagaan PTSP dan Perijinan.	Rencana pembangunan jalan tembus Lawang – Batu.	Kemacetan lalu lintas.
Pencapaian pendidikan dasar untuk semua.	Ketahanan Pangan.	Fasilitasi pelebaran struktur ruas Cangar – Pacet – Mojosari yang memerlukan koordinasi dengan Perhutani.	Kerjasama bidang pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.
Perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Penyelenggaraan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.	Dukungan pembangunan sarana pemerintahan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).	Kerjasama pengelolaan infrastruktur jalan dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.
Penurunan angka kematian anak.	Pemberantasan korupsi.	Dukungan penguatan kelembagaan di daerah melalui dana dekonsentrasi.	Kerjasama pengelolaan sumber daya air dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.
Peningkatan kesehatan ibu.	Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi.	Dukungan penguatan kapasitas SDM daerah.	Kerjasama pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan antar daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.
Penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.	Pengatasan tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar unit pemerintahan.	Dukungan pengendalian tingkat inflasi di daerah.	
Pelestarian lingkungan hidup.	Begitu besarnya jumlah aparatur pemerintah yang mengakibatkan besarnya anggaran untuk belanja pegawai.	Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.	
Pembangunan kemitraan global untuk pembangunan.	Kenaikan harga BBM	Belum optimalnya sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	Kerjasama pengelolaan persampahan dengan daerah Malang Raya dan daerah yang
Pemanasan global.	Peningkatan pelayanan publik.		
Persiapan menghadapi diberlakukannya pasar bebas.	Penanggulangan kemiskinan.		



	Petanian organik. Cuaca ekstrim dan bencana alam.	Belum optimalnya infrastruktur. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Daya saing pariwisata menuju kepariwisataan internasional. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan sosial. Menuju pangan sehat dengan standart internasional. Stabilitas kehidupan politik yang harmonis dan demokratis di Kota Batu. Kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat dan UKM. Good governance dan otonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat desa. Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Batu. Belum optimalnya kualitas pendidikan. Optimalisasi daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.	berbatasan dengan Kota Batu. Peran penting keberadaan Bandara Abdul Rahman Saleh terhadap kepariwisataan Kota Batu. Pengelolaan hutan dan taman hutan rakyat (Tahura). Degradasi moral masyarakat yang terlihat dari berbagai kasus kriminalitas dan moralitas. Tingginya angka pernikahan dini yang dapat berdampak pada tingginya angka perceraian. Gaya hidup hedonisme yang mulai merambah kepada masyarakat menengah ke bawah. Peredaran obat terlarang dan minuman keras. Arus globalisasi yang semakin deras melalui media teknologi informasi komunikasi. Pembangunan sektor fisik yang mendukung dinamika kehidupan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

4.3. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sejak diimplementasikannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, dalam kerangka pemikiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perencanaan



pembangunan daerah harus tetap menjaga keselarasan gerak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk itu, sangat perlu dilakukan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Selain untuk menjaga keselarasan, telaahan ini berfungsi untuk mengantisipasi berbagai peluang dan hambatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tabel 4.3.

Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Kota Batu

No.	Kebijakan Nasional	
	RPJMN	RPJMD Provinsi
(1)	(2)	(3)
1	Penegakan disiplin PNS di seluruh instansi.	Penataan sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.
2	Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah.	Peningkatan anggaran pendidikan mencapai 20% APBD untuk melanjutkan upaya pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
3	Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Perluasan akses kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan murah dan bermutu.
4	Kebijakan antikorupsi.	Penuntasan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah 12 tahun.
5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	Pemantapan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia peserta didik.
6	Pengembangan sistem e-procurement.	Pemberantasan buta aksara.
7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.	Pemberdayaan dan penyetaraan lembaga pendidikan <i>diniyah</i> dan pondok pesantren <i>salafiyah</i> setara pendidikan umum sesuai standar pendidikan nasional.
8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.	Optimalisasi peran dan fungsi dewan pendidikan kota/kabupaten dan propinsi.
9	Tindak lanjut pengaduan masyarakat.	Peningkatan dan pemerataan prasarana gedung sekolah yang berkualitas.
10	Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Pengembangan teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan.
11	Penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik.	Peningkatan jumlah, kualitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
12	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi.	Pengembangan pendidikan kewarganegaraan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai keberagaman.
13	Penerapan Manajemen Pengaduan.	Pengembangan pendidikan non formal yang murah dan bermutu.
14	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengembangan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju, dan mandiri.
15	Pelaksanaan evaluasi dan	Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan

	penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.	bermutu dan terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin.
16	Penataan kelembagaan instansi pemerintah.	Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan yang berorientasi pada subjek manusianya, bukan jenis penyakitnya bagi penduduk miskin.
17	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah.	Peningkatan jumlah, fungsi, dan kualitas puskesmas dan jaringannya secara merata.
18	Pemantapan kualitas manajemen SDM.	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan.
19	Pengembangan dan penerapan <i>e-government</i> .	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar.
20	Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK.	Pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang tinggal di wilayah sulit air.
21	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur.	Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola perilaku hidup bersih dan sehat.
22	Penyediaan layanan pendidikan TK.	Penciptaan jaring pengaman PHK.
23	Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD.	Pelaksanaan berbagai program perluasan kesempatan kerja.
24	Peningkatan akses dan mutu Madrasah Ibtidaiyah.	Peningkatan investasi agroindustri dan agrobisnis.
25	Penjaminan kepastian pendidikan SMP/SMPLB.	Penciptaan iklim dan lingkungan dunia usaha yang kondusif.
26	Peningkatan akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah.	Penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan.
27	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja melalui perbaikan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan.
28	Peningkatan akses dan mutu Madrasah Aliyah.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan.
29	Penyediaan layanan akademik Program Studi.	Penyempurnaan program pendukung pasar kerja dengan membentuk informasi pasar kerja.
30	Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Tinggi Islam.	Penciptaan iklim kerja yang kondusif bagi tenaga kerja.
31	Penyediaan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Pengintegrasian semua program sektoral untuk orientasi utama pengentasan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.
32	Penyediaan layanan Pendidikan Masyarakat.	Penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal, dan menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial.
33	Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan.	Pemberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial.
34	Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah.	Mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal untuk membangun sistem swa-organisasi.
35	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi.	Pengembangan UKM yang diarahkan untuk memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
36	Pembinaan keperawatan dan kebidanan.	Perluasan akses permodalan.
37	Penyehatan lingkungan.	Perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan.
38	Penanggulangan krisis kesehatan.	Peningkatan kualitas institusi pendukung UKM.

39	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Peningkatan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
40	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).	Pengembangan UMKM dengan pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri.
41	Pembinaan ketahanan keluarga.	Penguatan peran UMKM dalam proses industrialisasi.
42	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB.	Pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai keunggulan daerah.
43	Pelayanan sosial lanjut usia.	Peningkatan daya saing produk UMKM dalam penyediaan barang dan jasa di pasar domestic.
44	Bantuan sosial lanjut usia.	Penguatan tatanan kelembagaan koperasi di tingkat makro, meso, dan mikro.
45	Bantuan sosial korban bencana alam.	Peningkatan pemahaman, kepedulian, dan dukungan dari pemangku kepentingan kepada koperasi.
46	Bantuan sosial korban bencana sosial.	Peningkatan kemandirian koperasi.
47	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.	Penuntasan deregulasi peraturan dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk mengurangi biaya transaksi dan hambatan, terutama bagi UKM.
48	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.	Harmonisasi peraturan perundangan investasi.
49	Pembinaan dan pengembangan budaya politik.	Peningkatan jaminan kepastian usaha dan penegakan hukum.
50	Fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.	Perbaikan kebijakan investasi sesuai praktek internasional yang baik.
51	Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan.	Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu untuk pelayanan perijinan investasi.
52	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.	Peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor, dan penguatan kinerja eksportir.
53	Pemantapan hubungan dan politik luar negeri di kawasan Asia Timur dan Pasifik.	Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor, dan pelatihan eksportir kecil.
54	Pemantapan hubungan dan politik luar negeri di kawasan Asia Selatan dan Tengah.	Peningkatan infrastruktur kegiatan investasi dan ekspor, pertanian dan pedesaan.
55	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri.	Peningkatan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
56	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.	Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian usaha.
57	Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri.	Pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub sistem distribusi daerah.
58	Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan investasi di bidang pariwisata daerah dan produk-produk wisata.

	dan pemenuhan hak korban.	
59	Penyediaan data pendidikan untuk perumusan kebijakan nasional.	Penguatan struktur industri, teknologi, dan nilai pengganda (<i>multiplier</i>).
60	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender.	Peningkatan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) untuk menyerap kenaikan produksi.
61	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender.	Pengembangan industri manufaktur diutamakan pada yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
62	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender.	Mengembangkan subsektor industri yang terkait dan subsektor industri penunjang bagi industri manufaktur prioritas.
63	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender.	Fasilitasi penelitian dan pengembangan industri manufaktur untuk teknologi produksi, termasuk manajemen produksi dan teknik produksi yang ramah lingkungan.
64	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender.	Fasilitasi peningkatan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja industri untuk meningkatkan daya saing.
65	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender.	Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sumber daya air.
66	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender.	Peningkatan dan percepatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur penunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan.
67	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender.	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur penunjang pemerataan pembangunan antar daerah.
68	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender.	Kerjasama dengan badan usaha swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik dan komersial.
69	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender.	Peningkatan budaya kerja PNS yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab.
70	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.	Pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan masyarakat.
71	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender.	Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.
72	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan.	Penuntasan penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
73	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.	Penataan fungsi kelembagaan pemerintah.
74	Penyusunan dan harmonisasi	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

	kebijakan perlindungan korban perdagangan orang.	aparatur.
75	Sistem Informasi Manajemen.	Peningkatan kesejahteraan pegawai.
76	Kegiatan kerjasama HAM.	Pemberlakuan sistem karir yang berdasarkan prestasi.
77	Kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, umum, dan unggulan.
78	Kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.	Peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.
79	-	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
80	-	Pengembangan dan pemanfaatan <i>e-government</i> .
81	-	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama.
82	-	Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
83	-	Peningkatan kualitas penataan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah.
84	-	Pembinaan keluarga harmonis sebagai pilar utama pembentuk moral dan etika masyarakat.
85	-	Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
86	-	Peningkatan upaya menjaga keharmonisan sosial kelompok keagamaan dengan mengedepankan kearifan lokal.
87	-	Pencegahan faktor-faktor penyebab berkembangnya konflik keagamaan.
88	-	Penyelesaian konflik sosial keagamaan dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak.
89	-	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
90	-	Peningkatan taraf pendidikan, layanan kesehatan, dan bidang pembangunan lain untuk mempertinggi kualitas hidup kaum perempuan.
91	-	Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
92	-	Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang.
93	-	Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.
94	-	Penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
95	-	Penggunaan nilai budaya lokal sebagai sarana mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.
96	-	Peningkatan pemahaman dan penghormatan terhadap pendapat dan keyakinan masing-masing.
97	-	Penguatan konsolidasi demokrasi terutama demokrasi partisipatif.
98	-	Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk menjaga keamanan lingkungan dan berbagai

		permasalahan berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.
99	-	Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dengan melibatkan tokoh masyarakat.
100	-	Pemberian teladan praktek penegakan hukum non diskriminatif yang dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun <i>community policing</i> .
101	-	Pengurangan keresahan dan kerentanan sosio psikologis masyarakat korban lumpur yang mengalami ketidakpastian nasib dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akibat berlarutnya penyelesaian ganti rugi.
102	-	Minimalisasi gejolak sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat korban lumpur Lapindo.
103	-	Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik untuk menormalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan khususnya di koridor timur Jawa Timur.
104	-	Optimalisasi usaha intersifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka <i>taxing power</i> di daerah.
105	-	Penghapusan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun pembuatan lama, dan menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat mewah.
106	-	Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
107	-	Mengembangkan pendapatan daerah yang bersifat netral.
108	-	Peningkatan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif.
109	-	Penghabusan retribusi yang membebani masyarakat kecil.
110	-	Penciptaan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD.
111	-	Prioritas alokasi anggaran belanja daerah pada sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan, keterampasan, dan pembungkaman.
112	-	Peningkatan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
113	-	Pengarahan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, pencegahan terhadap bencana alam, dan perluasan lapangan kerja.
114	-	Pemberian alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa.



115	-	Penyediaan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM.
116	-	Peningkatan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik.
117	-	Peningkatan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
118	-	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.
119	-	Penggunaan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek besar lainnya.
120	-	Perluasan dan peningkatan kerjasama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model.
121	-	Pembiayaan pembangunan dengan pola <i>cost sharing</i> antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
122	-	Pengembangan privatisasi/swastanisasi.
123	-	Pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
124	-	Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.
125	-	Pemberian <i>Public Service Obligation</i> (PSO) kepada BUMD, yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Sumber : Hasil analisis terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan kebijakan lain.

4.4. Penelaahan RPJPD

Telaahan terhadap RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan dalam periode RPJMD sebelumnya. Untuk itu, perlu ditelaah mengenai sasaran pokok, indikator dan target kinerja 20 tahun, realisasi kinerja sampai periode terakhir, dan target yang ditentukan RPJPD untuk periode RPJMD tahun 2012-2017.



Tabel 4.4.
Hasil Telaahan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025

No.	Sasaran Pokok	Indikator & Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja s.d. Periode Terakhir	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD 2012-2017
1.	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).		73,50
2.	Meningkatnya toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif.	2. Indeks Pendidikan :		84,70
3.	Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.	a. Angka Partisipasi Kasar (APK).		120%
4.	Menguatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat.	1) SD.		85%
5.	Terbentuknya kharakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.	2) SMP.		50%
6.	Berkembangnya seni dan budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar pada warisan leluhur.	3) SMU.		100%
7.	Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas.	b. Angka Partisipasi Sekolah (APS).		92%
8.	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan nonformal.	1) SD.		75%
9.	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan.	2) SMP.		98%
10.	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.	3) SMU.		
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu	3. Angka Melek Huruf (AMH).		



	serta dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau.	4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).		9 tahun
12.	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.	5. Indeks Kesehatan :		
13.	Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.	a. Indeks Harapan Hidup (IHH).		72%
14.	Menurunnya jumlah penyakit menular yang diderita masyarakat.	b. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran).		34%
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.	c. Rasio balita penderita gizi buruk terhadap jumlah balita.		0,06%
16.	Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat.	d. Cakupan peserta KB aktif (dari jumlah PUS).		88%
17.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.	e. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin.		85%
18.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja.	6. Cakupan Kelurahan UCI.		24 kelurahan
19.	Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.	7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.		100%
20.	Terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku kepemudaan yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif.	8. Jumlah penduduk.		210.000 jiwa
21.	Meningkatnya kualitas dan partisipasi kepemudaan dalam pembangunan.	9. Laju pertumbuhan penduduk.		1,03
22.	Meningkatnya pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.			
23.	Meningkatnya minat keolahragaan masyarakat, baik yang mengarah pada olahraga sebagai budaya maupun olahraga sebagai prestasi.			
24.	Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.			
25.	Menguatnya kelembagaan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan.			
26.	Meningkatnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.			



27.	Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.	10. Jumlah tempat ibadah.		620
28.	Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada korban <i>trafficking</i> pada anak dan perempuan.	11. Laju pertumbuhan ekonomi ADHK.		6,8
29.	Menurunnya jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.	12. Indeks Daya Beli (PPP).		65
30.	Meningkatnya peran keluarga sejahtera sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.	13. PDRB ADHB.		Rp. 2.790.000,-
31.	Meningkatnya kinerja keluarga berencana melalui perbaikan layanan kesehatan.	14. PDRB per kapita ADHB.		Rp. 13.286.000,-
32.	Terbentuknya keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas.	15. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.		20,05%
33.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah (pengendalian tingkat kelahiran) maupun migrasi.	16. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.		47,50%
34.	Meningkatnya pemerataan sebaran penduduk, yang ditunjang dengan pemerataan pembangunan antar wilayah.	17. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB.		15,50%
35.	Meningkatnya kinerja administrasi kependudukan, khususnya dalam menyediakan data demografi yang handal dan mampu menunjang kebijakan kependudukan.	18. Persentase penduduk miskin.		9,75
36.	Terwujudnya ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.	19. TPAK.		62,71
37.	Meningkatnya aktifitas berbasis komunitas untuk mengatasi masalah kesejahteraan.	20. Tingkat Pengangguran Terbuka.		6,52
38.	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial.			
39.	Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kota Batu.			
40.	Terwujudnya penanggulangan kemiskinan berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.			



41.	Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran.			
42.	Meningkatnya kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial.			
43.	Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan merata ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.			
44.	Terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal.			
45.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.			
46.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan.			
47.	Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan.			
48.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan.			
49.	Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.			
50.	Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah.			
51.	Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.			
52.	Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan, sampai pemberhentian pegawai.			
53.	Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang			



	penyimpangan pelaksanaan pembangunan.			
54.	Terciptanya aparatur pengawas yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi.			
55.	Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah.			
56.	Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal.			
57.	Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.			
58.	Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.			
59.	Terwujudnya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.			
60.	Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.			
61.	Menguatnya kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan.			
62.	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban yang bersifat antisipatif, persuasif, dan preventif.			
63.	Meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram, dan damai.			
64.	Meningkatnya kemampuan mengelola resiko ancaman bencana alam.			



65.	Pengembangan dan revitalisasi objek wisata, dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan agrowisata.			
66.	Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.			
67.	Meningkatnya penggunaan sumber daya ekonomi lokal, untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain.			
68.	Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Batu, terutama koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausahawan baru.			
69.	Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing, serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah.			
70.	Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.			
71.	Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi.			
72.	Terpenuhinya sarana prasarana (infrastruktur) pendukung investasi.			
73.	Terjaganya distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau.			
74.	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil			



	pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.			
75.	Pengembangan perlbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah, dan murah.			
76.	Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi yang ditunjang dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur.			
77.	Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan daerah.			
78.	Tersedianya berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi dan non ekonomi.			
79.	Terbukanya kelancaran akses informasi ke seluruh pelosok wilayah.			
80.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan beserta sarana dan prasarana dasar pendungnya yang layak, sehat, dan murah.			
81.	Tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah.			
82.	Terciptanya sistem pengelolaan pertanahan daerah yang efisien dan efektif serta dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang pertanahan secara efektif.			
83.	Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.			
84.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.			
85.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.			
86.	Terkendalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan			



	hidup yang efektif, efisien, dan bernilai tambah.			
87.	Terwujudnya kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.			

Sumber : Hasil telaah terhadap RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025.



BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah Kota Batu dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kota Batu yang disampaikan kepada masyarakat ketika proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam menterjemahkan visi kedalam misi, visi diuraikan terlebih dahulu mengenai pokok-pokok yang terkandung didalam visi. Kemudian pokok-pokok visi tersebut dijelaskan mengenai kesesuaiannya dengan kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah. Selain itu, juga dijabarkan mengenai kriteria keberhasilan dan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program-program pembangunan dari masing-masing pokok visi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD harus terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu. Keterkaitan ini dimaksudkan menjaga kesinambungan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, pokok-pokok visi juga harus memiliki rujukan dari sasaran pokok dalam RPJPD.

Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Visi

No.	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia,	Kota Batu menjadi sentra pertanian organik.	<u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u> Visi ini mengantisipasi isu kerusakan tanah, lingkungan hidup, serta kondisi iklim dan cuaca. Di sisi lain, visi ini berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan pekerjaan melalui dukungan sektor pertanian organik terhadap sektor pariwisata.
			<u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> a. Kondisi kesuburan tanah di Kota Batu secara umum bisa dikatakan mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk dan pestisida



	dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.		kimia yang terus-menerus sekian lama ini. Dengan adanya (pokok) visi berkaitan dengan pertanian organik, maka diharapkan penggunaan pupuk organik dapat memulihkan kondisi kesuburan tanah. Sehingga dengan kembalinya kesuburan tanah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian (organik). b. Luasan lahan pertanian di Kota Batu bisa dikategorikan terbatas. Permasalahan keterbatasan lahan ini harus disiasati dengan cara menaikkan nilai produknya, bukan kuantitas produk. Sehingga, harus dipilih kategori produk yang nilai jualnya tinggi. Komoditas pertanian bernilai jual tinggi adalah komoditas pertanian organik. Oleh karenanya, pertanian organik diharapkan dan diasumsikan dapat meningkatkan nilai pendapatan sektor pertanian dengan keterbatasan luasan lahan pertanian. c. Pola pikir petani yang menginginkan percepatan masa panen yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan pupuk kimia. d. Pola pikir petani yang lebih memilih varietas bibit unggul yang berumur pendek yang notabene merupakan jenis bibit yang haus hara. <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u> Kota Batu memiliki potensi dan keunggulan di sektor pertanian/perkebunan yang sudah cukup dikenal masyarakat luas baik dari sisi produk pertanian/perkebunannya maupun pertanian/perkebunan yang mendukung pariwisata. <u>Kriteria Keberhasilan</u> Aspek manajemen : a. Ditetapkannya kawasan pertanian organik sesuai potensi sumber daya lahan. b. Tersusunnya master plan dan rencana aksi pengembangan kawasan sentra pertanian organik. c. Terbitnya dokumen kesepakatan lintas sektoral pengembangan kawasan sentra pertanian organik. d. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan sentra pertanian organik. Aspek Teknis a. Meningkatnya produktivitas dan produksi komoditas pertanian organik. b. Meningkatnya aktivitas pasca panen dan kualitas produksi. c. Meningkatnya aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk. d. Meningkatnya jaringan pemasaran komoditas.



		e. Meningkatnya pendapatan para pelaku usaha komoditas. f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. g. Meningkatnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, pasar input output, teknologi, dan informasi.
		<u>Indikator Keberhasilan</u> a. Produktivitas produk pertanian organik per hektar. b. Kontribusi sektor pertanian (organik) terhadap PDRB. c. Cakupan bina kelompok tani. d. Nilai tukar petani.
		<u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u> Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui melibatkan sektor swasta yang berorientasi pasar.
	Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional untuk melandasi dan memperkuat pertanian organik.	<u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u> a. Visi ini mengarahkan pembangunan menuju kondisi masa depan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu, yaitu keunggulan pariwisata. Peningkatan status kepariwisataan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan investasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. b. Pengelolaan pariwisata yang lebih menarik diharapkan mampu mendukung pembangunan sektor pertanian organik dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, karena wisatawan yang berkunjung dapat menjadi segmen pasar dari hasil produk pertanian organik. c. Pengelolaan pariwisata yang lebih baik dan bijaksana juga diharapkan dapat mengatasi (isu) kerusakan lingkungan, karena keunggulan (wisata) alam akan mendorong upaya pemeliharaan secara optimal.
		<u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> pembangunan daerah Kota Batu, yaitu bahwa: a. Sejumlah desa masih memiliki kendala dalam pembangunan pengembangan desa. Dengan adanya konsep “Desa Wisata”, maka arah pembangunan akan menuju kepada pengembangan desa. Dapat dikatakan dengan menggunakan satu strategi dua tujuan tercapai.



		b. Dinamika pembangunan daerah yang cukup tinggi membawa dampak negatif yang memungkinkan atau dapat merugikan potensi daerah. Potensi Kota Batu adalah keunggulan kondisi alam yang indah, udara yang sejuk, dan air yang melimpah. Tetapi potensi itu bisa rusak jika tidak dilindungi oleh misi yang benar-benar fokus mempertahankan sektor kepariwisataan. c. Sektor pertanian juga rentan terhadap dinamika pembangunan. Lahan pertanian Kota Batu yang termasuk kategori tidak luas sangat rentan beralih fungsi menjadi bukan lahan pertanian. Misi ini secara tidak langsung memperkuat fungsi lahan pertanian agar tetap digunakan sebagaimana fungsinya.
		<u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u> Kota Batu memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung kepariwisataan. Pemandangan yang indah, hawa yang sejuk, sumber daya hutan yang menarik, dan sumber daya air yang melimpah merupakan potensi yang berpeluang untuk diberdayakan semaksimal mungkin secara bijaksana menjadi wisata alam yang menarik. Selain itu, Kota Batu yang juga memiliki keunggulan di sektor pertanian memiliki potensi dan peluang untuk memaksimalkan wisata agro yang cukup diminati oleh wisatawan.
		<u>Kriteria Keberhasilan</u> Aspek manajemen : a. Tersusunnya master plan dan rencana aksi obyek wisata baru yang mendukung misi kepariwisataan internasional antara lain Asean Culture Park, Desa Wisata, Kereta Gantung, dan Drive In. b. Tersedianya kawasan, sarana prasarana, dan alokasi anggaran pengembangan kepariwisataan internasional. c. Terbitnya dokumen dasar hukum pengembangan kepariwisataan internasional. Aspek Teknis a. Meningkatnya pendapatan para pelaku usaha kepariwisataan. b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di sektor kepariwisataan maupun sektor lain yang mendukung. c. Meningkatnya jejaring kepariwisataan. d. Meningkatnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan.



		<u>Indikator Keberhasilan</u> a. Jumlah kunjungan wisata. b. Jumlah wisatawan manca Negara yang berkunjung. c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. <u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u> a. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan agrowisata. b. Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.
	Sektor pendidikan yang mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan Kota Batu.	<u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u> Seiring dengan potensi Kota Batu dalam sektor pertanian dan pariwisata, Kota Batu masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meneruskan dan mengembangkan kualitas potensi pertanian dan pariwisata. Diluar kedua sektor tersebut, Kota Batu masih memiliki potensi usaha kecil menengah dan industri yang masih menyediakan kesempatan kerja cukup luas. <u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> Permasalahan di sektor pendidikan yang terjadi di Kota Batu adalah masih tingginya jumlah anak putus sekolah, jenjang pendidikan masih relatif rendah, dan angka meneruskan sekolah juga masih rendah. Permasalah ini disebabkan karena faktor ketidakmampuan ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang arti penting pendidikan. <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u> Kota Batu sudah memiliki potensi, keunggulan, dan arah pembangunan di sektor pertanian organik dan kepariwisataan. Dua sektor tersebut sudah terbukti mampu mengangkat kondisi perekonomian daerah. Sehingga, output dari sektor pendidikan berupa sumber daya manusia memiliki peluang untuk masuk ke dalam dua sektor unggulan Kota Batu dengan syarat bahwa SDM output dari sektor pendidikan benar-benar berkompeten terhadap bidang pertanian maupun olahannya, dan pariwisata. <u>Kriteria Keberhasilan</u> Aspek manajemen : a. Tersedianya data kependidikan secara lengkap dan terbaru.



		b. Terwujudnya kurikulum pendidikan unggulan (pertanian dan pariwisata) yang dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan formal maupun non formal. c. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan pendidikan secara umum maupun pendidikan vokasi. Aspek Teknis a. Meningkatnya jumlah lulusan peserta didik. b. Meningkatnya jumlah lulusan peserta didik yang terserap dalam kesempatan kerja di dalam maupun di luar Kota Batu. c. Meningkatnya jumlah lulusan peserta yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
		<u>Indikator Keberhasilan</u> a. Angka Partisipasi Sekolah. b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan. c. Angka Kelulusan. d. Angka Putus Sekolah. e. Angka Melanjutkan.
		<u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u> a. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas. b. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan non formal. c. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan. d. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dikelola secara baik.	<u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u> a. Kota Batu memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya alam (terutama hutan dan air) dengan lebih baik karena kedua sumber daya ini merupakan penopang keunggulan geografis yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Sumber daya hutan terutama berfungsi menopang kesejukan udara, sedangkan sumber daya air menopang pasokan air bagi Kota Batu dan beberapa kota di sekitarnya. b. Kota Batu memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih baik karena sumber daya manusia (dalam hal ini masyarakat) merupakan obyek pembangunan dan juga sekaligus sebagai subyek pembangunan. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan sangat bergantung kepada faktor sumber daya manusia, baik dalam konteks proses pembangunannya maupun dalam penciptaan iklim



			atau situasi lingkungan. c. Kota Batu memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya budaya dengan lebih baik dalam rangka mempertahankan dan melestarikan keberadaan kebudayaan daerah yang dimiliki, yang berpeluang untuk dikembangkan menjadi satu sajian budaya yang dapat mendukung sektor pariwisata.
			<u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> a. Dalam hal sumber daya alam, permasalahan yang terjadi adalah sudah mulai tercemarnya dan mengalami proses kerusakan dua sumber daya alam utama di Kota Batu, yaitu sumber daya hutan dan air. Keduanya memiliki fungsi strategis yaitu menjaga kesejukan udara dan menyediakan pasokan air untuk masyarakat Kota Batu dan sekitarnya. b. Dalam hal sumber daya manusia, permasalahan yang terjadi adalah Kota Batu adalah masih banyaknya kasus yang terkait dengan kependudukan, pengangguran, ketenagakerjaan, kesehatan, kepemudaan, keadilan, kesejahteraan, sosial, dan lain sebagainya. c. Dalam hal sumber daya budaya, permasalahan yang terjadi adalah mulai terpinggirkannya budaya daerah yang disebabkan pengaruh budaya asing dan berkurangnya ketertarikan generasi muda kepada kebudayaan daerah. Padahal kebudayaan daerah merupakan aset atau kekayaan daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan tidak ternilai harganya.
			<u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u> a. Potensi sumber daya alam Kota Batu adalah keberadaan hutan, sumber mata air, tipe geografi alam, dan udara yang sejuk merupakan sebuah potensi yang sangat mendukung pengembangan berbagai sektor secara serempak dan dapat saling mendukung, dimana kondisi alam ini tidak dimiliki oleh banyak kota lain. b. Potensi sumber daya manusia Kota Batu adalah masyarakat Kota Batu yang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan yang mendukung stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga menunjang pembangunan daerah yang tetap berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal. c. Potensi sumber daya budaya Kota Batu adalah keberadaan budaya daerah baik yang berwujud kesenian daerah maupun nilai-nilai kearifan lokal



			yang sebetulnya menjadi kharakter masyarakat yang memiliki nilai kekhasan tersendiri.
			<u>Kriteria Keberhasilan</u> Aspek manajemen : a. Dibuatnya perencanaan program terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan budaya. b. Tersedianya alokasi anggaran pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan budaya. c. Ditetapkannya peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan budaya. Aspek Teknis a. Terwujudnya kondisi sumber daya alam yang lestari. b. Terwujudnya sumber daya manusia yang lebih berdaya dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan diri. c. Terwujudnya stabilitas kehidupan sosial, politik, dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
			<u>Indikator Keberhasilan</u> a. Indikator kinerja terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. b. Indikator kinerja terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. c. Indikator kinerja terkait dengan pengelolaan sumber daya budaya.
			<u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u> a. Kesehatan. b. Ketenagakerjaan. c. Kepemudaan dan olahraga. d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. e. Keluarga sejahtera. f. Kependudukan. g. Sosial. h. Kesatuan bangsa politik dan ketahanan masyarakat. i. Budaya.
		Pemerintah Kota Batu yang baik, kreatif, dan inovatif.	<u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u> Kota Batu memiliki kebutuhan untuk menata pengelolaan dan kinerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan kota yang baik dan bersih, serta mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
			<u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> a. Tidak ada atau kurangnya aktivitas perekaman atau pencatatan hasil capaian kerja dan kondisi riil masyarakat secara berkelanjutan dan terkini.



		b. Ketidakmerataan penyebaran tugas pekerjaan yang menyebabkan penumpukan pekerjaan di satu pihak, tetapi terjadi kekosongan pekerjaan di pihak lain. c. Lemahnya fungsi kepemimpinan di tingkat SKPD yang mengakibatkan lemahnya kinerja staf. d. Lemahnya fungsi koordinasi yang menimbulkan hambatan dalam berjalannya sebuah proses pekerjaan. e. Kurangnya evaluasi terhadap hasil kerja sehingga secara berantai mengakibatkan hasil kerja-hasil kerja yang kurang kualitasnya. f. Kurangnya fungsi pengawasan dan penerapan sanksi terhadap tindakan indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.
		<u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u> Pemerintahan Kota Batu memiliki jumlah aparatur yang cukup banyak dengan latar belakang pendidikan yang cukup memadai. Lima puluh persen lebih aparatur masih berusia muda, sehingga secara kekuatan fisik, pikir, dan semangat kerja seharusnya masih cukup tinggi. Potensi ini seharusnya dapat memacu tumbuhnya kreatifitas dan inovasi kerja para pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan daerah.
		<u>Kriteria Keberhasilan</u> Aspek manajemen : a. Ditetapkannya dasar hukum reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. b. Tersusunnya rencana program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam. c. Tersedianya alokasi anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. d. Terselenggaranya evaluasi berkala terhadap hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Aspek Teknis a. Meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan. b. Meningkatnya kedisiplinan dari aparatur. c. Meningkatnya kedisiplinan, motivasi, inisiatif, dan resposifitas kerja. d. Berjalannya sistem pengembangan dan pembinaan pegawai dengan baik. e. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja.



			<u>Indikator Keberhasilan</u> a. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. b. Sistem informasi manajemen pemerintah daerah dengan data yang valid dan terbaru yang merekam semua program kegiatan pengelolaan pemerintahan. c. Buku “Kota Batu dalam Angka”.
			<u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u> a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan. c. Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan. d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan. e. Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. f. Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah. g. Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat. h. Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan sampai pemberhentian pegawai. i. Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang penyimpangan pelaksanaan pembangunan. j. Terciptanya aparatur pengawasan yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi. k. Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah daerah. l. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal. m. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.



		Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) dan masyarakat Kota Batu yang memiliki perilaku berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.	<u>Relevansi dengan Kebutuhan Daerah</u> Kota Batu membutuhkan terjalinnya kemitraan, kerjasama, dan kepercayaan dari semua elemen masyarakat dan pemerintah dalam bersama-sama mencapai tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan, kerjasama, dan kepercayaan yang merupakan modal sosial ini hanya bisa terwujud jika ada keharmonisan yang melandasi perilaku setiap stakeholder. Landasan keagamaan dan kearifan lokal yang digunakan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. <u>Relevansi dengan Permasalahan Pembangunan Daerah</u> a. Nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu sudah mulai tercampur dan terkikis oleh nilai kehidupan budaya luar. Tercampurnya dan pengikisan nilai ini dikarenakan mudahnya informasi nilai budaya luar yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan degradasi moral masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat. b. Heterogenitas masyarakat di Kota Batu yang cukup tinggi membawa konsekuensi heterogenitas nilai masyarakat. Perbedaan nilai dari heterogenitas masyarakat ini rentan menimbulkan terjadinya konflik sosial, dimana konflik-konflik kecil pastilah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Agar tidak berubah menjadi konflik besar, maka sekecil apapun konflik yang terjadi harus dapat dikelola dengan baik, dan lebih baik untuk melakukan tindakan pencegahan, salah satunya melalui nilai keagamaan dan kearifan lokal yang bersifat universal. <u>Relevansi dengan Potensi Daerah</u> a. Masyarakat Kota Batu memiliki latar belakang keagamaan yang beragam. Keberagaman ini memberi nuansa dalam kehidupan bermasyarakat. b. Di Kota Batu terdapat beberapa lembaga pengembangan keagamaan yang cukup besar cakupan wilayahnya, yang keberadaannya ikut mengangkat nama Kota Batu di kota atau negara lain. Selain itu, keberadaan lembaga pengembangan keagamaan tersebut juga memberi peluang kunjungan masyarakat kota atau negara lain ke Kota Batu. <u>Kriteria Keberhasilan</u> Aspek manajemen : a. Terasilitasinya Forum Kerukunan Umat Beragama dan lembaga-lambaga sosial keagamaan yang ada



			dalam masyarakat. b. Teridentifikasinya nilai kearifan lokal yang akan diinternalisasi kepada masyarakat. c. Terwujudnya materi dan sarana proses internalisasi nilai. d. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan nilai keagamaan dan kearifal lokal. Aspek Teknis : a. Terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan keagamaan, sosial dan politik masyarakat. b. Terwujudnya perilaku masyarakat yang mencerminkan ketaatan terhadap nilai keagamaan dan kearifan lokal. c. Terwujudnya situasi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.
			<u>Indikator Keberhasilan</u> a. Angka kriminalitas. b. Jumlah demo. c. Rasio KDRT.
			<u>Rujukan Sasaran Pokok RPJPD</u> a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Meningkatnya toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan. c. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi harus memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi, dan misi perlu untuk dikaji dan dianalisis sehubungan dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi misi. Faktor-faktor tersebut dibedakan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan.

Rumusan misi bertujuan untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batu, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.



Tabel 5.2.
Perumusan Penjelasan Misi

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Kota Batu menjadi sentra pertanian organik.	Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Adanya dukungan pemerintah kota dalam pengembangan pertanian organik. b. Kelemahan 1) Luasan lahan pertanian yang terbatas. 2) Kondisi kesuburan tanah yang berkurang. 3) Pola pikir masyarakat petani yang masih cenderung pada pertanian non organik. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Masih besarnya peluang pasar penjualan produk pertanian organik. 2) Penguatan penjualan produk olahan dari komoditas pertanian baik organik maupun non organik. b. Tantangan 1) Kurangnya daya tarik pekerjaan di sektor pertanian. 2) Cuaca ekstrim. 3) Penyakit dan hama pertanian. 4) Kenyataan bahwa dampak penggunaan pupuk organik pada tahun awal justru menurunkan jumlah produksi pertanian akibat proses perbaikan kondisi tanah. 5) Mahalnya harga komoditas pertanian organik menyebabkan kesulitan pemasaran bagi masyarakat Kota Batu. 6) Kemungkinan yang besar terjadi alih fungsi lahan pertanian.
2	Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional untuk melandasi dan memperkuat pertanian organik.	Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Kepariwisataan Kota Batu yang sudah cukup dikenal luas dan diminati. 2) Kondisi alam yang cukup indah dengan hawa yang sejuk membuat Kota Batu cukup nyaman untuk tempat istirahat. 3) Adanya dukungan pemerintah kota dalam pengembangan kepariwisataan internasional. 4) Sudah terbentuk jaringan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik dari dalam maupun luar Kota Batu. 5) Kesiapan sektor usaha pengolahan makanan dalam kemasan dan souvenir atau kerajinan yang mendukung sektor pariwisata.



			b. Kelemahan 1) Gerak pembangunan pemerintah kota di sektor lain yang kurang atau tidak bersinergi dengan pembangunan sektor pariwisata. 2) Kurangnya bentuk-bentuk sajian budaya yang justru menjadi minat dari wisatawan asing. 3) Kurang memadainya infrastruktur jalan yang terlihat dari terjadinya kemacetan disaat masa-masa liburan, ketika banyak wisatawan yang masuk ke Kota Batu. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Keberadaan budaya tradisional yang dimiliki oleh Kota Batu, berpeluang untuk dikembangkan dan dikemas secara apik sehingga memiliki nilai jual dalam paket wisata Kota Batu. b. Tantangan 1) Dinamika pembangunan fisik yang dapat merusak atau mengganggu kondisi alam yang indah dan sejuk.
		Optimalisasi investasi daerah.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Kemudahan perijinan. 2) Kemudahan pasokan listrik. 3) Jumlah penduduk Kota Batu yang cukup besar, sehingga memberi kemudahan mendapatkan tenaga kerja. 4) Stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat. b. Kelemahan 1) Benturan kepentingan investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2) Sempitnya ruang atau lahan yang dapat digunakan untuk investasi mengingat hampir 60% wilayah Kota Batu sebagai wilayah hutan. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Jumlah kunjungan wisata yang cukup banyak dengan peningkatan yang cukup signifikan merupakan daya tarik penilaian investor akan nilai strategis investasi di Kota Batu. b. Tantangan 1) Persaingan pemerintah daerah di sekitar Kota Batu dan di Jawa Timur serta nasional yang menjadikan pariwisata dan agrobisnis sebagai unggulan daerah menimbulkan tantangan dalam merebut minat investor untuk



			berinvestasi. 2) Berkembangnya spekulasi tanah dan proyek dari luar Kota Batu yang menyebabkan daerah target wisata menjadi bernilai tinggi bagi investor sehingga mengurangi minat investor untuk melakukan investasi.
		Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Tersedianya lahan dan anggaran untuk pengembangan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan prasarana sarana lalu lintas. 2) Ketersediaan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan prasarana sarana lalu lintas memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batu. b. Kelemahan 1) Kurangnya pemahaman dari aparaturnya pelaksana terhadap kebijakan terkait pembangunan fasilitas fisik, diantaranya kebijakan tentang proses pengadaan tanah dan pencairan dana. 2) Terjadinya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diluar perencanaan. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Banyaknya pengembang yang sudah menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi terkait dengan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan prasarana sarana lalu lintas. b. Tantangan 1) Perubahan yang sering terjadi terhadap peraturan terkait pengadaan barang jasa dan pembiayaannya mengakibatkan perlunya upaya untuk penyesuaian kembali.
3	Sektor pendidikan yang mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan Kota Batu.	Peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Rasio jumlah guru dan murid sudah mencukupi. 2) Rasio jumlah guru dan kelas sudah mencukupi. 3) Persebaran guru telah merata di seluruh wilayah Kota Batu. 4) Biaya pendidikan terutama untuk pendidikan dasar sudah dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. b. Kelemahan 1) Jumlah guru tersertifikasi masih terbatas.



			2) Jumlah guru yang berpendidikan sarjana, master, dan doktor masih terbatas. 3) Jumlah guru profesional masih terbatas. 4) Jumlah sekolah terakreditasi masih terbatas. 5) Program pengembangan kompetensi guru di tingkat nasional dan internasional masih belum banyak. 6) Tingkat kesenjangan kualitas lembaga pendidikan masih tinggi. 7) Tenaga pendidik yang spesialisasi keahlian di bidang pariwisata dan pertanian masih terbatas. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Adanya program beasiswa pendidikan dari lembaga luar pemerintahan kota. 2) Adanya program sertifikasi guru dari pemerintahan pusat. b. Tantangan 1) Peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Malang Raya menyebabkan calon guru yang berkualitas lebih suka bekerja di luar Kota Batu.
4	Sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dikelola secara baik.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Ketersediaan data capaian kinerja yang cukup akurat dan terbaru. 2) Biaya jaminan kesehatan utamanya masyarakat miskin sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. 3) Jumlah puskesmas dan rumah sakit telah mencukupi. 4) Jumlah dokter umum dan tenaga paramedis sudah mencukupi. 5) Terjaminnya ketersediaan obat oleh pemerintah daerah. b. Kelemahan 1) Jumlah dokter spesialis masih terbatas 2) Kecenderungan pilihan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan cenderung masih memilih pelayanan kesehatan di Kota Malang. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Minat investor untuk berinvestasi di bidang kesehatan (seperti apotik, klinik, dan lain-lain) di Kota Batu. b. Tantangan 1) Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang



		menyebabkan pasien dari Kota Batu yang lebih suka menggunakan pelayanan kesehatan di luar Kota Batu.
	Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Cukup berkembangnya eksistensi koperasi-koperasi di Kota Batu. 2) Adanya dukungan pemerintah dalam hal bantuan permodalan terhadap koperasi dan UKM. b. Kelemahan 1) Lemahnya permodalan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pelaku usaha kecil menengah. 2) Lemahnya pengawasan terhadap kualitas produk. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Kecanggihan teknologi informasi memberikan peluang pemasaran yang cukup murah dengan cakupan wilayah pemasaran yang sangat luas. b. Tantangan 1) Iklim persaingan usaha yang semakin berat. 2) Melemahnya daya beli masyarakat secara global.
	Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Stabilitas politik di kota Batu yang cukup kondusif. 2) Hubungan yang harmonis antara partai politik dan kekuatan politik masyarakat. 3) Partisipasi masyarakat cukup tinggi. 4) Adanya kelembagaan pembina sosial politik di kota Batu. b. Kelemahan 1) Belum terjadi kesepahaman bersama terkait dengan pengaturan pelayanan pariwisata dengan nilai-nilai di masyarakat. 2) Tingkat pendidikan politik masyarakat Kota Batu yang masih rendah. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Lembaga-lembaga sosial politik di luar Kota Batu telah banyak yang melakukan kegiatan peningkatan demokratisasi masyarakat. b. Tantangan 1) Sifat dinamika kehidupan Kota Batu yang terbuka melalui wisatawan domestik dan



			asing menyebabkan pengaruh cukup tinggi terhadap kehidupan politik Kota Batu.
5	Pemerintah Kota Batu yang baik, kreatif, dan inovatif.	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Jumlah aparatur pemerintahan yang sudah memadai. 2) Kebutuhan aparatur yang akan menduduki jabatan tertentu berdasarkan pangkat sudah cukup memadai. b. Kelemahan 1) Kurang verifikasi penerimaan aparatur pemerintah dari daerah asal yang melakukan mutasi ke Kota Batu, sehingga kurang diketahui secara jelas track record dan profesionalitas di daerah asal. 2) Masih banyaknya aparatur Kota Batu yang berdomisili di Kota Batu sehingga menghambat kinerja. 3) Belum dimilikinya perkantoran yang representatif dan terintegrasi sehingga menghambat proses kerja. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Reformasi birokrasi menjadi agenda nasional. 2) Adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. 3) Adanya panduan Standart Pelayanan Minimal b. Tantangan 1) Dominasi politik dalam mempengaruhi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh birokrasi. 2) Perilaku pihak swasta (pemilik modal) yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Jumlah aparatur pemerintahan Desa sudah memadai. 2) Tersedia anggaran hibah bantuan pengembangan desa yang memadai untuk mendanai prakarsa aktif pembangunan masyarakat desa. 3) Telah dimiliki kantor yang representatif untuk pemerintahan desa 4) Pembinaan pelayanan dan pemerintahan desa telah terlembaga di pemerintahan kota. b. Kelemahan 1) Lemahnya kemampuan manajemen dan administrasi aparatur pemerintahan desa. 2) Belum disertifikasinya standarisasi kualitas



			pelayanan pemerintahan desa. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Bantuan pengembangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan propinsi tersedia langsung bagi masyarakat dan pemerintah desa. b. Tantangan 1) Adanya pihak-pihak luar yang mempengaruhi pola perilaku aparaturn pemerintahan desa untuk mencari keuntungan pribadi,
6	Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) dan masyarakat Kota Batu yang memiliki perilaku berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.	Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.	<u>Faktor Internal</u> a. Kekuatan 1) Banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dalam komunitas sosial maupun keagamaan masyarakat. 2) Adanya forum kerukunan antar umat beragama di Kota Batu. 3) Terdapat lembaga pendidikan agama dari berbagai agama yang berkembang pesat di Kota Batu. 4) Terdapat pusat pendidikan dan pusat peribadatan berskala nasional yang menjadi pusat kunjungan umat agama dari berbagai daerah dan menjadi penggiat kerukunan antar umat beragama. b. Kelemahan 1) Pola dan metode penyampaian pemahaman agama masih tradisional kurang menarik bagi generasi muda. 2) Belum ada peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama. <u>Faktor Eksternal</u> a. Peluang 1) Keterbukaan informasi dari tingkat nasional dan internasional untuk pendidikan keagamaan menunjang peningkatan pemahaman keagamaan 2) Besarnya perhatian dari lembaga keagamaan tingkat nasional dan internasional terhadap Kota batu melalui pusat peribadatan yang ada di Kota Batu. b. Tantangan 1) Banyaknya siswa dari luar Kota Batu yang belajar pada lembaga pendidikan keagamaan di Kota Batu, memungkinkan terjadi perbedaan pandangan tentang kerukunan agama di kota Batu. 2) Perkembangan pariwisata dan teknologi



			internet membawa pengaruh materialism dan liberalism terhadap generasi muda yang membahayakan akidah keagamaan.

Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan upaya melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah menuju program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu. Tanpa adanya tujuan dan sasaran, visi dan misi kepala daerah akan sangat sulit dioperasionalkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak yang diharapkan terwujud sebagai bentuk keberhasilan pembangunan daerah. Yang dimaksud tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 5.3.

Rumusan Sasaran dan Indikator

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
1	Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.	Mewujudkan pertanian organik berwawasan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.	Terwujudnya sistem bertani organik.	Jumlah paket pengembangan kawasan organik.
			Terwujudnya perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik yang berwawasan kesehatan.	Jumlah paket pelatihan pertanian organik.
			Terwujudnya produk pertanian organik.	
			Terwujudnya kemantapan proses pengembangan pertanian organik.	Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik.
			Terwujudnya diversifikasi pertanian organik.	
		Mewujudkan perdagangan hasil pertanian organik.	Terwujudnya pasar induk agribisnis.	Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian.
			Terwujudnya penguatan agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Ketersediaan informasi produksi pertanian/ perkebunan.



			Terwujudnya penguatan aspek pasar.	Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM)
			Terwujudnya sistem informasi produksi, distribusi, dan pasar komoditas pertanian.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah. (SPM)
			Terwujudnya akses informasi pasar komoditas pertanian yang lebih luas.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.
2	Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional.	Mewujudkan Kota Batu menjadi kota tujuan pariwisata internasional.	Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata. Terwujudnya penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional. Tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu. Tersedianya SDM kepariwisataan berkompentensi dan profesional.	Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata. Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata. Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional. Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata nasional maupun internasional. Jumlah kunjungan wisata. Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui berbagai media dan LBA. Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata. Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pembinaan.
3	Optimalisasi investasi daerah.	Mengoptimalkan investasi daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada. Masuknya investor baru ke Kota Batu. Berkembangnya kerjasama	Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. (SPM) Cakupan informasi berbagai potensi sumber



			investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri. Terciptanya peluang kerja padat karya bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan. Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.	daya unggulan daerah. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negari, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota. (SPM)
			Tersusunnya kebijakan investasi daerah.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi (KUMKM) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM)
		Membentuk keterpaduan antara pemerintah, pengusaha, dan	Meningkatnya kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (SPM)



		pekerja dalam proses kerja.	Meningkatkan kurikulum, sarana, dan prasarana berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis masyarakat. (SPM) Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan. (SPM)
			Terbentuknya hubungan yang selaras antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. (SPM)
			Meningkatnya produktivitas dan kualitas kerja.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek. (SPM)
			Meningkatnya kesejahteraan pekerja.	Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM) Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM)
4	Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas.	Memperlancar dan mendukung kinerja pemerintah, proses pembangunan kota, aktifitas perekonomian, dan segala aspek kehidupan masyarakat.	Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota.	Persentase penyelesaian gedung perkantoran pemerintah dalam satu area perkantoran.
			Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri.	Persentase penyelesaian pembangunan SD Negeri. Persentase penyelesaian pembangunan SMA Negeri.
			Terwujudnya infrastruktur kesehatan.	Persentase penyelesaian pembangunan gedung bank darah.
			Terwujudnya infrastruktur kearsipan dan perpustakaan.	Persentase penyelesaian pembangunan depo arsip.
			Terwujudnya infrastruktur keolahragaan.	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga.
			Terwujudnya infrastruktur perdagangan.	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk. Persentase penyelesaian pembangunan pasar sentra Junrejo. Persentase penyelesaian pembangunan pasar desa agropolitan. Persentase penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL).
			Terwujudnya infrastruktur pertanian.	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Agrobisnis.



			Terwujudnya infrastruktur perindustrian.	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
			Terwujudnya infrastruktur ketenagakerjaan.	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).
			Terwujudnya fasilitas bina sosial.	Persentase penyelesaian pembangunan gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan. Persentase penyelesaian pembangunan balai pertemuan dan pameran. Persentase penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial.
			Terwujudnya infrastruktur pariwisata.	Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta gantung. Persentase penyelesaian pembangunan rest area. Persentase penyelesaian pembangunan Drive In. Persentase penyelesaian pengembangan jalur festival wisata. Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain bike.
			Terwujudnya infrastruktur jalan. Terwujudnya akses lalu lintas antar wilayah. Meningkatnya dinamika masyarakat melalui ketersediaan sarana mobilisasi yang lebih baik.	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. (SPM) Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (SPM) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. (SPM)
			Terwujudnya infrastruktur transportasi.	Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan. Persentase penyelesaian pembangunan terminal tipe B. Persentase penyelesaian pembangunan terminal wisata.



			Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas.	Tersedianya halte pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota/kabupaten. (SPM)
			Meningkatnya infrastruktur sanitasi lingkungan permukiman.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. (SPM) Persentase penduduk yg memiliki akses penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (SPM) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. (SPM) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (SPM) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan. (SPM)



5	Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan.	Membentuk sumber daya manusia pendidik yang berkompeten dan beretika.	Meningkatnya kompetensi pendidik di setiap jenjang pendidikan.	Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program peningkatan mutu pendidik. Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima program peningkatan mutu pendidik. Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima program peningkatan mutu pendidik.
			Meningkatnya etika dari para pendidik.	Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik. Jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik yang tertangani.
		Mewujudkan lembaga pendidikan yang benar-benar mengedepankan upaya membentuk anak didik yang berkualitas secara keilmuan, bermoral dan berakhlak mulia.	Terwujudnya lembaga pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang unggul.	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. Persentase jumlah SMP/MTsyang telah



				memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll).
			Terwujudnya lembaga pendidikan menengah yang unggul.	Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll)
			Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang mendukung potensi dan keunggulan Kota Batu. Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan.	Ketersediaan kurikulum khusus pertanian dan kepariwisataan yang dapat diterapkan di pendidikan formal maupun non formal.
			Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan yang handal.	Persentase jumlah SD/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).



				Persentase jumlah SMP/MTs yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SD/MI yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. Persentase jumlah SMP/MTs yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM.
6	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.
			Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Cakupan kunjungan puskesmas.
			Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs) Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pengembangan keahlian.
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Persentase anggaran kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota.



			Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. (SPM) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. (SPM) Cakupan desa/kelurahan UCI. (SPM) Cakupan kunjungan ibu hamil K4. (SPM) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan. (SPM) Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) Cakupan kunjungan bayi. (SPM) Cakupan peserta KB aktif. (SPM) Cakupan pelayanan anak balita. (SPM) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat. (SPM) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. (SPM) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. (SPM) Persentase lansia yang dilayani. Persentase puskesmas santun lansia. Cakupan pemberian makanan pendamping



				ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. (SPM) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. (SPM) Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Persentase TTU/TPM sehat. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs)
			Meningkatnya kesehatan lingkungan.	Cakupan masyarakat terlayani sanitasi dasar. (MDGs) Cakupan pengawasan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi standard. (MDGs)
	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya keluarga berencana.	Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana.	Meningkatnya reproduksi sehat.	Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. (SPM) Cakupan sasaran pasangan usia subur yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 87%. (SPM) Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. (SPM) Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan. (SPM) Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan. (SPM)
			Terwujudnya keluarga berencana sejahtera.	



				Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. (SPM) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. (SPM) Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.
7	Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.	Mewujudkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui usaha kecil menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi melalui UKM.	Jumlah UKM yang mengakses sistem informasi dan sumber daya produktif. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs)
			Meningkatnya kemampuan UKM dalam mengembangkan usahanya.	Jumlah peningkatan usaha skala mikro ke kecil. Persentase jumlah UKM yang mendapat fasilitas dan pendampingan. Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.
			Meningkatnya kualitas upaya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur koperasi dan UKM.	Persentase jumlah perempuan usia produktif yang menerima program pemberdayaan. Persentase perempuan usia produktif yang mampu terlibat dalam bidang kerja baik secara mandiri maupun tidak mandiri.



		Mengentaskan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dari keterpurukan sosial melalui sektor UKM.	Meningkatnya kemampuan produktif (skill) masyarakat PMKS. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan bagi masyarakat PMKS. Meningkatnya keberdayaan masyarakat PMKS minimal dalam memenuhi 3 kebutuhan pokok.	Peningkatan persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. (SPM)
		Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Menengah Kecil (KUMKM) dalam mendorong keberdayaan UKM.	Terwujudnya KUMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.	Jumlah lembaga koperasi aktif.
			Meningkatnya kualitas dan kehandalan KUMKM yang berhasil guna dan berdaya guna.	Jumlah lembaga koperasi yang mendapat pembinaan.
			Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.
		Meningkatkan peran semua industri kecil dan menengah yang ada dalam masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Batu.	Meningkatnya konsolidasi dan jejaring semua sektor industri di Kota Batu untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata.	Jumlah KUB industri hulu hilir. Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah.
			Meningkatnya kemampuan dan daya saing industri kecil	Jumlah KUB yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi.
8	Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis.	Memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berpolitik bertanggung-jawab sesuai koridor hukum yang berlaku dengan senantiasa berpegang pada semangat kebangsaan dan sikap saling menghormati.	Meningkatnya iklim demokrasi. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamaan masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan demokratisasi. Meningkatnya peran dan fungsi perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik. Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih tertata.	Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik. Jumlah pembinaan terhadap partai politik.
		Mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat.	Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum.	Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.



			Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan.	Jumlah satuan/kelompok masyarakat pelaksana sistem keamanan lingkungan. Rasio ketersediaan pos keamanan lingkungan.
			Meningkatnya stabilitas dan keamanan lingkungan.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat. (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). (SPM)
9	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	Mewujudkan Pemerintah Kota Batu sebagai organisasi birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance).	Terwujudnya kepemimpinan yang mencerminkan kapasitas untuk mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah sesuai dengan nilai yang disepakati, serta kapasitas membangun kepercayaan dan langkah-langkah nyata.	Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran. Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan. Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah. Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat program pendidikan PIM IV, III &



				PIM II & prajabatan. Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan. Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan.
			Terwujudnya perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil kerja dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.	Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perkada. Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran.
			Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mencapai tujuan organisasi.	Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat kesesuaian



				aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD. Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Persentase jumlah aparatur pemeriksa dan pengawas laki-laki yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Persentase jumlah aparatur pemeriksa dan pengawas perempuan yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah aparatur yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. Persentase jumlah aparatur laki-laki yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. Persentase jumlah aparatur perempuan yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur.



				Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa laki-laki yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa perempuan yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan



				perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
			Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
			Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa.
			Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengidentifikasi, mengelola, meningkatkan, dan membangun proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung untuk mengimplementasikan dan mendukung rencana strategis dan roadmap organisasi.	Persentase capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Persentase capaian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Persentase capaian perumusan dan implementasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
		Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan.	Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN. Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi PATEN. Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur pelaksana PATEN.



				Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada camat terkait PATEN. Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan pelaksana PATEN. Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan PATEN. Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan PATEN. Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PATEN.
10	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atas berbagai kepentingan publik masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa. Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan desa yang mendukung tugas dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah kepada masyarakat.	Persentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang proses kerja pelayanan pemerintahan desa.	Jumlah sarana prasarana kerja bagi pemerintahan desa.
			Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah daerah.	Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. Pendampingan ADD. Pelantikan BPD. Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.
			Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa.	Jumlah desa yang telah menerapkan standar pelayanan.



11	Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.	Mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai iman dan kepercayaan masing-masing.	Persentase pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial keagamaan masyarakat.
			Terwujudnya sikap dan perilaku rukun dan gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat.	Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan.
			Terwujudnya nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bernegara.	Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam proses pembangunan daerah.
			Terminimalisirnya berbagai isu sara yang berpotensi menimbulkan konflik, dan mencari solusi secara damai jika terjadi konflik agama.	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB).
		Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang sesuai dengan budaya Indonesia agar tetap menjiwai Bangsa Indonesia.	Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dicapai.	Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui FKUB.
			Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.	Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan memuat penjabaran masing-masing misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Selanjutnya di dalam penyusunan arah kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025. Untuk lebih detail terkait strategi dan arah kebijakan lihat pada tabel berikut.

6.1 Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai iman dan kepercayaan masing-masing.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas wadah pembinaan masyarakat berbasis agama.	Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
	Terwujudnya sikap dan perilaku rukun, toleransi, dan gotong-royong.	Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama untuk membina masyarakat.	
		Memberikan dukungan operasional lembaga sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat.	
	Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.	Mengintegrasikan semua tokoh dan lembaga sosial keagamaan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan daerah.	Mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.
	Terminimalisirnya berbagai isu sara yang berpotensi menimbulkan konflik, dan mencari solusi secara damai jika terjadi konflik agama.	Membentuk dan merevitalisasi FKUB.	Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
		Mendukung FKUB dalam melaksanakan fungsinya.	
		Mengembangkan FKUB untuk juga membina kerukunan antar umat beda agama.	
	Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dicapai.	Mengedepankan FKUB dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama.	Memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama.



2. Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang sesuai dengan budaya Indonesia agar tetap menjiwai Bangsa Indonesia.	Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.	Mengidentifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) yang harus dilestarikan. Menginternalisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) melalui lembaga formal maupun informal masyarakat. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai tradisional, kearifan lokal, dan keagamaan.	Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan. Mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.2 Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 6.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pemerintah Kota Batu sebagai organisasi birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance).	Terwujudnya kepemimpinan yang mencerminkan kapasitas untuk mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah, serta kapasitas membangun kepercayaan dan langkah-langkah nyata.sesuai dengan nilai yang disepakati.	Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan. Memberi motivasi, inspirasi, mendukung pegawai, dan menjadi panutan. Mengelola hubungan dengan stakeholder.	Mengembangkan kepemimpinan yang bisa berdiri didepan memberi teladan, ditengah membangun semangat dan motivasi kerja, dan dibelakang memberi kekuatan kerja.
	Terwujudnya perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil kerja dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Mengembangkan, mengkaji, serta memperbarui rencana strategis dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya. Melaksanakan rencana strategis. Merencanakan, melaksanakan, & mengkaji modernisasi dan inovasi.	Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah partisiparif, transparan, dan akuntabel menuju modernisasi dan inovasi demi kepentingan bersama.
	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mencapai tujuan organisasi.	Merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas SDM aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana strategis dan roadmap reformasi birokrasi. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggunakan kompetensi pegawai, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Melibatkan staf dengan dialog dan pemberdayaan.	Mengembangkan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki daya untuk memberdayakan aparatur- aparturnya dan lebih berdayaguna untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pembangunan daerah.



	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Pengelolaan keuangan. Pengelolaan informasi dan pengetahuan. Pengelolaan teknologi. Pengelolaan fasilitas.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu memberdayakan kemampuan keuangan, informasi, pengetahuan, dan fasilitas yang dimiliki daerah dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi komunikasi. Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dan penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Efisiensi dan efektivitas pendanaan pembangunan melalui efektivitas dan efisiensi belanja APBD.
	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan pihak swasta. Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan kabupaten kota dalam provinsi dan luar provinsi. Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan provinsi dan pusat.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bijaksana dalam memberdayakan para pemangku kepentingan dalam sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas pendanaan pembangunan yang meliputi penguatan dan perluasan kemitraan, pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, pendanaan pembangunan daerah dengan pola <i>cost sharing</i> antara pemerintah (provinsi dan kota).
	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengidentifikasi, mengelola, meningkatkan, dan membangun proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung untuk mengimplementasikan dan mendukung rencana strategis dan roadmap organisasi.	Mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memperbaiki proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan. Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/ pengguna layanan.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai sistem proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, yang dapat meningkatkan hasil capaian dalam tugas pelayanan dan pembangunan daerah.



2. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan.	Mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diperlukan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia pelaksana, kebijakan terkait pelimpahan kewenangan perijinan kepada camat, dan alokasi anggaran bagi kecamatan. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PATEN yang meliputi penyusunan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan, penyusunan tata cara pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pelaporan, pemberian sanksi dan penghargaan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN terkait ketersediaan fasilitas, proses pelaksanaan, dan penggunaan anggaran.	Optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan kebutuhan serta tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.3 Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Tabel 6.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pertanian organik berwawasan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.	Terwujudnya sistem bertani organik.	Menyusun masterplan pertanian go organik.	Pengembangan pertanian organik dalam rangka menghasilkan produk unggulan yang berkualitas.
	Terwujudnya perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik yang berwawasan kesehatan.	Menetapkan kawasan pertanian organik beserta jenis tanaman sebagai pilot project.	
	Terwujudnya produk pertanian organik.	Memenuhi berbagai kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik (bibit unggul, obat-obatan, pupuk, dan teknologi organik).	
		Melakukan pembinaan kepada petani dan lembaga petani mengenai keunggulan pertanian organik dan keahlian pertanian organik berwawasan kesehatan.	
	Terwujudnya kemandirian proses pengembangan pertanian organik.	Meningkatkan intensitas pengembangan pilot project budidaya pertanian organik.	Memantapkan proses pengembangan pertanian organik, dan menciptakan diversifikasi produk unggulan berkualitas.
	Terwujudnya diversifikasi pertanian organik.	Menganekaragamkan jenis tanaman yang diproses secara organik.	
	Terwujudnya pasar induk agribisnis.	Membangun pusat perdagangan hasil pertanian organik maupun non organik dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai.	Pembangunan pasar induk agribisnis.
		Mendukung pemanfaatan pusat perdagangan ini agar dapat berfungsi optimal.	
	Terwujudnya penguatan agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Mengarahkan semua pelaku agrobisnis untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dalam rangka merebut pasar nasional maupun internasional.	Penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.
		Menggencarkan promosi hasil pertanian ke dalam	



		pasar nasional dan internasional.	
	Terwujudnya penguatan aspek pasar.	Memantau dan menjaga stabilitas mekanisme pasar agar tidak terganggu oleh tindakan-tindakan spekulasi yang dapat merusak akses pasar. Mengadakan tindakan penanggulangan lonjakan harga.	Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.
	Terwujudnya sistem informasi produksi, distribusi, dan pasar komoditas pertanian.	Mengembangkan sarana informasi untuk menginformasikan berbagai informasi pasar komoditas pertanian.	Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar untuk produk organik.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.	Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses penyuluhan pertanian. Mengembangkan keahlian SDM penyuluh pertanian.	Pengembangan SDM penyuluh pertanian dan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian organik.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.4 Misi 4 : Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Tabel 6.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 4 : Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata internasional.	Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kota yang berwawasan internasional dalam peraturan daerah. Menyusun strategi dan grand desain penyiapan sistem dan struktur sosial dalam mendukung kepariwisataan internasional. Menyusun kebijakan kepariwisataan dalam bentuk peraturan daerah. Memfasilitasi berdirinya Daerah Tujuan Wisata unggulan baru “ASEAN CULTURE PARK” yang berwawasan internasional. Mengembangkan Kota Batu secara makro menuju perwujudan <i>Batu Destination</i>. Mengembangkan desa/kelurahan menjadi “desa wisata” berdasarkan pada potensi masing-masing wilayah. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan “Batu Destination”. Menyiapkan infrastruktur kepariwisataan internasional.	Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
	Terwujudnya penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional.	Menggelar event pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata secara rutin dalam skala regional, nasional, maupun internasional sebagai sajian	Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

		wisata. Memantau sajian wisata Kota Batu supaya tetap mempertahankan basis budaya lokal dan agrowisata. Melakukan tindakan tertentu terhadap penyelewengan yang terjadi. Mengupayakan Kota Batu masuk dalam “international tourism directory”, “World Federation of Tourist Guide Association”, dan “World Tourism Organization.” Memenuhi standar sarana prasarana wisata internasional.	
	Tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu.	Mempromosikan semua obyek kepariwisataan Kota Batu secara nasional dan internasional melalui media informasi yang efektif. Mengembangkan promosi langsung melalui Location Based Advertising. Memperkuat kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah berbatasan.	Promosi pariwisata daerah dan pemantapan city branding Batu sebagai Kota Wisata di tingkat nasional dan internasional. Memperkuat kerjasama bidang pariwisata antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah.
	Tersedianya SDM kepariwisataan berkompentensi dan profesional.	Mendukung sekolah kejuruan bidang kepariwisataan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja kepariwisataan. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional. Meningkatkan profesionalitas pekerja sektor pariwisata melalui pendidikan di Balai Latihan Kerja.	Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten dan profesional.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.



6.5 Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Tabel 6.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengoptimalkan investasi daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada.	Menyediakan informasi yang berhubungan dengan bidang usaha unggulan daerah dan potensi sumber daya unggulan daerah.	Mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.
	Masuknya investor baru ke Kota Batu.	Menyusun sistem perijinan dan penataan lingkungan usaha yang kondusif bagi penciptaan kepastian investasi.	Kerjasama pemerintah kota dengan swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan kota.
	Berkembangnya kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri.	Memfasilitasi kerjasama investasi dengan pihak swasta.	
	Terciptanya peluang kerja padat karya bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan.	Mempromosikan semua potensi keunggulan wisata.	
	Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.	Mengembangkan kawasan ekonomi khusus.	
	Tersusunnya kebijakan investasi daerah.	Kajian regulasi investasi agar dapat lebih mengakomodasi ketertarikan investor untuk tetap atau hendak berinvestasi.	Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (sister city).
		Memperluas jaringan kerjasama investasi dengan daerah lain baik di Indonesia maupun negara lain.	
		Membentuk konsorsium investasi daerah bersama dengan daerah lain.	
2. Membentuk keterpaduan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam proses kerja.	Meningkatnya kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja.	Mendirikan Balai Latihan Kerja Pertanian dan Pariwisata.	Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal
	Meningkatkan kurikulum, sarana, dan prasarana berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Menyusun kurikulum pelatihan tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada, berbasis potensi lokal yang memiliki keunggulan, dan aspek kewirausahaan.	

		Melatih calon tenaga kerja dengan kurikulum baru yang telah ditetapkan agar memiliki kompetensi dan daya saing sesuai kebutuhan pasar. Meningkatkan sarana prasarana pelatihan yang memadai. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pelatih.	serta kewirausahaan.
	Terbentuknya hubungan yang selaras antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Meningkatnya produktivitas dan kualitas kerja. Meningkatnya kesejahteraan pekerja.	Membangun peluang-peluang kerja padat karya yang dikelola secara produktif dan professional. Menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai keberadaan dan hubungan antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja. Membentuk forum kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan asosiasi pekerja. Membangun kesepakatan bersama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.	Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
	Terjaganya keselarasan kerja yang telah dibangun oleh pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.	Memantau keselarasan kerja yang telah terbentuk dengan berpedoman kepada kesepakatan bersama dan aturan yang berlaku.	Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.6 Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Tabel 6.6.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Membentuk sumber daya manusia pendidik yang berkompeten dan beretika.	Meningkatnya kompetensi pendidik di setiap jenjang pendidikan.	Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Memfasilitasi uji kompetensi terhadap tenaga pendidik. Melaksanakan sertifikasi pendidik. Mengembangkan pendataan dan pemetaan pendidik. Mengembangkan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik.	Mendorong dan memacu pendidik untuk mau dan dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik agar dapat mengikuti laju perkembangan keilmuan sesuai dengan bidang studi yang diampu.
	Meningkatnya etika dari para pendidik.	Mengembangkan dan sosialisasi kode etik terhadap pendidik. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap aktifitas pendidik proses pendidikan.	Mendorong pendidik untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai pendidik secara profesional dan beretika.
2. Mewujudkan lembaga pendidikan yang benar-benar mengedepankan upaya membentuk anak didik yang berkualitas secara keilmuan, bermoral dan berakhlak mulia.	Terwujudnya lembaga pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan dasar dengan jumlah siswa pendidikan dasar. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb)	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal di tingkat pendidikan dasar sembilan tahun.

		Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	
	Terwujudnya lembaga pendidikan menengah yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan menengah. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb) Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal di tingkat pendidikan dasar menengah.
	Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang unggul yang mendukung potensi dan keunggulan daerah. Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan.	Mengembangkan kurikulum khusus (sesuai potensi dan keunggulan Kota Batu) untuk dimasukkan dalam pendidikan sekolah kejuruan di Kota Batu.	Mengembangkan pendidikan kejuruan yang lebih mengarahkan peserta didik untuk lebih siap mendukung sektor industri unggulan daerah Kota Batu.
	Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan yang handal.	Mengembangkan data dan informasi pendidikan yang terbaru dan akurat baik dari sisi peserta didik dan masyarakat, maupun	Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang handal, memegang prinsip pelayanan, transparan, dan dapat



		pengelolaan pendidikan. Memantau pemanfaatan berbagai dana bantuan oleh sekolah. Melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam memantau pelaksanaan pendidikan. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja setiap lembaga pendidikan.	dipertanggungjawabkan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.7 Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 6.7.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.	Mengadakan berbagai kebutuhan obat yang diproyeksi akan dibutuhkan. Menyebarkan persediaan obat secara merata kepada seluruh instansi pelayanan kesehatan masyarakat.	Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. Memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.	
	Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan melalui Diklat, Magang, Lokakarya dll.	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Standarisasi pelayanan kesehatan dengan menyusun Protap, SOP, dll.	
	Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular & tidak menular. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lansia. Penyediaan tambahan makanan dan vitamin bagi masyarakat. Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat. Memantau kualitas makanan masyarakat.	



		Menyelenggarakan penjaminan kesehatan kepada masyarakat.	
	Meningkatnya kesehatan lingkungan.	Membina masyarakat untuk meningkatkan sanitasi keluarga. Membina masyarakat untuk tidak buang air besar secara sembarangan. Melakukan uji air.	
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya keluarga berencana.	Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana. Meningkatnya reproduksi sehat. Terwujudnya keluarga berencana sejahtera.	Meningkatkan peran PLKB dalam pencapaian Program Keluarga Berencana. Meningkatkan KIE-KESPRO kepada masyarakat. Meningkatkan peranan PKK di seluruh wilayah dalam mewujudkan keluarga sejahtera.	Pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja. Pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.8 Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) khususnya
Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan
Sarana Lalu Lintas

Tabel 6.8.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) khususnya Perkantoran Pemerintah,
Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperlancar dan mendukung kinerja pemerintah, proses pembangunan kota, aktifitas perekonomian, dan segala aspek kehidupan masyarakat.	Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota.	Membangun gedung perkantoran pemerintah (block office).	Pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah. Kerjasama antar daerah perbatasan dalam upaya pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan, infrastuktur transportasi, dan persampahan.
	Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri.	Membangun gedung sekolah SD Negeri dan SMA Negeri.	
	Terwujudnya infrastruktur kesehatan	Membangun gedung bank darah.	
	Terwujudnya infrastruktur kearsipan dan perpustakaan.	Membangun gedung depo arsip dan perpustakaan.	
	Terwujudnya infrastruktur keolahragaan.	Membangun Gedung Olahraga beserta fasilitasnya yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan event olahraga nasional.	
	Terwujudnya infrastruktur perdagangan.	Membangun gedung pasar induk Kota Batu.	
	Terwujudnya infrastruktur pertanian.	Membangun gedung pasar agrobisnis Kota Batu.	
	Terwujudnya infrastruktur koperasi dan UKM.	Membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).	
	Terwujudnya infrastruktur ketenagakerjaan.	Membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK).	
	Terwujudnya infrastruktur pariwisata.	Membangun sarana wisata kereta gantung. Membangun rest area. Membangun sarana wisata Drive In	
	Terwujudnya infrastruktur jalan.	Membangun jalan lingkar barat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Membangun jalan lingkar utara untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Membangun jaringan jalan dan jembatan baru.	
	Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas.	Meningkatkan fasilitas jalan raya.	



	Meningkatnya infrastruktur sanitasi lingkungan permukiman.	Mengembangkan infrastruktur dan pengelolaan penyediaan air bersih. Mengembangkan infrastruktur pengolahan air limbah komunal dan fasilitas penyehatan lingkungan permukiman. Mengembangkan infrastruktur drainase lingkungan. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan persampahan.	

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.9 Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 6.9.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atas berbagai kepentingan publik masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa.	Membina aparatur pemerintah desa dengan sistem kepegawaian yang terstandar.	Penguatan otonomi pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan.
	Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan desa yang mendukung tugas dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah kepada masyarakat.	Menyebarkan penempatan PNS dalam pemerintahan desa. Pemberian insentif kepada aparatur desa non PNS.	
	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang proses kerja pelayanan pemerintahan desa.	Memenuhi sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan sarana teknologi informasi komunikasi.	
	Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah daerah.	Menyelenggarakan forum komunikasi antara pemerintah kota dengan pemerintah desa. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, serta pengelolaan aset desa.	
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa.	Menyusun pedoman standar pelayanan. Mensosialisasi pedoman standar pelayanan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman standar pelayanan untuk meningkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan desa.	

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.10 Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Tabel 6.10.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berpolitik bertanggung-jawab sesuai koridor hukum yang berlaku dengan senantiasa berpegang pada semangat kebangsaan dan sikap saling menghormati.	Meningkatnya iklim demokrasi. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamaan masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan demokratisasi. Meningkatnya peran dan fungsi perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik. Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih tertata.	Melaksanakan musrenbang baik di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, maupun kota sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Memberikan kebebasan dan hak untuk ikut berpolitik bagi semua elemen masyarakat termasuk perempuan dan pemuda. Menyelenggarakan pendidikan politik dan semangat kebangsaan secara masiv terhadap masyarakat. Mengembangkan kapasitas dan profesionalisme lembaga demokrasi lokal. <i>Mendorong partai politik untuk membina kader-kadernya untuk mewujudkan kemandirian partai politik.</i> Mensinergikan aktifitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam satu kerangka tujuan yang didasari penguatan etika organisasi. Mendukung penyelenggaraan pemilihan legislatif, presiden, dan DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, berbudaya, dan damai.	Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (<i>civil society</i>), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif.
2. Mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat.	Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum.	Meningkatkan peran satpol PP dalam menertibkan pelaksanaan perundang-undangan daerah dengan cara-cara yang berorientasi pada pelayanan prima.	Penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan,



		Melaksanakan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum dalam mendukung penegakan perundang-undangan daerah.	memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
	Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan.	Membentuk dan menguatkan peran sistem keamanan lingkungan (siskamling). Mensinergikan aktifitas siskamling dengan lembaga penegak hukum. Mengadakan pos-pos jaga di lingkungan masyarakat.	Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.
	Meningkatnya stabilitas dan keamanan lingkungan.	Mengembangkan sistem ketahanan sosial masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan dari luar. Melakukan upaya preventif terhadap berbagai tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan baik oleh lembaga siskamling maupun aparat penegak hukum. Membina masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui berbagai forum dalam masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.	Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.11 Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Tabel 6.11.

Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu

Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui usaha kecil menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi melalui UKM.	Melakukan pembinaan terhadap UKM yang telah ada dalam masyarakat. Memfasilitasi UKM dalam hal sarana, permodalan, dan pemasaran.	Mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan UKM yang ada di tengah masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produksi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Meningkatnya kemampuan UKM dalam mengembangkan usahanya.	Menyelenggarakan pelatihan terhadap para pelaku UKM terkait dengan berbagai pengetahuan pengembangan usaha. Memfasilitasi UKM dengan penerapan teknologi tepat guna. Memfasilitasi berbagai upaya kerjasama dan kemitraan usaha. Memfasilitasi upaya perlindungan hukum terhadap hasil produksi UKM.	Mendorong kewirausahaan dan keunggulan kompetitif hasil usaha dalam upaya sebagai daya dorong keberlanjutan dan keberlangsungan UKM. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi Jawa Timur dalam peningkatan perekonomian daerah.
	Meningkatnya kualitas upaya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur koperasi dan UKM.	Memberikan pelatihan kerja dengan materi keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor industri. Memfasilitasi inkubator usaha-usaha ekonomi oleh perempuan dan kelompok perempuan.	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi.



2. Mengentaskan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dari keterpurukan sosial melalui sektor UKM.	Meningkatnya kemampuan produktif (skill) masyarakat PMKS. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan bagi masyarakat PMKS. Meningkatnya keberdayaan masyarakat PMKS minimal dalam memenuhi 3 kebutuhan pokok.	Mengidentifikasi perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat PMKS. Memberikan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi PMKS yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor UKM.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Menengah Kecil (KUMKM) dalam mendorong keberdayaan UKM.	Terwujudnya KUMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.	Menguatkan peran Koperasi Usaha Menengah Kecil Masyarakat terhadap UKM-UKM yang ada di tengah masyarakat. Memfasilitasi kinerja KUMKM dalam menjalankan fungsinya baik ke dalam (kepada UKM) maupun ke luar (perluasan jaringan kerjasama). Mengembangkan jaringan kerjasama antar koperasi.	Optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
	Meningkatnya kualitas dan kehandalan KUMKM yang berhasil guna dan berdaya guna.	Memperbaiki sistem pengelolaan KUMKM untuk menghasilkan kinerja dan hasil kerja yang produktif, efisien, dan efektif. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola KUMKM.	Peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.
	Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	Mengembangkan inkubator bisnis padat karya. Mengikutsertakan UMKM dalam pameran lokal, regional, nasional, dan internasional. Memfasilitasi pengembangan sarana pemasaran.	Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Batu. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional.
4. Meningkatkan peran semua industri kecil dan menengah yang ada dalam masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Batu.	Meningkatnya konsolidasi dan jejaring semua sektor industri di Kota Batu untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata.	Menyusun grand desain pengembangan industri hulu hilir dalam mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata. Memfasilitasi konsolidasi dan networking dari semua pelaku industri kecil menengah di Kota Batu, dari industri hulu sampai hilir, industri pariwisata, industri pertanian, industri	Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (<i>networking</i>), melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Batu

		perikanan, industri kerajinan, industri perhotelan, dll. Memfasilitasi pemenuhan modal dan sumber daya bagi industri kecil dan menengah.	sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi lembaga keuangan mikro baik bank dan non bank yang diarahkan untuk mampu memberikan peran intermediasi di sektor riil lokal pedesaan maupun kelompok marginal perkotaan.
	Meningkatnya kemampuan dan daya saing industri kecil.	Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Memfasilitasi pengembangan industri kecil agar menjadi tangguh. Mengembangkan pembinaan strategi industri melalui pembentukan sentra dan cluster industri.	Penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, capaian kinerja, program pembangunan daerah, bidang urusan dan SKPD penanggung jawab.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Selanjutnya di dalam penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025. Untuk lebih detail terkait dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah lihat pada tabel berikut.

7.1 Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai iman dan kepercayaan masing-masing. 2. Terwujudnya sikap dan perilaku rukun, toleransi, dan gotong-royong.	Meningkatkan kualitas wadah pembinaan masyarakat berbasis agama. Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama untuk membina masyarakat. Memberikan dukungan operasional lembaga sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat.	Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.	Persentase pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial keagamaan masyarakat. Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	100% 40%	100% 80%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Kesra, Setda, Kantor Kesbangpol & Linmas, Kecamatan, Kelurahan, Kantor Satpol PP, Dinas Pendidikan
3. Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.	Mengintegrasikan semua tokoh dan lembaga sosial keagamaan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan daerah.	Implementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.	Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam proses pembangunan daerah.	100%	100%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
4. Terminimalisirnya berbagai isu sara yang berpotensi menimbulkan konflik, dan mencari solusi secara damai jika terjadi konflik agama	Membentuk dan merevitalisasi FKUB. Mendukung FKUB dalam melaksanakan fungsinya. Mengembangkan FKUB untuk juga membina kerukunan antar umat beda agama.	Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB).	40%	80%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	

5. Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dicapai.	Mengedepankan FKUB dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama.	Memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama.	Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui FKUB.	100%	100%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	
6. Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.	Mengidentifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) yang harus dilestarikan. Menginternalisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) melalui lembaga formal maupun informal masyarakat. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai tradisional, kearifan lokal, dan keagamaan.	Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan.	Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat.	0	5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.2 Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 7.2.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya kepemimpinan yang mencerminkan kapasitas untuk mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah sesuai dengan nilai yang disepakati, serta kapasitas membangun kepercayaan dan langkah-langkah nyata.	Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan. Memberikan motivasi, inspirasi, mendukung pegawai, serta menjadi panutan. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan.	Mengembangkan kepemimpinan yang bisa berdiri didepan memberi teladan, ditengah membangun semangat dan motivasi kerja, dan dibelakang memberi kekuatan kerja.	Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
			Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran.	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
			Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan.	100%	100%			
			Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah.	100%	100%			
			Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	100%	100%	Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0%	90%			

			Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0%	50%			
			Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0%	40%			
			Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & prajabatan.	0%	85%			
			Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan.	0%	50%			
			Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan.	0%	35%			
2. Terwujudnya perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil kerja dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan masa yang akan datang.	Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah partisipatif, transparan, dan akuntabel menuju modernisasi dan inovasi demi kepentingan bersama.	Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini.	0	100%	Program Pengembangan Data	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, semua SKPD
	Mengembangkan, mengkaji, serta memperbarui rencana strategis dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya.		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah.	3 kali	14 kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, semua SKPD
	Melaksanakan rencana strategis.		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang	1	2			

	Merencanakan, melaksanakan, dan mengkaji modernisasi dan inovasi.		berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perkada. Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran.	5 36 36 5	10 72 216 30			
3. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mencapai tujuan organisasi.	Merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas SDM aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana strategis dan roadmap reformasi birokrasi.	Mengembangkan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki daya untuk memberdayakan aparatur-aparturnya dan lebih berdayaguna untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pembangunan daerah.	Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.	5	10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, semua SKPD
	Mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggunakan kompetensi pegawai, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.		Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD.	75%	100%			
	Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan pemberdayaan.		Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Persentase jumlah aparatur	18% 10%	68% 40%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Pemerintahan Umum	Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah

			pemeriksa dan pengawas laki-laki yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawas. Persentase jumlah aparaturngawas pemeriksa dan pengawas perempuan yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawas.	8%	20%			
			Persentase jumlah aparaturngawas yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparaturngawas laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparaturngawas perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0%	90%	Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi
			Persentase jumlah aparaturngawas yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparaturngawas. Persentase jumlah aparaturngawas laki-laki yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparaturngawas. Persentase jumlah aparaturngawas perempuan yang mengikuti program peningkatan	0%	80%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi
				0%	50%			
				0%	30%			

			sumberdaya aparatur.					
			Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.	0%	90%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi
			Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.	0%	60%			
			Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.	0%	30%			
			Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.	50%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, Kelurahan
			Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa laki-laki yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.	40%	70%			
			Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa perempuan yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.	10%	30%			

			Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.	50% 40% 10%	100% 70% 30%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum	Dishubkominfo, semua SKPD
4. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja	Pengelolaan keuangan.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu memberdayakan kemampuan keuangan, informasi, pengetahuan, dan fasilitas yang dimiliki daerah dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi komunikasi.	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	100%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Daerah
	Pengelolaan teknologi.		Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.	100%	100%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintahan Umum	Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan
	Pengelolaan fasilitas.		Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.	30%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan
3. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan	Pengelolaan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bijaksana dalam memberdayakan para	Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah.	100%	100%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan

mengelola kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Pengelolaan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat	pemangku kepentingan dalam sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa.	96%	100%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Kemasyarakatan, BPMPKB, Kelurahan
4. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengidentifikasi, mengelola, meningkatkan, dan membangun proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung untuk mengimplementasikan dan mendukung rencana strategis dan roadmap organisasi.	Mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memperbaiki proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan. Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/ pengguna layanan.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai sistem proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, yang dapat meningkatkan hasil capaian dalam tugas pelayanan dan pembangunan daerah.	Persentase capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	10,38%	58,50%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat
			Persentase capaian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	1,03%	95,86%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintahan Umum	Inspektorat
			Persentase capaian perumusan dan implementasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya.	0%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah
5. Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan	Mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diperlukan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia pelaksana, kebijakan terkait pelimpahan kewenangan perijinan kepada camat,	Optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN.	0%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesekretariatan	Bagian Pemerintahan, Kecamatan
			Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi PATEN.	0%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum	Dishubkominfo

maupun non perizinan.	dan alokasi anggaran bagi kecamatan. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PATEN yang meliputi penyusunan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan, penyusunan tata cara pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, serta pemberian sanksi dan penghargaan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN terkait ketersediaan fasilitas, proses pelaksanaan, dan penggunaan anggaran.	menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan kebutuhan serta tuntutan masyarakat dalam pelayanan.	Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur pelaksana PATEN.	0%	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Pemerintahan
			Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada camat terkait PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
			Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan pelaksana PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Pendidikan Kedinasan	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
			Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
			Persentase cakupan pembinaan pelaksanaan PATEN.	0%	100%			
			Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Inspektorat
			Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PATEN.	0%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat, Bagian Pemerintahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.3 Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Tabel 7.3.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya sistem bertani organik.	Menyusun masterplan pertanian go organik.	Pengembangan pertanian organik dalam rangka menghasilkan produk unggulan yang berkualitas.	Jumlah paket pengembangan kawasan organik.	4	14	Program Pengembangan Pertanian Organik	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2. Terwujudnya perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik yang berwawasan kesehatan.	Menetapkan kawasan pertanian organik beserta jenis tanaman sebagai pilot project.		Jumlah paket pelatihan pertanian organik.	0	5			
3. Terwujudnya produk pertanian organik.	Memenuhi berbagai kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik (bibit unggul, obat-obatan, pupuk, dan teknologi organik). Melakukan pembinaan kepada petani dan lembaga petani mengenai keunggulan pertanian organik dan keahlian pertanian organik berwawasan kesehatan.							
4. Terwujudnya kemantapan proses pengembangan pertanian organik.	Meningkatkan intensitas pengembangan pilot project budidaya pertanian organik.	Memantapkan proses pengembangan pertanian organik, dan menciptakan diversifikasi produk unggulan berkualitas.	Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik.	9	25	Program Pengembangan Pertanian Organik	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
5. Terwujudnya diversifikasi pertanian organik.	Menganekaragamkan jenis tanaman yang diproses secara organik.							

6. Terwujudnya pasar induk agribisnis.	Membangun pusat perdagangan hasil pertanian dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Mendukung pemanfaatan pusat perdagangan ini agar dapat berfungsi optimal.	Pembangunan pasar induk agribisnis.	Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian.	0 paket	10 paket	Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
7. Terwujudnya penguatan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Mengarahkan semua pelaku agribisnis untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dalam rangka merebut pasar nasional maupun internasional. Menggencarkan promosi hasil pertanian ke dalam pasar nasional dan internasional.	Penguatan agribisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agribisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Ketersediaan informasi produksi pertanian/ perkebunan.	0 paket	5 paket	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
8. Terwujudnya penguatan aspek pasar.	Memantau dan menjaga stabilitas mekanisme pasar agar tidak terganggu oleh tindakan spekulasi yang dapat merusak akses pasar Menanggulangi tindakan mengacaukan harga.	Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.	Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM)	50 %	90 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
9. Terwujudnya sistem informasi produksi, distribusi, dan pasar komoditas pertanian.	Mengembangkan sarana informasi untuk menginformasikan berbagai informasi pasar komoditas pertanian.	Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah. (SPM)	15 %	90 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
20. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.	Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Mengembangkan keahlian SDM penyuluh pertanian.	Pengembangan SDM penyuluh pertanian dan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian organik.	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang mendapat update pengetahuan pertanian organik. Ketersediaan sarana penyuluhan pertanian.	50%	100%	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.4 Misi 4 : Meningkatkan Posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Tabel 7.4.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 4 : Meningkatkan Posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kota yang berwawasan internasional dalam peraturan daerah. Menyusun strategi dan grand desain penyiapan sistem dan struktur sosial dalam mendukung kepariwisataan internasional. Menyusun kebijakan kepariwisataan dalam bentuk peraturan daerah. Memfasilitasi berdirinya Daerah Tujuan Wisata unggulan baru “ASEAN CULTURE PARK” yang berwawasan internasional. Mengembangkan Kota Batu secara makro menuju perwujudan <i>Batu Destination</i>. Mengembangkan desa/kelurahan menjadi “desa wisata” berdasarkan	Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata.	12	17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPMPKB, Kelurahan

	pada potensi masing-masing wilayah. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan “Batu Destination”. Menyiapkan infrastruktur kepariwisataan internasional.							
2. Terwujudnya penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional.	Menggelar event pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata secara rutin dalam skala regional, nasional, maupun internasional sebagai sajian wisata. Memantau sajian wisata Kota Batu supaya tetap mempertahankan basis budaya lokal dan agrowisata. Melakukan tindakan tertentu terhadap penyelewengan yang terjadi. Mengupayakan Kota Batu masuk dalam “international tourism directory”, “World Federation of Tourist Guide Association”, dan “World Tourism Organization.” Memenuhi standar sarana prasarana wisata internasional.	Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata. Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional. Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata nasional maupun internasional.	24	24	Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
				7	44			
				0	1			

3. Tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu.	Mempromosikan semua obyek kepariwisataan Kota Batu secara nasional dan internasional melalui media informasi yang efektif. Mengembangkan promosi langsung melalui Location Based Advertising. Memperkuat kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah berbatasan.	Promosi pariwisata daerah dan pencitraan Batu Kota Wisata. Promosi pariwisata daerah dan pemantapan city branding Batu sebagai Kota Wisata di tingkat nasional. Memperkuat kerjasama bidang pariwisata antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah.	Jumlah kunjungan wisata. Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui berbagai media dan LBA. Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.	2.547.855 10 ...	17.772.104 108 ...	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Tersedianya SDM kepariwisataan berkompentensi internasional. 5. Terwujudnya SDM kepariwisataan dengan standarisasi internasional.	Melatih siswa kejuruan kepariwisataan melalui Praktek Kerja Langsung. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional untuk "Desa Wisata". Meningkatkan profesionalitas para pekerja sektor pariwisata melalui pendidikan di Balai Latihan Kerja.	Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten dan profesional.	Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata. Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pembinaan.	24 10	34 100	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kecamatan, Kelurahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.5 Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Tabel 7.5.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada. 2. Masuknya investor baru ke Kota Batu. 3. Berkembangnya kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri.	Menyediakan informasi yang berhubungan dengan bidang usaha unggulan daerah. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan berbagai potensi sumber daya unggulan daerah.	Mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.	Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. (SPM) Cakupan informasi berbagai potensi sumber daya unggulan daerah.	0 0	1 subdomain website, 8000 leaflet, 1500 booklet, 1000 DVD peluang investasi 10000 leaflet, 2500 booklet potensi sumber daya	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Pembangunan
4. Terciptanya peluang kerja padat karya bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan. 5. Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.	Menyusun sistem perijinan dan penataan lingkungan usaha yang kondusif bagi penciptaan kepastian investasi. Memfasilitasi kerjasama investasi dengan pihak swasta.		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM)	2 0 0	1100 pelaku usaha 100% 1100 pelaku usaha	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Pembangunan

			Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM)	38 jenis ijin teknis sektoral	62 jenis ijin teknis sektoral dan penanaman modal, 5 Tanda Daftar Bidang Penanaman Modal			
	Mempromosikan semua potensi keunggulan wisata. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus.		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota. (SPM)	2	57	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
6. Tersusunnya kebijakan investasi daerah.	Kajian regulasi investasi agar dapat lebih mengakomodasi ketertarikan investor untuk tetap atau hendak berinvestasi. Memperluas jaringan kerjasama investasi dengan daerah lain baik di Indonesia maupun negara lain. Membentuk konsorsium investasi daerah bersama dengan daerah lain.	Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (sister city).	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi (KUMKM) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM)	1	12	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja.	Mendirikan Balai Latihan Kerja Pertanian dan Pariwisata.	Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (SPM)	45%	99%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
8. Meningkatkan kurikulum, sarana, dan prasarana berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Menyusun kurikulum pelatihan tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada, berbasis potensi lokal yang memiliki keunggulan, dan aspek kewirausahaan.	Melatih calon tenaga kerja dengan kurikulum baru yang telah ditetapkan agar memiliki kompetensi dan daya saing sesuai kebutuhan pasar.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis masyarakat. (SPM)	14%	58%			
	Meningkatkan sarana prasarana pelatihan yang memadai.		Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan. (SPM)	10%	60%			
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pelatih.							

9. Terbentuknya hubungan yang selaras antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.	Membangun peluang-peluang kerja padat karya yang dikelola secara produktif dan professional.	Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. (SPM)	10%	60%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Kelurahan
10. Meningkatnya produktivitas dan kualitas kerja.	Menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai keberadaan dan hubungan antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja.		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek. (SPM)	0%	50%			
11. Meningkatnya kesejahteraan pekerja.	Membentuk forum kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan asosiasi pekerja.		Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM)	15%	45%			
	Membangun kesepakatan bersama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.		Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM)	0%	50%			

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.6 Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Tabel 7.6.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya kompetensi pendidik di setiap jenjang pendidikan.	Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik di jenjang dasar dan menengah.	Mendorong dan memacu pendidik untuk mau dan dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik agar dapat mengikuti laju perkembangan keilmuan sesuai dengan bidang studi yang diampu.	Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program peningkatan mutu pendidik.	24,1 %	50 %	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
	Memfasilitasi uji kompetensi terhadap tenaga pendidik.		Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima program peningkatan mutu pendidik.	22,1 %	50 %			
	Melaksanakan sertifikasi pendidik.		Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima program peningkatan mutu pendidik.	22,7 %	50 %			
2. Meningkatnya etika dari para pendidik.	Mengembangkan dan sosialisasi kode etik terhadap pendidik.	Mendorong pendidik untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai pendidik secara profesional dan beretika.	Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik.	10	5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
	Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap aktifitas pendidik proses pendidikan.		Jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik yang tertangani.	1	1			
3. Terwujudnya lembaga pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan dasar dengan jumlah siswa pendidikan	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.	100 %	100 %	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah

	dasar.	mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal.	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).	60,4 %	85 %			
	Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya.		Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).	62,2 %	75 %			
	Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb)		Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll)	40 %	75 %			
	Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.		Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.	100 %	100 %			
	Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.		Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah).	76,4 %	100 %			
			Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).	70,6 %	85 %			
			Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan	73,6 %	85 %			

			sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll).					
4. Terwujudnya lembaga pendidikan menengah yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan menengah. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb) Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal di tingkat pendidikan dasar menengah.	Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll)	100 % 90,2 % 71,8 % 57,8 %	100 % 100 % 85 % 75 %	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah

5. Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang mendukung potensi dan keunggulan Kota Batu.	Mengembangkan kurikulum khusus (sesuai potensi dan keunggulan Kota Batu) untuk dimasukkan dalam pendidikan sekolah kejuruan di Kota Batu.	Mengembangkan pendidikan kejuruan yang lebih mengarahkan peserta didik untuk lebih siap mendukung sektor industri unggulan daerah Kota Batu.	Ketersediaan kurikulum khusus pertanian dan kepariwisataan yang dapat diterapkan di pendidikan formal maupun non formal.	2	15	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
6. Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan.								
7. Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan yang handal.	Mengembangkan data dan informasi pendidikan yang terbaru dan akurat baik dari sisi peserta didik dan masyarakat, maupun pengelolaan pendidikan. Memantau pemanfaatan berbagai dana bantuan oleh sekolah. Melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam memantau pelaksanaan pendidikan. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja setiap lembaga pendidikan.	Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang handal, memegang prinsip pelayanan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Persentase jumlah SD/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SMP/MTs yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SD/MI yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. Persentase jumlah SMP/MTs yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala	100 % 100 % 100 % 75 % 64 %	100 % 100 % 100 % 100 % 80 %	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

			sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM.					
			Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM.	66 %	90 %			

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.7 Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 7.7.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.	Mengadakan berbagai kebutuhan obat yang diproyeksi akan dibutuhkan. Menyebarkan persediaan obat secara merata kepada seluruh instansi pelayanan kesehatan masyarakat.	Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.	76,47%	83%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.	peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak	Cakupan kunjungan puskesmas.	52,91%	65%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan melalui Diklat, Magang, Lokakarya dll.	menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. Memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pengembangan keahlian. (komulatif) a. Asuhan Persalinan Normal. b. ABBK. c. IVA test. d. Manajemen Asfiksi. e. Manajemen BBLR.	30 10 20 30 20	70 50 60 70 60	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Menstandarisasi pelayanan kesehatan dengan menyusun Protap, SOP (Standart Operating Sistem), dll.	menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	Persentase anggaran kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota.	3,39%	4,5%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
5. Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular & tidak menular.		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. (SPM) a. AFP. b. Pneumonia balita. c. TB BTA positif. d. DBD. e. Diare.	2,09 5% 40,29% 100% 59,48%	>2 100% 80% 100% 90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. (SPM)	100%	100%			
			Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. (MDG's)	31,79%	100%			
			Jumlah ODHA mendapat ARV. (MDG's)	60%	100%			
	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.		Cakupan desa/ kelurahan UCI. (SPM)	95,83	>95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan kunjungan ibu hamil K4. (SPM)	94,12%	95%			
			Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. (SPM)	84,12%	80%			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan. (SPM)	102,2%	100%			

			Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM)	101,3%	100%			
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. (SPM)	87,34%	87%			
			Cakupan kunjungan bayi. (SPM)	92,4%	92%			
			Cakupan peserta KB aktif. (SPM)	62,68%	70%			
	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.		Cakupan pelayanan anak balita. (SPM)	81,90%	90%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat. (SPM)	94,68%	100%			
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. (SPM)	26,51%	30%			
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. (SPM)	54,12%	50%			
	Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lansia.		Persentase lansia yang dilayani.	55%	70%	Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
			Persentase puskesmas santun lansia.	10%	16%			
	Penyediaan tambahan makanan dan vitamin bagi masyarakat.		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. (SPM)	100%	100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. (SPM)	100%	100%			
	Memantau kualitas makanan		Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti penyuluhan	97%	100%	Program Pengawasan Obat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

	masyarakat.		keamanan pangan.			dan Makanan		
			Persentase TTU/TPM sehat.	46,92%	65%	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Menyelenggarakan penjaminan kesehatan kepada masyarakat.		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs)	16,75%	20%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan.	Membina masyarakat untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.		Cakupan masyarakat terlayani sanitasi dasar. (MDGs)	53,30%	90%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	Membina masyarakat untuk tidak buang air besar secara sembarangan.		Cakupan pengawasan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi standard. (MDGs)	57,1%	90%			
	Melakukan uji kualitas air.							
7. Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana.	Meningkatkan peran PLKB dalam pencapaian Program Keluarga Berencana.	Pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja. <i>Pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera.</i>	Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. (SPM)	2,19	2	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan
8. Meningkatnya reproduksi sehat.	Meningkatkan KIE-KESPRO kepada masyarakat.		Cakupan sasaran pasangan usia subur yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM)	79,58	80			
9. Terwujudnya keluarga berencana sejahtera.	Meningkatkan peranan PKK di seluruh wilayah dalam mewujudkan keluarga sejahtera.		Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%.	19,5	17			
			Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 87%. (SPM)	70,42	75			
			Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga	86,89	89			

			sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. (SPM)					
			Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan. (SPM)	1 : 3	1 : 1			
			Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan. (SPM)	1 : 1	1 : 1			
			Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. (SPM)	2,7	25			
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. (SPM)	100%	100%			
			Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.	0	15	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan
			Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi.	0	755			

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.8 Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Tabel 7.8.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik,
Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota.	Membangun gedung perkantoran pemerintah (block office).	Pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.	Persentase penyelesaian gedung perkantoran pemerintah dalam satu area perkantoran.	17,3%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Pekerjaan Umum	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri.	Membangun gedung sekolah SD Negeri dan SMA Negeri.		Persentase penyelesaian pembangunan SD Negeri.	0%	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan,
			Persentase penyelesaian pembangunan SMA Negeri.	0%	100%	Program Pendidikan Menengah		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Terwujudnya infrastruktur kesehatan.	Membangun gedung bank darah.		Persentase penyelesaian pembangunan gedung bank darah.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Kesehatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4. Terwujudnya infrastruktur kearsipan dan perpustakaan.	Membangun gedung depo arsip dan perpustakaan.		Persentase penyelesaian pembangunan depo arsip.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi,
5. Terwujudnya infrastruktur keolahragaan.	Membangun Gedung Olahraga beserta fasilitasnya yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan event olahraga nasional.		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga.	0%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

								Ruang
6. Terwujudnya infrastruktur perdagangan.	Membangun gedung pasar induk Kota Batu. Membangun pasar sentra Junrejo. Membangun pasar desa agropolitan. Penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL).		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk. Persentase penyelesaian pembangunan pasar sentra Junrejo. Persentase penyelesaian pembangunan pasar desa agropolitan. Persentase penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL).	0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan
7. Terwujudnya infrastruktur pertanian.	Membangun gedung pasar agrobisnis Kota Batu.		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Agrobisnis.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8. Terwujudnya infrastruktur koperasi dan UKM.	Membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
9. Terwujudnya infrastruktur ketenagakerjaan.	Membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK).		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
10. Terwujudnya fasilitas bina sosial.	Membangun gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan. Membangun balai		Persentase penyelesaian pembangunan gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Sosial	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan

	pertemuan dan pameran. Membangun gedung serbaguna dan lembaga sosial.		Persentase penyelesaian pembangunan balai pertemuan dan pameran. Persentase penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial.	0% 0%	100% 100%			
11. Terwujudnya infrastruktur pariwisata.	Membangun sarana wisata kereta gantung. Membangun rest area. Membangun Drive In Mengembangkan jalur festival wisata. Mengembangkan jalur mountain bike.		Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta gantung. Persentase penyelesaian pembangunan rest area. Persentase penyelesaian pembangunan Drive In. Persentase penyelesaian pengembangan jalur festival wisata. Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain bike.	0% 0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100% 100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Bina Marga
12. Terwujudnya infrastruktur jalan.	Membangun jalan lingkaran barat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.		Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkaran barat.	0%	100%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pengairan dan Bina Marga
13. Terwujudnya akses lalu lintas antar wilayah.	Membangun jalan lingkaran utara untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.		Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkaran utara.	0%	100%			
14. Meningkatnya dinamika masyarakat melalui ketersediaan sarana mobilisasi yang lebih baik.	Membangun jalan lingkungan pendukung desa wisata.		Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkungan pendukung desa wisata.	0%	100%			
	Membangun jaringan jalan dan jembatan baru.		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. (SPM)	0 ruas jalan	6 ruas jalan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pengairan dan Bina Marga

			Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (SPM) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. (SPM)	37 ruas jalan 17 lokasi	209 ruas jalan 128 lokasi			
15. Terwujudnya infrastruktur transportasi.	Membangun terminal angkutan. Mengembangkan terminal tipe B. Mengembangkan terminal wisata.		Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan. Persentase penyelesaian pembangunan terminal tipe B. Persentase penyelesaian pembangunan terminal wisata.	0% 0% 0%	100% 100% 100%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Dinas Pengairan dan Bina Marga
16. Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas.	Meningkatkan fasilitas jalan raya.		Tersedianya halte pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota/kabupaten. (SPM)	6 7662	16 9988	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi
17. Meningkatnya infrastruktur sanitasi lingkungan permukiman.	Mengembangkan infrastruktur dan pengelolaan penyediaan air bersih.		Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. (SPM) Persentase penduduk yg	38831 KK	40299 KK	Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

			memiliki akses penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan.					
	Mengembangkan infrastruktur pengolahan air limbah komunal dan fasilitas penyehatan lingkungan permukiman.		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (SPM) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. (SPM)	883 KK	1865 KK	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Mengembangkan infrastruktur drainase lingkungan.		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (SPM)	16 titik	106 titik	Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Mengembangkan infrastruktur pengelolaan persampahan.		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan. (SPM)	6 paket alat pengolah sampah	4 gedung dan 16 paket alat pengolah sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.9 Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 7.9.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan
Kepada Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa. 2. Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan desa yang mendukung tugas dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah kepada masyarakat.	Membina aparatur pemerintah desa dengan sistem kepegawaian yang terstandar. Menyebarkan penempatan PNS dalam pemerintahan desa. Pemberian insentif kepada aparatur desa non PNS.	Penguatan otonomi pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan.	Persentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.	96%	99%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang proses kerja pelayanan pemerintahan desa.	Memenuhi sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan sarana teknologi informasi komunikasi.		Jumlah sarana prasarana kerja bagi pemerintahan desa.	96%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan
4. Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah daerah.	Menyelenggarakan forum komunikasi antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran		Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. Pendampingan ADD. Pelantikan BPD.	97% 96% 100%	100% 100% 100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan

	pembangunan desa, serta pengelolaan aset desa.		Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.	100%	100%			
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa.	Menyusun pedoman standar pelayanan. Mensosialisasi pedoman standar pelayanan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman standar pelayanan untuk meningkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan desa.		Jumlah desa yang telah menerapkan standar pelayanan.	19 desa	114 desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.10 Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Tabel 7.10.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya iklim demokrasi.	Melaksanakan musrenbang baik di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, maupun kota. Memberikan kebebasan dan hak untuk ikut berpolitik bagi semua elemen masyarakat termasuk perempuan dan pemuda. Menyelenggarakan pendidikan politik dan semangat kebangsaan secara masiv terhadap masyarakat.	Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (civil society), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif.	Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.	1	6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan
2. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamaan masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan demokratisasi.			Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik.	150	900			
3. Meningkatnya peran dan fungsi perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik.	Mengembangkan kapasitas dan profesionalisme lembaga demokrasi lokal.		Jumlah pembinaan terhadap partai politik.	0	6	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Setwan DRPD, Kecamatan, Kelurahan
4. Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih tertata.	<i>Mendorong partai politik untuk membina kader-kadernya untuk mewujudkan kemandirian partai politik.</i> Mensinergikan aktifitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam satu kerangka tujuan yang didasari penguatan etika organisasi.							

	Mendukung penyelenggaraan pemilihan legislatif, presiden, dan DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, berbudaya, dan damai.							
5. Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum.	Meningkatkan peran satpol PP dalam menertibkan pelaksanaan perundang-undangan daerah dengan cara-cara yang berorientasi pada pelayanan prima. Melaksanakan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam mendukung penegakan perundang-undangan daerah.	Penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).	Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	1 (Komunitas Intelejen Daerah / KOMINDA)	6 (Komunitas Intelejen Daerah / KOMINDA)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol, Bagian Hukum
6. Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan.	Membentuk dan menguatkan peran sistem keamanan lingkungan (siskamling). Mensinergikan aktifitas siskamling dengan lembaga penegak hukum terkait. Mengadakan pos-pos jaga di lingkungan masyarakat.	Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.	Jumlah satuan/kelompok masyarakat pelaksana sistem keamanan lingkungan. Rasio ketersediaan pos keamanan lingkungan.	24	24	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan
7. Meningkatnya stabilitas dan keamanan lingkungan.	Mengembangkan sistem ketahanan sosial masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan dari luar. Melakukan upaya preventif terhadap berbagai tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan baik	Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum	Cakupan petugas perlindungan masyarakat. (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan. (SPM)	1768 petugas 100%	1768 petugas 100%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Bagian Hukum, Kecamatan, Kelurahan

	oleh lembaga siskamling maupun aparat penegak hukum. Membina masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui berbagai forum dalam masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.	serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.						

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.11 Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Tabel 7.11.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi melalui UKM.	Melakukan pembinaan terhadap UKM yang telah ada dalam masyarakat. Memfasilitasi UKM dalam hal sarana, permodalan, dan pemasaran.	Mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan UKM yang ada di tengah masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produksi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah UKM yang mengakses sistem informasi dan sumber daya produktif.	40	60	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, BPMPKB
			Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs)	2	10			
			Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs)	1	8			
2. Meningkatnya kemampuan UKM dalam mengembangkan usahanya.	Menyelenggarakan pelatihan terhadap para pelaku UKM terkait dengan berbagai pengetahuan pengembangan usaha. Memfasilitasi UKM dengan penerapan teknologi tepat guna. Memfasilitasi berbagai upaya kerjasama dan kemitraan usaha. Memfasilitasi upaya perlindungan hukum	Mendorong kewirausahaan dan keunggulan kompetitif hasil usaha dalam upaya sebagai daya dorong keberlanjutan dan keberlangsungan UKM.	Jumlah peningkatan usaha skala mikro ke kecil.	2066	2191	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, BPMPKB
			Persentase jumlah UKM yang mendapat fasilitas dan pendampingan.	24 %	36 %			
			Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	1	8			

	terhadap hasil produksi UKM.							
3. Meningkatnya kualitas upaya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur koperasi dan UKM.	Memberikan pelatihan kerja dengan materi keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor industri. Memfasilitasi inkubator usaha-usaha ekonomi oleh perempuan dan kelompok perempuan.	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi.	Persentase jumlah perempuan usia produktif yang menerima program pemberdayaan. Persentase perempuan usia produktif yang mampu terlibat dalam bidang kerja baik secara mandiri maupun tidak mandiri.	0 orang 25%	480 orang 50%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
4. Meningkatnya kemampuan produktif (skill) masyarakat PMKS. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan bagi masyarakat PMKS. 6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat PMKS minimal dalam memenuhi 3 kebutuhan pokok.	Mengidentifikasi perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat PMKS. Memberikan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi PMKS yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor UKM.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Peningkatan persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. (SPM)	16%	80%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Kelurahan

7. Terwujudnya KUMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.	Menguatkan peran Koperasi Usaha Menengah Kecil Masyarakat terhadap UKM-UKM yang ada di tengah masyarakat. Memfasilitasi kinerja KUMKM dalam menjalankan fungsinya baik ke dalam (kepada UKM) maupun ke luar (perluasan jaringan kerjasama). Mengembangkan jaringan kerjasama antar koperasi.	Optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.	Jumlah lembaga koperasi aktif.	122	137	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan
8. Meningkatnya kualitas dan kehandalan KUMKM yang berhasil guna dan berdaya guna.	Memperbaiki sistem pengelolaan KUMKM untuk menghasilkan kinerja dan hasil kerja yang produktif, efisien, dan efektif. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola KUMKM.	Peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.	Jumlah lembaga koperasi yang mendapat pembinaan.	122	142	Program Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan
9. Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	Mengembangkan inkubator bisnis padat karya. Mengikutsertakan UMKM dalam pameran lokal, regional, nasional, dan internasional. Memfasilitasi pengembangan sarana pemasaran.	Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Batu. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional.	Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	1	8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan

10. Meningkatnya konsolidasi dan jejaring semua sektor industri di Kota Batu untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata.	Menyusun grand desain pengembangan industri hulu hilir dalam mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata.	Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (<i>networking</i>), melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Batu sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.	Jumlah KUB industri hulu hilir.	0	4	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bappeda
	Memfasilitasi konsolidasi dan networking dari semua pelaku industri kecil menengah di Kota Batu, dari industri hulu sampai hilir, industri pariwisata, industri pertanian, industri perikanan, industri kerajinan, industri perhotelan, dll.		Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah.	10	20	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
11. Meningkatnya kemampuan dan daya saing industri.	Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Memfasilitasi pengembangan industri kecil agar menjadi tangguh. Mengembangkan pembinaan strategi industri melalui pembentukan sentra dan cluster industri.	Penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi.	15	45	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, BPMPKB

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA BATU

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendataan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka langkah selanjutnya adalah membuat alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batu

Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB																
PENDIDIKAN																
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dedicated)	1	Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)	24,1%	0,9%	80.000.000	5%	90.000.000	5%	100.000.000	5%	110.000.000	10%	120.000.000	50%	500.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
	2	Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)	22,1%	7,9%	80.000.000	5%	90.000.000	5%	100.000.000	5%	110.000.000	5%	120.000.000	50%	500.000.000	
	3	Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)	22,7%	7,3%	80.000.000	5%	90.000.000	5%	100.000.000	5%	110.000.000	5%	120.000.000	50%	500.000.000	
	4	Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik. (Dedicated)	10	9	0	8	5.000.000	7	5.000.000	6	10.000.000	5	10.000.000	5	30.000.000	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dedicated)	1	Ketersediaan gedung SD Negeri (Dedicated)	65	0	0	1	2.000.000.000	0	0	0	0	0	6	2.000.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
	2	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)	100%	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%		5.562.562.200
	3	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). (Dedicated)	60,4%	4,6%	20.000.000	5%	30.000.000	5%	40.000.000	5%	50.000.000	5%	60.000.000	85%		200.000.000
	4	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)	62,2%	2,6%	4.597.809.200	2,6%	4.717.352.200	2,6%	4.840.003.400	2,5%	4.961.003.500	2,5%	5.085.028.500	75%		24.201.196.800
	5	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) (Dedicated)	40%	4,7%	100.000.000	8,2%	150.000.000	7,7%	200.000.000	7%	250.000.000	8%	300.000.000	75%		1.000.000.000
	6	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%		1.800.000.000
	7	Persentase jumlah SMP/ MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). (Dedicated)	76,4%	4,3%	20.000.000	4,3%	30.000.000	5%	40.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	100%		190.000.000
	8	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)	70,6%	2,7%	4.398.043.200	2,7%	4.517.586.250	3%	4.640.237.400	3%	4.761.237.500	3%	4.885.262.500	85%		23.202.366.850
	9	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll). (Dedicated)	73,6%	1,2%	450.000.000	1,2%	460.000.000	3%	475.000.000	3%	490.000.000	3%	500.000.000	85%		2.375.000.000

	10	Jumlah siswa SD sasaran BOS (MDGs)	16760 siswa	16.760	9.720.800.000	17.598	10.206.840.000	18.478	10.717.240.000	19.402	11.253.160.000	20.372	11.815.760.000	20372 siswa	11.815.760.000	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan
	11	Jumlah siswa SMP sasaran BOS (MDGs)	8128 siswa	8.128	5.770.880.000	8.534	6.059.140.000	8.961	6.362.310.000	9.410	6.681.100.000	9.881	7.015.510.000	9881 siswa	7.015.510.000	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan
Program Pendidikan Menengah (Dedicated)	1	Ketersediaan gedung SMA Negeri. (Dedicated)	2	Pengadaan Tanah	2.000.000.000	1 (pembangunan gedung)	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3	7.000.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Kependidikan Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	
	3	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). (Dedicated)	90,2%	1,9%	20.000.000	1,9%	25.000.000	2%	30.000.000	2%	40.000.000	2%	50.000.000	100%	165.000.000	
	4	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)	71,8%	2,1%	4.494.806.000	2,1%	4.589.196.900	3%	4.726.872.800	3%	4.868.679.000	3%	5.014.739.400	85%	23.694.294.100	
	5	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) (Dedicated)	57,8%	2,6%	200.000.000	2,6%	250.000.000	4%	300.000.000	3%	350.000.000	3%	400.000.000	75%	1.500.000.000	
	6	Ketersediaan kurikulum khusus pertanian dan kepariwisataan yang dapat diterapkan di pendidikan formal maupun non formal. (Dedicated)	2	3	20.000.000	3	30.000.000	4	40.000.000	3	50.000.000	2	60.000.000	15	200.000.000	
	7	Jumlah lulusan sekolah kejuruan di sektor pertanian dan kerajinan.	449	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	933	25.000.000	Dinas Pendidikan
	8	Jumlah SMK terakreditasi A.	2 sekolah	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	7	25.000.000	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Dedicated)	1	Persentase jumlah SD/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	Dinas Pendidikan
	2	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)	100%	100%	30.505.450	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	200.000.000	
	3	Persentase jumlah SMA/ SMK/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	200.000.000	
	4	Persentase jumlah SD/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. (Dedicated)	75%	5%	215.110.750	5%	215.110.750	5%	225.000.000	5%	225.000.000	5%	250.000.000	100%	1.250.000.000	
	5	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. (Dedicated)	64%	4%	215.110.750	4%	223.715.180	3%	230.426.650	3%	237.339.450	2%	242.086.250	80%	1.210.431.250	
	6	Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. (Dedicated)	66%	4%	436.874.800	5%	458.718.540	5%	481.654.467	5%	505.737.190	5%	531.024.050	90%	2.655.120.250	

Program PAUD	1	Jumlah anak usia dini dalam PAUD.	6484 anak	100	50.000.000	100	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	6.985	250.000.000	Dinas Pendidikan					
	2	Pembangunan gedung PAUD	10 paud	1	80.000.000	3	256.000.000	2	256.000.000	2	256.000.000	2	256.000.000	10	1.104.000.000	Dinas Pendidikan					
	3	Jumlah PAUD terakreditasi	20 sekolah	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	17	170.000.000	0	970.000.000	Dinas Pendidikan					
KESEHATAN																					
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan gedung bank darah. (Dedicated)	0%	0	0	50% (tanah dan bangunan)	1.000.000.000	50% (peralatan)	1.000.000.000	0	0	0	0	100%	2.000.000.000	Dinas Kesehatan Dinas Cikartarung					
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dedicated)	1	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. (Dedicated)	76,47%	78%	1.188.472.886	79%	1.430.054.340	80%	1.716.065.208	82%	2.059.278.249	83%	2.471.133.899	83%	8.865.004.582	Dinas Kesehatan					
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas (Dedicated)	1	Cakupan kunjungan puskesmas. (Dedicated)	52,91%	55%	5.832.696.121	57%	7.765.965.734	60%	8.907.562.307	62%	7.763.318.539	65%	6.286.715.641	65%	36.556.258.342	Dinas Kesehatan					
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dedicated)	1	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs) (Dedicated)	16,75%	17%	260.568.000	17,5%	327.041.650	18%	363.132.600	19%	402.860.580	20%	446.906.000	20%	1.800.508.830	Dinas Kesehatan					
	2	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pengembangan keahlian. (Dedicated)																			
		Asuhan Persalinan Normal.	30	30				40				50					60		60		70
		ABBK.	10	10				20				30					40		40		50
		IVA test.	20	20				30				40					50		50		60
		Manajemen Asfiksi.	30	30				40				50					60		60		70
		Manajemen BBLR.	20	20				30				40					50		50		60
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Dedicated)	1	Persentase anggaran kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota. (Dedicated)	3,39%	3,45%	158.872.750	4%	204.500.000	3,75%	217.450.000	4%	132.500.000	4,5%	146.050.000	4,5%	859.372.750	Dinas Kesehatan					
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dedicated)					347.888.800		412.354.925		489.512.707		573.938.357		649.173.909		2.472.868.698	Dinas Kesehatan					
	1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. (SPM) (Dedicated)																			
		AFP.	2,09	>2				>2				>2					>2		2		>2
		Pneumonia balita.	5%	90%				90%				100%					100%		100%		100%
		TB BTA positif.	40,29%	80%				80%				80%					80%		80%		80%
		DBD.	100%	100%				100%				100%					100%		100%		100%
		Diare.	59,48	>85%				>85%				>85%					90%		90%		90%
	2	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. (SPM) (Dedicated)	100%	100%				100%				100%					100%		100%		100%
	3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. (MDG's)	31,79%	40%				60%				80%					90%		100%		100%
	4	Jumlah ODHA mendapat ARV. (MDG's)	60%	60%				70%				80%					90%		100%		100%
	5	Cakupan desa/kelurahan UCI. (SPM) (Dedicated)	95,82	>95%				>95%				>95%					>95%		>95%		>95%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (Dedicated)					116.232.300		117.550.500		120.510.750		124.290.750		127.855.600		606.439.900	Dinas Kesehatan					
	1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4. (SPM) (Dedicated)	9412%	95%				95%				95%					95%		95%		
	2	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) (Dedicated)	8412%	85%				85%				85%					85%		85%		

	3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan. (SPM) (Dedicated)	102,2	100%		100%		100%		100%		100%				
	4	Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM) (Dedicated)	101,3	100%		100%		100%		100%		100%				
	5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) (Dedicated)	87,34	87%		87%		87%		87%		87%				
	6	Cakupan kunjungan bayi. (SPM) (Dedicated)	92,4	92%		92%		92%		92%		92%				
	7	Cakupan peserta KB aktif. (SPM) (Dedicated)	62,67	70		0,7		0,7		0,7		0,7				
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Dedicated)					640.840.760		713.899.371		792.710.083		881.183.616		981.376.028	4.010.009.858	Dinas Kesehatan	
	1	Cakupan pelayanan anak balita. (SPM) (Dedicated)	81,90%	85%		87%		90%		90%		90%				
	2	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat. (SPM) (Dedicated)	94,68%	100%		100%		100%		100%		100%				
	3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. (SPM) (Dedicated)	26,51%	35%		35%		35%		30%		30%				
	4	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. (SPM) (Dedicated)	54,12%	80%		70%		65%		60%		50%				
Program Peningkatan Kesehatan Lansia (Dedicated)					19.252.800		19.684.200 amatan,		20.152.600		20.652.600		21.652.600	101.394.800	Dinas Kesehatan	
	1	Persentase lansia yang dilayani. (Dedicated)	55%	60%		65%		65%		65%		70%		70%		
	2	Persentase puskesmas santun lansia. (Dedicated)	10%	12%		14%		14%		14%		16%		16%		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dedicated)					593.887.850		731.067.880		802.094.034		871.440.698		945.113.807	3.943.604.269	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan	
	1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. (SPM) (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. (SPM) (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Dedicated)	1	Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan. (Dedicated)	97%	98%	84.856.900	98%	131.068.320	99%	157.281.984	99%	188.738.381	100%	226.486.057	100%	788.431.642	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan (Dedicated)	1	Persentase TTU/TPM sehat. (Dedicated)	46,92%	50%	45.480.950	52%	79.493.380	55%	95.392.056	60%	114.326.467	65%	136.391.761	65%	471.084.614	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Dedicated)					95.393.850		731.067.880		179.000.000		252.600.000		252.200.000	1.510.261.730	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan	
	1	Cakupan masyarakat terlayani sanitasi dasar. (MDGs) (Dedicated)	53,30%	65%		75%		80%		85%		90%		90%		
	2	Cakupan pengawasan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi standard. (MDGs) (Dedicated)	57,10%	70%		75%		80%		85%		90%		50%		
	3	Persentase rumah yg memenuhi syarat kesehatan. (MDGs)	57,6%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dedicated)	1	Cakupan desa siaga aktif. (SPM) (Dedicated)	100%	100%	106.827.300	100%	116.717.300	100%	128.717.300	100%	142.717.300	100%	158.717.300	100%	653.696.500	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	1	Cakupan pengembangan obat asli Indonesia			8.625.000		9.961.875		11.505.966		13.289.390		15.349.246		58.731.477	BPMPKB

PEKERJAAN UMUM																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan gedung perkantoran dalam satu area perkantoran. (Dedicated)	17,3%	19%	39.826.120.000	21,7%	45.173.394.800	21%	44.000.000.000	21%	44.000.000.000	0	0	100%	172.999.514.800	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Ketersediaan rumah negara untuk aparaturn pemerintahan. (Dedicated)	0	1	468.000.000	3	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	4	2.968.000.000	
	3	Persentase penyelesaian pembangunan gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan. (Dedicated)	0%	50%	1.283.300.000	-	0	50%	2.000.000.000	-	0	0	0	100%	3.283.300.000	
	4	Persentase penyelesaian pembangunan balai pertemuan dan pameran. (Dedicated)	0%	40%	475.000.000	20%	2.000.000.000	20%	1.000.000.000	20%	2.000.000.000	0%	0	100%	5.475.000.000	
	5	Persentase penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial. (Dedicated)	0%	20%	10.388.400.000	20%	4.100.000.000	20%	4.000.000.000	20%	2.000.000.000	20%	6.000.000.000	100%	26.488.400.000	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkaran barat. (Dedicated)	0%	40%	15.000.000.000	40%	10.000.000.000	20%	5.000.000.000	0%	0	0%	0	100%	30.000.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Bappeda
	2	Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkaran utara. (Dedicated)	0%	0%	0	0%	0	10%	25.000.000.000	20%	40.000.000.000	20%	50.000.000.000	50%	115.000.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Bappeda
	3	Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkungan pendukung desa wisata. (Dedicated)	0%	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	50%	25.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	4	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. (SPM) (Dedicated)	0 ruas jalan	2	15.888.268.365	0	20.000.000.000	2	35.000.000.000	0	25.000.000.000	2	40.000.000.000	6	135.888.268.365	
	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (SPM) (Dedicated)	37 ruas jalan	16		40		28		60		28		209		
	6	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. (SPM) meliputi jembatan, plengsengan, dan trotoar. (Dedicated)	17 lokasi	23	11.921.264.237	30	15.000.000.000	25	30.000.000.000	30	30.000.000.000	20	30.000.000.000	128 lokasi	116.921.264.237	
	7	Jumlah kerjasama pengelolaan infrastruktur jalan dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.														Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Dedicated)	1	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (SPM) (Dedicated)	7 ruas jalan	23	5.013.495.280	15	7.000.000.000	25	10.000.000.000	20	12.000.000.000	30	17.000.000.000	120	51.013.495.280	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	2	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. (SPM) (Dedicated)	13 ruas jalan	12		40		30		45		40		180		
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. (SPM)	12 lokasi kawasan/ dusun miskin	Peningkatan kualitas kawasan yang sudah diperbaiki.	5.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	16	45.000.000.000	Dinas Cikartarung
	2	Tersedianya infrastruktur kota.	0	5	2.874.300.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	29	5.274.300.000	Dinas Cikartarung
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1	Tingkat penyebaran pembangunan infrastruktur perdesaan.	35.907,84 m2	30.711 m2	4.299.550.000	16.551,72 m2	2.400.000.000	16.000 m2	2.400.000.000	15.483,87 m2	2.400.000.000	15.000 m2	2.400.000.000	129.654,43 m2	13.899.550.000	Dinas Cikartarung
Program Rehabilitasi Pembangunan Sarana Sumber Daya Air	1	Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Air Bersih dari Sumber Mata Air		0%	0	15%	500.000.000	10%	250.000.000	15%	500.000.000	20%	700.000.000	40%	1.950.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih	64 Jaringan Air Bersih	11	1.295.658.600	12	1.600.000.000	14	1.920.000.000	15	2.304.000.000	16	2.764.800.000	132	9.884.458.600	

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (SPM)	0 sumur pantau	0	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	40	800.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,
	2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat. (SPM)	1559,88 lt/dt	40854 lt/dt	11.239.366.964	40854 lt/dt	12.363.303.660	445,68 lt/dt	13.599.634.026	445,68 lt/dt	14.959.597.429	445,68 lt/dt	16.455.557.172	2154,12 lt/dt	68.617.459.251	
	3	Tersusunnya Peta daerah Resapan dan Batas Zonasi Sumber Mata Air	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	6	950.000.000	
	4	Peta Cekungan Air Tanah dan Rekomendasi Konservasinya	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	
	5	Jumlah bangunan konservasi air tanah.	12 brouncap	0	0	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	28	960.000.000	
	6	Evaluasi penggunaan dan pemanfaatan air baku yang di konsumsi masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun usaha jasa perdagangan	0 laporan survei	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	
Program Pengendalian Banjir	1	Jumlah upaya dalam mengendalikan banjir.	0%	0%	0	10%	600.000.000	6%	400.000.000	7%	450.000.000	12%	650.000.000	35%	2.100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinsosnaker
Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota	1	Cakupan pemerataan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).	2289 titik	228	2.735.130.000	500	4.983.731.000	200	2.735.604.100	200	2.898.915.000	200	2.874.780.000	3617	16.228.160.100	Dinas Cikartarung
Program Pembangunan Plengsengan	1				3.267.302.592		8.900.000.000		8.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		38.167.302.592	Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong Gorong	1				4.114.565.600		13.650.000.000		10.000.000.000		9.000.000.000		10.000.000.000		46.764.565.600	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1				379.982.200		2.900.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		11.279.982.200	Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1				15.703.862.564		14.750.000.000		13.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		71.453.862.564	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	1				0		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		35.000.000	Kecamatan Batu
PERUMAHAN																
Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah unit rumah dalam perumahan PNS yang difasilitasi bagi PNS golongan I dan II.	0	0	0	100	9.000.000.000	300	27.000.000.000	0	0	0	0	400	36.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Jumlah Rumah Sederhana yang disediakan bagi masyarakat tidak mampu.	0	0	0	0	0	1	800.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	3	20.800.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota. (SPM)	1200 rumah tinggal	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	5200	250.000.000	KPPT
	4	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kota. (SPM)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	6	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU). (SPM)	0	0	0	0	0	0	0	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	100	10.000.000.000	
	7	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun. (SPM)	0	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	5 SIUJK	125.000.000	KPPT
	8	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap. (SPM)	0	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	125 IUJK	125.000.000	

Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni. (SPM)	0	0	0	20%	800.000.000	20%	500.000.000	30%	5.000.000.000	30%	5.000.000.000	100%	11.300.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. (SPM)	53%	0%	0	9.25%	510.000.000	9.25%	480.000.000	9.25%	510.000.000	9.25%	480.000.000	90%	1.980.000.000	Dinsosnaker, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan, Tim Penggerak PKK, CSR, BPMPKB
			0%	0%	0	5%	800.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	20%	3.800.000.000	Dinas Cikartarung
			2 rumah per desa	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	12	50.000.000	Bagian Pemerintahan (ADD), Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					4.280.026.000		5.236.363.800		15.969.549.200		7.921.530.300		5.095.820.600		38.503.289.900	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinsosnaker
	1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran. (SPM)	0 zone	4		6		16		8		6		40		
	2	Tingkat Waktu Tanggap daerah layahan wilayah manajemen kebakaran. (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PENATAAN RUANG																
Program Perencanaan Tata Ruang	1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Rencana Rincinya melalui peta analog dan digital. (SPM)	1 Perda RTRW	2 Perda RDTRK	225.000.000	1 Perda RDTRK	150.000.000	-	0	Evaluasi Perda RTRW	200.000.000	Evaluasi 3 Perda RDTRK	450.000.000	Updating Perda RTRW dan 3 Perda RDTRK	1.025.000.000	Bappeda
			Belum ada Perwali RTBL	-	0	Perwali RTBL	200.000.000	-	0	-	0	-	0	Perwali RTBL	200.000.000	Dinas Cikartarung
			0 dokumen	3	750.000.000	6	1.500.000.000	3	750.000.000	0	0	0	0	12	3.000.000.000	Dinas Cikartarung
	2	Tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)	1.777,70 Ha (9% dr luas wilayah Kota Batu	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	3.981,74 Ha 20%	100.000.000.000	Bappeda, Dinas Cikartarung, Bagian Perlengkapan, Distanhut
	3	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusun RTR dan program pemanfaatan ruang. (SPM)	14 kali	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	29 kali	375.000.000	Bappeda, Tim BKPRD
Program Pemanfaatan Ruang	1	Terlayannya masyarakat dalam mengurus izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR. (SPM)	32 rekomendasi	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	182	250.000.000	Bappeda, Tim BKPRD
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja. (SPM)	1 pengaduan	-	0	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	Bappeda, Tim BKPRD
	2	Pengendalian pemanfaatan lahan sesuai peruntukan.	12 dokumen	3	151.175.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	27	751.175.000	Dinas Cikartarung
PERENCANAAN PEMBANGUNAN																
Program Pengembangan Data/Informasi (Dedicated)	1	Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini. (Dedicated)	0	0	0	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.000.000.000	Semua SKPD
	2	Tersedianya data/informasi kondisi umum daerah yang valid dan terkini. (Dedicated)	3 dokumen	4	230.000.000	4	230.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	23	1.210.000.000	Bappeda

	3	Tersedianya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini. (Dedicated)	3 dokumen	3	270.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000	15	1.350.000.000	Bappeda, Bagian Organisasi
					48.295.333		168.124.500		58.436.000		154.280.700		141.416.000		570.552.533	Bagian Pemerintahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dedicated)	1	Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah. (Dedicated)														Bappeda
		Musrenbang forum SKPD	1 kali	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	6	100.000.000	
		Musrenbang forum Kota	1 kali	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6		
		Musrenbang RPJMD	-	1	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1		
		Musrenbang RPJPD	1 kali	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	0	
	2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda. (Dedicated)	1	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000.000	Bappeda
	3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada. (Dedicated)	5	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	10	440.000.000	Bappeda
	4	Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. (Dedicated)	36	36	360.000.000		0		0		0		0	72	360.000.000	Semua SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dedicated)	5	Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. (Dedicated)	36	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	216	25.000.000	Semua SKPD
	6	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran. (Dedicated)	5	5	240.000.000	5	250.000.000	5	270.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	30	1.360.000.000	Bappeda
					1.266.103.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		5.466.103.000	Bagian Keuangan
Program Kerjasama Pembangunan	1	Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. (Dedicated)	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	10	125.000.000	Bappeda
	2	Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD. (Dedicated)	75%	80%	0	85%	0	90%	0	95%	0	100%	0	100%	0	
Program Kerjasama Pembangunan	1	Cakupan kerjasama pembangunan.	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	Bappeda
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	Bappeda
	2	Jumlah wujud kerjasama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan antar daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.														Bappeda, Badan Penanaman Modal, Bagian Perekonomian
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	5	6	446.489.000	13	1.175.366.850	10	769.199.075	4	529.358.450	5	392.713.350	43	3.313.126.725	Bappeda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.	4	5	850.320.000	5	2.092.349.600	5	776.401.390	2	58.879.700	4	186.862.400	25	3.964.813.090	Bappeda

Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.	3	3	126.668.000	8	663.841.350	3	258.239.950	6	419.975.000	3	173.145.600	26	1.641.869.900	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.			0		656.100.000		0		0		0		656.100.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.			0		100.000.000		0		0		0		100.000.000	Bappeda
PERHUBUNGAN																
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan. (Dedicated)	0%			25%		25%		25%		25%		100%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan tipe B. (Dedicated)	0%			25%		25%		25%		25%		100%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	3	Persentase penyelesaian pembangunan terminal wisata. (Dedicated)	0%			10%		10%		10%		10%		40%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	4	Tersedianya halte pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM) (Dedicated)	6													Dishubkominfo
		Bangun baru		1	120.000.000	2	240.000.000	3	390.000.000	2	260.000.000	2	280.000.000	16	1.290.000.000	
		Rehabilitasi		2	240.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	240.000.000	
	5	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM)														
		Pemeliharaan terminal.	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	350.000.000	
		Penyusunan studi kelayakan.		0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	
	6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kota yang telah memiliki terminal. (SPM)	4	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	9	42.500.000	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Dedicated)	1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota/kabupaten. (SPM) (Dedicated)														Dishubkominfo
		Rambu-rambu.	411	96	91.200.000	160	152.000.000	160	152.000.000	160	152.000.000	161	152.950.000	1148	700.150.000	
		RPPJ.	80	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	130	200.000.000	
		Marka.	6056	500	92.500.000	1000	185.000.000	1500	277.500.000	2000	370.000.000	2500	462.500.000	7500	1.387.500.000	
		Guardrail.	1100	64	96.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1164	96.000.000	
		Penyeberangan Pelican Crossing dan zona selamat sekolah	0	1	125.063.000	2	250.126.000	2	250.126.000	2	250.126.000	3	375.189.000	10	1.250.630.000	
		Warning lamp.	10	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	18	400.000.000	
		Rehabilitasi/Peremajaan Traffic Light.	5	1	167.537.000	2	500.000.000	2	500.000.000	0	0	0	0	5	1.167.537.000	
		Pengadaan dan pemasangan CCTV.	0	0	0	4	500.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.250.000.000	
		Pengadaan dan pemasangan display peta jalan/jalan alternatif.	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	3	600.000.000	
	2	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, dan Pengelolaan Parkir pada kota. (SPM) (Dedicated)														Dishubkominfo
		Perencanaan transportasi.	1	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2	4.000.000	
		Traffic Light.	2	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	4	5.000.000	
		MRLL.	0	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0	2	8.000.000	
		Andalalin.	0	2	8.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0	4	16.000.000	
		PULANATA.	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	4	7.500.000	
		Intelejen Transportasi System (ITS).	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	3	7.500.000	

		Orientasi Lalu Lintas (OLL).	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	3	7.500.000	
		Manajemen Perlengkapan Jalan.	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	3	7.500.000	
		Manajemen Terminal Angkutas Jalan I.	0	1	2.500.000	2	5.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	5	12.500.000	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1				212.537.000		550.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.262.537.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji. (SPM)														Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		Pengadaan tanah.	0	0	0	1 Ha	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.000	
		Pembangunan kantor dan alat.	0	0	0	0	0	1 unit	15.000.000.000	0	0	0	0	1	15.000.000.000	
		Pengadaan alat pengujian portable.	0	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	1	1.500.000.000	
	2	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota. (SPM)	0	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	0	0	100	200.000.000	
	3	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. (SPM)	6	1	8.000.000	2	16.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	12	48.000.000	
	4	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. (SPM)	3	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	13	80.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota/kabupaten. (SPM)														Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		Batu-Selecta-Sumberbrantas.	70	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	175.000.000	
		Batu-Songgoriti.	38	38	19.000.000	38	19.000.000	38	19.000.000	38	19.000.000	38	19.000.000	38	95.000.000	
		Batu-Bumiaji.	8	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	20.000.000	
		Batu-Gunungsari.	7	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	17.500.000	
		Batu-Tolongrejo-Landungsari.	20	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	50.000.000	
		Batu-Junrejo-Landungsari.	25	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	62.500.000	
		Batu-Giripurno-Karangploso.	55	55	27.500.000	55	27.500.000	55	27.500.000	55	27.500.000	55	27.500.000	55	137.500.000	
		Batu-Landungsari.	85	85	42.500.000	85	42.500.000	85	42.500.000	85	42.500.000	85	42.500.000	85	212.500.000	
		Batu-Pujon-Ngantang-Kasembon.	46	46	23.000.000	46	23.000.000	46	23.000.000	46	23.000.000	46	23.000.000	46	115.000.000	
	2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota/kabupaten. (SPM)														
		Batu-Brau-Pandesari.	0	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	20.000.000	
		Sumberbrantas-Cangar.	0	0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	40.000.000	
		Junrejo-Dressel.	0	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	20.000.000	
Program Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abdul Rahman Saleh Malang	1	Jumlah nilai dukungan yang diberikan bagi peningkatan fasilitas operasional Bandara Abdul Rahman Saleh Malang.														Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (Dedicated)	1	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota. (SPM) (Dedicated)	883 KK	155	1.398.957.000	119	1.074.000.000	236	2.124.000.000	236	2.124.000.000	236	2.124.000.000	1865	8.844.957.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan

	2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (SPM) (Dedicated)	16 titik skala kawasan	16	2.612.500.000	20	3.300.000.000	18	3.000.000.000	18	3.000.000.000	18	3.000.000.000	106	14.912.500.000		
	3	Jumlah pemukiman kumuh yang terfasilitasi. (MDGs)	12 lokasi	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	16	4.000.000.000		
	4	Tersedianya infrastruktur sanitasi di lingkungan permukiman.	12 lokasi	0	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	16	8.000.000.000		
Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan (Dedicated)	1	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari. (SPM) (Dedicated)	38831 KK	418	1.530.966.000	600	11.132.640.000	150	3.900.000.000	150	3.900.000.000	150	3.900.000.000	40.299	24.363.606.000	Dinas Cikartarung, Kecamatan, Kelurahan	
	2	Persentase penduduk yg memiliki akses penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan. (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dedicated)	1	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (Dedicated)	6 paket alat pengolah sampah	3 paket alat pengolah sampah	189.964.650	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	398.961.200	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	438.857.320	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	482.743.052	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	531.017.357	4 gedung pengolah sampah dan 21 paket alat pengolah sampah	2.041.543.579	Kantor Lingkungan Hidup	
	2	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (SPM) (Dedicated)	12,8%	1,25%	1.999.175.000	4%	3.020.000.000	3%	4.693.650.000	1%	2.601.000.000	1%	520.762.500	24%	12.834.587.500	Dinas Cikartarung	
	3	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (SPM)	35%	1%	804.313.000	1%	762.392.000	1%	790.022.500	1%	782.411.500	1%	817.696.000	40%	3.956.835.000	Dinas Cikartarung	
	4	Jumlah wujud kerjasama pengelolaan persampahan antar daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.														Dinas Cikartarung	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. (SPM)	100%	-	-	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	92.820.000	Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan	
	2	Persentase jumlah titik pantau lingkungan hidup.	60 titik pantau	100%	23.445.000	100%	25.789.500	100%	28.368.450	100%	31.205.295	100%	34.325.825	100%	143.134.070		
	3	Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan.	3 Unit Instalasi Biogas Limbah Ternak	7	337.095.000	5	370.804.500	5	407.884.950	5	448.673.445	5	493.540.790	30	2.057.998.685		
	4	Status mutu air.															
		Pemantauan Kualitas Lingkungan															
		Analisis Kualitas Air Sungai dan Mata Air Di Kota Batu	0	-	-	2 Kali	58.575.000	2 Kali	64.432.500	2 Kali	70.875.750	2 Kali	77.963.325	8 kali	271.846.575		
		Titik pantauan analisis pengujian kualitas air sungai dan mata air	0	-		36 Titik Pantau		36 Titik Pantau		36 Titik Pantau		36 Titik Pantau		144 titik pantau			
		Pemanfaatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air	31 unit /alat														
		Jasa Pemeliharaan (reparasi dan kalibrasi) alat laboratorium		3	108.366.000	30	21.969.750	30	24.166.725	30	26.583.398	30	29.241.737	154	210.327.610		
		Pemeliharaan pengadaan Konstruksi Gedung (Pembuatan Meja Permanen Ruang Laboratorium)		3		0	0	0	0	0	0	0	-	3	-		
	5	Upaya penegakan hukum lingkungan.															
		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	120 pelaku usaha/ industri	50	33.324.500	50	36.656.950	50	40.322.645	50	44.354.910	50	48.790.400	370	203.449.405		

		Koordinasi Penyusunan Dokumen AMDAL	7 dokumen lingkungan	1	342.535.000	1	376.788.500	1	414.467.350	1	455.914.085	1	501.505.494	12 dokumen	2.091.210.429	
	6	Persentase luasan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. (SPM)	0	0	0	1 (Tahap kajian)	150.000.000	2 (Tahap kajian)	165.000.000	3 (Tahap kajian)	181.500.000	4 (Tahap kajian)	199.650.000	(Tahap Kajian)	696.150.000	Kantor Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Cakupan penghijauan sumber mata air.	0	1	328.193.100	1	361.012.410	1	397.113.651	1	436.825.016	1	480.507.518	5	2.003.651.695	Kantor Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Penghijauan kawasan sekitar sumber mata air.														
		Kajian kawasan imbuhan sumber mata air. 1 paket terdiri dari 5 sumber mata air.														
	2	Jumlah sumur resapan.	245 unit	20	215.707.300	20	237.278.030	30	261.005.833	30	287.106.416	30	315.817.058	375 unit	1.316.914.637	
		Pembangunan sumur resapan														
		Kajian kebutuhan sumur resapan														
	3	Upaya pengurangan resiko akibat terjadinya bencana, terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.	0	-	-	1 kampung iklim	150.000.000	1 kampung iklim	165.000.000	1 kampung iklim	181.500.000	1 kampung iklim	199.650.000	4 kampung iklim	696.150.000	
		Pengendalian Dampak perubahan iklim														
		Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
	4	Jumlah wujud kerjasama pengelolaan sumber mata air dengan daerah Malang Raya dan daerah berbatasan dengan Kota Batu.	0	Tersusun rencana pembangunan taman KEHATI	113.998.100	Luasan 5000 m2 tahap 1	125.397.910	Luasan 5000 m2 tahap 2	137.937.701	Fasilitas Pendukung Taman KEHATI	151.731.471	Pemeliharaan tahap 1	166.904.618	1	695.969.800	
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1	Pelibatan masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam. (Bambunisasi di sekitar sempadan sungai)	0	5000	184.435.000	5000	202.878.500	5000	223.166.350	5000	245.482.985	5000	270.031.284	25000 batang	1.125.994.119	Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1	Luasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengembangan taman kota, hutan kota, dan jalur hijau.	6,229 ha	0,5	809.000.000	2,2	2.344.500.000	2,2	2.439.000.000	3,6	5.655.000.000	2,2	1.545.000.000	16,929	12.792.500.000	Dinas Cikartarung
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1	Jumlah areal pemakaman.	1 TPU	1	108.325.000	0	0	1	535.000.000	0	0	0	0	2	643.325.000	Dinas Cikartarung
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Tersedianya akses informasi tentang sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup / Peningkatan akses informasi dan peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup														Kantor Lingkungan Hidup
		Sekolah Adiwiyata.	11	3	379.000.100	3	416.900.110	3	458.590.121	3	504.449.133	3	554.894.046	26	2.313.833.510	
		Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).	1	1	100.199.000	1	110.218.900	1	121.240.790	1	133.364.869	1	146.701.356	6	611.724.915	
		Website KLH yang memuat SLHD.	0	0	0	1	-	Up date data	-	Up date data	-	Up date data	-	Terbarunya website KLH		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. (SPM)	0	-	-	100%	29.975.000	100%	32.972.500	100%	36.269.750	100%	39.896.725	100%	139.113.975	Kantor Lingkungan Hidup
	2	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. (SPM)	0	-	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	464.100.000	

	3	Jumlah sarana pengendalian polusi.	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 IPAL Medis	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe, 1 IPAL Medis	315.778.600	3 IPAL UKM Tahu, 3 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	727.076.000	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	461.884.016	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	508.072.418	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	558.879.659	8 IPAL UKM Tahu, 8 IPAL UKM Tempe, 2 IPAL Medis, dan 4 insenerator	2.571.690.693	
PERTANAHAN																
Program Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1	Ketepatan waktu penyelesaian urusan pertanahan.	100%	100%	38.000.000	100%	43.000.000	100%	48.000.000	100%	53.000.000	100%	58.000.000	100%	240.000.000	Bagian Pemerintahan
	2	Ketertiban pengadministrasian urusan pertanahan.	100%	100%	38.000.000	100%	43.000.000	100%	48.000.000	100%	53.000.000	100%	58.000.000	100%	240.000.000	
	3	Konsistensi pemanfaatan lahan tanah sesuai dengan penetapan awal fungsinya.	60%	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	400.000.000	
	4	Konflik pertanahan.	60%	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	192.500.000	
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk. (SPM)	0	5000	42.000.000	5000	175.000.000	5000	175.000.000	5000	175.000.000	5000	175.000.000	25000	742.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan kepada Masyarakat.	0	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	500.000.000	
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	77,73	80	500.000.000	8,2	500.000.000	8,3	500.000.000	8,4	500.000.000	8,5	500.000.000	8,5	2.500.000.000	
Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	1	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran. (SPM)	4363	5000	62.000.000	5000	65.000.000	5000	70.000.000	5000	70.000.000	5000	70.000.000	29363	337.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2	Cakupan penerbitan Akta Perkawinan.	215	300	80.000.000	300	80.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1715	460.000.000	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan (Dedicated)	1	Persentase jumlah perempuan usia produktif yang menerima program pemberdayaan. (Dedicated)	0	100 orang	110.000.000	100 orang	115.000.000	100 orang	120.000.000	100 orang	125.000.000	80 orang	120.000.000	480 orang	590.000.000	BPMPKB, Dinas Pendidikan
	2	Persentase perempuan usia produktif yang mampu terlibat dalam bidang kerja baik secara mandiri maupun tidak mandiri. (Dedicated)	25%	5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	50%	250.000.000	
	3	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki pada SD/MI/SDLB. (MDGs)	0,948	0,01	96.500.000	0,01	110.000.000	0,01	120.000.000	0,01	130.000.000	0,01	140.000.000	1	596.500.000	
	4	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki pada SMP/MTs/SMPLB. (MDGs)	1	1	103.700.000	1	103.700.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	547.400.000	
	5	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki pada SMA/SMK/MA/SMLB. (MDGs)	1	1	121.700.000	1	121.700.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	643.400.000	
	6	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki di PT/PTA. (MDGs)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	150.000.000	
	7	Rasio guru perempuan terhadap laki-lakidi sekolah umum/sekolah agama yang bersertifikat pendidik. (MDGs)	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	1	930.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan pada Perempuan	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
	2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	

	3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (SPM)	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	150.000.000	
	4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	
	5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (SPM)	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	150.000.000	
	6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	
	7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. (SPM)	100%	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	175.000.000	
	8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. (SPM)	41.6%	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	85%	100.000.000	Dinsosnaker
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak.	1	Jumlah pembinaan terhadap lembaga pengarusutamaan jender dan anak yang terlibat dalam memberi perlindungan kepada perempuan dan anak.	25	25	25.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	40.000.000	15	60.000.000	125	185.000.000	BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Cakupan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.			159.418.000		184.127.790		212.667.597		245.631.075		283.703.892		1.085.548.354	BPMPKB
Program Pembinaan Masyarakat	1	Cakupan program pembinaan masyarakat.			119.165.500		137.636.153		158.969.756		183.610.068		212.069.629		811.451.106	BPMPKB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA																
Program Keluarga Berencana (Dedicated)	1	Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. (SPM) (Dedicated)	25,30	25	39.200.000	23	70.000.000	21	75.000.000	19	80.000.000	17	85.000.000	17	349.200.000	BPMPKB
	2	Cakupan sasaran pasangan usia subur yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM) (Dedicated)	79,58	80	64.150.500	82	75.000.000	84	75.000.000	86	80.000.000	88	80.000.000	88	374.150.500	
	3	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%. (Dedicated)	19,15	19	25.000.000	18	25.000.000	17	30.000.000	16	30.000.000	15	35.000.000	15	145.000.000	
	4	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan. (SPM) (Dedicated)	Rasio 1 : 3	Rasio 1 : 2	703.230.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	3.703.230.000	
	5	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan. (SPM) (Dedicated)	Rasio 1 : 1	Rasio 1 : 1 (tetap)	133.566.500	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	673.566.500	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat (terutama remaja). (Dedicated)	0	1	11.272.250	2	25.000.000	3	37.500.000	4	50.000.000	5	62.500.000	15	186.272.250	BPMPKB, Kelurahan
	2	Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi. (Dedicated)	0	55		100		150		200		250		755		
Program Pelayanan Kontrasepsi	1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. (SPM)	2,7	0	0	10%	75.000.000	15%	100.000.000	20%	150.000.000	25%	200.000.000	25%	525.000.000	BPMPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. (SPM)	56 Orang	0	0	100	30.000.000	150	45.000.000	200	60.000.000	250	75.000.000	756	210.000.000	BPMPKB, Kelurahan
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	1	Cakupan promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat.	0 kegiatan	1	39.200.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	249.200.000	BPMPKB, Kelurahan
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR	1	Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi. (Dedicated)	0	55 remaja	14.810.630	100	25.000.000	150	37.500.000	200	50.000.000	250	62.500.000	755	189.810.630	BPMPKB
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	1	Cakupan peningkatan penanggulangan narkoba dan PMS.	0	70 remaja	15.000.000	50	15.000.000	100	25.000.000	125	37.500.000	150	45.000.000	595	137.500.000	BPMPKB
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. (SPM)	0%	0%	0	51.785 KK	77.677.500	52.300 KK	104.600.000	52.900 KK	105.800.000	53.550 KK	107.100.000	53.550 KK	395.177.500	BPMPKB
	2	Cakupan penyediaan informasi data tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	100%	100%	23.624.751	200%	25.000.001	200%	30.000.001	200%	35.000.001	200%	40.000.001	200%	153.624.755	
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 87%. (SPM)	0	174 Orang	18.306.250	250 Orang	30.000.000	300 Orang	40.000.000	350 Orang	50.000.000	400 Orang	60.000.000	1474 Orang	198.306.250	BPMPKB
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	1	Cakupan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.	0	0	0	50	30.000.000	25	15.000.000	50	25.000.000	25	20.000.000	150	90.000.000	BPMPKB, Dinas Kesehatan
SOSIAL																
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (Dedicated)	1	Peningkatan persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. (SPM) (Dedicated)	64,00%	3,2%	40.785.000	3,2%	48.943.000	3,2%	58.730.000	3,2%	70.476.000	3,2%	84.571.000	80%	303.505.000	Dinsosnaker, Kecamatan, Kelurahan
	2	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. (SPM)	5,8%	6%	246.456.500	6%	325.542.000	6%	348.650.000	6%	343.380.000	6%	370.056.000	80%	1.634.084.500	
	3	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat. (SPM)	0%	8%	29.737.500	8%	35.685.000	8%	42.822.000	8%	51.386.000	8%	61.663.000	40%	191.556.000	
			0%	0%	0	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	40%	400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. (SPM)	0%	0%	0	25%	2.000.000.000	5%	500.000.000	5%	500.000.000	5%	500.000.000	40%	3.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. (SPM)	0%	31,04%	32.400.000	17,24%	18.000.000	17,24%	18.000.000	17,24%	18.000.000	17,24%	18.000.000	100%	104.400.000	Dinsosnaker
	2	Persentase sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. (SPM)	52,3%	5,54%	42.267.500	5,54%	200.721.000	5,54%	210.865.200	5,54%	223.038.240	5,54%	237.645.888	80%	914.537.828	

	3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. (SPM)	0	9	0	5	0	5	0	5	0	5	0	29	0	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	1,93%	2,63%	185.895.000	5,94%	265.685.000	5,12%	287.822.000	5,94%	281.386.000	5,12%	306.663.000	26,68%	1.327.451.000	Dinsosnaker
Program Pembinaan Anak Terlantar	1	Cakupan pembinaan Anak Terlantar	1,93%	4,95%	74.375.000	4,95%	75.000.000	4,95%	75.000.000	4,95%	75.000.000	4,95%	75.000.000	26,66%	374.375.000	Dinsosnaker
Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	1	Cakupan pembinaan panti asuhan/ jompo.	52,30%	0,65%	37.592.500	5,54%	45.111.000	5,54%	54.133.200	5,54%	64.959.840	5,54%	77.951.800	75,11%	279.748.340	Dinsosnaker
TENAGA KERJA																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK). (Dedicated)	0%	75%	10.000.000.000	25%	500.000.000	-	0	-	0	-	0	100%	10.500.000.000	Dinas Cikartarung
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dedicated)	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (SPM) (Dedicated)	1.9%	2%	3.000.000.000	2%	675.000.000	2%	75.000.000	2%	80.000.000	2%	85.000.000	11.9%	3.915.000.000	Dinsosnaker
	2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis masyarakat. (SPM) (Dedicated)	0.8%	1%	136.509.000	1%	155.500.000	1%	167.800.000	1%	181.500.000	1%	186.000.000	5.8%	827.309.000	
	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan. (SPM) (Dedicated)	43.75%	1.25%	192.875.000	1.25%	247.345.000	1.25%	255.829.500	1.25%	264.912.450	1.25%	274.653.695	50%	1.235.615.645	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Dedicated)	1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. (SPM) (Dedicated)	10%	10%	209.241.500	10%	178.930.000	10%	185.000.000	10%	232.000.000	10%	214.000.000	60%	1.019.171.500	Dinsosnaker
	2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek. (SPM) (Dedicated)	35.7%	0	0	0	0	14.3%	85.000.000	0%	0	0	0	50%	85.000.000	
	3	Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM) (Dedicated)	0%	15%	53.380.000	15%	85.000.000	0	0	15%	85.000.000	0	0	45%	223.380.000	
	4	Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM) (Dedicated)	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	90.000.000	50%	90.000.000	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Cakupan upaya peningkatan kesempatan kerja.	0%	5%	250.467.000	3,34%	324.070.000	3,34%	340.227.000	3,34%	357.749.700	3,34%	376.774.671	18,36%	1.649.288.371	
KOPERASI UKM																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). (Dedicated)	0%	100%	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	3.000.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Dinas Cikartarung
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Dedicated)	1	Jumlah UKM yang mengakses sistem informasi dan sumber daya produktif. (Dedicated)	40 UKM	5		5		5		5		5		60		Dinas Koperindag, Kecamatan, Kelurahan
	2	Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) (Dedicated)	2	-	144.886.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	5	275.000.000	10	1.244.886.000	
	3	Jumlah mitra kerja yang menjadi pendaping kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) (Dedicated)	1	-		1		1		1		4				
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM (Dedicated)	1	Jumlah peningkatkan usaha skala mikro ke kecil. (Dedicated)	2.066 usaha kecil	25		25		25		25		25		2.191		Dinas Koperindag, Kecamatan, Kelurahan
	2	Persentase jumlah UKM yang mendapat fasilitas dan pendampingan. (Dedicated)	24%	3%	150.000.000	2%	235.000.000	2%	235.000.000	3%	235.000.000	2%	285.000.000	36%	1.140.000.000	
	3	Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional. (Dedicated)	1	-		1		1		1		4		8		

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Dedicated)	1	Jumlah koperasi aktif. (Dedicated)	122	3	266.478.400	3	590.000.000	3	515.000.000	3	515.000.000	3	515.000.000	137	2.401.478.400	Dinas Koperindag, Kecamatan, Kelurahan
	2	Jumlah lembaga koperasi yang mendapat pembinaan. (Dedicated)	122	4		4		4		4		142				
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1	Jumlah UMKM formal.	2335 UKM formal	150	464.424.000	150	5.050.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	3085	5.664.424.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
PENANAMAN MODAL																
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Dedicated)	1	Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. (SPM) (Dedicated)			43.500.000		100.000.000		50.000.000		75.000.000		50.000.000		318.500.000	KPPT, Bagian Perekonomian
			0	2000 leaflet Profil Peluang Investasi		1 subdomain website sistem informasi Investasi		2000 leaflet Profil Peluang Investasi		2000 leaflet profil peluang investasi sektor UMKM pendukung pariwisata & pertanian		2000 leaflet profil peluang investasi		1 subdomain website, 8000 lembar leaflet; 1500 booklet; 1000 DVD profil peluang investasi di Kota Batu		
			0	500 booklet Profil Peluang Investasi		500 DVD Profil Peluang Investasi		500 booklet Profil Peluang Investasi		500 DVD profil peluang investasi sektor UMKM pendukung pariwisata & pertanian		500 booklet profil peluang investasi				
	2	Cakupan informasi berbagai potensi sumber daya unggulan daerah. (Dedicated)	0	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang pertanian	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang seni, budaya dan pariwisata	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang perdagangan dan jasa UMKM	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang industri UMKM	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang pertanian dan pariwisata	50.000.000	10000 lembar leaflet dan 2500 booklet profil potensi sumber daya Kota Batu	250.000.000	
	3	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) (Dedicated)	2	150 Pengusaha Hotel dan Restoran	50.000.000	100 Pengusaha Periklanan	100.000.000	350 Pengusaha jasa impresariat, villa, dan homestay	100.000.000	250 Pengusaha Home Industri dan Pedagang UMKM,	100.000.000	250 Pengusaha Sektor Informal Pendukung Pariwisata dan Pertanian	100.000.000	1100 Pelaku Usaha di berbagai sektor Pendukung Pariwisata dan Pertanian	450.000.000	
4	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM) (Dedicated)	0	25 % dari seluruh perizinan Penanaman Modal	50.000.000	100 % dari seluruh perizinan Penanaman Modal	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100 % dari seluruh perizinan Penanaman Modal	100.000.000		
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat duni a usaha. (SPM) (Dedicated)	0	150 Pengusaha Hotel dan Restoran	100.000.000	100 Pengusaha Periklanan	100.000.000	350 Pengusaha jasa impresariat, villa, dan homestay	100.000.000	250 Pengusaha Home Industri dan Pedagang UMKM,	100.000.000	250 Pengusaha Sektor Informal Pendukung Pariwisata dan Pertanian	100.000.000	1100 Pelaku Usaha di berbagai sektor Pendukung Pariwisata dan Pertanian	500.000.000		

	6	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM) (Dedicated)	38 Jenis Izin teknis sektoral	24 izin Teknis Sektoral dan PM, 5 Tanda Daftar Bidang PM	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 izin Teknis Sektoral dan PM, 5 Tanda Daftar Bidang PM	100.000.000	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota. (SPM) (Dedicated)	2	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 1 kali gelar pameran	136.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus	150.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 2 kali gelar pameran	200.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 2 kali gelar pameran	200.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 2 kali gelar pameran	200.000.000	50 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 7 kali gelar pameran	886.000.000	KPPT, Bagian Perekonomian
	2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi (KUMKM) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM) (Dedicated)	1	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	12 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	1.000.000.000	
KEBUDAYAAN																
Program Pengembangan Nilai Budaya (Dedicated)	1	Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat. (Dedicated)	0	1	213.707.500	1	636.987.500	1	611.987.500	1	600.862.500	1	640.862.500	5	2.704.407.500	Dispartabud, Kelurahan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Cakupan kajian seni. (SPM)	4	8	30.000.000	8	35.000.000	8	40.000.000	8	45.000.000	8	50.000.000	44	200.000.000	Dispartabud
	2	Cakupan sumber daya manusia kesenian. (SPM)	1	2		2		2		2		2		11		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Cakupan fasilitasi seni. (SPM)	1	3	170.000.000	3	370.950.000	3	383.650.000	3	397.120.000	3	411.437.000	16	1.733.157.000	Dispartabud, Kecamatan, Kelurahan
	2	Cakupan gelar seni. (SPM)	2	3	156.000.000	3	392.140.000	3	402.140.000	3	412.140.000	3	422.140.000	17	1.784.560.000	
	3	Misi kesenian. (SPM)	1	2	100.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000	2	145.000.000	11	650.000.000	
	4	Cakupan tempat kesenian. (SPM)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	5	Cakupan organisasi kesenian. (SPM)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	6	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya.			50.571.000		58.409.505		67.462.978		77.919.740		89.997.300		344.360.523	BPMPKB
Program Pembinaan Organisasi Pemuda dalam Bidang Kesenian					0		15.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		75.500.000	Disparbud, Kecamatan, Kelurahan
PEMUDA DAN OLAHRAGA																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga. (Dedicated)	0	0	0	50%	600.000.000	50%	15.000.000.000	0	0	0	0	1	15.600.000.000	Dispora, Dinas Cikartarung

	2	Jumlah sarana prasarana olahraga khususnya ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga. (Dedicated)	2 kegiatan (pemeliharaan dan peningkatan sarpras)	2	114.850.000	2	137.820.000	2	165.384.000	2	198.460.000	2	238.150.000	12	854.664.000	Dispora, Kecamatan, Kelurahan
			16 unit	1	615.275.000	3	9.100.000.000	3	9.100.000.000	3	9.100.000.000	3	9.100.000.000	29	37.015.275.000	Dinas Cikartarung
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1	Jumlah kegiatan pemuda maupun organisasi kepemudaan yang memberi manfaat bagi masyarakat.	1 kegiatan	1	35.338.000	1	42.405.000	1	50.886.000	1	61.064.000	1	73.276.000	6	262.969.000	Dispora, Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1	Jumlah inovasi dan prestasi pemuda maupun kelompok pemuda.	1 kegiatan	1	29.088.000	1	34.905.000	1	41.886.000	1	50.264.000	1	60.316.000	6	216.459.000	Dispora, Kecamatan, Kelurahan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1	Jumlah pembinaan olahraga prestasi.	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	50.058.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SMP,SMA, & pembelian alat OR 3 cabor)	60.070.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	72.084.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SMP,SMA, & pembelian alat OR 3 cabor)	86.500.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	103.800.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, SMP,SMA, & pembelian alat OR 18 cabor)	372.512.000	Dispora, Dinas Pendidikan
	2	Jumlah event olahraga yang terselenggara di Kota Batu dengan baik.	1 event	1	311.235.000	1	342.360.000	2	376.595.000	2	414.255.000	2	455.680.000	9	1.900.125.000	
	3	Jumlah gerakan olahraga massal masyarakat.	1	0	78.000.000	1	85.000.000	0	95.000.000	1	115.000.000	0	125.000.000	3	498.000.000	
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					59.652.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		96.652.000	Disdikpora, Kecamatan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial keagamaan masyarakat. (Dedicated)	2	2	100.605.000	2	110.605.000	2	120.605.000	2	130.605.000	2	140.605.000	12	603.025.000	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan
	2	Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. (Dedicated)	3	3	486.336.000	3	534.969.600	3	588.466.560	3	647.313.216	18	712.044.538	180%	2.969.129.914	Bagian Kesra
	3	Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam proses pembangunan daerah. (Dedicated)	60%	70%	400.000.000	80%	450.000.000	85%	500.000.000	90%	550.000.000	95%	600.000.000	95%	2.500.000.000	Bagian Kesra
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dedicated)	1	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB). (Dedicated)	2	40%	21.000.000	50%	23.100.000	60%	25.410.000	70%	27.951.000	80%	30.746.100	80%	128.207.100	Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Kesra
	2	Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui FKUB. (Dedicated)	0	30%	40.902.500	20%	60.902.500	10%	80.902.500	5%	100.902.500	2,5%	120.902.500	2%	404.512.500	Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Kesra
Program Pendidikan Politik Masyarakat (Dedicated)	1	Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. (Dedicated)	1	1	132.079.000	1	145.286.900	1	159.815.590	1	175.797.149	1	193.376.864	6	806.355.503	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan
	2	Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik. (Dedicated)	150	150		150		150		150		150		900		
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan terhadap partai politik. (Dedicated)	0	1	75.000.000	2	150.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	6	450.000.000	Kantor Kesbangpolinmas
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Dedicated)	1	Jumlah upaya pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. (Dedicated)	1 (Komunitas Intelegej Daerah / KOMINDA)	1	257.050.000	1	282.755.000	1	311.030.500	1	342.133.550	1	376.346.905	6	1.569.315.955	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (Dedicated)	1	Jumlah satuan/kelompok masyarakat pelaksana sistem keamanan lingkungan. (Dedicated)	24	24	17.660.000	24	19.426.000	24	21.368.600	24	23.505.460	24	25.856.000	24	107.816.060	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan
	2	Rasio ketersediaan pos keamanan lingkungan. (Dedicated)	220	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	320	1.500.000.000	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Dedicated)	1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat. (SPM) (Dedicated)	1768 anggota linmas	1768 (tetap)	78.000.000	1768 (tetap)	78.780.000	1768 (tetap)	86.658.000	1768 (tetap)	95.323.800	1768 (tetap)	104.856.180	1768 (tetap)	443.617.980	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan
	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan. (SPM) (Dedicated)	100%	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	38.885.000	100%	42.773.500	100%	47.050.850	100%	202.209.350	
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	1	Cakupan pemberantasan barang kena cukai ilegal.	90%	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	500.000.000	Satpol PP, Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1				29.835.000		33.835.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		123.670.000	Bagian Kesra
Program Pembinaan Kemasyarakatan	1				120.330.500		180.613.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.943.500	Bagian Kesra
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1				150.000.000		200.000.000		0		0		0		350.000.000	Bagian Humas dan Protokol
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1				85.000.000		19.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		179.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam, Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Dedicated)	1	Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (Dedicated)	100%	100%	1.895.174.000	100%	2.370.000.000	100%	2.405.550.000	100%	2.489.922.000	100%	2.553.214.000	100%	11.713.860.000	Bagian Umum
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Dedicated)			100%	100%	5.211.096.000	100%	5.741.650.800	100%	5.732.205.600	100%	5.992.760.400	100%	6.253.878.700	100%	28.931.591.500	Sekretariat Dewan
	1	Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran.														
	2	Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan.														
	3	Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah.														
	4	Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.														
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (Dedicated)	1	Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)	18%	10%	60.000.000	10%	60.000.000	10%	60.000.000	10%	60.000.000	10%	60.000.000	68%	300.000.000	Inspektorat

		Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas laki-laki yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)	10%	6%		6%		6%		6%		6%		40%		
		Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas perempuan yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)	8%	4%		4%		4%		4%		4%		28%		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. (Dedicated)	1	Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)	50%	10%	71.630.000	10%	100.000.000	10%	150.000.000	10%	150.000.000	10%	190.000.000	100%	661.630.000	Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Dishubkominfo
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)	40%	6%		6%		6%		6%		6%		70%		
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)	10%	4%		4%		4%		4%		4%		30%		
	2	Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Dedicated)	30%	10%	104.000.000	10%	114.400.000	10%	125.840.000	10%	138.424.000	30%	179.951.200	100%	662.615.200	Bagian Organisasi
		Pengembangan software analisis jabatan.	0	1	35.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35.900.000	
		Sistem tata laksana komunikasi kepala SKPD.	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	
	3	Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi PATEN. (Dedicated)	0%	0	0	100%	45.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	45.000.000	Dishubkominfo
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Dedicated)	1	Cakupan peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Dedicated)	100%	21%	3.037.934.500	18%	2.566.934.500	19%	2.774.452.950	21%	3.002.723.245	22%	3.253.820.569	100%	14.635.865.764	Bagian Keuangan
					1.065.050.000		2.990.579.000		2.749.136.900		2.476.050.590		2.864.831.147		12.145.647.637	Dinas Pendapatan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. (Dedicated)	1	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. (Dedicated)	100%	100%	138.556.000	100%	138.556.000	100%	152.441.600	100%	167.652.760	100%	184.418.036	100%	781.624.396	Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. (Dedicated)	1	Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. (Dedicated)	100%	100%	44.464.250	100%	45.575.500	100%	46.715.250	100%	47.883.100	100%	49.080.200	100%	233.718.300	Bagian Perekonomian
					28.450.000		31.295.000		34.425.000		37.867.000		41.653.700		173.690.700	Bagian Pemerintahan
	2	Cakupan kerjasama dengan dunia usaha.	100%	100%	9.755.300	100%	9.990.100	100%	10.250.300	100%	10.505.400	100%	10.768.000	100%	51.269.100	
	3	Fasilitasi bagi SKPD untuk melakukan kegiatan bersama.	100%	100%	17.175.000	100%	17.600.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	100%	18.950.000	100%	90.225.000	

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (Dedicated)	1	Persentase capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. (Dedicated)	10,38%	1,46%	917.629.000	8,94%	1.498.025.900	10,76%	1.638.652.200	12,57%	1.779.278.500	14,38%	1.919.904.800	58,50%	7.753.490.400	Inspektorat
	2	Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0%	0%	0	100%	70.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	250.000.000	Inspektorat, Bagian Pemerintahan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dedicated)	1	Persentase capaian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. (Dedicated)	1,03%	3,66%	18.147.000	19,74%	80.323.700	21,78%	88.174.600	23,81%	96.025.500	25,84%	103.876.400	95,86%	386.547.200	Inspektorat
	2	Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan PATEN. (Dedicated)	0	0	0	Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Inspektorat, Bagian Pemerintahan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1	Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada camat terkait PATEN. (Dedicated)	0	0	0	Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Bagian Hukum
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	Jumlah SKPD yang menyusun dokumen anjab.	100%	100%	47.530.000	100%	50.000.000	100%	53.000.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	263.530.000	Bagian Organisasi
	2	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya.			46.260.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		266.260.000	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah draft Perda SOTK.	0	4		0		1		0		0		5		
		Jumlah draft Perwali Tusi.	0	11		0		23		0		0		34		
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan.	0	0		1		0		1		1		3		
	3	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan standar pelayanan minimum.			21.340.000		22.000.000		24.000.000		27.000.000		30.000.000		124.340.000	Bagian Organisasi
	4	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah mendapatkan sertifikat ISO.			102.000.000		75.000.000		40.000.000		125.000.000		80.000.000		422.000.000	Bagian Organisasi
		Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan ISO.	0	1		0		0		1		0		2		
		Jumlah SKPD yang telah mendapat sertifikat ISO.	0	0		1		0		0		1		2		
		Jumlah SKPD yang difasilitasi untuk evaluasi ISO.	0	0		0		1		0		0		1		
	5	Jumlah pembinaan untuk meningkatkan budaya kerja organisasi.	0	0	0	1	80.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	0	0	3	230.000.000	Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Jumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pelayanan yang telah menyusun SOP	0	42	34.925.000	42	20.000.000	42	25.000.000	42	27.000.000	42	29.000.000	42	135.925.000	Bagian Organisasi
	2	Keikutsertaan SKPD dalam pameran pelayanan publik.	0	1	91.480.000	0	0	1	95.000.000	0	0	1	98.000.000	3	284.480.000	Bagian Organisasi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	Cakupan penataan daerah otonomi baru.	0	0	5.314.003.630	0	7.984.567.850	1	3.735.595.985	1	5.619.298.950	2	5.789.418.150	4	28.442.884.565	Bagian Pemerintahan
Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah	1				127.876.695		142.350.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		720.226.695	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi	1				50.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		260.000.000	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1				173.885.000		65.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		388.885.000	Bagian Organisasi
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1				0		5.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	

KEPEGAWAIAN																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dedicated)	1	Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & prajabatan (Dedicated)	2.803	90%	1.407.770.000	85%	1.245.000.000	80%	1.100.000.000	85%	1.845.000.000	87%	1.900.000.000	85%	7.497.770.000	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan (Dedicated)	0	60%	844.662.000	55%	684.750.000	50%	550.000.000	50%	922.500.000	47%	893.000.000	50%	3.894.912.000	
		Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan (Dedicated)	0	30%	422.331.000	30%	373.500.000	30%	330.000.000	35%	645.750.000	40%	760.000.000	30%	2.531.581.000	
	2	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)	545	90%	1.008.488.350	80%	778.143.250	78%	553.143.250	80%	728.143.250	80%	728.143.250	80%	3.796.061.350	
		Persentase jumlah aparatur laki-laki yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)	0	65%	655.517.428	50%	389.071.625	48%	265.508.760	55%	400.478.788	50%	364.071.625	50%	2.074.648.226	
		Persentase jumlah aparatur perempuan yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)	0	35%	352.970.922	30%	223.442.975	30%	165.942.975	25%	182.035.812	30%	218.442.975	30%	1.142.835.659	
	3	Persentase capaian perumusan dan implementasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya. (Dedicated)	0	33%	70.265.000	0	0	67%	55.000.000	0	0	0	0	100%	125.265.000	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Program Pendidikan Kedinasan (Dedicated)	1	Persentase jumlah Aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional (Dedicated)	81	90%	28.400.000	80%	20.000.000	85%	25.000.000	90%	30.000.000	95%	35.000.000	90%	138.400.000	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. (Dedicated)	0	60%	17.040.000	55%	11.000.000	60%	15.000.000	50%	15.000.000	50%	17.500.000	50%	75.540.000	
		Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. (Dedicated)	0	30%	8.520.000	25%	5.000.000	25%	6.350.000	40%	12.000.000	45%	15.750.000	40%	47.620.000	
	2	Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan pelaksana PATEN. (Dedicated)	0	0	0	Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Dedicated)	1	Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. (Dedicated)	205	80%	138.949.350	90%	190.000.000	95%	215.000.000	96%	245.000.000	98%	270.000.000	95%	1.058.949.350	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. (Dedicated)	0	50%	69.474.675	65%	123.500.000	60%	129.000.000	55%	134.750.000	50%	135.000.000	60%	591.724.675	
		Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. (Dedicated)	0	30%	41.684.805	25%	47.500.000	35%	75.250.000	41%	100.450.000	48%	129.600.000	45%	394.484.805	
	2	Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur pelaksana PATEN. (Dedicated)	0	0%	0	100%	25.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Pemerintahan
	3	Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0	0		Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
	4	Persentase cakupan pembinaan pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0%	0%	0	100%	70.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	250.000.000	

Program Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	1				60.000.000		215.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		875.000.000	Bagian Organisasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Dedicated)	1	Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)	0%	0	0	86%	115.000.000	66%	160.000.000	0	0	50%	80.000.000	100%	355.000.000	Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa laki-laki yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)	0%			60%		50%		0%		45%		100%		
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa perempuan yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)	0%			16%		16%		0%		5%		100%		
	2	Persentase keterpenuhan sarana kerja bagi pemerintahan desa. (Dedicated)	0	0	0	100%	50.000.000	100%	35.000.000	0	0	0	0	100%	85.000.000	
	3	Pendampingan ADD. (Dedicated)	96%	97%	80.525.000	97%	80.525.000	98%	85.525.000	99%	86.520.000	100%	90.000.000	100%	423.095.000	
	4	Pelantikan BPD. (Dedicated)	100%	100%	169.465.000	1	186.411.500	0	0	0	0	0	0	100%	355.876.500	
	5	Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa. (Dedicated)	100%	100%	142.625.000	100%	25.931.818	0	0	100%	25.931.818	100%	12.966.900	100%	207.455.536	
	6	Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. (Dedicated)	0	0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	60.000.000	
7	Jumlah pemerintahan desa yang telah menerapkan standart pelayanan. (Dedicatted)	19 desa	19		19		19		19		19		114			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. (Dedicated)	1	Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa. (Dedicated)	96%	97%	54.540.000	97%	55.540.000	98%	55.540.000	99%	55.540.000	100%	55.540.000	100%	276.700.000	Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Cakupan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.			230.673.900		266.428.355		307.724.749		355.422.086		410.512.509		1.570.761.599	BPMPKB
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	Cakupan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.			123.750.000		142.931.250		165.085.594		190.673.861		220.228.309		842.669.014	BPMPKB
STATISTIK																
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	1	Tingkat ketersediaan data/ informasi/statistik daerah.	3 jenis dokumen	3	225.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000		1.525.000.000	Bappeda, BPS, Kelurahan
	2	Tingkat kebaruan data/ informasi/statistik daerah yang tersedia.	3 jenis dokumen	3		4		4		4		4				
KEARSIPAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan depo arsip. (Dedicated)	0%	0	0	40%	5.000.000.000	30%	3.000.000.000	30%	3.000.000.000	0	0	1	11.000.000.000	Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi, Dinas Cikartarung

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1	Jumlah dokumen/arsip daerah yang terekam secara elektronik.	17 berkas	24	14.000.000	37	19.000.000	59	24.000.000	103	29.000.000	196	35.000.000	392	121.000.000	Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi
	2	Peningkatan jumlah dokumen/arsip daerah yang ditata dengan baik dan aman.	3.000 berkas	4.800	10.000.000	4.950	12.000.000	5.250	14.000.000	5.400	17.000.000	5.700	20.000.000	6.000	73.000.000	
	3	Tingkat kemudahan dalam mencari dokumen/arsip daerah yang dibutuhkan.	4.000 berkas	50%	10.000.000	65%	15.000.000	75%	20.000.000	80%	30.000.000	90%	40.000.000	90%	115.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan informasi.	100%	100%	193.000.000	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	438.000.000	
	2	Jumlah keluhan atas kualitas pelayanan informasi.	32 surat	30	0	25	0	20	0	17	0	15	0	15	0	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.	1	Desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : (SPM)														Dishubkominfo
		Media baru seperti website.	1x / hari	2x / hari	25.000.000	3x / hari	40.000.000	4x / hari	50.000.000	5x / hari	60.000.000	6x / hari	70.000.000	70x / hari	245.000.000	
		Media massa, seperti majalah, radio, dan televisi.	2x / tahun	3x / tahun	30.000.000	5x / tahun	50.000.000	7x / tahun	70.000.000	9x / tahun	90.000.000	12x / tahun	120.000.000	12x / tahun	360.000.000	
		0 x tayang advetorial sosialisasi bidang cukai		10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	80	400.000.000	Bagian Humas dan Protokol
		0 x tayang advetorial kegiatan pemerintahan		45	175.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	365	1.175.000.000	
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1x / tahun	2x / tahun	50.000.000	5x / tahun	250.000.000	8x / tahun	200.000.000	9x / tahun	225.000.000	12x / tahun	300.000.000	12x / tahun	1.025.000.000	Dishubkominfo
		Media interpersonal seperti sarasehan dan lokakarya.	1x / tahun	2x / tahun	60.000.000	4x / tahun	120.000.000	8x / tahun	240.000.000	10x / tahun	300.000.000	12x / tahun	360.000.000	12x / tahun	1.080.000.000	
		Media luar ruang seperti buletin, brosur,	2x / tahun	3x / tahun	30.000.000	5x / tahun	50.000.000	7x / tahun	70.000.000	9x / tahun	90.000.000	12x / tahun	120.000.000	12x / tahun	360.000.000	Bagian Humas dan Protokol
		0 eksemplar majalah Panderman		4000	104.400.000	4000	125.000.000	4000	125.000.000	4000	125.000.000	4000	125.000.000	20000	604.400.000	
		0 kliping berita dan kepustakaan kehumasan		1	50.280.000	1	50.280.000	1	50.280.000	1	50.280.000	1	50.280.000	5	251.400.000	
		0 keping DVD peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah kota		1000	103.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	103.720.000	
		0 Buku kiprah		0		500		500		500		500		2000		
		0 keping DVD Selayang Pandang Kota Batu		0	0	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	4000	600.000.000	
		0 media bando jalan		0		20		20		20		20		80		
	0 media baliho		46	96.000.000	33	150.000.000	33	150.000.000	33	150.000.000	33	150.000.000	178	696.000.000		
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. (SPM)	4 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	119.000.000	8 desa/ kelurahan	160.000.000	12 desa/ kelurahan	240.000.000	20 desa/ kelurahan	400.000.000	24 desa/ kelurahan	480.000.000	74 desa/ kelurahan	1.399.000.000	Dishubkominfo, Bagian Perlengkapan	
3	Jumlah sarana prasarana teknologi komunikasi informasi yang dikembangkan dalam lingkup pemerintahan.	4 titik hotspot	5 titik hotspot	127.000.000	7 titik hotspot	182.000.000	10 titik hotspot	260.000.000	15 titik hotspot	390.000.000	30 titik hotspot	780.000.000	71 titik hotspot	1.739.000.000		
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan kota hingga tingkat desa maupun kelurahan yang mendapat peningkatan kemampuan.	15	2	20.000.000	3	30.000.000	2	20.000.000	3	30.000.000	2	30.000.000	27	130.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1				260.000.000		470.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.230.000.000	Dishubkominfo, Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Informasi Pelayanan Publik	1				100.000.000		247.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.097.000.000	Bagian Humas dan Protokol
PERPUSTAKAAN																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Jumlah koleksi buku perpustakaan umum.	8.869 eksemplar	9.828	85.000.000	10.746	90.000.000	11.630	95.000.000	12.489	100.000.000	13.369	110.000.000	66,931	480.000.000	Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi, Kelurahan
	2	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan.	14 perpustakaan desa/ kelurahan	16	10.000.000	0	0	19	15.000.000	0	0	21	10.000.000	70	35.000.000	
	3	Jumlah publikasi pengembangan budaya baca.	10 baliho	15	7.250.000	0	0	19	7.000.000	26	10.000.000	31	15.000.000	101	39.250.000	
URUSAN PILIHAN																
PERTANIAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Agrobisnis. (Dedicated)	0%	0	0	10%	2.000.000.000	15%	3.000.000.000	10%	4.000.000.000	15%	5.000.000.000	50%	14.000.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Cikartarung
Program Pengembangan Pertanian Organik (Dedicated)	1	Jumlah paket pengembangan kawasan organik. (Dedicated)	4	2	6.000.000.000	2	6.000.000.000	2	6.500.000.000	2	7.000.000.000	2	7.500.000.000	14	33.000.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah paket pelatihan pertanian organik. (Dedicated)	0	1	55.000.000	1	66.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	72.000.000	5	331.000.000	
	3	Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik. (Dedicated)	9	3		3		3		4		3		25		
Program Pengembangan Agrobisnis (Dedicated)	1	Ketersediaan informasi produksi pertanian/perkebunan. (Dedicated)	0 paket	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5 paket	350.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (Dedicated)	1	Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian. (Dedicated)	0 paket pekerjaan	2	140.000.000	2	165.000.000	2	192.500.000	2	220.000.000	2	275.000.000	10 paket pekerjaan	992.500.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) (Dedicated)	1	Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM) (Dedicated)	50%	75%	0	80%	50.000.000	85%	60.000.000	90%	75.000.000	95%	85.000.000	90%	270.000.000	Kantor Ketahanan Pangan
	2	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah. (SPM) (Dedicated)	15%	20%	0	40%	50.000.000	50%	60.000.000	70%	70.000.000	90%	80.000.000	90%	260.000.000	
	3	Ketersediaan energi dan protein per kapita. (SPM)	25%	35%	89.330.000	45%	100.000.000	65%	120.000.000	75%	135.000.000	85%	155.000.000	85%	599.330.000	
	4	Penguatan cadangan pangan. (SPM)	30%	40%	75.000.000	50%	86.000.000	60%	99.000.000	70%	114.000.000	80%	130.000.000	80%	504.000.000	
	5	Skor pola harapan pangan (PPH). (SPM)	92%	0	0	95%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	340.000.000	
	6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. (SPM)	20%	0	0	10%	80.000.000	20%	80.000.000	25%	85.000.000	30%	100.000.000	85%	345.000.000	
	7	Penanganan daerah rawan pangan. (SPM)													0	
		Pemanfaatan pekarangan Untuk pengembangan pangan (Pengembangan KRPL)	20%	30%	100.000.000	40%	115.000.000	50%	135.000.000	60%	155.000.000	70%	175.000.000	70	680.000.000	
		Pembuatan Peta Kerawanan Pangan	100%	100%	100.000.000	0	0	0		100%	115.000.000	0	0	0	215.000.000	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan (Dedicated)	1	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang mendapat update pengetahuan pertanian. (Dedicated)	0	0	0	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	825.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Ketersediaan sarana penyuluhan pertanian. (Dedicated)	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Jumlah pelatihan peningkatan kesejahteraan petani.	2 paket SL PHT	8		8		8		8		32		Dinas Pertanian dan Kehutanan		
	2	Jumlah petani yang mendapat pelatihan peningkatan kesejahteraan petani.	120 petani	480 petani	440.000.000	480 petani	528.000.000	480 petani	552.000.000	480 petani	552.000.000	480 petani	576.000.000		2520 petani	2.648.000.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan.	4%	4%	1.250.000.000	4%	1.900.000.000	4%	1.900.000.000	4%	2.000.000.000	4%	2.000.000.000	20%	9.050.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah bantuan bibit unggul yang diberikan kepada petani.	0 paket	1	100.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	5	1.200.000.000	
	3	Jumlah bantuan sarana produksi.	1	2	190.000.000	2	300.000.000	3	325.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	14	1.565.000.000	
	4	Jumlah benih dan penunjang perbenihan.	3 paket	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	28	1.500.000.000	
	5	Jumlah pelatihan peningkatan produksi pertanian.	0 paket SL GAP	2		2		2		2		2		10		
	6	Jumlah petani yang mendapat pelatihan peningkatan produksi pertanian.	0 petani	120	70.000.000	120	70.000.000	120	70.000.000	120	70.000.000	120	80.000.000	600	360.000.000	
	7	Jumlah persentase monitoring dan evaluasi kegiatan		100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah bantuan alat mesin pertanian diberikan kepada petani.		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		10 paket		Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah bantuan alat pertanian konvensional yang diberikan kepada petani.		1000 buah	390.000.000	1000 buah	400.000.000	1000 buah	405.000.000	1000 buah	410.000.000	1000 buah	415.000.000	5000 buah	2.020.000.000	
	3	Jumlah bantuan sarana olah hasil pertanian.		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
	4	Jumlah penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.		1 kali	75.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	60.000.000	5 kali	390.000.000	
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1				5.451.860.000		5.275.400.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		25.727.260.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1				335.000.000		166.250.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		1.026.250.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1				1.470.000.000		1.084.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.554.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Pencapaian dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman	1				1.975.000.000		1.725.650.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		6.700.650.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan
PETERNAKAN																
Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan	1	Jumlah pelaksanaan kontes ternak (kali/tahun)	0	0	0	1	200.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah pembangunan sarana prasarana perbibitan ternak	0	1	2.000.000.000	0		0		0	0	0	0	1	2.000.000.000	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1	Cakupan pendistribusian bibit ternak yang diberikan kepada masyarakat	0	4 paket	225.000.000	4 paket	300.000.000	4 paket	330.000.000	4 paket	360.000.000	4 paket	390.000.000	20	1.605.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah penyuluhan peningkatan produksi hasil ternak.	0	1		1		1		1		1		5		
	3	Jumlah peternak yang mengikuti penyuluhan peningkatan produksi hasil ternak.	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	300	250.000.000	
	4	Jumlah unit sarana dan prasarana pasar produksi peternakan.	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	2	2.000.000.000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	Capaian peningkatan penerapan teknologi peternakan	0	0	0	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	12	260.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				250.000.000		255.000.000		260.000.000		265.000.000		270.000.000		1.300.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan	
	1	Prevalensi angka kematian dan angka kelahiran per tahun.	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		2,5		
	2	Jumlah penyidikan, pengamatan peramalan wabah Epidemiologi penyakit hewan (Jumlah kunjungan/th)	48	12		12		12		12		12		108		
	3	Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan Hewan (per tahun)	200	200		200		200		200		200		1200		
	4	Jumlah pelatihan SDM keswan dan kesmavet (Jumlah pelatihan/th)	1	2		2		2		2		2		11		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1	Cakupan peningkatan penanganan dan pemasaran hasil produksi peternakan	3 paket	3	1.500.000.000	3	2.000.000.000	3	30.000.000	3,00	35.000.000	3	45.000.000	15	3.610.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
KEHUTANAN																
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1	Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.	0	2	172.984.000	2	202.000.000	2	211.000.000	2	192.000.000	2	170.000.000	10	947.984.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah sarana prasarana pengembangan hasil hutan non kayu.	0 paket	1	100.000.000	1	140.000.000	1	100.000.000	1	82.500.000	1	35.000.000	5	457.500.000	
	3	Jumlah sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan.	0 paket	1		1		1		1		1		5		
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1	Capaian program rehabilitasi hutan dan lahan.			517.262.000		1.075.000.000		885.000.000		970.000.000		1.105.000.000		4.552.262.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Dam penahan.	110 unit	10		10		10		10		10		160		
		Dam pengendali.	1 unit	1		1		1		1		1		5		
		Terasering.	7 unit	3		3		3		3		3		22		
		Sumur resapan.	66 unit	10		10		10		10		10		116		
		Kegiatan penghijauan.	0 paket	1		1		1		1		1		5		
		Bibit tanaman kehutanan untuk penghijauan.	0 unit	3		1		1		2		2		9		
		Pelestarian hutan dan menambah pendapatan masyarakat.	0 paket	2		2		2		2		2		10		
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan	1	Upaya perlindungan konservasi sumber daya hutan.		1	102.500.000	1	255.000.000	1	375.000.000	1	325.000.000	1	380.000.000	5	1.437.500.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1	Upaya pengembangan hutan.	0 paket	0	0	1	30.000.000,0000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	130.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Cakupan kegiatan peningkatan mutu tanaman perkebunan.	0 paket	2	172.984.000	2	202.000.000	2	211.000.000	2	215.000.000	2	217.000.000	10	1.017.984.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
Program Pengembangan Energi Alternatif Ramah Lingkungan	1	Jumlah kajian dan pengembangan energi alternatif ramah lingkungan.	4 dokumen	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	2	70.000.000	1	50.000.000	10	210.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	2	Jumlah sarana dan prasarana energi alternatif.	6 unit instalasi Biogas	6	199.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	199.600.000	
	4	Tercapainya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26%	19 lokasi	0	0	0	0	10	350.000.000	10	350.000.000	20	100.000.000	59	800.000.000	
	5	Tercapainya program nasional untuk hemat listrik dan bbm sebesar 20 % per tahun.	0	0	0	1X sosialisasi	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	155.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	1	Terjaganya kawasan di sepanjang sungai dari aktivitas pertambangan liar	0	1	27.500.000	0	0	1	30.000.000	0	0	1	35.000.000	3	92.500.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1				332.168.000		540.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.372.168.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga

PARIWISATA																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta gantung. (Dedicated)	0%	0	0	50%	2.000.000.000	50%	1.000.000.000	0	0	0	0	100%	3.000.000.000	Dispartabud, Dinas Cikartarung
	2	Persentase penyelesaian pembangunan rest area. (Dedicated)	0%	0	0	0	0	20%	40.000.000.000	40%	10.000.000.000	40%	10.000.000.000	100%	60.000.000.000	
	3	Persentase penyelesaian pembangunan Drive In. (Dedicated)	0%	0	0	10%	5.000.000.000	60%	30.000.000.000	20%	10.000.000.000	10%	5.000.000.000	100%	50.000.000.000	
	4	Persentase penyelesaian pembangunan jalur festival. (Dedicated)	0%	0	0	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	100%	20.000.000.000	Dispartabud, Dinas Perhubungan
	5	Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain bike. (Dedicated)	0%			25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	100%	20.000.000.000	
	6	Persentase fasilitasi penyelesaian pengembangan museum transportasi. (Dedicated)	0%	0	0	100%	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	50.000.000	
	7	Persentase fasilitasi penyelesaian pengembangan Taman Bunga Cinta. (Dedicated)	0%	0	0	100%	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	50.000.000	
	8	Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata. (Dedicated)	12	1	361.400.000	1	440.000.000	1	470.000.000	1	499.000.000	1	527.000.000	17	2.297.400.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata. (Dedicated)	24	24	600.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	24	750.000.000	24	750.000.000	24	3.300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional. (Dedicated)	7	7	55.000.000	7	60.000.000	7	65.000.000	8	70.000.000	8	75.000.000	44	325.000.000	
	3	Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata nasional maupun internasional. (Dedicated)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	4	4.000.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dedicated)	1	Jumlah kunjungan wisata. (Dedicated)	2.547.855	2.700.726		2.862.771		3.034.537		3.216.609		3.409.606		17.772.104		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui berbagai media dan LBA. (Dedicated)	10	13	2.988.320.000	20	4.782.420.000	21	6.137.500.000	22	8.395.088.000	22	8.635.434.800	108	30.938.762.800	
	3	Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. (Dedicated)														
Program Pengembangan Kemitraan (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata. (Dedicated)	24	2		2		2		2		2		34		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan. (Dedicated)	10	15	383.550.000	15	415.000.000	15	540.000.000	20	685.000.000	25	835.000.000	100	2.858.550.000	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.			100.000.000		130.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		680.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1	Capaian pengembangan budidaya perikanan.			1.437.597.700		100.000.000		155.000.000		135.000.000		195.000.000		2.022.597.700	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Jumlah produksi ikan konsumsi (ton).	52,20	63,8		70,18		77,2		84,92		93,41		93,41		
		Jumlah produksi ikan hias (ekor).	7.700	11.220		12.342		13.500		14.900		16.400		16.400		
		Luas lahan budidaya (Ha).	2,5	2,5		2,85		3,13		3,44		3,78		3,78		
		Luas lahan budidaya yang sehat (Ha).	2,5	2,5		2,85		3,13		3,44		3,78		3,78		
		Jumlah produksi benih ikan (ekor).	1.068.000	3.000.000		3.300.000		3.600.000		4.000.000		4.400.000		4.400.000		
		Jumlah UPR (unit).	22	22		22		22		22		22		22		
		Jumlah UPR yang bersertifikat.	0	1		1		1		1		1		1		

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2	Capaian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.			43.634.700		50.000.000		75.000.000		50.000.000		100.000.000		318.634.700	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Kapasitas produksi olahan (kg)	42,43	44,554		46,772		49,111		51,566		54,144		54,144		
		Jumlah daerah distribusi.	Malang Raya	Malang Raya		Jatim		Jatim		Jatim		Luar Jatim		Luar Jatim		
		Jumlah jenis makanan olahan.	3,00	3		4		4		5		5		5		
		Legalitas produk olahan (buah)	-	3		4		4		5		5		5		
		Angka konsumsi ikan (kg/kap/thn)	14,24	14,95		15,69		16,47		17,29		18,15		18,15		
PERDAGANGAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk. (Dedicated)	0%	0	0	100%	150.000.000.000	0	0	0	0	0	100%	150.000.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Dinas Cikartarung	
	2	Persentase penyelesaian pembangunan pasar sentra Junrejo. (Dedicated)	0%	0	0	100%	2.000.000.000	0	0	0	0	0	100%	2.000.000.000		
	3	Persentase penyelesaian pembangunan pasar desa agropolitan. (Dedicated)	0%	100%	984.001.500	0	0	0	0	0	0	0	100%	984.001.500		
	4	Persentase penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL). (Dedicated)	0%	0	0	100%	1.000.000.000	0	0	0	0	0	100%	1.000.000.000		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1	Tingkat pemberdayaan pasar lokal dan informasi pasar.	1 Pasar	0	0	1	1.075.000.000	1	1.100.000.000	1	1.150.000.000	1	1.200.000.000	4	4.525.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	Jumlah pelaku usaha ekspor.	7	1	50.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	16	825.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
	2	Peningkatan volume ekspor.	-	-		-		-		-		-				
	3	Peningkatan nilai ekspor.	-	-		-		-		-		-				
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dan asongan yang mendapat pembinaan.	2	1	196.425.850	1	180.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	195.000.000	1	946.425.850	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	Capaian perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.	0	0	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	215.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
PERINDUSTRIAN																
Program Penataan Struktur Industri (Dedicated)	1	Jumlah KUB industri hulu hilir. (Dedicated)	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah. (Dedicated)	10	2	1.346.750.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	20	1.846.750.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (Dedicated)	1	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi. (Dedicated)	15	6	50.000.000	6	70.000.000	6	75.000.000	6	80.000.000	6	95.000.000	45	370.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Jumlah KUB yang menguasai teknologi industri.	10	2	102.640.000	2	165.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000	20	762.640.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1	Jumlah paket ketersediaan data IKM yang akurat.	1	0	0	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	3	150.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan

URUSAN KESEKRETARIATAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	19.934.289.290	100%	21.621.465.683	100%	23.426.159.683	100%	24.636.573.347	100%	25.349.411.473	100%	114.967.899.476	Semua SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	100%	100%	6.613.327.544	100%	7.370.083.769	100%	6.372.891.151	100%	7.113.472.968	100%	7.019.802.834	100%	34.489.578.266	Semua SKPD
	2	Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0%	0	0	100%	70.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	70.000.000	Bagian Pemerintahan, Kecamatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Capaian peningkatan disiplin aparatur.	100%	100%	494.050.900	100%	852.069.500	100%	577.127.750	100%	799.958.225	100%	891.877.184	100%	3.615.083.559	Semua SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	100%	100%	762.791.150	100%	771.630.000	100%	762.297.500	100%	2.305.471.875	100%	877.495.969	100%	5.479.686.494	Semua SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100%	100%	242.190.000	100%	333.959.000	100%	365.708.000	100%	392.007.000	100%	414.306.000	100%	1.748.170.000	Semua SKPD
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	1	Jumlah PNS yang mendapat penyelenggaraan fasilitas pindah/purna tugas PNS.	100%	100%	33.400.000	100%	34.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	217.400.000	Semua SKPD
					359.374.913.162		635.541.040.959		612.297.426.174		531.480.988.343		510.419.199.845		2.581.897.098.206	



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 9.1.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Batu

No.	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	8,04	8	8,02	8,03	8,04	8,05	8,05
1.2.	Laju inflasi	5,12	5	4,8	4,6	4,4	4	4
1.3.	PDRB per kapita	6,6	7	7,5	8	9	9,5	9,5
1.4.	Indeks Daya Beli	65,90	66,50	66,94	67,35	67,82	68	68
1.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,20	75,50	75,77	76,00	76,10	76,23	76,23
1.6.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,90	95	95,25	95,50	95,75	96	96
1.7.	Angka kriminalitas yang tertangani	155	186	223	267	320	384	384
1.8.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (milyar)	33,2	48	49	50	51	52	52
1.9.	Nilai APBD (milyar)	482	568	618	668	720	768	768
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	98,7	98,9	100	100	100	100	100
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,52	8,63	8,70	8,81	8,92	9,00	9,00
1.3.	Angka Partisipasi Kasar							
1.3.1.	APK SD/MI	107,27	107,77	108,27	108,77	109,27	109,77	109,77
1.3.2.	APK SMP/MTs	116,72	117,22	117,72	118,22	118,72	119,22	119,22
1.3.3.	APK SMA/SMA/MA	77,65	78,15	78,65	79,16	79,65	80,16	80,16
1.4.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan							
1.4.1.	SD/MI	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2	2
1.4.2.	SMP/MTs	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
1.4.3.	SMA/MA/SMK	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2
1.5.	Angka Partisipasi Murni							



1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,95	95,39	95,78	95,91	96,35	96,50	96,50
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,04	81,04	82,1	83,1	83,5	84,0	84,0
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	62,60	62,65	63,1	63,5	63,6	64,0	64,0
2	Kesehatan							
2.1.	Angka kematian bayi	10,35	7,71	6,84	6,25	5,67	5,07	5,07
2.2.	Angka usia harapan hidup	69,80	69,93	70,01	70,32	70,47	70,50	70,50
2.3.	Persentase balita gizi buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pertanahan							
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan							
4	Ketenagakerjaan							
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,68	0,71	0,73	0,81	0,87	0,93	0,93
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	97	50	50	50	50	50	347
1.2.	Jumlah gedung kesenian	1	0	0	0	0	0	1
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	7	8	15	20	25	29	29
2.2.	Jumlah gedung olahraga	1	0	0	1	0	0	2
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Dasar							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	855	956	967	978	989	1000	1000
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	40	50	50	60	60	60	70
1.1.3.	Rasio guru/murid	590	600	650	700	750	800	850
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0,835	0,84	0,845	0,85	0,855	0,860	0,865
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	730	810	850	870	890	900	950
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	30	40	40	40	50	50	60
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	770 1.120	780 1.125	790 1.130	830 1.135	850 1.140	860 1.145	900 1.150
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	1,805 4,239	1,810 4,240	1,815 4,241	1,820 4,242	1,825 4,243	1,830 4,244	1,835 4,245
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	141.220	141.230	141.235	141.240	141.245	141.250	141.255
1.3.	Fasilitas Pendidikan							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	72	72,26	75,87	79,66	83,64	87,82	87,82
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	92	92,8	94,66	96,55	98,48	100	100
1.3.3.	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	84	84,86	87,41	90,03	92,73	95,51	95,51
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	93	95	97	99	100	101	101
1.5.	Angka Putus Sekolah							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0	0	0	0	0
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,50	0,51	0	0	0	0	0
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,45	0,46	0	0	0	0	0
1.6.	Angka Kelulusan							



1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	96	96,95	97	98	99	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	91	92,91	94	96	98	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	90	91,71	93	96	99	100	100
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	109,33	109,43	109,53	109,63	109,73	110	110
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	103,61	103,71	103,81	103,91	104,15	104,25	104,25
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	55	64,04	70	80	90	100	100
2	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	1.21	1.16	1.18	1.21	1.22	1.22	1.22
2.2.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	2.63	2.54	2.51	2.48	2.46	2.44	2.44
2.3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	2.63	2.54	2.51	2.48	2.46	2.44	2.44
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	32.37	40.04	40.04	40.04	40.04	40.04	40.04
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	71.5	77.68	77.68	77.68	77.68	77.68	77.68
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	80%	80%	70%	65%	60%	50%	50%
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
2.14.	Cakupan puskesmas	5	0	0	0	0	0	5
2.15.	Cakupan puskesmas pembantu	6	0	0	0	0	0	6
2.16.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0%	40%	60%	80%	90%	100%	100%
2.17.	Jumlah ODHA yang layak mendapat ARV	0%	60%	80%	90%	100%	100%	100%
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	4,28
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	12,56	12,57	12,58	12,59	12,60	12,61	62,95
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	37	36	36	35	35	34	34
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi							
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1 TPU	0	0	1 TPU	0	0	2 TPU
3.6.	Rasio tempat	1,11m ³	1,52m ³	1,8m ³	1,98m ³	2,15m ³	2,32m ³	2,32m ³



	pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk							
3.7.	Persentase rumah layak huni	94,90	95	95,25	95,50	95,75	96	96
3.8.	Rasio permukiman layak huni							
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,002 081	0,012 08	0,022 08	0,032 08	0,042 08	0,052 08	0,16041
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	0,002 17	0,012 17	0,022 17	0,032 17	0,042 17	0,052 17	0,16085
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	4,28
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	1,35
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar							
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar							
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat							
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota							
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	5,15
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	66%	67,5%	69%	70,5%	72%	73%	73%
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	6,27
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	56,16%	59,76%	63,36%	66,92%	70,52%	74,12%	74,12%
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh							
5.	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	60%	5%	5%	5%	5%	5%	85%
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	0
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%



7.	Perhubungan							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	163.886	164.486	156.262	148.449	141.026	133.975	133.975
7.2.	Rasio ijin trayek	0,101	0,141	0,138	0,136	0,133	0,131	0,131
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	20	25	30	45	50	55	55
7.4.	Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1
7.5.	Angkutan darat	0,198	0,215	0,226	0,238	0,251	0,265	0,265
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	20	25	30	45	50	55	55
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 Menit
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7.9.	Persentase pemasangan rambu-rambu	35,80	8,36	13,94	13,94	13,94	14,02	14,02
8.	Lingkungan Hidup							
8.1.	Persentase penanganan sampah	35%	36%	37%	37%	39%	40%	40%
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata							
8.4.	Pencemaran status mutu air							
8.4.1.	Pengujian Air Sungai	100	100	100	100	100	100	100
8.4.2.	Pengujian Sumber Mata Air	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28
8.4.3.	Pengujian Air Limbah Industri	100	100	100	100	100	100	100
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air							
8.5.1.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor	0	0	0	1 ha	1 ha	1 ha	3 ha
8.5.2.	Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air (pada lahan negara)	0	7,89	7,89	10,5	13	15,8	55,08
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	40	20	20	20	20	20	100
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	12,80%	14,05%	18,05%	21,05%	22,05%	23,05%	23,05%
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100	100
9	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	93%	92%	94%	96%	98%	98%	98%
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	60%	62%	64%	66%	68%	68%	68%
9.3.	Penyelesaian izin lokasi	85%	90%	90%	95%	100%	100%	100%
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,73	0,81	0,78	0,76	0,73	0,71	0,71
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	231,31	219,89	193,44	174,70	160,73	149,91	149,91
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,83	0,84	0,87	0,88	0,90	0,91	0,91
10.4.	Kepemilikan KTP	90%	94%	96%	98%	99%	100%	100%
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	51%	63%	63%	63%	62%	62%	62%
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.8.	Jumlah penduduk	190.184	192.504	194.852	197.229	199.635	202.070	202.070
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	0	50%	50%	50%	50%	50%	50%



	pemerintah							
11.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	0	50%	50%	50%	50%	50%	50%
11.3.	Persentase KDRT	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	0	20%	35%	50%	65%	80%	100%
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,6	1,5%	1,5%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%
12.2.	Rasio akseptor KB	23,20	95%	95%	97%	97%	97%	97%
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	79,73	65%	68%	70%	72%	74%	74%
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	40,10	52%	56%	60%	70%	80%	80%
13.	Sosial							
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	12 panti	16%	16%	16%	16%	16%	80%
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	0,19	16%	16%	16%	16%	16%	80%
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,28	16%	16%	16%	16%	16%	80%
14.	Ketenagakerjaan							
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	1,08	10%	10%	10%	10%	10%	50%
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,01	10%	10%	10%	10%	10%	50%
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1,08	10%	10%	10%	10%	10%	50%
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	0,48	10%	10%	10%	10%	10%	50%
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	4,57	4,45	4,32	4,27	4,13	4	4
14.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,67	10%	10%	10%	10%	10%	50%
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1.	Persentase koperasi aktif	70,11%	71,84%	73,56%	75,29%	77,01%	78,74%	78,74%
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.569	14.574	14.590	15.000	15.011	15.015	15.015
15.3.	Jumlah BPR/LKM	10	10	12	12	12	13	13
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	98,15%	98,33%	98,49%	99,35%	98,84%	99,01%	99,01%
16.	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	85	5	5	5	5	5	110
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,8 T	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M	3,3 T
16.3.	Pertumbuhan Investasi Daerah	15%	14,29%	12,50%	11,11%	10%	10%	10%
16.4.	Rasio daya serap tenaga kerja	5,20	5,78	6,18	6,25	6,49	7,0	7,0
16.5.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	292,8	297,1	299	304	307	310	310
17.	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	5	5	5	5	5	33
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	0	1	1	1	1	8



17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15%	10%	15%	10%	10%	10%	70%
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	15	15	15	15	15	15	15
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	92	97	102	107	110	115	115
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	1	1	1	1	1	6
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	1	1	1	2	2	2	9
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	2	2	3	3	3	3
18.6.	Lapangan olahraga	45	45	45	45	45	45	45
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0	1	2	1	1	1	6
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1	1	6
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3	3	7	8	8	8	8
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	81	81	82	82	83	84	84
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	8 : 1	8 : 1	8 : 1	9 : 1	10 : 1	11 : 1	11 : 1
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	8,04	8	8,02	8,03	8,04	8,04	8,04
20.5.	Kemiskinan	5,10	5	4,75	4,50	4,25	4	4
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	1	-	1	-	-	-	2
20.7.	Penegakan PERDA	600	1800	1850	1900	1950	2000	2000
20.8.	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	0	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	540	270	280	260	218	200	1768
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	1700	1705	1720	1720	1740	1740	1740
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota.	0	0,0000 24%	0,0000 28%	0,0000 37%	0,00004 1%	0,0000 45%	0,00004 5%
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		55,56	0	66,7	77,8	88,9	100	100
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	5	10	15	20	25	30	30
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat							
21.	Ketahanan Pangan							
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	4	1	1	0	0	7
21.2.	Ketersediaan pangan utama	0,096 ton/kap/ th	0,095	0,095	0,095	0,094	0,094	0,094 ton/kap/t h
		95,700 kg/kap/th	94,806	94,702	94,588	94,468	94,342	94,342 kg/kap/th
		0,261 kg/kap/	0,260	0,259	0,259	0,258	0,258	0,258 kg/kap/



		hari						hari
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	48	48	51	54	56	58	58
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	28	28	28	28	28	28	28
22.3.	Jumlah LSM	16	1	1	1	1	1	21
22.4.	LPM Berprestasi		5	7	10	11	13	
22.5.	PKK aktif	967	979	982	988	991	995	1000
22.6.	Posyandu aktif	189	189	189	189	189	189	189
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		35	37	42	45	50	
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
23.	Statistik							
23.1.	Buku "kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	45%	45%	55%	70%	85%	100%	100%
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	3	2	3	3	13 keg.
25.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	120 sst	130 sst	140 sst	150 sst	160 sst	170 sst	170 sst
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	23	23	23	23	23	23	23
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	8	9	10	11	12	13	13
		5	5	5	5	5	5	5
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		1	1	1	1	1	1	1
25.6.	Pameran/expo	3	3	5	5	5	5	26
		3	1	1	1	1	1	8
		5	5	5	5	5	5	30
26.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan	37	37	37	37	37	38	38
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8.323	8.410	8.456	8.503	8.572	8.593	8.593
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	8.869	9.828	10.746	11.630	12.489	13.369	66.931
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas pertanian organik per hektar	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6
1.2.	Luasan lahan pertanian organik (Ha)	4	6	8	10	12	14	14
1.3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6,40	6,48	6,54	6,60	6,65	6,70	6,70
1.4.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17,87	18	18,5	19	19,5	20	20
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB	86,44	86,75	87	87,3	87,6	88	88
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,45	0,47	0,49	0,5	0,55	0,6	0,6
1.7.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	62,29	64	64,5	65	65,5	70	70
1.8.	Cakupan bina kelompok	34,76	35	35,5	40	40,5	50	50



	petani							
1.9.	Kontribusi Pertanian terhadap Total PDRB	19,79%	19,44%	19,09%	18,74%	18,39%	18,04%	18,04%
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	12,16	20	25	35	50	60	60
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
4.	Pariwisata							
4.1.	Kunjungan wisata	2.547.855	2.700.726	2.862.770	3.034.536	3.216.608	3.409.605	17.772.100
4.2.	Kunjungan wisatawan manca negara	16.133	16.751	17.150	17.562	17.923	18.245	18.245
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	47,16%	47,56%	47,93%	48,02%	48,47%	48,63%	48,63%
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Produksi perikanan	54,94	63,8	70,18	77,2	84,92	93,41	93,41
5.2.	Konsumsi ikan	94,95	95	95,2	95,45	95,8	96	96
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	49,01%	50,10%	52,09%	54,49%	57,28%	60,42%	60,42%
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	44,40%	55,56%	66,67%	77,78%	88,89%	100%	100%
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	10,89%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	35,00%
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	10,89%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	35,00%
7.3.	Pertumbuhan Industri	3,06%	5,00%	20,00%	7,50%	10,00%	15,00%	15,00%
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	33,33%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100%	100%
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	580.650	585.413	596.375	610.450	623.275	649.310	649.310
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	315.205	331.110	350.503	361.675	380.450	397.510	397.510
1.3.	Produktivitas total daerah							
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,041	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
1.2.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	164.486	164.486	156.262	148.449	141.026	133.975	133.975
1.3.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	5.170.000	5.363.000	5.401.000	5.430.000	5.495.000	6.013.000	6.013.000
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	85%	90%	90%	95%	100%	100%	100%
2.2.	Luas wilayah produktif	47,38%	47,38%	47,38%	47,38%	47,38%	47,38%	47,38%
2.3.	Luas wilayah industri	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
2.4.	Luas wilayah banjir	1,18%	1,18%	0,94%	0,70%	0,45%	0,22%	0,22%
2.5.	Luas wilayah kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Luas wilayah perkotaan	52,30%	52,80%	53,30%	53,80%	54,30%	54,80%	54,80%
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							



3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	24	24	24	24	27	27	27
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	2	2	2	3	3	4	4
3.3.	Jumlah restoran	19	19	20	21	22	23	23
3.4.	Jumlah rumah makan	55	55	55	56	56	57	57
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	444	1	1	1	1	1	449
4.	Lingkungan Hidup							
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	66%	67,5%	69%	70,5%	72%	73%	73%
5.	Komunikas dan Informatika							
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik	76 MVA	77	78	79	80	81	81
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik							
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	30%	40%	50%	50%	60%	60%	60%
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas	361	346	331	316	301	286	271
1.2.	Jumlah demo	21	19	18	18	17	16	16
1.3.	Lama proses perijinan	12 hari	12	12	12	12	12	12 hari
1.4.	Jumlah dan macam pajak daerah	8	9	9	9	9	10	10
1.5.	Jumlah dan macam retribusi daerah	19	19	19	20	20	20	20
1.6.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	13	3	3	3	3	3	28
1.7.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	90%	91%	92%	94%	96%	98%	98%
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	522,35	523,12	524,24	525,10	525,85	526,01	526,01
1.2.	Rasio ketergantungan	49,04	50,12	51,05	52,11	53,08	54,14	54,14

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

1. RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 ini menjadi akan pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode 2017-2022. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2012-2017 berakhir.
2. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2012-2017 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan periode 2017-2022.
3. RKPD masa transisi merupakan “tahun pertama dan bagian tak terpisahkan” dari RPJMD 2017-2022 dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pemilukada periode 2017-2022.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Renstra SKPD 2012-2017 dan RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu (termasuk dunia usaha) berkewajiban melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu 2012-2017 dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu berkewajiban menyusun rencana strategis (renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan



fungsi SKPD, dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja (renja) SKPD setiap tahun.

3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD 2012-2017 terhadap RPJMD 2012-2017.
4. Bappeda Kota Batu berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD 2012-2017 kedalam Renstra 2012-2017 dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu.